



**WALI KOTA SABANG**  
**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS**  
**PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**KOTA SABANG TAHUN 2022-2025**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SABANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor ...

11

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  7. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10. Permukiman ...

10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
15. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta Prasarana, Sarana dan utilitas umum.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkatnya;
18. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
20. Pihak Swasta, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media adalah pihak non pemerintah yaitu para pelaku pembangunan yang berkelanjutan yang berasal dari luar sektor Pemerintah Kota.



21. *New Urban Agenda* selanjutnya disingkat NUA adalah kesepakatan yang disusun untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RP2KPKPK dimaksudkan sebagai dokumen rencana terpadu penanganan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) Permukiman Kumuh.
- (2) RP2KPKPK bertujuan:
  - a. sebagai instrumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan maupun partisipasi publik;
  - b. sebagai dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan jangka menengah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh;
  - c. sebagai dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang) dan rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi); dan
  - d. sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan Kota.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota;
- c. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota;
- d. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota;
- e. rencana penyediaan lahan;
- f. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. rumusan peran pemangku kepentingan.



BAB II  
SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH KOTA SABANG

Pasal 5

- (1) Permasalahan berdasarkan kondisi aktual Kota terkait Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat pada tujuh aspek, yaitu:
  - a. Permukiman;
  - b. jalan dan jembatan;
  - c. air minum;
  - d. drainase;
  - e. air limbah;
  - f. persampahan; dan
  - g. kebakaran.
- (2) Aspek Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  - b. Kawasan Permukiman yang belum tertata dengan baik; dan
  - c. status lahan Permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat.
- (3) Aspek jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. persentase jalan Kota dalam kondisi baik belum optimal;
  - b. masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar; dan
  - c. konektivitas jaringan jalan belum optimal.
- (4) Aspek air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi;
  - b. kurangnya ketersediaan Prasarana Sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik;
  - c. *water treatment plan* yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (dua puluh empat jam); dan
  - d. kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.

(5) Aspek ...

- (5) Aspek drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;
  - b. persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;
  - c. jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung;
  - d. kawasan Permukiman yang tergenang; dan
  - e. belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan Permukiman.
- (6) Aspek air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah;
  - b. tingginya penggunaan Sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis;
  - c. rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik; dan
  - d. belum optimalnya dan ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota, komunal, serta kawasan.
- (7) Aspek persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki permasalahan meliputi:
  - a. belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah Kota secara regional;
  - b. rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
  - c. kurangnya Sarana dan Prasarana persampahan;
  - d. rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.
- (8) Aspek kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki permasalahan yaitu belum tersedianya Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.

#### BAB IV

#### RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA

##### Bagian Kesatu

##### Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

##### Pasal 6

- (1) Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota dilakukan dengan tindakan:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.



- (2) Tindakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan;
  - b. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan;
  - c. pengawasan dan pengendalian terhadap kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; dan
  - d. pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi keberfungsian bangunan beserta Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan tidak mengurangi keberfungsian.
- (3) Tindakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pendampingan; dan
  - b. pelayanan informasi.
- (4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. rencana penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar teknis.

#### Bagian Kedua

### Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

#### Pasal 7

- (1) Rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota terdiri dari:
  - a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; dan
  - b. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:

a. pemugaran ...



- a. pemugaran;
- b. peremajaan; dan
- c. permukiman kembali.

BAB V  
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH KOTA

Bagian Kesatu  
Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan  
Permukiman Kumuh Kota

Pasal 8

- (1) Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.
- (2) Program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas  
Krueng Raya

Pasal 9

- (1) Kawasan Krueng Raya menjadi kawasan prioritas pertama berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota dengan luas 27,011 Ha (dua puluh tujuh koma nol satu satu).
- (2) Program Peningkatan Kualitas kawasan prioritas dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

Bagian Ketiga  
Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan  
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

Pasal 10

Rencana aksi program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
RENCANA PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 11

Rencana penyediaan lahan memuat rumusan penyediaan lahan terhadap penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan Permukiman kembali.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan

lahan ...

lahan untuk permukiman kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (2) Penyediaan lahan bagi pembangunan permukiman kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

#### Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota direncanakan berasal dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kota; dan
  - d. non pemerintahan atau pembiayaan lainnya

### Bagian Kedua Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

#### Pasal 14

Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang dijabarkan selama lima tahun kedepan.

## BAB VIII RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

#### Pasal 15

- (1) Pemangku kepentingan dalam upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota terdiri dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kota;
  - d. pihak swasta;
  - e. pihak akademisi;
  - f. pihak Organisasi Masyarakat; dan
  - g. pihak media.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai peran antara lain:
  - a. menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan *Sustainable Development Goals*;
  - b. mengkoordinasikan pemerintah daerah;
  - c. untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah; dan
  - d. mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai peran antara lain:
  - a. memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/Kota; dan
  - b. bersama dengan Pemerintah Pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.
- (4) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai peran antara lain:
  - a. menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD; dan
  - c. mendorong kerja sama dengan badan usaha.
- (5) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai peran antara lain:
  - a. menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV); dan
  - b. mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.
- (6) Pihak Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai peran berupa menyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
- (7) Pihak Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai peran antara lain:
  - a. terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan Kota; dan
  - b. mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
- (8) Pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai peran berupa publikasi isu-isu pembangunan Kota secara objektif.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 16 Januari 2023  
Pj. WALI KOTA SABANG,  
  
REZA FAHLEVI



Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 16 Januari 2023  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 3





# **PERATURAN WALI KOTA SABANG**

## **TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025**



# **2022-2025**

## **BAPPEDA KOTA SABANG**



## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan produk akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan RP2KPKPK. Hal-hal yang diuraikan dalam dokumen ini antara lain latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran dari pekerjaan, kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permasalahan permukiman perkotaan, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta rumusan peran pemangku kepentingan dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dokumen RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan Kota Sabang yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non- fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat menjadi acuan dalam penanganan kawasan kumuh Kota Sabang. Atas kerjasama dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR.....   | i  |
| DAFTAR ISI .....  | ii |
| DAFTAR TABEL .....  | iv |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vi |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran .....  | 4  |
| 1.3 Ruang Lingkup .....   | 5  |
| 1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka<br>Pembangunan Kabupaten/Kota.....  | 12 |
| 1.5 Sistematika Penyajian .....   | 13 |
| BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN<br>PERKOTAAN .....   | 16 |
| 2.1 Gambaran Umum Kota Sabang .....   | 16 |
| 2.2 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman .....  | 24 |
| 2.3 Kehijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman .....  | 27 |
| 2.4 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman<br>Kumuh .....  | 40 |
| BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH<br>KOTA SABANG.....   | 55 |
| 3.1 Seharan Permukiman Kumuh, Peta Delimiasi Kawasan Kawasan<br>Kumuh, Lokasi Permukiman Kumuh dan Luasan Verifikasi .. | 56 |
| 3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh dan Gambaran<br>Kelembagaan Lokal .....   | 59 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH<br>.....   | 121 |
| 4.1 Isu Dan Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman<br>Kumuh.....   | 121 |
| 4.2 Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan<br>Skala Prioritas Penanganan .....  | 125 |
| 4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan<br>Permasalahan Permukiman Kumuh .....   | 147 |
| BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS<br>PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....   | 152 |
| 5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas<br>Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan<br>Pencapaian Kota Behas Kumuh Dalam Skala Kota .....   | 152 |
| 5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas<br>Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .....   | 163 |
| BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN<br>BERKEMBANGNYA 6.1A PERUMAHAN KUMUH DAN<br>PERMUKIMAN KUMUH .....   | 181 |
| 6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan<br>Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh<br>.....  | 181 |
| 6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan<br>Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh<br>Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, Dan Skala<br>Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/Cap) ..... | 186 |
| 6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan<br>Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh<br>.....  | 187 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| BAB VII  | RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH   |     |
| 7.1      | Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh .....                                 | 191 |
| 7.2      | Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng Raya .....   | 197 |
| 7.3      | Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Sabang .....  | 201 |
| 7.4      | Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas - Krueng Raya ..... | 215 |
| 7.5      | Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas .....   | 219 |
| <br>     |  |     |
| BAB VIII | RENCANA PENYEDIAAN TANAH .....   | 226 |
| 8.1      | Pola Penyediaan Tanah .....  | 226 |
| 8.2      | Pengadaan Tanah Dan Permukiman Kembali .....   | 230 |
| <br>     |  |     |
| BAB IX   | RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN .....   | 234 |
| 9.1      | Sumber Pembiayaan .....  | 234 |
| 9.2      | Rencana Investasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....  | 236 |
| <br>     |  |     |
| BAB X    | RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN .....   | 255 |
| 10.1     | Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh .....               | 255 |

## DAFTAR TABEL

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| Tabel 1.1  | Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK ..... 6  | Tabel 2.11 | Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .....46                        |
| Tabel 1.2  | Seharan Permukiman Kumuh Kota Sabang ..... 10  | Tabel 2.12 | Kriteria perumahan dan permukiman kumuh .....47                              |
| Tabel 2.1  | Kondisi Iklim Kota Sabang 2019 ..... 19  | Tabel 3.1  | Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang Berdasarkan SK No. 650/351/2020 .....56 |
| Tabel 2.2  | Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang ..... 20   | Tabel 3.2  | Hasil Verifikasi Luasan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Sabang .....59   |
| Tabel 2.3  | Jumlah Desa/Gampong yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Sabang, 2011–2018 ..... 21 | Tabel 3.3  | Profil Kumuh Gampong Krueng Raya .....61                                     |
| Tabel 2.4  | Lokasi Objek Wisata di Kota Sabang, 2019 ..... 21  | Tabel 3.4  | Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Krueng Raya .....77                      |
| Tabel 2.5  | Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang ..... 26                              | Tabel 3.5  | Profil Kumuh Gampong Paya .....73  |
| Tabel 2.6  | Overview Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Sabang ..... 28                                      | Tabel 3.6  | Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Paya .....84                             |
| Tabel 2.7  | Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ..... 40    | Tabel 3.7  | Profil Kumuh Gampong Keuneukai .....85                                       |
| Tabel 2.8  | Peran, Tugas dan Fungsi Stakeholder dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..... 42  | Tabel 3.8  | Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Keuneukai .96                            |
| Tabel 2.9  | Pemhagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh ..... 43                             | Tabel 3.9  | Profil Kumuh Gampong Jaboi .....97   |
| Tabel 2.10 | Indikator dan Kriteria Permukiman Kumuh ..... 45   | Tabel 3.10 | Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jabo ..... 108                           |
|            |  | Tabel 3.11 | Profil Kumuh Gampong Beurawang ..... 109                                     |
|            |  | Tabel 3.12 | Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jaboi ..... 120                          |
|            |  | Tabel 4.1  | Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang ..... 123                               |



|           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| Tabel 4.2 | Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....124  | Tabel 7.3  | Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prioritas – Kawasan Krueng Raya ..... 198                                |
| Tabel 4.3 | Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas 126  | Tabel 7.4  | Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....201  |
| Tabel 4.4 | Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan .....135   | Tabel 7.5  | Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas – Krueng Raya ..... 215                           |
| Tabel 4.5 | Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh .....146                               | Tabel 8.1  | Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali .....231  |
| Tabel 4.6 | Rumusan Kebutuhan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....148  | Tabel 9.1  | Sumber Biaya, Bentuk dan Skema Pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Sabang .....234 |
| Tabel 5.1 | Tabel Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota .....154  | Tabel 9.2  | Karakteristik Pembiayaan .....234  |
| Tabel 5.2 | Tabel Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan .....164   | Tabel 9.3  | Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025 .....237                      |
| Tabel 6.1 | Program Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru .....184   | Tabel 10.1 | Peran Para Pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh .....256                     |
| Tabel 6.2 | Program dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru .....184  | Tabel 10.2 | Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh .....258   |
| Tabel 6.3 | Rencana Aksi Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang .....188 | Tabel 10.3 | Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Sabang dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK .....259  |
| Tabel 7.1 | Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....191                                      |            |  |
| Tabel 7.2 | Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya .....197   |            |  |

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |     |            |  |     |
|------------|--|-----|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Proses Penyusunan RP2KPKPK .....   | 9   | Gambar 5.2 | Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Krueng Raya .....   | 179 |
| Gambar 1.2 | Deliniasi Kawasan Kumuh Kota Sahang. (dari kiri ke kanan) Kawasan Paya Keuneukai, Kawasan Krueng Raya, Kawasan Jaboi dan Kawasan Beurawang ..... | 11  | Gambar 5.3 | Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Paya Keunekai ..... | 179 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kota Sabang .....  | 18  | Gambar 5.4 | Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Jaboi .....         | 180 |
| Gambar 2.2 | Pantai Pasir Putih - Paya .....  | 23  | Gambar 5.5 | Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Beurawang .....     | 180 |
| Gambar 2.3 | Gunung Berapi Jaboi .....  | 23  | Gambar 7.1 | Ilustrasi Diagram Program Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sabang .....  | 196 |
| Gambar 2.4 | Tugu Kilometer 0 - Iboih .....   | 23  | Gambar 7.2 | Kegiatan pengembangan penanganan kumuh Kawasan Krueng Raya .....   | 220 |
| Gambar 2.5 | Pulau Klah – Krueng Raya .....   | 23  | Gambar 7.3 | Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya .....  | 220 |
| Gambar 3.1 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Keuncukai .....   | 55  | Gambar 7.4 | Kegiatan Naturalisasi Krueng Raya .....  | 221 |
| Gambar 3.2 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Paya .....  | 57  | Gambar 7.5 | Kegiatan <i>Manggrove Trail/Park</i> . Krueng Raya .....   | 221 |
| Gambar 3.3 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Beurawang .....   | 57  | Gambar 7.5 | Kegiatan <i>Manggrove Trail/Park</i> . Krueng Raya .....   | 221 |
| Gambar 3.4 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Jaboi .....   | 58  | Gambar 7.6 | Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan .....  | 222 |
| Gambar 3.5 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Krueng Raya .....   | 58  | Gambar 7.7 | Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan .....  | 222 |
| Gambar 3.1 | Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Keuneuka .....  | 55  | Gambar 7.8 | Ilustrasi Kegiatan Rchab Jemlatan .....  | 222 |
| Gambar 5.1 | Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota - Kota Sabang .....                            | 153 | Gambar 7.9 | Konsep Kegiatan IPAL Komunal Terintegrasi RTP ...  | 223 |

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 7.10 Kegiatan TPS 3R dan Sistem Pengelolaan Persampahan .....   | 223 |
| Gambar 7.11 Potensi sumber air bersih. Alur Waduk Paya Senara (kiri) dan Mata air (kanan) .....                  | 224 |
| Gambar 7.12 Skema Konsep Penyediaan Air Bersih .....   | 224 |
| Gambar 7.13 Ilustrasi Penyediaan Galeri dan Food Stall Untuk Mendukung Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif ..... | 224 |
| Gambar 7.14 Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas ....  | 225 |
| Gambar 7.15 Ilustrasi 3D Ruang Terbuka Komunitas .....   | 225 |
| Gambar 10.1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat .....                         | 255 |
| Gambar 10.2 Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman .....   | 258 |



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA  
SABANG TAHUN 2022-2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu kawasan perkotaan atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi, telah turut berdampak terhadap perubahan karakteristik kawasan perkotaan. Salah satu dampak yang bisa terlihat adalah lahirnya kawasan-kawasan permukiman kumuh yang terjadi akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan huniannya yang layak.

Dampak dari lahirnya kawasan permukiman kumuh ini juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memherikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan

penghidupan warganya. Padahal jika merujuk pada UU No 1 Tahun 2011 dalam pasal 94 ayat (3) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tersebut bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang. Sehingga dengan demikian, dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar tercapai 0 ha luasan kumuh di Kota Sabang, maka juga diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dari berbagai pihak penyelenggara pemerintahan, yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan kawasan kumuh juga merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Dalam ...

11

Dalam mewujudkan fungsi permukiman yang memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh harus segera dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni yang berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selain tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011, Perencanaan penanganan kawasan kumuh juga diatur dalam PP No 14 Tahun 2016, Permen PUPR No 14/PRT/M/2018 serta dalam SE DJCK 30/SE/DC/2020. Program ini dikenal dengan nama RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). RP2KPKPK ini merupakan program perencanaan penanganan permukiman kumuh yang dicanangkan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program RKPKP (Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) pada tahun 2015 dan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) pada tahun 2016-2019.

Selanjutnya, penyusunan RP2KPKPK ini juga merujuk pada memorandum Program RP2KPKP yang merupakan review

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), yang juga merupakan rencana 5 (lima) tahun pengurangan kawasan kumuh yang terintegrasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang dengan menguraikan sebuah perencanaan tingkat kota dan kawasan serta skenario untuk pengurangan kawasan kumuh kota, juga mengidentifikasi kebutuhan investasi maupun sumber-sumber pembiayaannya.

Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan kawasan kumuh diawali dengan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang selanjutnya diikuti dengan penetapan lokasi kawasan kumuh tersebut. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Bab VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas, penanganan permukiman kumuh di Kota Sabang juga dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya;

1. *Sustainable Development Goal's/SDGs* pada tujuan 11 *sustainable cities and communities* beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/common vision kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
2. *New Urban Agenda/NUA* yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh (RP2KPKPK) ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan harapan:

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati/walikota;
2. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor;
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat/ *Community Based Organizations* (KSM/CBO's) dan kelompok badan usaha/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
4. Terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agendapembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New



Urban Agenda) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

## 1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran

### 1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Kota Sabang secara mandiri dan berkelanjutan.

### 1.2.2 Tujuan

Dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Sabang ini disusun dengan tujuan:

- a. Memantapkan pemahaman Pemerintah Kota Sabang tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh dalam mencapai

target zero kumuh (100-0-100) padatahun – tahun ke depan.

- b. Agar Pemerintah Kota Sabang dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dan berpartisipasi dalam Penyusunan Memorandum Program RP2KPKPK yang difokuskan pada penanganan dan pengurangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
- c. Agar Pemerintah Kota Sabang memiliki komitmen tinggi serta konsisten di dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.
- d. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman dalam suatu profil kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Sabang.
- e. Menyusun rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat.
- f. Menyusun dokumen perancangan berupa rencana aksi penanganan kawasan kumuh dan DED kegiatan tahun pertama dan peta perencanaan
- g. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan

penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama.

- h. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor keciptakarya.

### 1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Sabang adalah:

- a. Tersedianya suatu konsep dan strategi yang dapat menjadi landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (stakeholders) pemerintahan Kota Sabang.
- b. Tersedianya suatu dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*).

- c. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2022-2025).
- d. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*Action Plan Community*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/ BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (*Action Plan Document*), Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2022) sebagai bagian dari RP2KPKPK secara keseluruhan.

### 1.3 Ruang Lingkup

#### 1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh) yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kota Sabang ini dibagi menjadi 7 tahap, yaitu:

Tabel 1.1 Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK

| LINGKUP KEGIATAN   | CAPAIAN  |
|--|--|
| <b>A. PERSIAPAN</b>  |  |
| 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK  | a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK<br>b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan  |
| 2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja  | a. Rencana Kerja<br>b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan  |
| 3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistic terkait | Data awal profil permukiman kumuh  |
| 4. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK  | a. SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/ Kota dan Peta Dasar<br>b. Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten<br>c. Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan<br>d. Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas |

| LINGKUP KEGIATAN   | CAPAIAN   |
|--|---|
| 5. <i>Overview</i> kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/ kota dan status tanah permukiman | a. Hasil <i>overview</i> dokumen perencanaan dan kebijakan daerah<br>b. Hasil <i>overview</i> dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman<br>c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/ kota (guna lahan permukiman) |
| 6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi   | Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi   |
| 7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat ditingkat kabupaten/ kota   | Terbentuknya/ tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/ LKSM) yang terdaftar/ legal secara hukum   |
| <b>B. SURVEI</b>   |   |
| 1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder                   | Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)   |
| 2. Menyusun desain survei  | Desain survei   |
| 3. Melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/ kota   | a. Hasil survey berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/ kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh<br>b. Hasil kompilasi data dari hasil survey dan data baseline sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018                       |



| LINGKUP KEGIATAN  | CAPAIAN   |
|---|---|
| <b>C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA</b>   |   |
| Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh   | a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur)<br>b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh<br>c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi |
| <b>D. ANALISIS</b>  |   |
| 1. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh | Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh)   |
| 2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh                       | a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan<br>b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh   |

| LINGKUP KEGIATAN  | CAPAIAN  |
|---|--|
| <b>E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  |  |
| 1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)                                 | Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)  |
| 2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) | a. Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)<br>b. Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/ kota |
| 3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)   | a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)<br>b. Agenda/ rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan                                       |
| 4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh  | Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh   |
| 5. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/                 | Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi dan indikasi added value dalam penanganan permukiman kumuh)  |

| LINGKUP KEGIATAN  | CAPAIAN   |
|---|---|
| kota yang berkelanjutan dengan adanya added value dalam penanganan kumuh  |   |
| <b>F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH</b>   |   |
| 1. Merumuskan scenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian  | a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan<br>b. Desain kawasan dan scenario penanganan permukiman kumuh  |
| 2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan | a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan.<br>b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh<br>c. Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh |
| 3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pemukiman yang berkelanjutan dan pertimbangan lain             | Skala prioritas penanganan permukiman kumuh   |
| 4. Merumuskan konsep tematik & scenario pencegahan dan  | Konsep tematik dan scenario pencegahan dan peningkatan kualitas   |

| LINGKUP KEGIATAN   | CAPAIAN  |
|--|--|
| peningkatan kualitas kawasan prioritas   | kawasan prioritas  |
| 5. Menyusun rencana penyediaan tanah   | Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali  |
| 6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasan prioritas   | Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas   |
| 7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas                        | a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas<br>b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/ kota   |
| 8. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan | Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan kegiatan)  |
| 9. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas  | a. Peta rinci/ siteplan<br>b. Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D)<br>c. Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan<br>d. Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur<br>e. DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman |



| LINGKUP KEGIATAN   | CAPAIAN  |
|--|--|
| G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH |  |
| 1. Penyusunan <i>legal drafting</i> rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK         | Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK) |
| 2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK                               | Peraturan Wali Kota/ Peraturan Bupati RP2KPKPK                                 |

Secara lebih ringkas, lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK Kota Sabang tahun 2020 dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Lihat Gambar 1.1



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RP2KPKPK

### 1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi kegiatan, kajian, penyusunan dokumen serta pembahasan laporan RP2KPKPK Kota Sabang ini dilaksanakan dalam lingkup wilayah administrasi Kota Sabang, yang meliputi seluruh kawasan permukiman kumuh yang disebutkan dalam SK Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut :



Table 1.2. Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang

| NO | KECAMATAN | KAWASAN                           | GAMPONG   | JURONG                 | LUAS<br>DELINIASI<br>KUMUH<br>(HA) | TOTAL<br>DELINIASI<br>KAWASAN<br>(HA) |
|----|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sukajaya  | Kawasan<br>Paya<br>-<br>Keuneukai | Keuneukai | Lhok                   | 16,002                             | 57,495                                |
|    |           |                                   |           | Pasi                   | 10,809                             |                                       |
|    |           |                                   |           | Kulam                  | 2,520                              |                                       |
|    |           |                                   |           | Blang<br>Mukim         | 5,492                              |                                       |
|    |           |                                   | Paya      | Pante<br>Jaya          | 4,457                              |                                       |
|    |           |                                   |           | Tgk. Chok<br>Alue Kala | 15,088                             |                                       |
|    |           |                                   |           | Cot Preh               | 1,894                              |                                       |
|    |           |                                   |           | Ditremon               | 1,233                              |                                       |
| 2  | Sukajaya  | Kawasan<br>Beurawang              | Beurawang | Teupin<br>Bada         | 8,348                              | 15,279                                |
|    |           |                                   |           | Meurelo                | 6,931                              |                                       |
| 3  | Sukajaya  | Kawasan<br>Jaboi                  | Jaboi     | Meunasah<br>Tuha       | 9,322                              | 23,928                                |
|    |           |                                   |           | Tgk. Di<br>Jaboi       | 5,133                              |                                       |
|    |           |                                   |           | Lamkuta                | 3,89                               |                                       |
|    |           |                                   |           | Gampong<br>Baroe       | 5,583                              |                                       |

| NO | KECAMATAN | KAWASAN                   | GAMPONG        | JURONG                      | LUAS<br>DELINIASI<br>KUMUH<br>(HA) | TOTAL<br>DELINIASI<br>KAWASAN<br>(HA) |
|----|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 4  | Sukakarya | Kawasan<br>Krueng<br>Raya | Krueng<br>Raya | Batu<br>Singa<br>Berfakta   | 9,24                               | 27,011                                |
|    |           |                           |                | Lhok<br>Drien               | 3,039                              |                                       |
|    |           |                           |                | Mustika<br>Kolam<br>Bermata | 7,161                              |                                       |
|    |           |                           |                | Teupin<br>Cirik             | 7,571                              |                                       |
|    |           |                           |                | TOTAL                       |                                    |                                       |

#### 1.4 Kedudukan ...

11



#### 1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota

Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- b. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
- d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;
- e. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0%

permukiman kumuh dan agenda tindak lanjut pembangunan permukiman berupa:

- 1) Sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota);
- 2) Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
- 3) Kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
- 4) Kebijakan pemerintah kabupaten/kota
- 5) dan sebagainya

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

- a. Kondisi fisik bangunan hunian;
- b. Aksesibilitas lingkungan;
- c. Kondisi drainase lingkungan;
- d. Kondisi pelayanan air minum/baku;
- e. Kondisi pengelolaan air limbah;
- f. Kondisi pengelolaan persampahan; dan
- g. Kondisi proteksi kebakaran;



Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

### 1.5 Sistematika Penyajian

Untuk memudahkan dan memahami proses dan substansi penyusunan RP2KPKPK Kota Sabang ini, maka RP2KPKPK ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan Latar Belakang penyusunan dokumen, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup yang terdiri dari Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Wilayah,

Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota serta uraian Sistematika penyajian laporan.

## BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kota Sabang yang telah di-*overview*. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan tersebut. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kota Sabang, Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang, serta Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang.

## BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh Kota Sabang yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait. Secara lebih rinci,

bagian ini turut menjelaskan tentang Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM), serta Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.

#### BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang. Secara lebih rinci, bagian ini turut memaparkan tentang Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang, Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan, serta Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh tersebut.

#### BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh. Bagian ini akan mengulas tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota serta Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.

#### BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) yang berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan membahas tentang Program dan kegiatan

pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang, Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP), serta Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh di Kota Sabang.

#### BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan memaparkan tentang Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Sabang, Program peningkatan kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan, Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas

permukiman kumuh kawasan prioritas, dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

#### BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

#### BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

#### BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN


Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.



## BAB II

### KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Sabang

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Area  | 122,13 Km <sup>2</sup>  |
| Permukiman  |                         |
| Penduduk  | 41.197 Jiwa             |
| Kepadatan Penduduk  | 355,285/Km <sup>2</sup> |
| <b>PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF</b>  |                         |
|  |                         |

Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra, dengan Pulau Weh

sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo.

Berdasarkan Qanun Kota Sabang No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang yang mulanya terdiri dari dua kecamatan, saat ini telah menjadi tiga kecamatan, dan delapan belas gampong. yang masing-masing

kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 1.706,09 Ha; (2) Kecamatan Sukajaya 3.599,2 Ha dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6902,82 Ha.

Kota Sabang terletak secara geografis berada antara 05°46'28"-05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'13'02"-95°22'36" Bujur Timur. Sabang merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Batas-batas administrasi Kota Sabang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

##### 2.1.1 Kondisi Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2019 adalah 42.191 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,82 persen, terdiri dari 21.267 jiwa penduduk laki-laki dan 20.924 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk Kota Sabang yaitu Kecamatan

Sukajaya 22.002 jiwa dan Kecamatan Sukakarya 20.189 jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 362 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Sukajaya sebesar 329 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sukakarya sebanyak 267 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2020).

Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Kota Sabang, 2019

| No | Kecamatan  | Ibu Kota Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (2019) |
|----|------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | Sukajaya   | Balohan            | 3.599,2           | 15.663                 |
| 2  | Sukakarya  | Aneuk Laot         | 1.706,95          | 12.349                 |
| 3  | Sukamakmue | Batce Shoek        | 6.902,82          | 6.559                  |

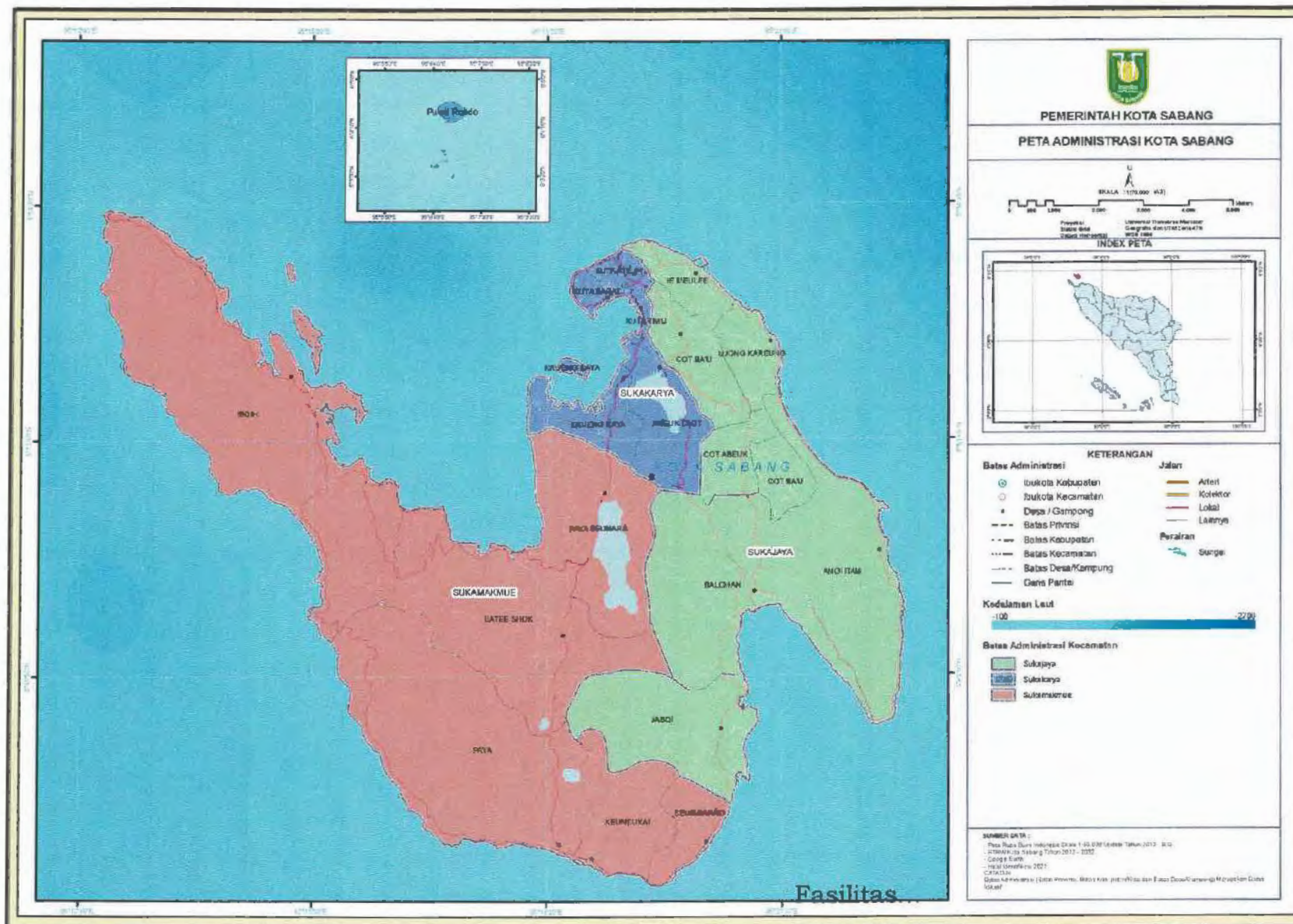
Mata pencaharian penduduk Kota Sabang adalah sebagai pegawai pemerintahan, petani dan nelayan. Jenis mata pencaharian masyarakat lainnya adalah sebagai pedagang, buruh, pelaku wisata, sektor jasa dan industri rumah tangga, selain itu penghasilan masyarakat juga didapatkan dari memelihara hewan ternak. Angkatan kerja berjumlah 17.071 jiwa dan pengangguran berjumlah 824 jiwa (BPS, 2020)

Penduduk Kota Sabang sebanyak 39.004 jiwa atau 92,45% beragama islam, dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada 63

tempat ibadah di Kota Sabang diantaranya 18 masjid, 29 Mushalla, 2 gereja dan 1 vihara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh.

Tahun 2019 terdapat 18 Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat yang menampung 1.205 murid dengan 123 guru. Kota Sabang juga memiliki 29 Sekolah Dasar (SD)/sederajat dengan 4.867 murid dan 482 guru. Sekolah Menengah Pertama terdapat 11 sekolah yang menampung 1.920 murid dengan 278 guru. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas terdapat 4 sekolah yang menampung 1.591 murid dengan 175 guru. (BPS, 2020)

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sabang pada tahun 2019 terdiri dari 2 Rumah Sakit, 2 Poliklinik, 6 Puskesmas, 9 Puskemas Pembantu, 6 Apotek, 37 Posyandu dan 15 Polindes. Fasilitas kesehatan ini didukung oleh tenaga kerja kesehatan yang terdiri dari 60 Dokter, 60 Perawat, 51 Bidan, 12 Farmasi dan 6 Ahli Gizi



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sabang, Sumber Hasil Pemetaan, 2020



### 2.1.2 Kondisi Iklim

Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini karena dipengaruhi oleh letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 26,9°C

Tabel 2.1 Kondisi Iklim Kota Sabang 2019. Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

| Bulan     | Suhu Rata-Rata (°C) | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan | Penyinaran Matahari |
|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Januari   | 22,2                | 123,6              | 15                | 131                 |
| Februari  | 23,2                | 13,3               | 4                 | 189                 |
| Maret     | 23,8                | 102,9              | 10                | 208                 |
| April     | 22,7                | 19,0               | 5                 | 177                 |
| Mei       | 25,5                | 123,7              | 11                | 195                 |
| Juni      | 27,0                | 90,8               | 10                | 119                 |
| July      | 25,0                | 119,9              | 11                | 146                 |
| Agustus   | 22,3                | 140,6              | 12                | 152                 |
| September | 22,1                | 153,7              | 13                | 119                 |
| Oktober   | 21,7                | 235,3              | 17                | 112                 |
| November  | 23,5                | 290,0              | 18                | 147                 |
| Desember  | 23,7                | 382,0              | 19                | 103                 |

### 2.1.3 Kondisi Bencana Alam

Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri.

#### a. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap guncangan gempabumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala richter dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (Modifield Mercaly Intensity).

#### b. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu

struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor.

Tabel 2.2 Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

| No | Kecamatan  | Gampong      | Luas Sebaran Kerentanan Tanah (Ha) |
|----|------------|--------------|------------------------------------|
| 1  | Sukajaya   | Anoi Hitam   | 1,62                               |
| 2  |            | Balohan      | 95,69                              |
| 3  |            | Cot Abeuk    | 45,33                              |
| 4  |            | Cot Ba'U     | 20,90                              |
| 5  |            | Jaboi        | 38,40                              |
| 6  | Sukakarya  | Aneuk Laot   | 49,62                              |
| 7  |            | Krueng Raya  | 247,20                             |
| 8  | Sukamakmue | Beurawang    | 83,29                              |
| 9  |            | Keuneukai    | 152,52                             |
| 10 |            | Paya         | 114,55                             |
| 11 |            | Iboih        | 628,65                             |
| 12 |            | Paya Seunara | 83,56                              |
| 13 |            | Batee Shok   | 151,63                             |
|    | Total      |              | 1.712,96                           |

c. Abrasi

Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti

Pantai Kasih, Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (Clay). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

d. Angin

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu angin barat dan angina timur. Musim angin barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur kearah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang hersekitar antara 26,40 0C sampai dengan 28,70 0C. Kelembapan nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung.



Tabel 2.3 Jumlah Desa/Gampong yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Sabang, 2011-2018.  
Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

| No | Kecamatan  | Gampong      | Luas Sebaran Kerentanan Tanah (Ha) |
|----|------------|--------------|------------------------------------|
| 1  | Sukajaya   | Anoi Hitam   | 1,62                               |
| 2  |            | Balohan      | 95,69                              |
| 3  |            | Cot Abeuk    | 45,33                              |
| 4  |            | Cot Ba'U     | 20,90                              |
| 5  |            | Jaboi        | 38,40                              |
| 6  | Sukakarya  | Aneuk Laot   | 49,62                              |
| 7  |            | Krueng Raya  | 247,20                             |
| 8  | Sukamakmue | Beurawang    | 83,29                              |
| 9  |            | Keuneukai    | 152,52                             |
| 10 |            | Paya         | 114,55                             |
| 11 |            | Iboih        | 628,65                             |
| 12 |            | Paya Seunara | 83,56                              |
| 13 |            | Batee Shok   | 151,63                             |
|    | Total      |              | 1.712,96                           |

#### 2.1.4 Kondisi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sabang. Selain memiliki potensi alam, historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan,

Kota Sabang juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Berikut disajikan lokasi objek wisata di Kota Sabang pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Lokasi Objek Wisata di Kota Sabang, 2019 Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

| No | Nama Objek Wisata                         | Lokasi (Gampong) | Jarak Dari Pusat Kota |
|----|---|------------------|-----------------------|
| 1  | Pantai Pasir Putih                        | Paya             | ±17 Km                |
| 2  | Pantai Pasir Teungoh                      | Paya             | ±17 Km                |
| 3  | Pantai Pasir Cum                          | Paya             | ±17 Km                |
| 4  | Air Terjun Bango                          | Paya             | ±17 Km                |
| 5  | Makam Aulia Tengu dicemong                | Paya             | ±17 Km                |
| 6  | Benteng Ujong Peunayong                   | Paya             | ±17 Km                |
| 7  | Kolam Air panas Keunekai                  | Keunekai         | ±21 Km                |
| 8  | Gunung Berapi Keunekai                    | Keunekai         | ±21 Km                |
| 9  | Pantai Keunekai                           | Keunekai         | ±21 Km                |
| 10 | Pantai Beurawang                          | Beurawang        | ±19 Km                |
| 11 | Kolam Pemandian Air Panas Jaboi           | Jaboi            | ±15 Km                |
| 12 | Gunung Berapi Jaboi                       | Jaboi            | ±15 Km                |
| 13 | Panjati Jaboi                             | Jaboi            | ±15 Km                |
| 14 | Kelok 13 Teupin meuneng dan Telok Balohan | Balohan          | ±11 Km                |
| 15 | Kebun Salak                               | Balohan          | ±11 Km                |



| No | Nama Objek Wisata                       | Lokasi (Gampong) | Jarak Dari Pusat Kota |
|----|---|------------------|-----------------------|
| 16 | Tugu I Love Sabang                      | Cot Ba'u         | ±3 Km                 |
| 17 | Pantai Teupin reudep/Pantai Batee Gajah | Anoi Itam        | ±12 Km                |
| 18 | Pantai Arun                             | Anoi Itam        | ±12 Km                |
| 19 | Pantai Teupin Bube                      | Anoi Itam        | ±12 Km                |
| 20 | Benteng Pertahanan jepang               | Anoi Itam        | ±12 Km                |
| 21 | Pantai Ujong Kareung                    | Ujong Kareung    | ±12 Km                |
| 22 | Pantai Sumur Tiga                       | Ie Meulee        | ±4 Km                 |
| 23 | Pantai Tapak Gajah                      | Ie Meulee        | ±2 Km                 |
| 24 | Benteng Jepang Tapak Gajah              | Ie Meulee        | ±2 Km                 |
| 25 | Rumah Teuku Abbas                       | Ie Meulee        | ±4 Km                 |
| 26 | Pantai Gapang                           | Iboih            | ±19 Km                |
| 27 | Pantai Calok Meunasah                   | Iboih            | ±21 Km                |
| 28 | Pantai Teupin Layeu                     | Iboih            | ±21 Km                |
| 29 | Pantai Teupin Serkui                    | Iboih            | ±21 Km                |
| 30 | Pantai Teupin Reudeup                   | Iboih            | ±21 Km                |
| 31 | Pulau Rubiah                            | Iboih            | ±21 Km                |
| 32 | Taman Laut Pulau Rubiah                 | Iboih            | ±21 Km                |
| 33 | Batu gendangg                           | Iboih            | ±21 Km                |
| 34 | Tugu Kilometer 0                        | Iboih            | ±21 Km                |
| 35 | Hutan Wisata Iboih                      | Iboih            | ±21 Km                |
| 36 | Gua Sarang                              | Iboih            | ±21 Km                |
| 37 | Pantai Serui                            | Batee Shoek      | ±12 Km                |

| No | Nama Objek Wisata                          | Lokasi (Gampong) | Jarak Dari Pusat Kota |
|----|--|------------------|-----------------------|
| 38 | Pantai Pria Laot                           | Batee Shoek      | ±12 Km                |
| 39 | Tugu Pemancungan Jepang                    | Batee Shoek      | ±12 Km                |
| 40 | Air Terjun Pria Laot                       | Batee Shoek      | ±12 Km                |
| 41 | Makam Aulia Pria Laot                      | Batee Shoek      | ±12 Km                |
| 42 | Pantai Teupin Cirik                        | Krueng Raya      | ± 1 Km                |
| 43 | Pantai Lhong Krueng Raya                   | Krueng Raya      | ± 6 Km                |
| 44 | Pantai Teupin Tongkang                     | Krueng Raya      | ± 6 Km                |
| 45 | Kuburan keramat Ujung Sekundur             | Krueng Raya      | ± 6 Km                |
| 46 | Pulau Klah                                 | Krueng Raya      | ± 6 Km                |
| 47 | Danau Aneuk Laot                           | Aneuk Laot       | ± 2 Km                |
| 48 | Kolam Permainan Anak-anak Jurong Putro Ijo | Aneuk Laot       | ± 2 Km                |
| 49 | Benteng Tinjau Alam                        | Aneuk Laot       | ± 2 Km                |
| 50 | Masjid Baiturrahim                         | Kuta Timu        | ± 1 Km                |
| 51 | Gudang Pelor                               | Kuta Timu        | ± 1 Km                |
| 52 | Benteng Jepang Jurong Keutapang            | Kuta Timu        | ± 1 Km                |
| 53 | Zwimbath                                   | Kuta Timu        | ± 2 Km                |
| 54 | Dermaga CT3                                | Kuta Timu        | ± 1 Km                |
| 55 | Lokasi Sabang Fair                         | Kuta Barat       | ± 1 Km                |
| 56 | Benteng Pertahanan Jepang Ujung Asam       | Kuta Barat       | ± 1 Km                |

| No | Nama Objek Wisata                                     | Lokasi (Gampong) | Jarak Dari Pusat Kota |
|----|---|------------------|-----------------------|
| 57 | Benteng Pertahanan Jepang di tengah jalan Sabang Fair | Kuta Barat       | ± 1 Km                |
| 58 | Benteng Jepang di Samping gedung BPKS                 | Kuta Barat       | ± 1 Km                |
| 59 | Dermaga CT1   | Kuta Barat       | ± 1 Km                |
| 60 | Puncang Sabang  | Kuta Barat       | ± 1 Km                |
| 61 | Sabang Hill   | Kuta Ateuh       | ± 1 Km                |
| 62 | Kuburan Kerkhop                                       | Kuta Ateuh       | ± 1 Km                |



Gambar 2.2. Pantai Pasir Putih - Paya



Gambar 2.5. Pulau Klah – Krueng Raya



Gambar 2.3. Gunung Berapi Jaboi



Gambar 2.4. Tugu Kilometer 0 - Iboih



2.2 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- (1). Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- (2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- (3). Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- (4). Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
- (5). Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- (6). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- (7). Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu Prioritas Nasional 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

Kota Sabang merupakan kawasan perkotaan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan perumahan



dan permukiman. Kebutuhan perumahan yang layak huni (*livable*), aman (*safe*), nyaman (*comfortable*), dan damai (*peaceful*) dan sejahtera (*prosperous*) serta berkelanjutan (*sustainable*) dalam kawasan permukiman terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sabang.

Permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar, mendesak dan penting ini selanjutnya diidentifikasi menjadi isu-isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Kota Sabang. . Isu strategis merupakan kondisi bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis agar dapat dipetakan program program kegiatan yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasar identifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan lima tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta

telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Sabang adalah:

1. Pelaksanaan syariat islam
2. Kualitas dan pelayanan pendidikan
3. Kualitas dan pelayanan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
5. Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi dan kearifan lokal untuk mendukung sektor pariwisata;
7. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
8. Tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya isu strategis pembangunan perumahan dan pembangunan Kota Sabang disajikan pada tabel 2.5 dibawah ini. Isu strategis ini yang dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait, hasil kajian berbagai dokumen pembangunan dan perencanaan serta kondisi di lapangan,

Tabel 2.5 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang.

Sumber : Kajian dan Analisis Dokumen. RP2KPKP 2022-2025

| No | Aspek              | Isu Strategis   |
|----|--------------------|---|
| 1  | Permukiman         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</li> <li>2. Masih banyak dijumpai permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,</li> <li>3. Belum tergarapnya infrastruktur hijau (green infrastructure) dan upaya hemat energy</li> <li>4. Masih ada kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik</li> <li>5. Masih ada lahan permukiman tidak bersertifikat</li> </ol> |
| 2  | Jalan dan Jembatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal</li> <li>2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar</li> <li>3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal</li> <li>4. Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU)</li> </ol>  |
| 3  | Air Minum          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.</li> </ol>  |

| No | Aspek    | Isu Strategis  |
|----|----------|--|
|    |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Water Treatment Plant yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (24 jam).</li> <li>4. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.</li> </ol>  |
| 4  | Drainase | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya,</li> <li>2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.</li> <li>3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung.</li> <li>4. Kawasan permukiman yang tergenang.</li> <li>5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.</li> </ol>                          |
| 5  | Sanitasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan air sebagai tempat pembuangan limbah.</li> <li>2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.</li> <li>3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.</li> <li>4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;</li> </ol> |

| No | Aspek       | Isu Strategis   |
|----|-------------|---|
| 6  | Persampahan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.</li><li>2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.</li><li>3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.</li><li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian</li><li>5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,</li></ol> |
| 7  | Kebakaran   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.</li></ol>   |

2.3 Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Memahami berbagai kebijakan terkait pembangunan perumahan dan permukiman yang berlaku di Kota Sabang dilakukan agar dalam melakukan menentukan program-program penanganan kekumuhan sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Sabang. Hal ini juga dilakukan agar kegiatan penanganan kumuh yang direncanakan

tidak saling tumpang tindih antar berbagai pihak terkait. Kajian Kebijakan ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kota Sabang yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota (RPJMD, Renstra Dinas, Rencana Sektor, dan dokumen lain).



Tabel 2.6 Overview Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Sabang

| No | Sumber Dokumen  | Visi dan Misi   | Tujuan & Sasaran  | Strategi & Arahan Kebijakan  |
|----|---|---|---|--|
| 1  | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 | VISI: Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa   |   |  |
|    |   | <p>MISI terkait dengan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.</p> <p>MISI KEDUA: Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan</p> | <p>Sasaran:</p> <p>1. Terbangunnya kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan (prasarana jalan, sarana transportasi, pelayanan air bersih, pengelolaan air limbah dan sampah) yang berkualitas baik, ruang terbuka hijau, kesediaan energi listrik, perlindungan masyarakat dari bencana (mitigasi bencana), meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.</p> <p>Penataan ruang yang sinergis, serasi dan berkelanjutan, dan pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi</p> | <p>Arahan Kebijakan:</p> <p>1. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.</p> <p>2. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi (pengelolaan air limbah dan persampahan) diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber</p> |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran | Strategi & Arahkan Kebijakan   |
|----|----------------|---------------|------------------|--|
|    |                |               |                  | <p>daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air serta kesehatan.</p> <p>3. Pemanfaatan terpadu sumber air baku, antara air permukaan dan air tanah akan dikembangkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber air baku.</p> <p>4. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Penyediaan pelayanan angkutan umum masal perkotaan yang didukung pelayanan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin.</p> <p>5. Pembangunan prasarana jalan, diarahkan pada peningkatan mutu jaringan jalan lingkar Pulau Weh, pengembangan jaringan jalan baru untuk pengembangan wilayah dan peningkatan mutu jalan-jalan dalam kota serta seluruh jalan lingkungan berstandar aspal beton/hot mix.</p> <p>6. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan tertata dengan membangun kawasan permukiman baru (resettlement) dan pembangunan rumah tidak</p> |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran | Strategi & Arah Kebijakan  |
|----|----------------|---------------|------------------|--|
|    |                |               |                  | <p>layak huni masyarakat tidak mampu (dhuafa).</p> <p>7. Pembangunan perkotaan dilakukan dengan merevitalisasi kota lama dan bangunan bersejarah (heritage) untuk menciptakan kota yang indah dan mempunyai daya tarik, dan membangun kawasan kota baru (newtown) untuk pengembangan wilayah.</p> <p>8. Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan pada pelestarian sumber daya alam (danau, hutan, taman laut, wiayah pesisir) dan membangun Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>9. Peningkatan sumber daya energi listrik, diarahkan selain mengandalkan tenaga diesel perlu juga dikembangkan sumber energi alternatif lain seperti sumber energi Panas Bumi Jaboi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.</p> <p>10. Arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan pemerataan dan pemenuhan pelayanan jasa pos, informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses informasi, khususnya penggunaan jaringan telepon selular dan pelayanan internet, sehingga setiap lapisan</p> |



| No | Sumber Dokumen   | Visi dan Misi  | Tujuan & Sasaran   | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  |  | <p>masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan telekomunikasi secara mudah dan terjangkau. Dalam kaitan ini, diharapkan juga arah kebijakan Komunikasi dan Informatika mampu mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi wilayah dari sisi keterisolasian dan ketertinggalan.</p> <p>Penanggulangan bencana alam diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan, tidak hanya pada saat bencana tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana</p> |
| 2  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sabang 2017-2022 | <p>VISI: Terwujudnya pembangunan kota sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syari'ah dengan semangat kebersamaan (ulama dan umara)</p>               |  |   |
|    |  | <p>MISI terkait dengan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.</p> <p>MISI KEENAM: Meningkatkan Infrastruktur Dan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Dhu'afa)</p> | <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni</li> <li>2. Meningkatkan penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</li> </ol> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan</li> </ol> | <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan persampahan</li> <li>1.1.2 Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga</li> <li>1.1.3 Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase</li> <li>1.2.1 Menyiapkan lahan dan pembangunan rumah yang layak bagi kaum dhu'afa di Kota Sabang</li> </ol>   |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran  | Strategi & Arahan Kebijakan  |
|----|----------------|---------------|---|--|
|    |                |               | <p>1.2 Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan penataan kawasan permukiman kumuh</p> <p>1.3 Meningkatnya akses transportasi</p> <p>1.4 Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat</p> <p>2.1 Terwujudnya tata ruang kota yang berkelanjutan</p> <p>2.2 Terwujudnya ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim</p> <p>2.3 Meningkatnya upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam</p> <p>2.4 Meningkatnya pelayanan kebencanaan</p> <p>2.5 Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Meningkatnya kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana</p> | <p>1.2.2 Meningkatkan kualitas rumah MBR</p> <p>1.3.1 Meningkatkan sarana, prasarana dan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara antar wilayah</p> <p>1.4.1 Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat</p> <p>2.1.1 Menyusun dokumen, penegakan hukum dan implementasi RTRW</p> <p>2.2.1 Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>2.2.2 Meningkatkan pelayanan persampahan</p> <p>2.3.1 Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan</p> <p>2.4.1 Menyusun dokumen rencana mitigasi bencana</p> <p>2.5.1 Meningkatkan Ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana</p> <p>2.6.1 Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan bencana</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <p>1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana air limbah</p> <p>3. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase</p> <p>1.2.1.1 Validasi data calon penerima rumah layak huni pemeliharaan jaringan drainase</p> |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran | Strategi & Arah Kebijakan  |
|----|----------------|---------------|------------------|--|
|    |                |               |                  | <p>1.2.1.2 Penyiapan lahan untuk pembangunan rumah layak huni</p> <p>1.2.1.3 Penyiapan dokumen perencanaan terhadap kawasan peruntukan rumah layak huni</p> <p>1.2.2.1 Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni</p> <p>1.3.2.1 Peningkatan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara</p> <p>1.4.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi dan Informasi</p> <p>2.1.1.1 Penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi</p> <p>2.2.1.1 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>2.2.2.1 Peningkatan pengelolaan persampahan</p> <p>2.3.1.1 Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam</p> <p>2.3.1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>2.3.1.3 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan</p> <p>2.4.1.1 Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana</p> <p>2.5.1.1 Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat</p> <p>2.6.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pelaku penanggulangan bencana</p> |



| No | Sumber Dokumen  | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran  | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|---|---------------|---|---|
| 3  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032 |               | <p>Tujuan:<br/>Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan kota sebagai kawasan strategis nasional.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya interaksi dan integrasi wilayah Kota Sabang ke dalam konteks sistem tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh maupun RTRW Nasional melalui penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (urban system) secara terpadu dengan sistem transportasi wilayah (c.q. transportasi antar wilayah);</li> <li>2. Mempercepat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, post dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya;</li> </ol> | <p>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Sabang untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Sabang Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan kota yang berjenjang dalam mendukung investasi kawasan perdagangan dan pelabuhan Sabang</li> <li>2. Pemantapan fungsi kawasan lindung</li> <li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal</li> <li>4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif</li> <li>5. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata agar dapat mendukung perekonomian Kota Sabang</li> <li>6. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> </ol> <p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Mengembangkan Kuta Barat, Kuta Ateuh, Cot Ba'u, le Meulee sebagai pusat pelayanan kota</li> <li>1.2 Mengembangkan Kuta Timu, Balohan, Paya Seunara, Batee Shok sebagai sub pusat pelayanan kota</li> <li>1.3 Mengembangkan Krueng Raya, Aneuk Laot, Jaboi, Cot Abeuk, Iboih, Paya, Keunekai, Beurawang sebagai pusat</li> </ol> |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran  | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|----------------|---------------|---|---|
|    |                |               | <p>3. Meningkatkan interaksi wilayah Kota Sabang ke dalam jaringan perkotaan poros-perekonomian dunia (aksesibilitas global) seperti Singapore dan Batam melalui pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan jenjang PKSN dan PKW khususnya, serta pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional.</p> <p>4. Meningkatkan interaksi wilayah hinterland dengan pusat-pusat permukiman perkotaan melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi intra wilayah untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan ruang antara perkotaan dengan pedesaan;</p> <p>5. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan-kawasan tertinggal/perdesaan, terpencil dan pulau-pulau yang jauh untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan kawasan;</p> <p>6. Mengurangi tingkat konflik pemanfaatan ruang dalam wilayah melalui penegasan fungsi ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di ruang daratan maupun lautan, serta penetapan kriteria</p> | <p>lingkunganMengembangkan dan mengoptimalkan sistem jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;</p> <p>2.1 Menetapkan batas kawasan lindungMerehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi;</p> <p>2.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga fungsi dan ekosistem kawasan lindung sesuai dengan kearifan</p> <p>3.1. Mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya agar sesuai peruntukan;</p> <p>3.2. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi; dan</p> <p>3.3. Membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang Kota Sabang yang nyaman</p> <p>4.1. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan untuk menunjang pengembangan perekonomian wilayah</p> <p>4.2. Mengembangkan sektor pertanian dengan mendorong komoditi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan</p> <p>4.3. Memanfaatkan daya Tarik wisata bahari, budaya dan alam</p> |



| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi | Tujuan & Sasaran   | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|----------------|---------------|--|---|
|    |                |               | <p>lokasi dan standar teknis pengelolaan kawasan;</p> <p>7. Mengupayakan terwujudnya perimbangan dalam luasan dan sebaran ruang antara kawasan hutan dan non hutan dengan memperhatikan fungsi-fungsi hidrologis hutan sebagai kawasan resapan air, pemeliharaan kesuburan tanah, dan mencegah terjadinya erosi maupun banjir;</p> <p>8. Meningkatkan optimalitas pemanfaatan dan produktivitas lahan kawasankawasan budidaya, terutama pola kawasan-kawasan produksi yang belum diusahakan dan terlantar dengan tetap mempertahankan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah;</p> <p>9. Menyediakan dan mencadangkan secara khusus lahan-lahan budidaya untuk mendukung pengembangan perekonomian rakyat (usaha kecil, menengah dan koperasi) di berbagai sektor; dan</p> <p>10. Menetapkan strategi pemanfaatan ruang yang telah mengantisipasi kebencanaan yang mungkin timbul.</p> | <p>4.4. Memanfaatkan secara optimal potensi sektor perikanan di kawasan laut dan pesisir</p> <p>4.5. Mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki peluang ekonomi tinggi;</p> <p>4.6. Menetapkan dan mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>4.7. Menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil</p> <p>5.1. Mengembangkan wisata bahari dan wisata sejarah</p> <p>5.2. Membangun sarana dan prasarana wisata</p> <p>5.3. Mengembangkan pengelolaan bersama dengan investor</p> <p>6.1 Mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>6.2 Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif yang berada di kawasan maupun sekitar kawasan pertahanan dan keamanan</p> <p>6.3 Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan</p> |



| No | Sumber Dokumen                           | Visi dan Misi  | Tujuan & Sasaran  | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|--|--|---|---|
| 4  | Strategi Sanitasi Kota Sabang Tahun 2016 | <p><b>VISI SANITASI KOTA SABANG:</b><br/>Terwujudnya Kota Sabang sebagai Kota Wisata yang mandiri, bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pada tahun 2026.</p>  |   |   |
|    |  | <p><b>MISI AIR LIMBAH DOMESTIK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan regulasi tingkat daerah dalam hal pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta.</li> <li>3. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.</li> </ol> <p>Menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan air limbah domestik.</p> | <p><b>TUJUAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya akses aman 3% di sektor air limbah domestik.</li> <li>2. Tercapainya Akses Layak di sektor air limbah domestik.</li> <li>3. Tercapainya Kota Sabang tanpa BABS di tempat terbuka.</li> </ol> <p><b>SASARAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Meningkatkan akses aman dari 2% menjadi 3% pada tahun 2024 dan 5% di tahun 2026</li> <li>1.2. Menyusun regulasi tingkat Daerah dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>1.3. Membentuk sistem kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik Berkurangnya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 32,9% menjadi 0% pada tahun 2019</li> </ol> | <p><b>STRATEGI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik.</li> <li>2. Melakukan penguatan terhadap regulasi prioritas penggunaan dana gampong yang menjadikan air limbah domestik sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan di gampong.</li> <li>3. Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>4. Mendorong Kota Sabang sebagai Kota Open Defecation Free (ODF) melalui penyediaan akses layak, aman dan berkelanjutan.</li> <li>5. Meningkatkan Kegiatan Kampanye Perubahan Perilaku</li> <li>6. Menyediakan anggaran yang sesuai dan mencukupi bagi kebutuhan program kegiatan pengelolaan air limbah domestik</li> <li>7. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk pengelolaan limbah domestik</li> </ol> <p>Memperkuat pelaksanaan inovasi Gerakan Bersama Sanitasi Aman dan Tuntas (GEBER)</p> |

| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi   | Tujuan & Sasaran   | Strategi & Arah Kebijakan   |
|----|----------------|---|--|---|
|    |                |   | <p>2.1 Meningkatkan akses layak individu (tidak termasuk aman) dari 85% menjadi 95% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2026</p> <p>2.2 Menurunkan akses layak bersama dari 4,5% menjadi 2% pada tahun 2024 dan 0% pada tahun 2026</p> <p>2.3 Menurunkan akses layak khusus perdesaan (leher angsa - cubluk) dari 1,6% menjadi 0% pada tahun 2024.</p> <p>2.4 Menurunkan akses belum layak dari 5,7% menjadi 0% pada tahun 2024.</p> <p>3.1 Menurunkan angka BABS dari 1,7% menjadi 0% di tahun 2023.</p> <p>3.2 Meningkatkan persentase pendanaan pada sektor air limbah domestic</p> | SANTUN) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA)   |
|    |                | <p><b>MISI PERSAMPAHAN:</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</p> <p>2. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan.</p> | <p><b>TUJUAN:</b></p> <p>1. Tercapainya penanganan sampah perkotaan yang menjangkau seluruh wilayah</p> <p>2. Tercapainya target 15% pengurangan sampah perkotaan.</p> <p><b>SASARAN:</b></p> <p>1.1 Meningkatkan capaian penanganan sampah perkotaan dari 85,8%</p>   | <p><b>STRATEGI:</b></p> <p>1. Peningkatan dan pengembangan TPA Lhoek Batee</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan persampahan</p> <p>3. Melakukan penguatan terhadap regulasi prioritas penggunaan dana gampong yang menjadikan persampahan sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan di gampong.</p> |



| No | Sumber Dokumen | Visi dan Misi  | Tujuan & Sasaran   | Strategi & Arah Kebijakan  |
|----|----------------|--|--|--|
|    |                | <p>3. Mengurangi timbulan sampah dari sumbernya dalam rangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta.</p> <p>Menciptakan sistem manajemen dan kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and cooperative governance. Mendorong peran swasta dalam penanganan dan pengelolaan persampahan.</p> | <p>menjadi 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2026</p> <p>1.2 Memperkuat regulasi tingkat Daerah dalam hal Pengelolaan Persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</p> <p>1.3 Membentuk sistem kelembagaan dalam pengelolaan persampahan</p> <p>1.4 Meningkatkan persentase pendanaan pada sektor persampahan</p> <p>2.1 Meningkatkan capaian pengurangan sampah perkotaan dari 0% menjadi 10% pada tahun 2024 dan 15% pada tahun 2026</p> <p>Mengurangi Timbulan Sampah dari sumbernya dengan metode 3R</p> | <p>4. Menyediakan anggaran yang sesuai dan mencukupi bagi kebutuhan program kegiatan penanganan persampahan</p> <p>5. Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R</p> <p>6. Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan</p> <p>7. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan</p> <p>8. Memperkuat pelaksanaan inovasi Aksi dan Implementasi Kelola Sampah yang Berkelanjutan Ramah Lingkungan di Kota Sabang (ASIK SAYANG SABANG) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA)</p> <p>9. Memperkuat pelaksanaan inovasi Aksi dan Implementasi Kelola Sampah yang Berkelanjutan Ramah Lingkungan di Kota Sabang (ASIK SAYANG SABANG) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA)</p> <p>10. Memberikan reward/penghargaan kepada pihak swasta yang terlihat dalam sistem pengelolaan persampahan</p> |



## 2.4 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

### 2.4.1 Amanat Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemah, dan/atau setiap orang.

Tabel 2.7 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

| PENCEGAHAN   |  |
|--|--|
| Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup: | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;</li> <li>b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;</li> <li>c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan</li> <li>d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.</li> </ul> |
| Pencegahan dilaksanakan melalui:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dan pengendalian; dan</li> <li>b. Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>  |
| Pengawasan dan pengendalian  | Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| Pemberdayaan masyarakat  | Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.  |

| PENINGKATAN KUALITAS   |   |
|--|---|
| Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan: | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemugaran;</li> <li>b. Peremajaan; atau</li> <li>c. Pemukiman kembali</li> </ul>  |
| Penetapan Lokasi   | <p>Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li> <li>b. Ksesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;</li> <li>c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;</li> <li>d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;</li> <li>e. Kualitas bangunan; dan</li> <li>f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.</li> </ul> |
| Pemugaran  | Merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Peremajaan        | Merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.   |
| Pemukiman Kembali | Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat |

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya



meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Tabel 2.8 Peran, Tugas dan Fungsi Stakeholder dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Stakeholder  | Peran, Tugas dan Fungsi   |
|--|---|
| Pemerintah Pusat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja PKP Nasional</li> <li>• Kementerian terkait</li> <li>• Forum PKP Nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundangan dan Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Permukiman. Peraturan dan Pedoman Umum bidang penyelenggaraan permukiman.</li> <li>• Penganggaran, Monitoring, Supervisi, Pengembangan Kapasitas, dll.</li> </ul> |
| Pemerintah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODP Provinsi</li> <li>• Pokja Provinsi</li> <li>• Forum PKP Provinsi</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Pokja PKP</li> <li>• Dukungan ke Pemerintah Kota/Kabupaten. Koordinasi, Sinkronisasi, dll</li> </ul>   |

| Stakeholder  | Peran, Tugas dan Fungsi   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendanaan dan Pemrograman di APBD. Alokasi dana dan program penyelenggaraan permukiman.</li> </ul>   |
| Pemerintah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODP Kab/Kota</li> <li>• Pokja PKP/Kota</li> <li>• Forum PKP Kab/Kota</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Penanganan Kumuh. Perda Kumuh, Perda BG, Perda Tata Ruang, dll</li> <li>• Kelembagaan Pokja PKP</li> <li>• Dokumen Strategi &amp; Perencanaan (program investasi, masterplan, dokumen teknis).</li> <li>• Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan dalam Penanganan Permukiman Kumuh,</li> <li>• Dukungan Masyarakat. Informasi kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll.</li> </ul>  |
| Masyarakat Swasta/Dunia Usaha &  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Partisipatif. Pemetaan Swadaya Penyusunan Profil Kumuh dan Perencanaan Partisipasi Penanganan &amp; Pencegahan kumuh dikomunitas</li> <li>• Integrasi Perencanaan ke Dokumen Strategi &amp; Perencanaan (SIAP/RKP-KP)</li> <li>• Penguatan Kelembagaan. Penguatan Kapasitas BKM dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam Penanganan Kuuuh dan Pencegahan Kumuh.</li> <li>• Pelaksanaan Kegiatan Investasi Invesatsi Infrastruktur Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kumuh Tingkat Komunitas.</li> </ul> |



#### 2.4.2 Amanat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping

itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

| NO | SUB URUSAN         | PEMERINTAH PUSAT  | PEMERINTAH PROVINSI   | PEMERINTAH KOTA  |
|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | Kawasan Permukiman | a. Penetapan sistem kawasan permukiman.<br>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman . |

| NO | SUB URUSAN                             | PEMERINTAH PUSAT  | PEMERINTAH PROVINSI  | PEMERINTAH KOTA   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | lima belas) ha atau lebih.  | dengan di bawah 15 (lima belas) ha.  | b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |
| 2  | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |   |  | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota .                             |
| 3  | Permukiman                             | a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.<br>b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional. | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota                                     |

#### 2.4.3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- Bangunan gedung
- Jalan lingkungan;
- Penyediaan air minum;
- Drainase lingkungan;
- Pengelolaan air limbah;
- Pengelolaan persampahan; dan
- Proteksi kebakaran.

Tabel 2.10 Indikator dan Kriteria Permukiman Kumuh

| NO | INDIKATOR KUMUH        | KRITERIA  |
|----|------------------------|---|
| 1  | Bangunan gedung        | a. Ketidakteraturan bangunan;<br>b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau<br>c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.          |
| 2  | Jalan Lingkungan       | a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau<br>b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.   |
| 3  | Penyediaan Air Minum   | a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau<br>b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.   |
| 4  | Drainase lingkungan    | a. Drainase lingkungan tidak tersedia;<br>b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau<br>c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk |
| 5  | Pengelolaan air limbah | a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau  |



| NO | INDIKATOR KUMUH         | KRITERIA   |
|----|-------------------------|--|
| 6  | Pengelolaan persampahan | b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.<br>a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau<br>b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis. |
| 7  | Proteksi kebakaran      | a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan<br>b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.  |




Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdiri atas:

1. Di atas air;
2. Di tepi air;
3. Di dataran rendah;
4. Di perbukitan; dan/atau
5. Di daerah rawan bencana.



Tabel 2.11 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

| NO | TIPOLOGI   | LOKASI   | KETERANGAN  |
|----|--|--|---|
| 1  | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.   | <br>Permukiman kumuh di atas air di Banjarmasin |
| 2  | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air | <br>Permukiman kumuh di tepi air di Jakarta     |

| NO | TIPOLOGI   | LOKASI  | KETERANGAN   |
|----|--|---|--|
| 3  | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah       | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.                                     | <br>Permukiman kumuh di dataran rendah di Jakarta           |
| 4  | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan           | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran Tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%                           | <br>Permukiman kumuh di perbukitan di Jayapura              |
| 5  | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir. | <br>Permukiman kumuh di daerah rawan bencana di Yogyakarta |

#### 2.4.4 Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Qanun ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Kriteria perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.12. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh

| NO | INDIKATOR       | KRITERIA                     | PENJELASAN   |
|----|-----------------|------------------------------|--|
| 1  | Bangunan Gedung | a. Ketidakteraturan bangunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep</li> </ul> |



| NO | INDIKATOR | KRITERIA  | PENJELASAN   |
|----|-----------|---|--|
|    |           |   | orientasi lingkungan, dan wajah jalan.   |
|    |           | b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>• Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.</li> </ul> |
|    |           | c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.  | <p>Persyaratan tata bangunan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;</li> <li>• Arsitektur bangunan gedung;</li> <li>• Pengendalian dampak lingkungan;</li> </ul> |

| NO | INDIKATOR        | KRITERIA                           | PENJELASAN   |
|----|------------------|------------------------------------|--|
|    |                  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan</li> <li>• Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.</li> </ul> <p>Persyaratan keandalan bangunan gedung, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan keselamatan bangunan gedung;</li> <li>• Persyaratan kesehatan bangunan gedung;</li> <li>• Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan</li> <li>• Persyaratan kemudahan bangunan gedung.</li> </ul> |
|    | Jalan Lingkungan | a. Jaringan jalan lingkungan tidak | Merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak  |



| NO | INDIKATOR            | KRITERIA  | PENJELASAN   |
|----|----------------------|---|--|
|    |                      | melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman;          | terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.   |
|    |                      | b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.                   | Merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk. |
|    | Penyediaan Air Minum | a. Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau                | Merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan yang berlaku.     |
|    |                      | b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi. | Merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai                    |

| NO | INDIKATOR           | KRITERIA  | PENJELASAN   |
|----|---------------------|---|--|
|    |                     |   | minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.   |
|    | Drainase Lingkungan | a. Drainase lingkungan tidak tersedia;  | Merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.                                   |
|    |                     | b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau | Merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun. |

| NO | INDIKATOR              | KRITERIA  | PENJELASAN   |
|----|------------------------|---|--|
|    |                        | c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.                                 | Merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.  |
|    | Pengelolaan Air Limbah | a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau      | Merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. |
|    |                        | b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. | Merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:   |

| NO | INDIKATOR               | KRITERIA   | PENJELASAN  |
|----|-------------------------|--|---|
|    |                         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau</li> <li>• Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>  |
|    | Pengelolaan Persampahan | a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; | <p>Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;</li> <li>• Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;</li> </ul> |

| NO | INDIKATOR | KRITERIA   | PENJELASAN  |
|----|-----------|--|---|
|    |           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan</li> <li>• Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</li> </ul>   |
|    |           | b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis. | <p>Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pewadahan dan pemilahan domestik;</li> <li>• Pengumpulan sampah lingkungan;</li> <li>• Pengangkutan sampah lingkungan;</li> </ul> |

| NO | INDIKATOR          | KRITERIA                                       | PENJELASAN  |
|----|--------------------|--|---|
|    | Proteksi Kebakaran | a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahansampah lingkungan.</li> </ul> <p>Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasokan air dari sumber alam maupun buatan;</li> <li>• Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;</li> <li>• Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau</li> <li>• Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.</li> </ul> |



| NO | INDIKATOR | KRITERIA                                     | PENJELASAN  |
|----|-----------|--|---|
|    |           | b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia. | Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia antara lain terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>• Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau</li> <li>• Mobil tangga sesuai kebutuhan.</li> </ul> |

Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. survey
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh paling sedikit memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rumusan perencanaan penyediaan tanah dan penyediaan rumah;
- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh memuat prinsip desain universal. Prinsip desain universal meliputi:

- a. Kesetaraan penggunaan ruang;
- b. Keselamatan dan keamanan bagi semua;
- c. Kemudahan akses tanpa hambatan;
- d. Kemudahan akses informasi;
- e. Kemandirian penggunaan ruang;

- f. Efisiensi upaya pengguna; dan
- g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Prinsip desain universal mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola penanganan direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola penanganan meliputi:

- a. Pemugaran; merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- b. Peremajaan; dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- c. Pemukiman kembali; dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

- a. Hak keperdataan masyarakat terdampak;
- b. Kondisi ekologis lokasi; dan
- c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus mempertimbangkan tipologi kumuh dengan ketentuan:

- a. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka

penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

- d. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

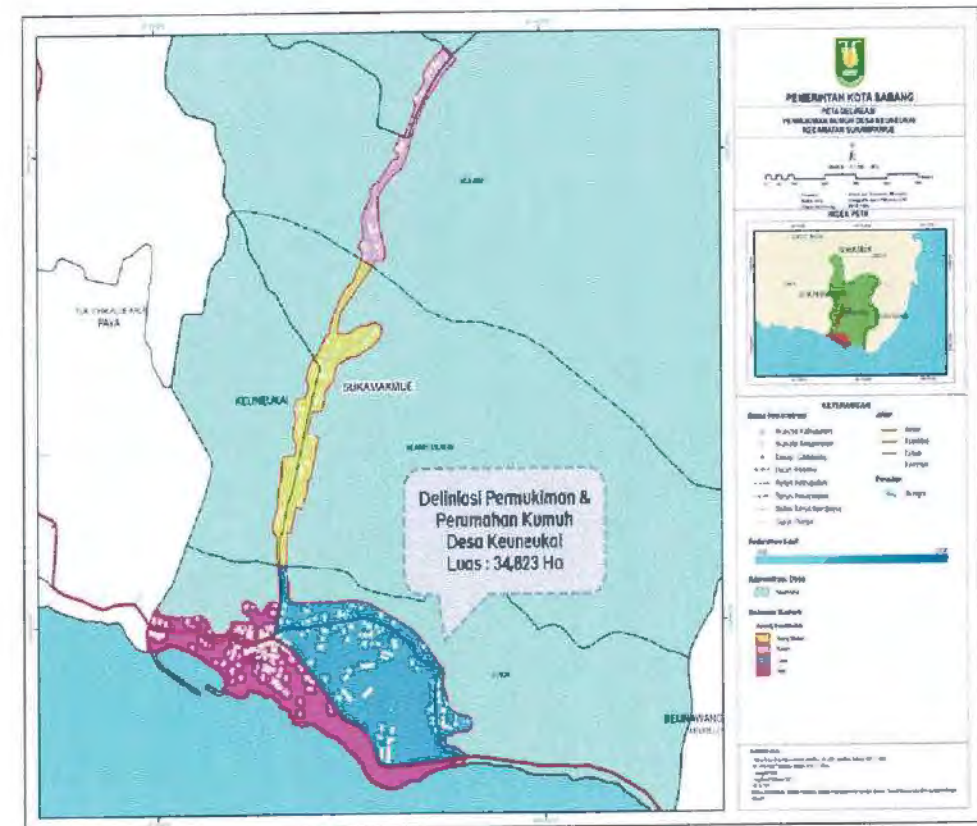


### BAB III

#### PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG

##### 3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Permukiman Kumuh Dan Luasan Verifikasi

Sebaran permukiman kumuh Kota Sabang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut

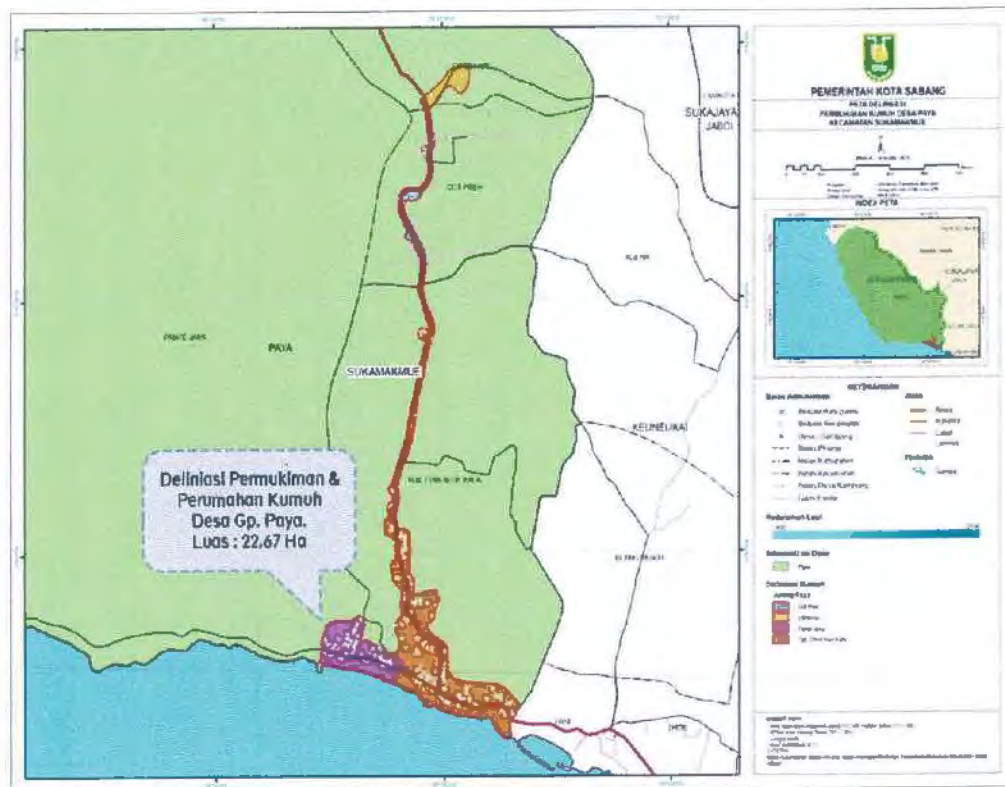


Gambar 3.1 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh  
Gampong Keuneukai

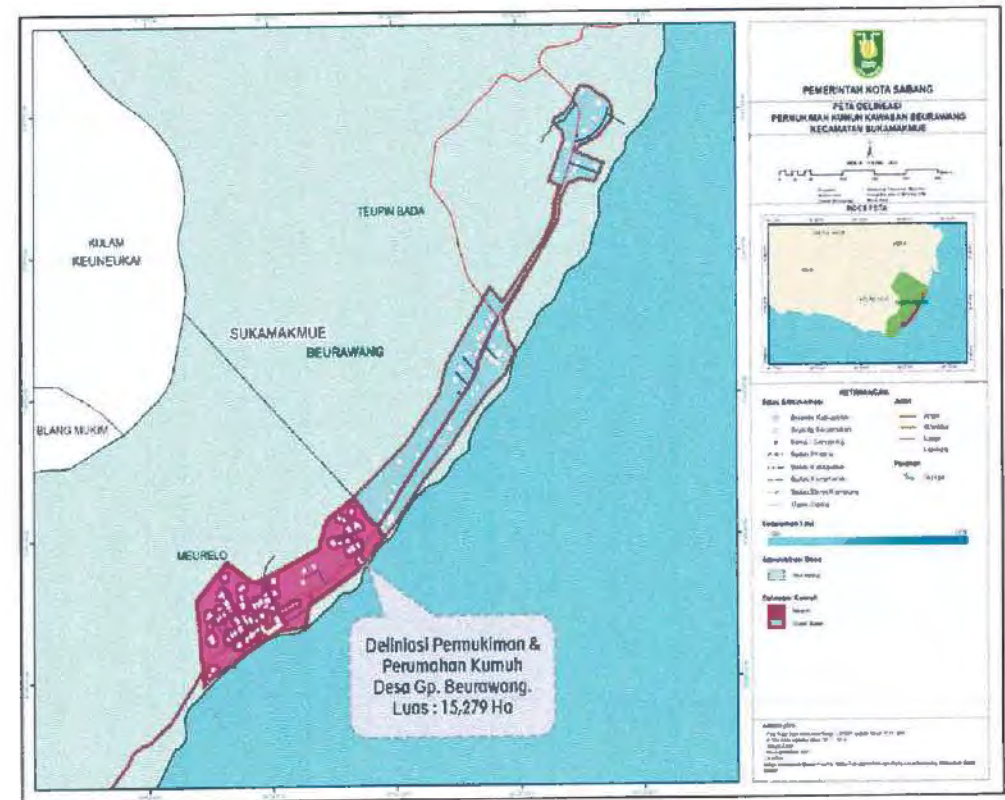
Table 3.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang Berdasarkan SK No. 650/351/2020

| NO | KECAMATAN | KAWASAN                  | GAMPONG     | JURONG                | LUAS DELINIASI KUMUH (HA) | TOTAL DELINIASI KAWASAN (HA) |
|----|-----------|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | Sukajaya  | Kawasan Paya - Keuneukai | Keuneukai   | Lhok                  | 16,002                    | 57,495                       |
|    |           |                          |             | Pasi                  | 10,809                    |                              |
|    |           |                          |             | Kulam                 | 2,52                      |                              |
|    |           |                          |             | Blang Mukim           | 5,492                     |                              |
|    |           |                          | Paya        | Pante Jaya            | 4,457                     |                              |
|    |           |                          |             | Tgk. Chok Alue Kala   | 15,088                    |                              |
|    |           |                          |             | Cot Preh              | 1,894                     |                              |
|    |           |                          |             | Ditremon              | 1,233                     |                              |
| 2  | Sukajaya  | Kawasan Beurawang        | Beurawang   | Teupin Bada           | 8,348                     | 15,279                       |
|    |           |                          |             | Meurelo               | 6,931                     |                              |
| 3  | Sukajaya  | Kawasan Jaboi            | Jaboi       | Meunasah Tuha         | 9,322                     | 23,928                       |
|    |           |                          |             | Tgk. Di Jaboi         | 5,133                     |                              |
|    |           |                          |             | Lamkuta               | 3,89                      |                              |
|    |           |                          |             | Gampong Baroe         | 5,583                     |                              |
| 4  | Sukakarya | Kawasan Krueng Raya      | Krueng Raya | Batu Singa Berfakta   | 9,24                      | 27,011                       |
|    |           |                          |             | Lhok Drien            | 3,039                     |                              |
|    |           |                          |             | Mustika Kolam Bermata | 7,161                     |                              |
|    |           |                          |             | Teupin Cirik          | 7,571                     |                              |
|    |           |                          |             |                       |                           | 123,713 Ha                   |



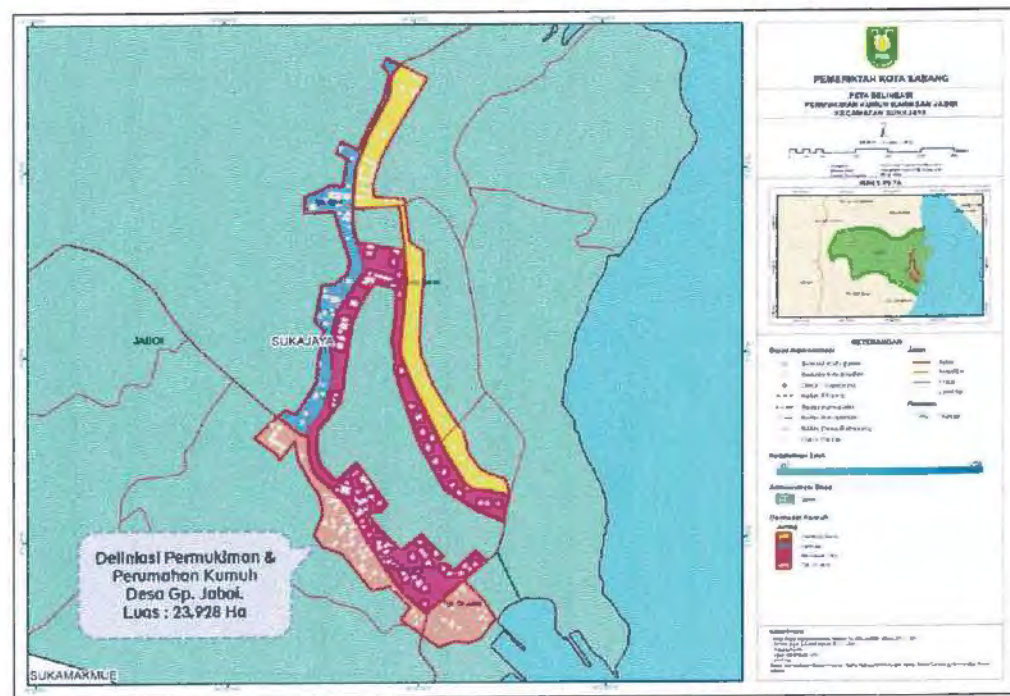


Gambar 3.2 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Paya

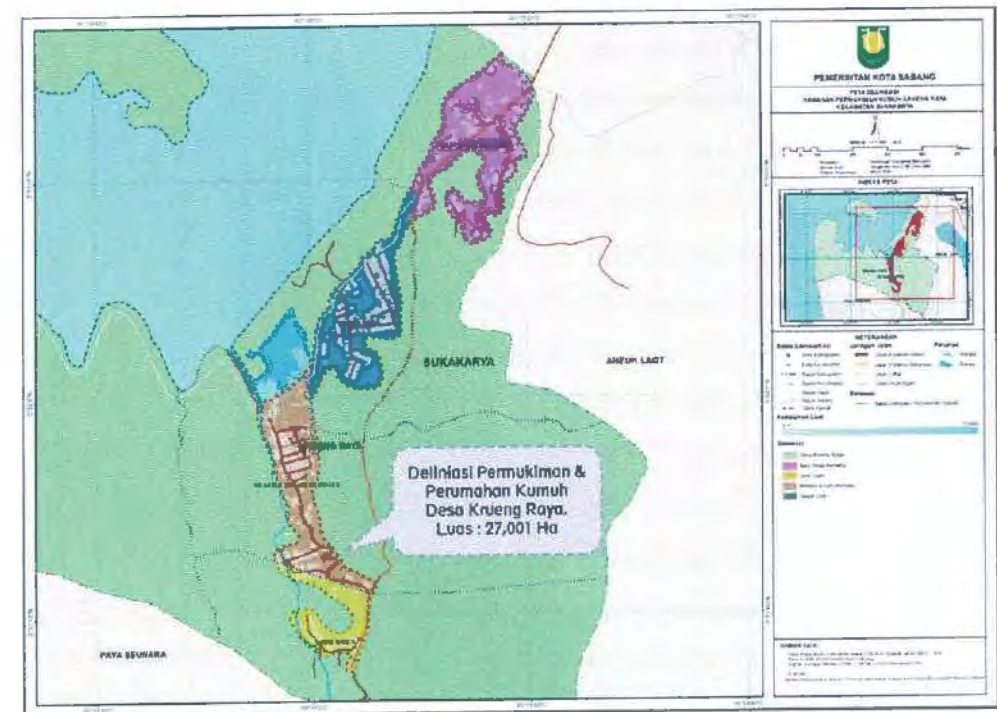


Gambar 3.3 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Beurawang





Gambar 3.4 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Jaboi



Gambar 3.5 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Krueng Raya

Selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan secara menyeluruh dilokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Sabang berdasarkan baseline awal yang menjadi dasar pembentukan SK. Berdasarkan verifikasi dan sinkronasi yang dilakukan, sebaran lokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Sabang SK Walikota, berikut ditampilkan detail hasil verifikasi:

Table 3.2 Hasil Verifikasi Luasan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Sabang

| No | Kecamatan  | Kawasan        | Kelurahan/Gampong | Luas SK (Ha) | Luas Verifikasi (Ha) | Tingkat Kekumuhan |
|----|------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1  | Sukamakmue | Paya-Keuneukai | Paya              | 22,672       | 22,672               | Kumuh Ringan      |
| 2  | Sukamakmue |                | Keuneukai         | 34,823       | 34,823               | Kumuh Ringan      |
| 3  | Sukamakmue | Beurawang      | Beurawang         | 15,279       | 15,279               | Kumuh Ringan      |
| 4  | Sukajaya   | Jaboi          | Jaboi             | 23,928       | 23,928               | Kumuh Ringan      |
| 5  | Sukakarya  | Krueng Raya    | Krueng Raya       | 27,011       | 27,011               | Kumuh Ringan      |
|    |            |                |                   | 123,713      | 123,713              |                   |

### 3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Dan Gambaran Kelembagaan Lokal

#### 3.2.1 Profil Kawasan Permukiman Kumuh

Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang disusun berdasarkan pendataan Data baseline kumuh. Data baseline adalah data 100-0-100, merupakan data yang terkait akses air minum (100 kiri), pengurangan kawasan kumuh (0) dan yang terkait dengan akses sanitasi yang layak (100 kanan). Data tersebut terdiri dari data fisik dan non fisik terkait dengan 7 indikator kumuh.

Data fisik mencakup :

- 1) Kondisi bangunan hunian, meliputi keteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kondisi fisik bangunan.
- 2) Jalanan lingkungan.
- 3) Drainase lingkungan.
- 4) Pembuangan air limbah.
- 5) Penyediaan air minum/baku.
- 6) Pengelolaan persampahan.
- 7) Pengamanan Bahaya Kebakaran

Data non fisik bangunan meliputi :

- 1) Legalitas Pendirian Bangunan

2). Kepadatan ...

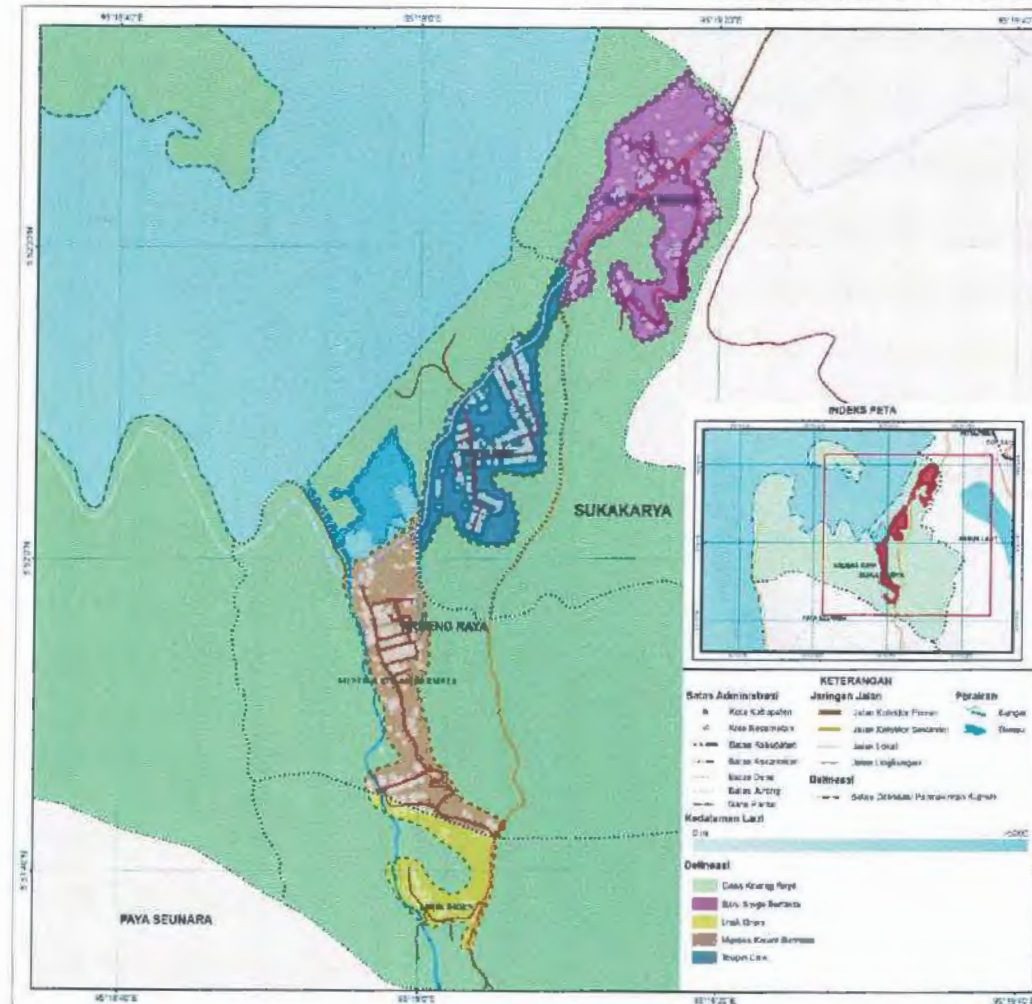
Fl

- 2) Kepadatan Penduduk
- 3) Mata Pencarian Penduduk
- 4) Pembangunan Daya Listrik
- 5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 6) Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Metode pendataan baseline melalui FGD digunakan pada saat penggalan data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detail juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas kecil) untuk menggali data utama. Metode pendataan baseline melalui wawancara, digabungkan dengan teknik FGD dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis dusun. Metode pendataan baseline melalui transek, akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klasifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.



Tabel 3.3 Profil Kumuh Gampong Krueng Raya.



| INFORMASI UMUM  |   | SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH |                       |                 |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi             | Krueng Raya Krueng Raya Sukakarya Sabang Aceh | No                       | Nama Dusun            | Luas Kumuh (Ha) |
| Luas Deliniasi Kumuh                                  | 27,011  | 1                        | Batu Singa Berfakta   | 9,24            |
| Koordinat Latitude Longitude                          |   | 2                        | Lhok Drien            | 3,04            |
| Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumlah KK             | 332 Unit 1.220 Jiwa 294 KK                    | 3                        | Mustika Kolam Bermata | 7,16            |
| Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh |   | 4                        | Teupin Cirik          | 7,57            |
| Kategori Kumuh  | Kumuh Ringan                                  |                          | Total                 | 27,011          |
| Tipologi Kumuh  | Permukiman Kumuh Pesisir Pantai               |                          |                       |                 |
| Karakteristik   | Kawasan Gampong Nelayan                       |                          |                       |                 |

|                   |                           |                         |                                  | Permasalahan Utama   |                 |           |                            |             |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|
|                   |                           |                         |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tersedia sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis</li> <li>• Kondisi jalan lingkungan belum memadai (&lt;2 M)</li> <li>• Kondisi drainase lingkungan yang buruk</li> </ul> <p>Sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai teknis.</p> |                 |           |                            |             |
| PERTIMBANGAN LAIN | BANGUNAN                  | LEGALITAS & TATUS TANAH |                                  | SOSIAL EKONOMI   |                 |           | JALAN LINGKUNGAN           |             |
|                   | Jumlah Bangunan           | 332 Unit                | Bangunan Ber IMB                 | 86 Rumah Tangga  | Jumlah penduduk | 1220 Jiwa | Total jaringan jalan       | 6.852 Meter |
|                   | Jumlah RTLH               | 82 Unit                 | Bangunan tidak memiliki IMB      | 246 Rumah Tangga   | Jumlah KK       | 294 KK    | Jalan rusak                | 2.542 Meter |
|                   | Ketidakteraturan Bangunan | 99 Unit                 |                                  |  | Jumlah MBR      | 180 KRT   | Jalan belum memadai (<2 m) |             |
|                   | Kepadatan Bangunan        | 0                       | Bangunan tidak sesuai peruntukan |  |                 |           | Kebutuhan jalan baru       | 2001 Meter  |

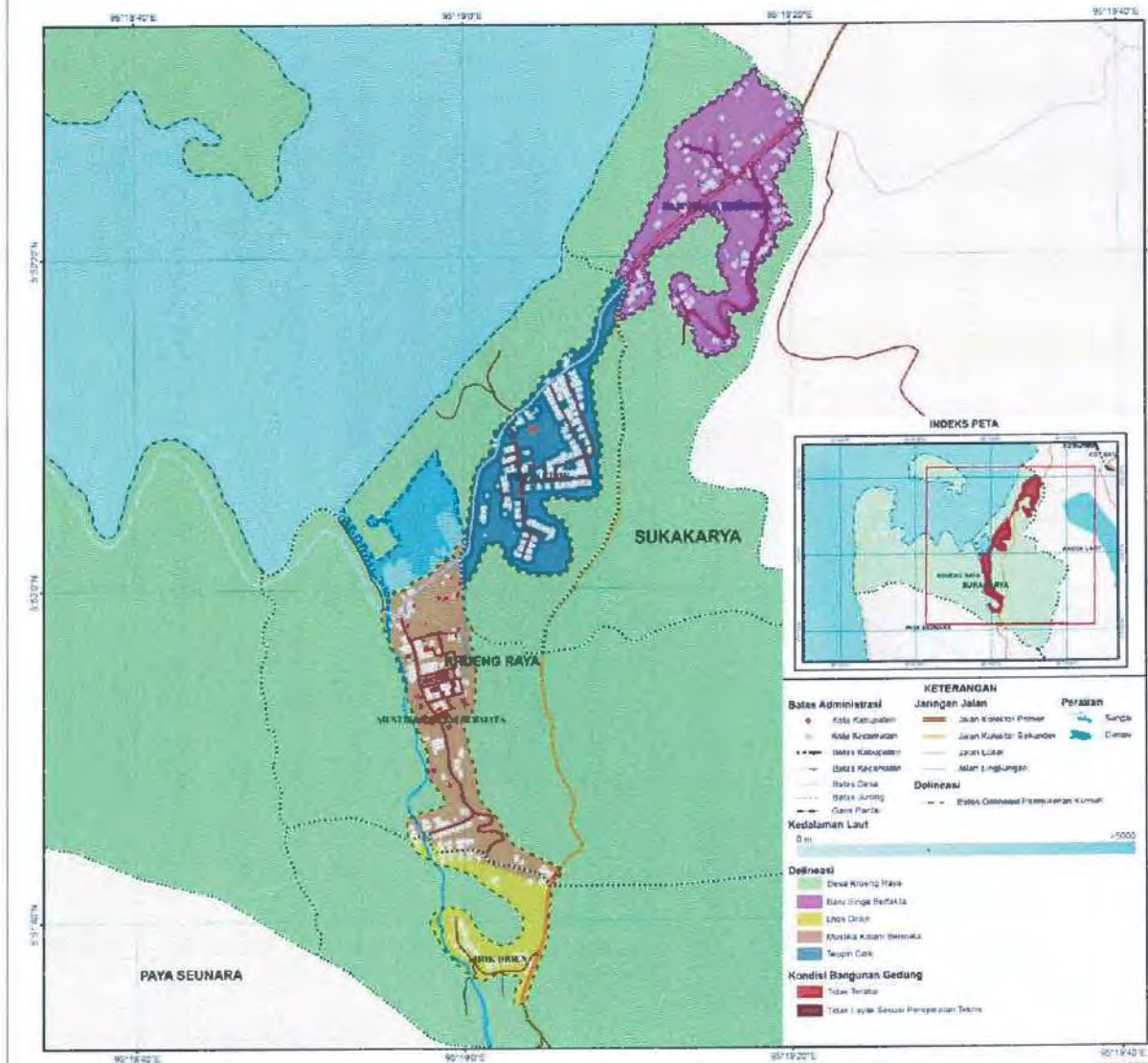




| AIR MINUM                              |        | DRAINASE                   |             | PENGOLAHAN LIMBAH  | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |   |         | KONDISI KEBAKARAN                              |          |
|--|--------|----------------------------|-------------|--|-------------------------|---|---------|--|----------|
| Jumlah KK                              | 294 KK | Panjang drainase eksisting | 3.600 Meter | Jumlah KK  | 294 KK                  | Jumlah KK   | 294 KRT | Jumlah KK                                      | 294 KK   |
| Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum | 14 KK  | Panjang drainase ideal     | 4.945 Meter | Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                   | 16 KK                   | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 294 KK  | Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 108 Unit |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 80 KK  | Luas genangan              | 2,00 Ha     | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 81 KK                   | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 285 KK  | Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran    | 332 Unit |



|   |  |                |                |   |   |  |  |  |  |
|---|--|----------------|----------------|---|---|--|--|--|--|
|   |  | Drainase rusak | 1.754<br>Meter |   |   |  |  |  |  |
|  |  |                |                |  |  |  |  |  |  |



### KONDISI BANGUNAN GEDUNG GP. KRUENG RAYA



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Jumlah Bangunan           | 294 Unit |
| Jumlah RTLH               | 22 Unit  |
| Ketidakteraturab Bangunan | 39 Unit  |
| Kepadatan Bangunan        | -        |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |



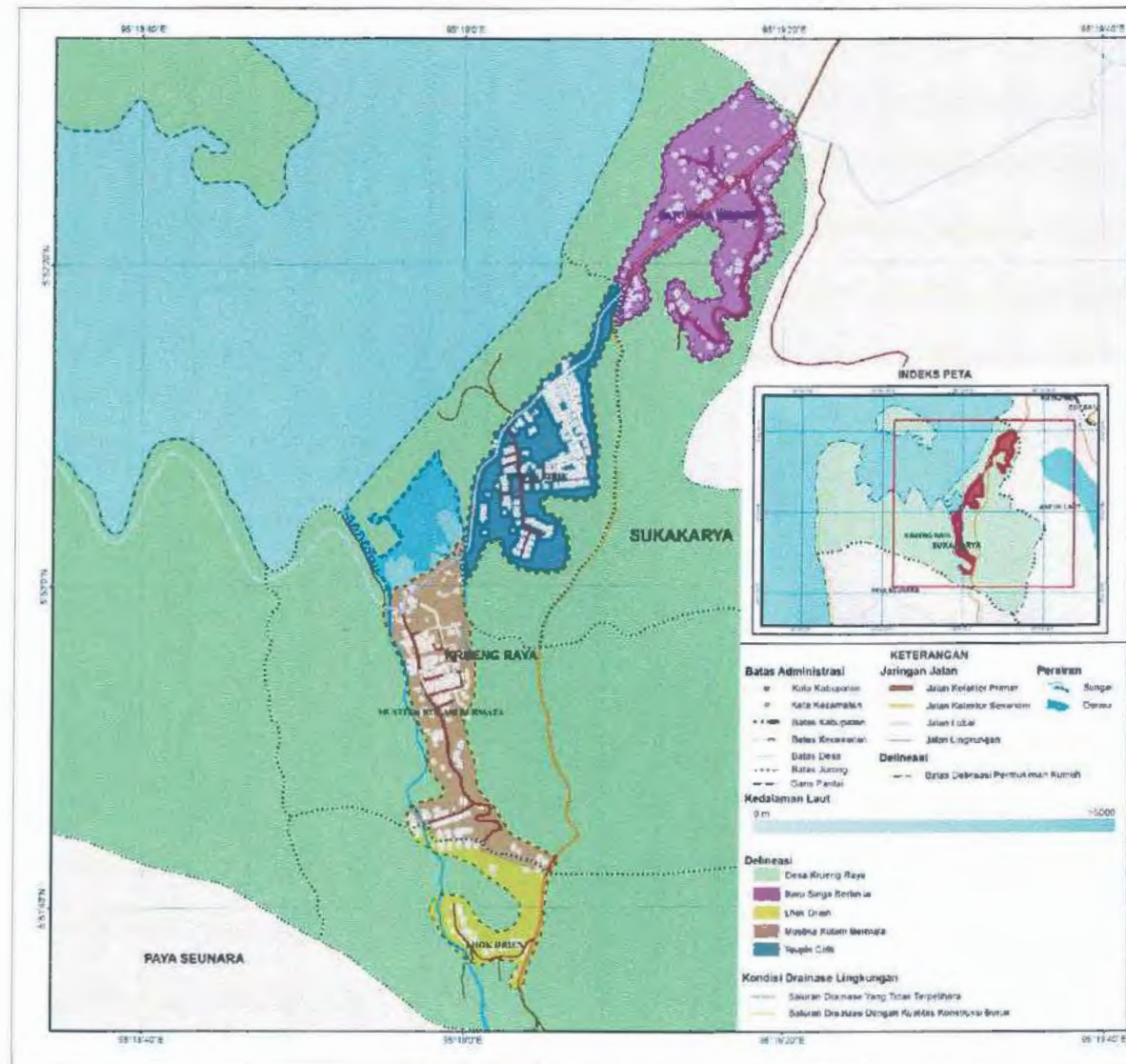


|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

11



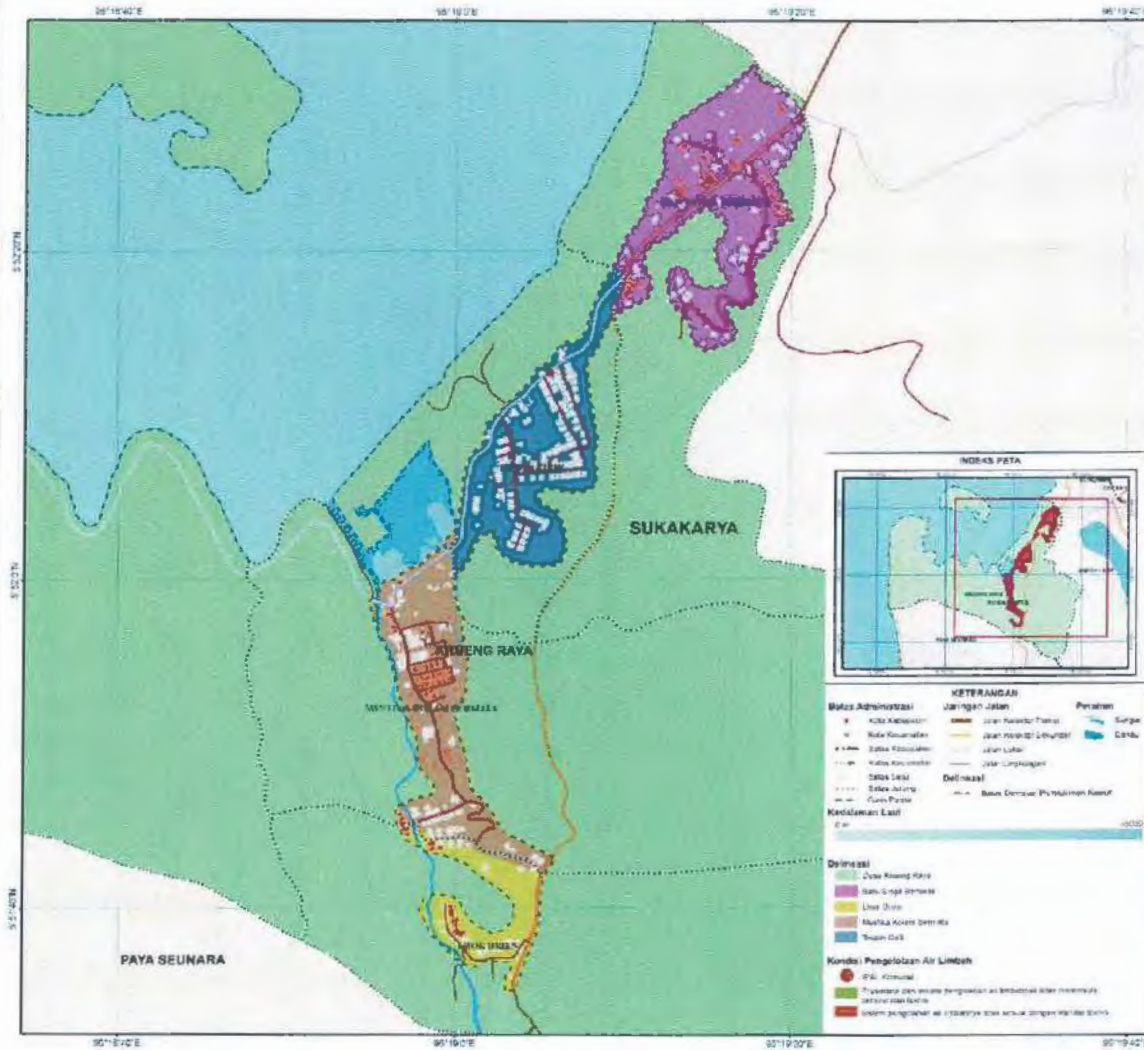


## KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GP. KRUENG RAYA



|   |        |
|---|--------|
| Jumlah KK                               | 294 KK |
| Ketidak tersediaan Akses Aman Air Minum | 14 KK  |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum  | 80 KK  |





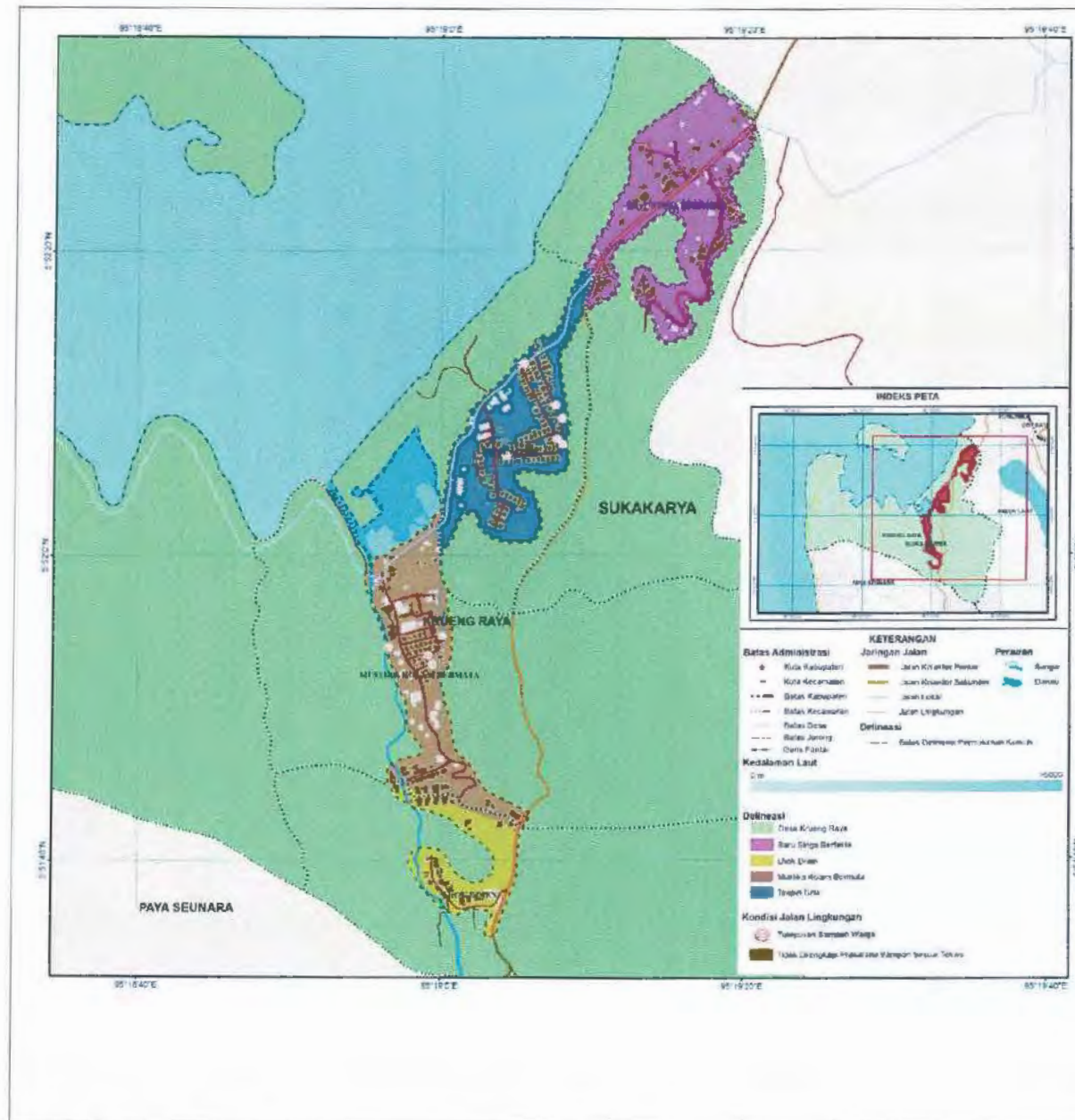
## KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GP KRUENG RAYA



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Panjang drainase eksisting | 3.600 Meter |
| Panjang drainase ideal     | 4.945 Meter |
| Luas genangan              | 2,00 Ha     |
| Drainase rusak             | 1.756 Meter |

Kondisi ...



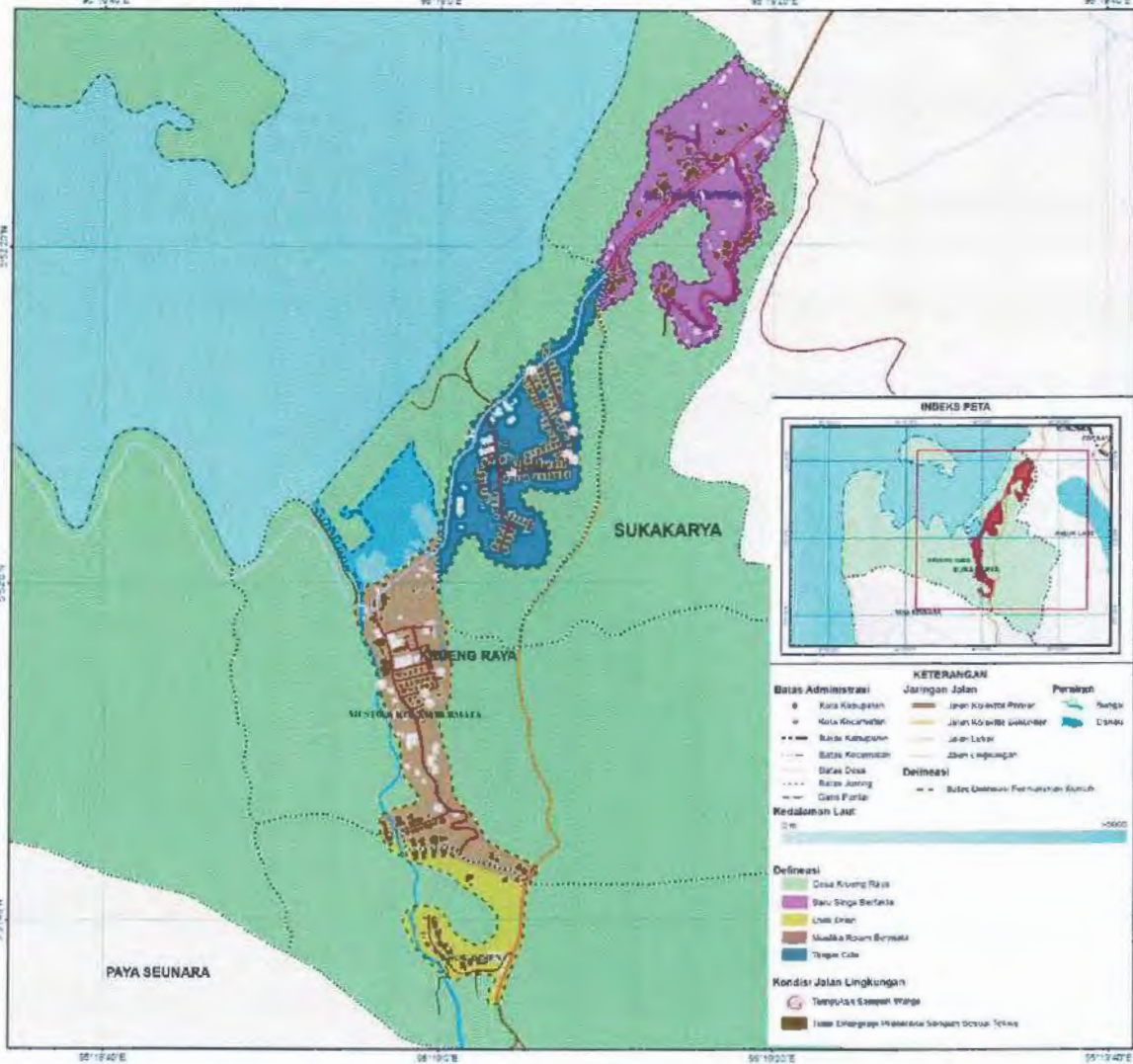


## KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GP. KRUENG RAYA



|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KK  | 294 KK |
| Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                   | 16 KK  |
| Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 81 KK  |





## KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GP. KRUENG RAYA



|   |        |
|---|--------|
| Jumlah KK   | 294 KK |
| Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 294 KK |
| Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 295 KK |





## KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GP. KRUENG RAYA

|   |          |
|---|----------|
| Jumlah KK   | 294 KK   |
| Ketidaktersediaan Prasarana<br>Proteksi Kebakaran | 108 Unit |
| Ketidaktersediaan Sarana Proteksi<br>Kebakaran    | 332 Unit |



## DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG KRUENG RAYA

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Krueng Raya berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Krueng Raya adalah 16, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.4 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Krueng Raya

| PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS |               |                 |              |  |
|--|---------------|-----------------|--------------|--|
| Provinsi   | : ACEH        | Luas SK         | : 27,01 Ha   |  |
| Kab/Kota   | : SABANG      | Luas Verifikasi | : 27,01 Ha   |  |
| Kecamatan  | : SUKAKARYA   | Jumlah Bangunan | : 332 Unit   |  |
| Kawasan  | : KRUENG RAYA | Jumlah Penduduk | : 1.220 Jiwa |  |
| Kelurahan  | : KRUENG RAYA | Jumlah KK       | : 294 KK     |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |              |            |       |
|---|---|--------------------------|--------------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                  | SAT.         | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 39,00                    | Unit         | 11,75%     | 0     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Pery Teknis Bangunan  | 22,00                    | Unit         | 6,68%      | 0     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | 1.401,00                 | Meter        | 16,90%     | 0     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 2.892,00                 | Meter        | 35,04%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                          |              | 17,52%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | 14,00                    | KK           | 4,76%      | 0     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 80,00                    | KK           | 27,21%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                          |              | 13,61%     |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakkampuan Mengalirkan Limpasan Air  | 2,00                     | Ha           | 7,40%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Drainase  | 1.943,00                 | Meter        | 27,20%     | 1     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 1.756,00                 | Meter        | 35,51%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                          |              | 20,90%     |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | 16,00                    | KK           | 5,45%      | 0     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 81,00                    | KK           | 27,55%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                          |              | 13,78%     |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 294,00                   | KK           | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 285,00                   | KK           | 96,94%     | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                          |              | 98,47%     |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | 108,00                   | Unit         | 32,58%     | 1     |
|   | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 332,00                   | Unit         | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                          |              | 66,27%     |       |
|   |   | TOTAL NILAI              | 21           |            |       |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN      |   | TINGKAT KEKUMUHAN        | KUMUH RINGAN |            |       |
| 30-39 KUMUH SEDANG                        |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL | 32,93%       |            |       |
| 10-19 KUMUH RINGAN                        |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |            |       |

| DS001-00000 |               |                 |            |  |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--|
| Provinsi    | : ACEH        | Luas SK         | : 9,24 Ha  |  |
| Kab/Kota    | : SABANG      | Luas Verifikasi | : 9,24 Ha  |  |
| Kecamatan   | : SUKAKARYA   | Jumlah Bangunan | : 129 Unit |  |
| Kawasan     | : KRUENG RAYA | Jumlah Penduduk | : 293 Jiwa |  |
| Kelurahan   | : KRUENG RAYA | Jumlah KK       | : 65 KK    |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |              |            |       |
|---|---|--------------------------|--------------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                  | SAT.         | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 1,00                     | Unit         | 0,81%      | 0     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Pery Teknis Bangunan  | 3,00                     | Unit         | 2,44%      | 0     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | 151,00                   | Meter        | 5,30%      | 0     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 1.420,00                 | Meter        | 49,81%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                          |              | 24,90%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | 1,00                     | KK           | 1,54%      | 0     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 15,00                    | KK           | 23,08%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakkampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Drainase  | -                        | Meter        | 0,00%      | 0     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 357,00                   | Meter        | 77,11%     | 5     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                          |              | 23,70%     |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | 4,00                     | KK           | 6,15%      | 0     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 15,00                    | KK           | 23,08%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 65,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 65,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                          |              | 100,00%    |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | 58,00                    | Unit         | 47,15%     | 1     |
|   | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 123,00                   | Unit         | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                          |              | 79,50%     |       |
|   |   | TOTAL NILAI              | 22           |            |       |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN      |   | TINGKAT KEKUMUHAN        | KUMUH RINGAN |            |       |
| 30-39 KUMUH SEDANG                        |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL | 32,93%       |            |       |
| 10-19 KUMUH RINGAN                        |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |            |       |

| DS003-00000 |               |                 |            |  |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--|
| Provinsi    | : ACEH        | Luas SK         | : 3,04 Ha  |  |
| Kab/Kota    | : SABANG      | Luas Verifikasi | : 3,04 Ha  |  |
| Kecamatan   | : SUKAKARYA   | Jumlah Bangunan | : 63 Unit  |  |
| Kawasan     | : KRUENG RAYA | Jumlah Penduduk | : 278 Jiwa |  |
| Kelurahan   | : KRUENG RAYA | Jumlah KK       | : 82 KK    |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |              |            |       |
|---|---|--------------------------|--------------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                  | SAT.         | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 11,00                    | Unit         | 17,46%     | 0     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Pery Teknis Bangunan  | 17,00                    | Unit         | 26,98%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                          |              | 14,80%     |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | 350,00                   | Meter        | 27,62%     | 1     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 247,00                   | Meter        | 19,49%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                          |              | 53,81%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | -                        | KK           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 20,00                    | KK           | 24,39%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakkampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Drainase  | -                        | Meter        | 0,00%      | 0     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 302,00                   | Meter        | 54,41%     | 3     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                          |              | 18,14%     |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | -                        | KK           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 19,00                    | KK           | 23,17%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 82,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 82,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                          |              | 100,00%    |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | -                        | Unit         | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 63,00                    | Unit         | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                          |              | 50,00%     |       |
|   |   | TOTAL NILAI              | 20           |            |       |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN      |   | TINGKAT KEKUMUHAN        | KUMUH RINGAN |            |       |
| 30-39 KUMUH SEDANG                        |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL | 27,28%       |            |       |
| 10-19 KUMUH RINGAN                        |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |            |       |

| DS004-00000 |               |                 |            |  |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--|
| Provinsi    | : ACEH        | Luas SK         | : 7,16 Ha  |  |
| Kab/Kota    | : SABANG      | Luas Verifikasi | : 7,16 Ha  |  |
| Kecamatan   | : SUKAKARYA   | Jumlah Bangunan | : 50 Unit  |  |
| Kawasan     | : KRUENG RAYA | Jumlah Penduduk | : 221 Jiwa |  |
| Kelurahan   | : KRUENG RAYA | Jumlah KK       | : 51 KK    |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |              |            |       |
|---|---|--------------------------|--------------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                  | SAT.         | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 23,00                    | Unit         | 45,00%     | 1     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Pery Teknis Bangunan  | 2,00                     | Unit         | 4,00%      | 0     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                          |              | 15,00%     |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | 650,00                   | Meter        | 29,08%     | 1     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 595,00                   | Meter        | 26,76%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                          |              | 27,92%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | 18,00                    | KK           | 25,49%     | 1     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 24,00                    | KK           | 47,06%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                          |              | 30,22%     |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakkampuan Mengalirkan Limpasan Air  | 2,00                     | Ha           | 27,98%     | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Drainase  | 775,00                   | Meter        | 87,77%     | 1     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 577,00                   | Meter        | 28,12%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                          |              | 32,27%     |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | 12,00                    | KK           | 23,53%     | 0     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 24,00                    | KK           | 47,06%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                          |              | 29,90%     |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 51,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 42,00                    | KK           | 82,35%     | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                          |              | 93,38%     |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | 50,00                    | Unit         | 100,00%    | 5     |
|   | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 50,00                    | Unit         | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                          |              | 100,00%    |       |
|   |   | TOTAL NILAI              | 29           |            |       |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN      |   | TINGKAT KEKUMUHAN        | KUMUH RINGAN |            |       |
| 30-39 KUMUH SEDANG                        |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL | 46,50%       |            |       |
| 10-19 KUMUH RINGAN                        |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |            |       |

| DS005-00000 |               |                 |            |  |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--|
| Provinsi    | : ACEH        | Luas SK         | : 7,57 Ha  |  |
| Kab/Kota    | : SABANG      | Luas Verifikasi | : 7,57 Ha  |  |
| Kecamatan   | : SUKAKARYA   | Jumlah Bangunan | : 96 Unit  |  |
| Kawasan     | : KRUENG RAYA | Jumlah Penduduk | : 428 Jiwa |  |
| Kelurahan   | : KRUENG RAYA | Jumlah KK       | : 96 KK    |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |              |            |       |
|---|---|--------------------------|--------------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                  | SAT.         | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 4,00                     | Unit         | 4,17%      | 0     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Pery Teknis Bangunan  | -                        | Unit         | 0,00%      | 0     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | 250,00                   | Meter        | 13,16%     | 0     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 627,00                   | Meter        | 33,00%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                          |              | 16,90%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | -                        | KK           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 21,00                    | KK           | 21,88%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakkampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                        | Ha           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Drainase  | 570,00                   | Meter        | 30,40%     | 1     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 520,00                   | Meter        | 27,78%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                          |              | 28,59%     |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | -                        | KK           | 0,00%      | 0     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 23,00                    | KK           | 23,96%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                          |              | 0,00%      |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 96,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 96,00                    | KK           | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                          |              | 100,00%    |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | -                        | Unit         | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 96,00                    | Unit         | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                          |              | 80,00%     |       |
|   |   | TOTAL NILAI              | 18           |            |       |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN      |   | TINGKAT KEKUMUHAN        | KUMUH RINGAN |            |       |
| 30-39 KUMUH SEDANG                        |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL | 28,55%       |            |       |
| 10-19 KUMUH RINGAN                        |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |            |       |



Tabel 3.5 ...



Tabel 3.5 Profil Kumuh Gampong Paya

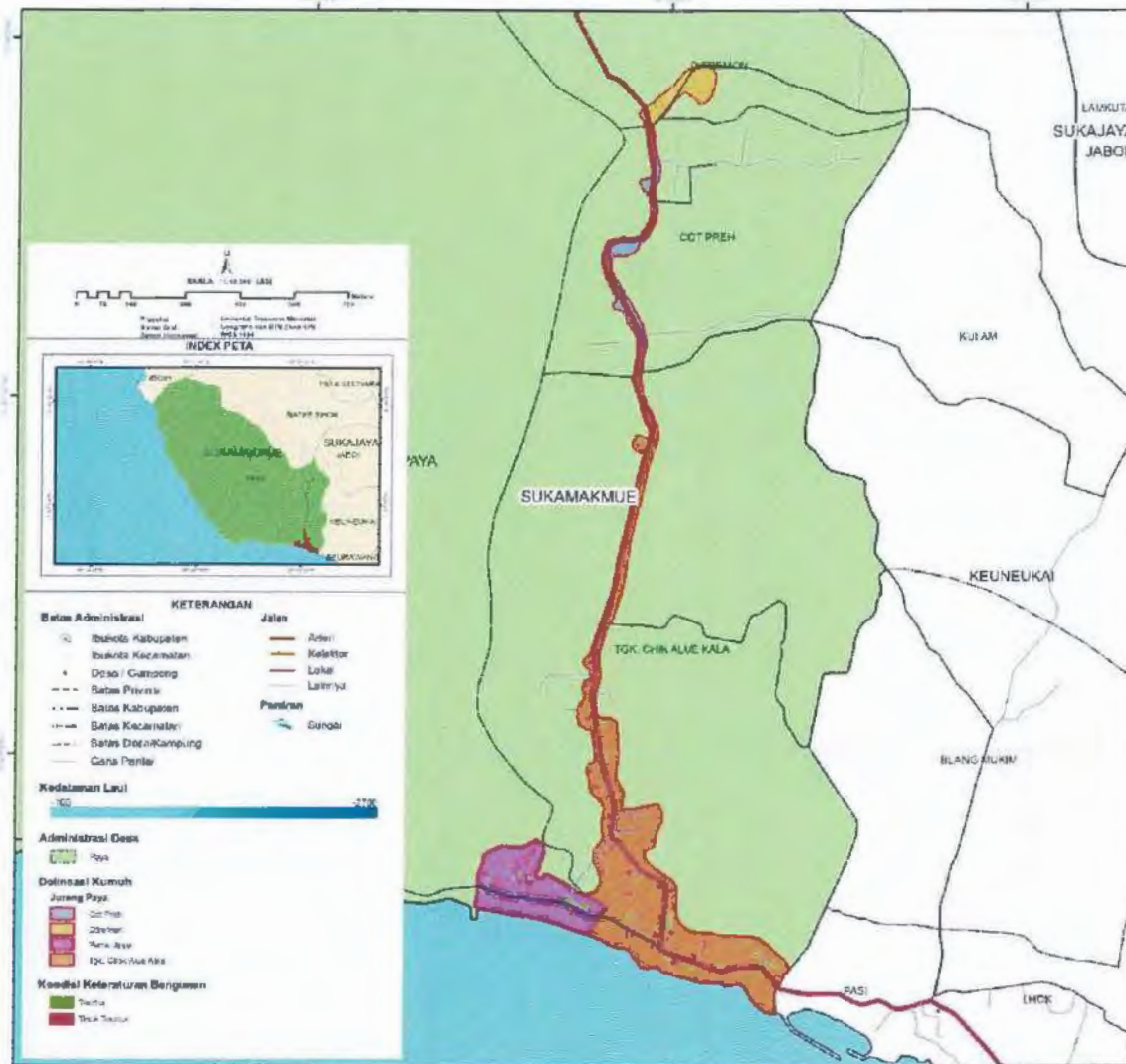
| INFORMASI UMUM                            |  | SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH                              |                     |                 |
|---|--|---|---------------------|-----------------|
| Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi | Paya Keuneukai Paya Sukamakmue Sabang Aceh | No  | Nama Dusun          | Luas Kumuh (Ha) |
| Luas Deliniasi Kumuh                      | 22,672                                     | 1   | Pante Jaya          | 4,457           |
| Koordinat Latitude Longitude              |  | 2   | Tgk. Chik Alue Kala | 15,088          |
| Jumlah Bangunan                           | 172 Unit                                   | 3   | Cot Preh            | 1,894           |
| Jumlah Penduduk                           | 606 Jiwa                                   | 4   | Tgk Di Tereumon     | 1,233           |
| Jumlah KK                                 | 131 KK                                     | Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh |                     |                 |
| Kategori Kumuh                            | Kumuh Ringan                               | Total   |                     | 22,672          |
| Tipologi Kumuh                            | Permukiman Kumuh Pesisir Pantai            |   |                     |                 |
| Karakteristik                             | Kawasan Gampong Nelayan                    |   |                     |                 |

|                   |                           |          |                                  |                          | Permasalahan Utama  |                |                            |                  |  |
|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------|--|
|                   |                           |          |                                  |                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan sesuai teknis</li><li>• Sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedia</li><li>• Kondisi drainase lingkungan yang buruk</li><li>• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum</li><li>• Ketidakteraturan bangunan</li></ul> |                |                            |                  |  |
| PERTIMBANGAN LAIN |                           | BANGUNAN |                                  | LEGALITAS & STATUS TANAH |   | SOSIAL EKONOMI |                            | JALAN LINGKUNGAN |  |
|                   | Jumlah Bangunan           | 172 Unit | Bangunan Ber IMB                 | 0                        | Jumlah penduduk   | 606 Jiwa       | Total jaringan jalan       | 18.913,93 Meter  |  |
|                   | Jumlah RTLH               | 37 Unit  | Bangunan tidak Ber IMB           | 172 Unit                 | Jumlah KK   | 131 KK         | Jalan rusak                | 2.242,51 Meter   |  |
|                   | Ketidakteraturan Bangunan | 86 Unit  | Rumah Tangga tidak memiliki SHM  | 28 Unit                  | Jumlah MBR  | 128 KK         | Jalan belum memadai (<2 m) | 0                |  |
|                   | Kepadatan Bangunan        | 0        | Bangunan tidak sesuai peruntukan | 0                        |   |                | Kebutuhan jalan baru       | 0                |  |

|  |  |                            |                |  |        |   |        |   |          |
|--|---|----------------------------|----------------|---|--------|---|--------|---|----------|
|  |   |                            |                |   |        |   |        |   |          |
| AIR MINUM                              |   | DRAINASE                   |                | PENGOLAHAN LIMBAH   |        | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |        | KONDISI KEBAKARAN                               |          |
| Jumlah KK                              | 131 KK  | Panjang drainase eksisting | 1.518,32 Meter | Jumlah KK   | 131 KK | Jumlah KK   | 131 KK | Jumlah Bangunan                                 | 172 Unit |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 2 KK  | Panjang drainase idela     | 1.518,32 Meter | Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                    | 25 KK  | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 131 KK | Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 127 Unit |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 35 KK   | Luas genangan              | 0              | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis  | 25 KK  | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 131 KK | Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran    | 172 Unit |



|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | Drainase rusak  | 424,6 Meter   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG PAYA

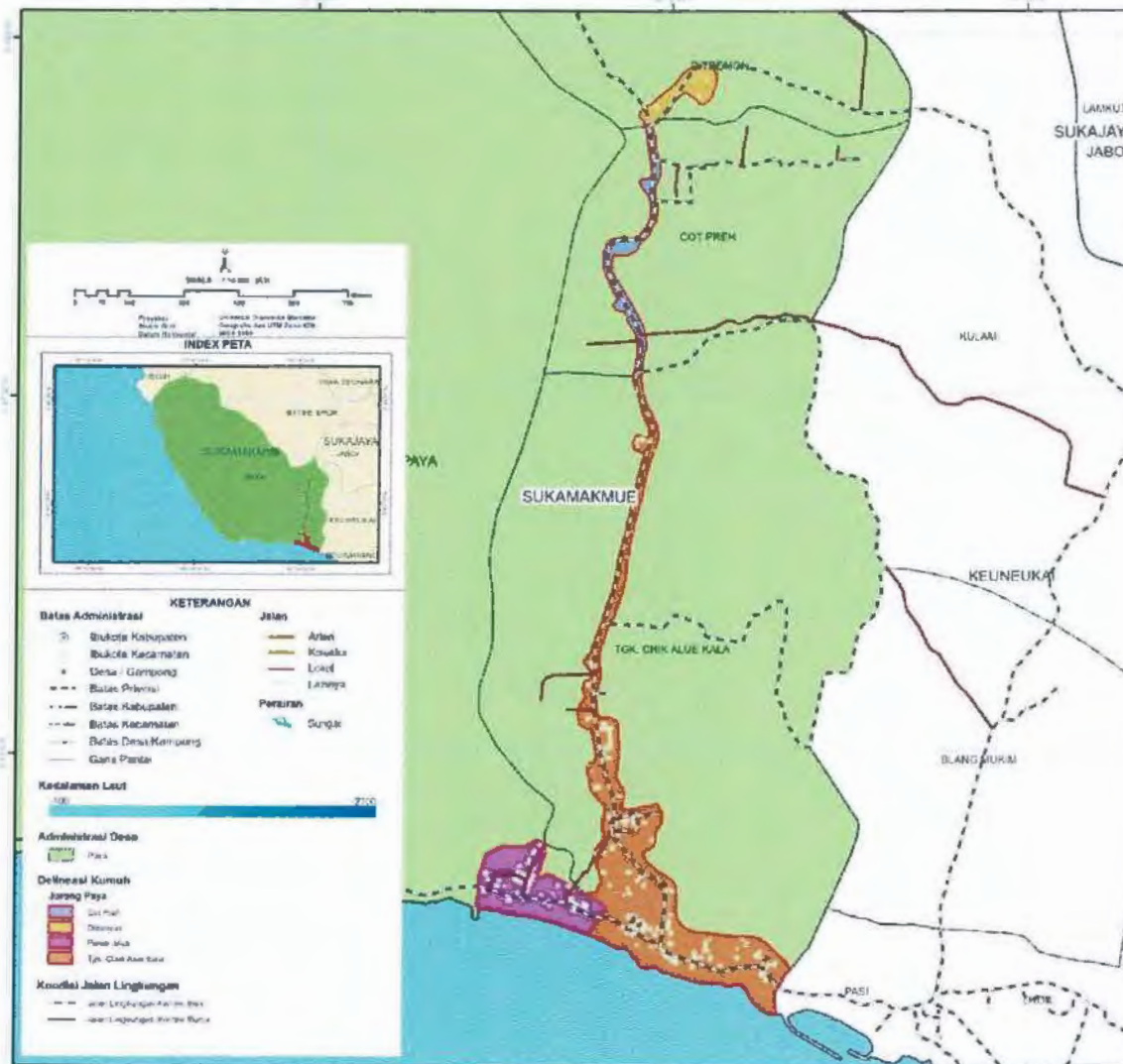


|  |          |
|--|----------|
| Jumlah Bangunan                        | 131 Unit |
| Jumlah RTLH                            | 37 Unit  |
| Ketidakteraturan Bangunan              | 86 Unit  |
| Kepadatan Bangunan                     | -        |
| Ketidaksesuaian dgn Persyaratan Teknis | 37 Unit  |
|  |          |

Kondisi ...



## KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG PAYA



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Total jaringan jalan | 18.913,93 Meter |
| Jalan rusak          | 2.242,93 Meter  |
| Kebutuhan jalan baru | 0 Meter         |
|                      |                 |

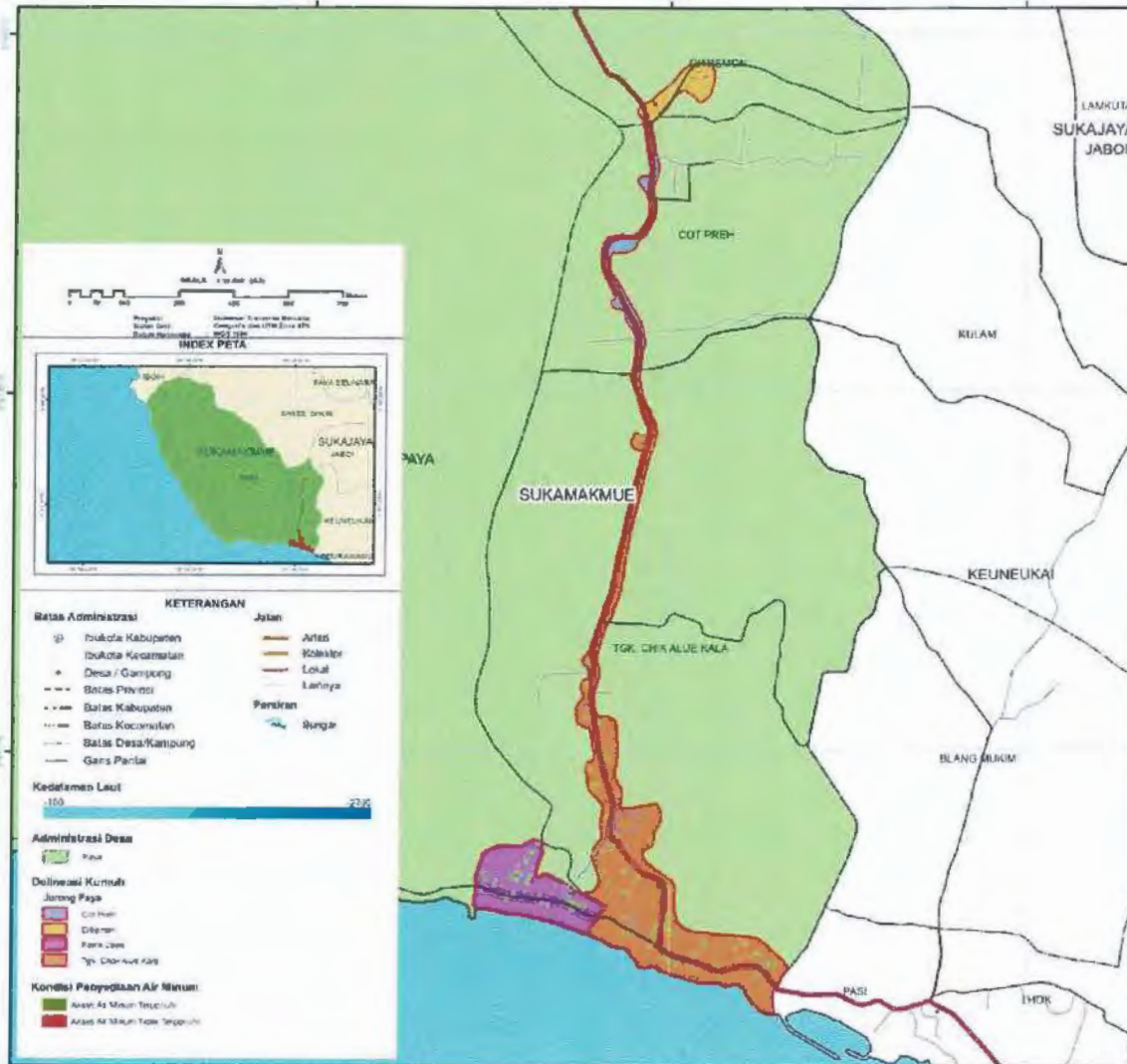


## KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG PAYA



|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KRT                             | 131 KK |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 2 KK   |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 35 KK  |

Kondisi ...



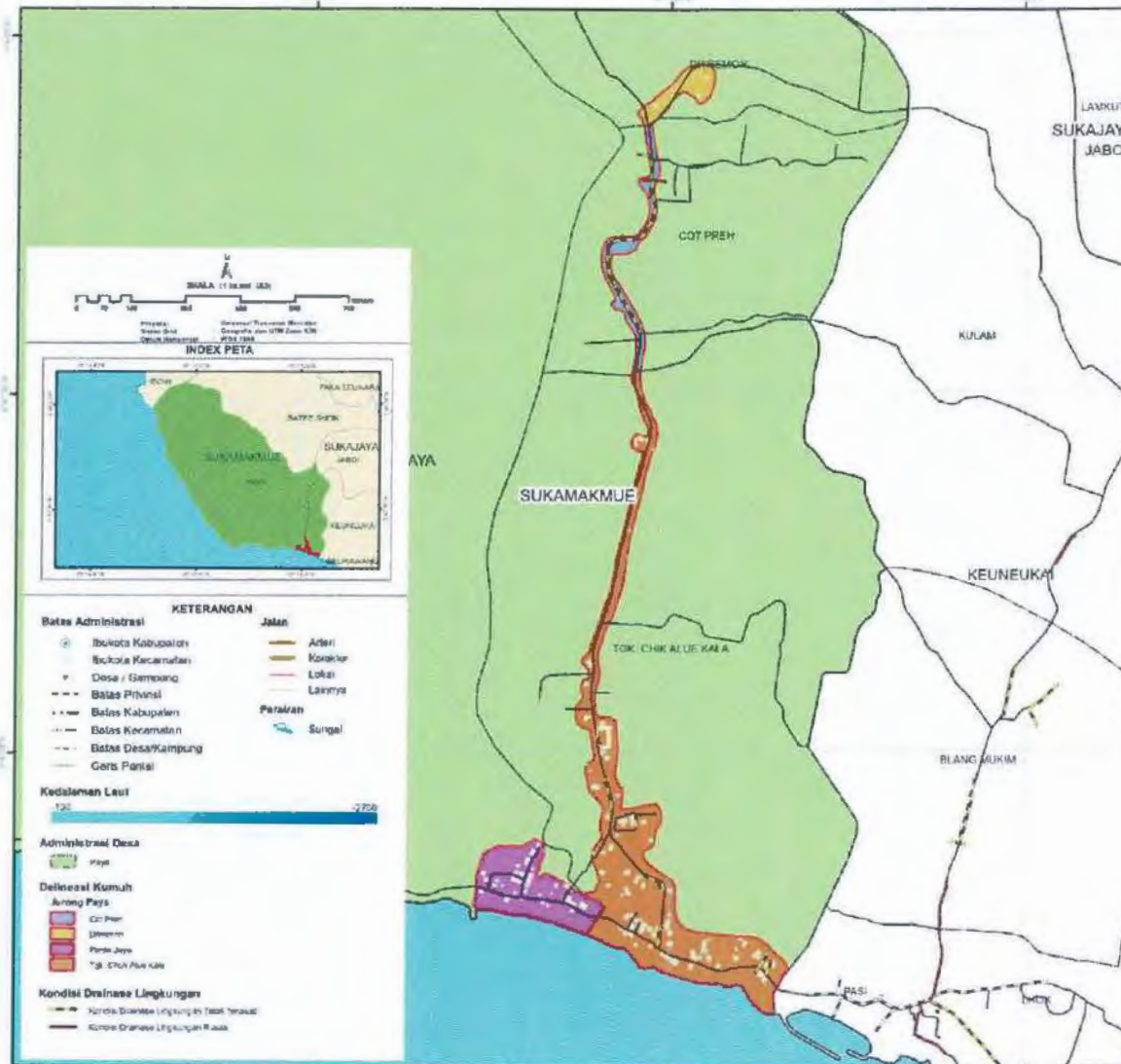


## KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG PAYA

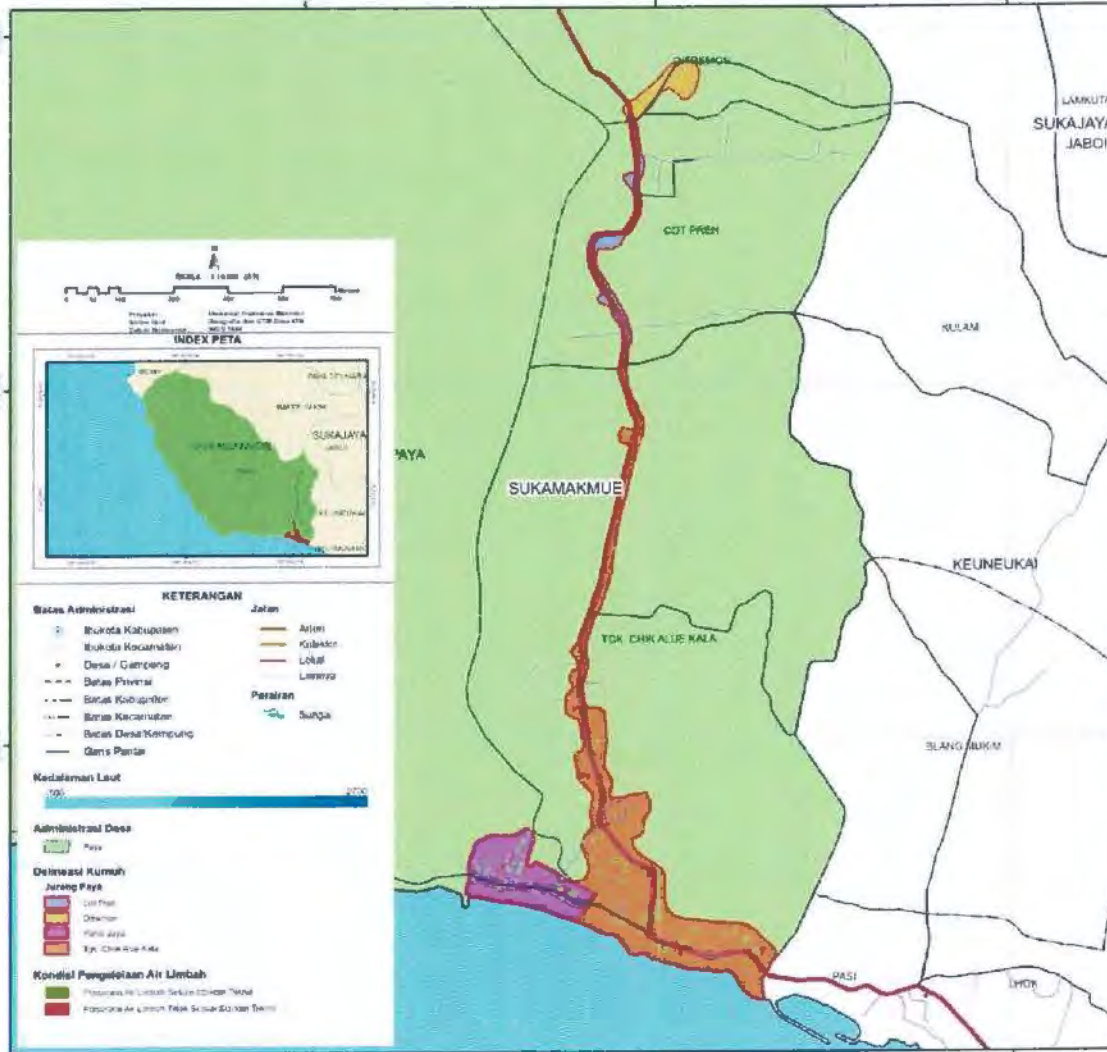


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Panjang drainase eksisting | 1.518,32 Meter |
| Panjang drainase idela     | 1.518,32 Meter |
| Luas genangan              | 0 Ha           |
| Drainase rusak             | 424,6 Meter    |

Kondisi ...







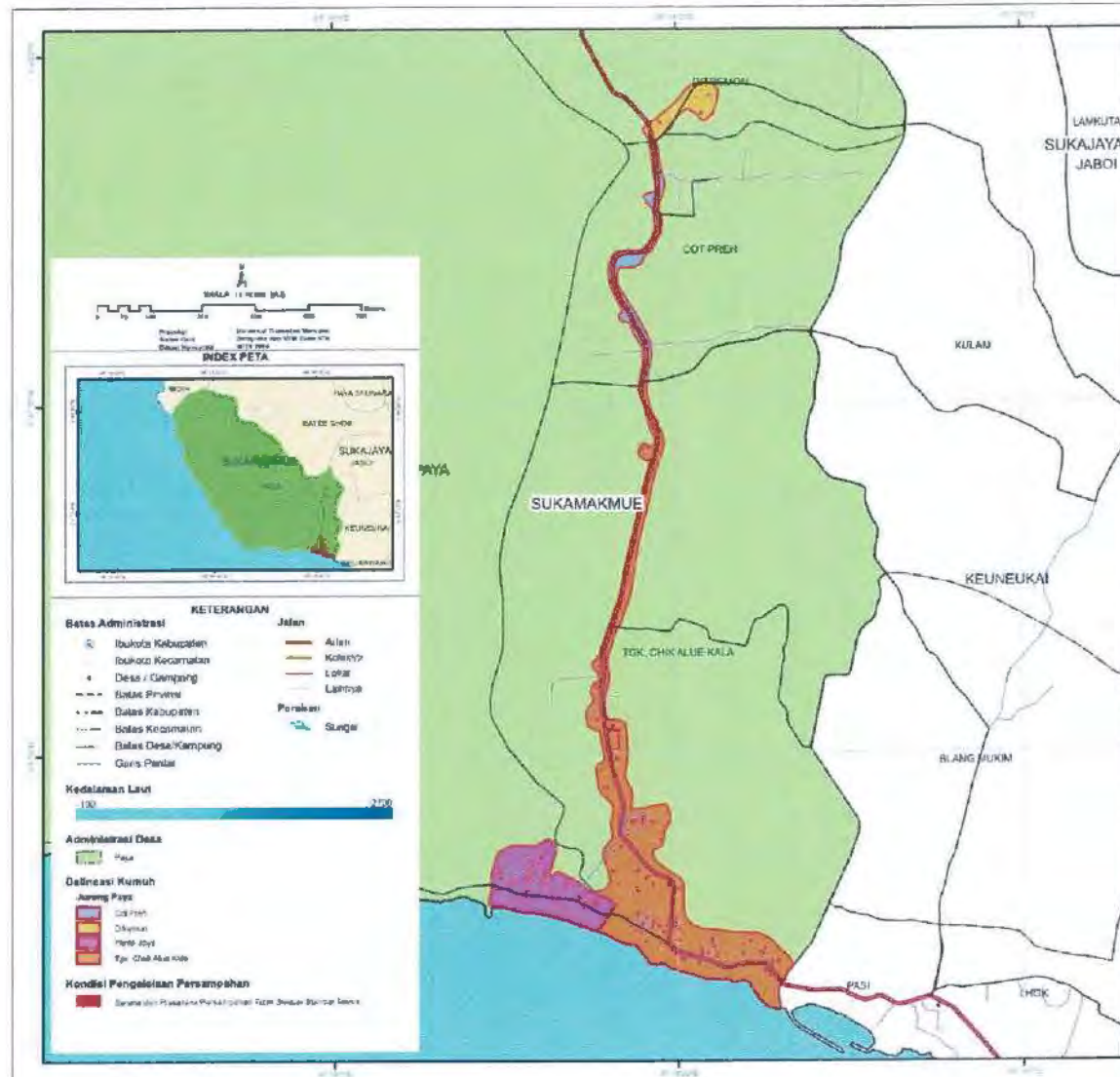
## KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG PAYA



|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KRT   | 131 KK |
| Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                   | 25 KK  |
| Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 25 KK  |

Kondisi ...



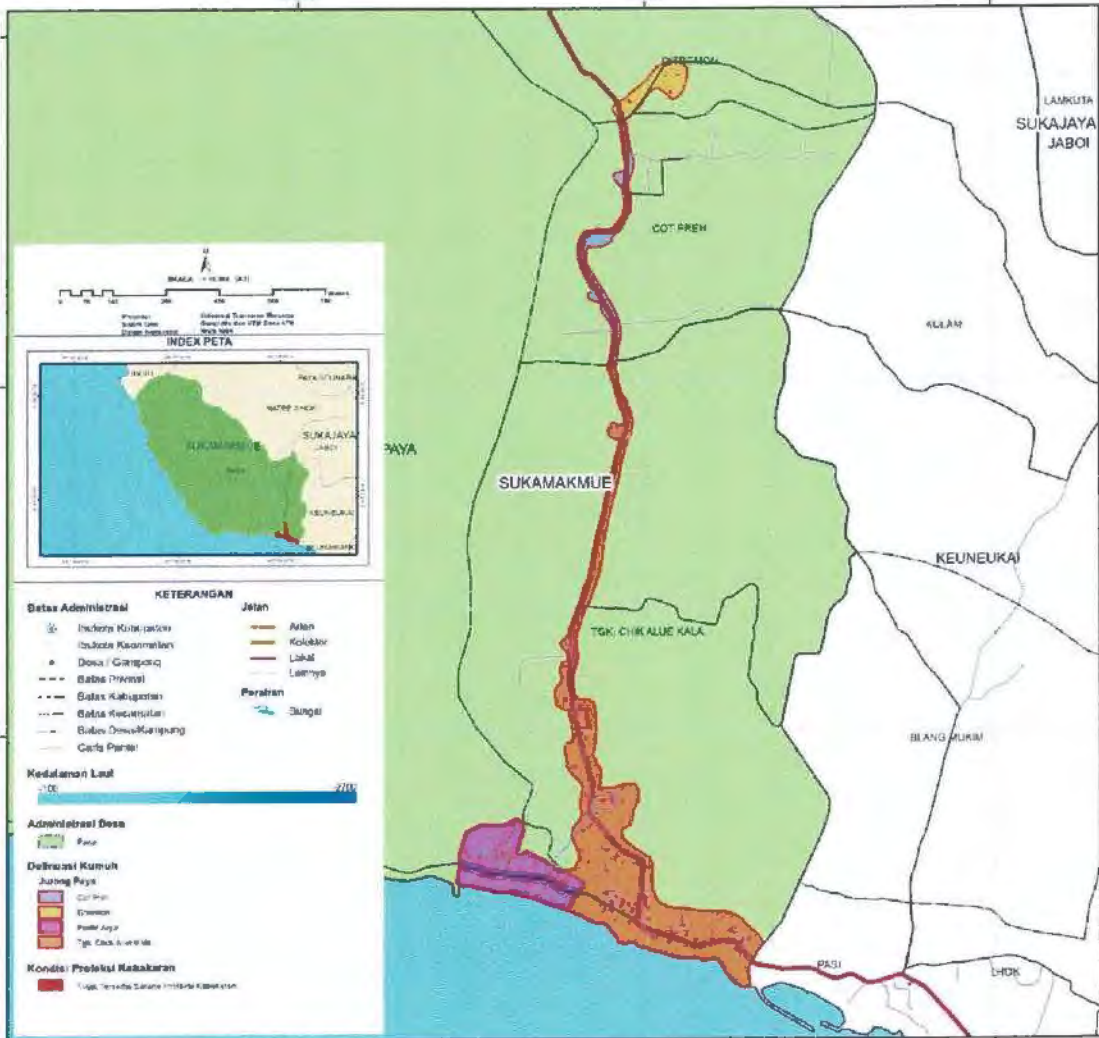


## KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG PAYA



|   |        |
|---|--------|
| Jumlah KRT  | 131 KK |
| Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 131 KK |
| Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 131 KK |





### KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GP. PAYA



|  |          |
|--|----------|
| Jumlah KRT                                     | 131 KK   |
| Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 127 Unit |
| Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran    | 172 Unit |



## DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG PAYA

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Paya berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.6. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Paya adalah 21, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.6 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Paya

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kawasan

Kelurahan

: ACEH

: KOTA SABANG

: SUKAMAKMUE

: PAYA KEUNEUKAI

: PAYA

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumlah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

22,67 Ha

22,67 Ha

172 Unit

606 jiwa

131 KK

ASPEK

KRITERIA

KONDISI AWAL (BASELINE)

NUMERIK

SATUAN

PROSEN (%)

NILAI

1. Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

86,00

Unit

50,00%

1

b. Kepadatan Bangunan

-

Ha

0,00%

0

c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan

37,00

Unit

21,51%

0

Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung

16,67%

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

-

Meter

0,00%

0

b. Kualitas Perumahan Jalan lingkungan

2.242,51

Meter

11,66%

0

Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan

0,00%

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

2,00

KK

1,53%

0

b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

35,00

KK

26,72%

1

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum

13,36%

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air

-

Ha

0,00%

0

b. Ketidaktersediaan Drainase

-

Meter

0,00%

0

c. Kualitas Konstruksi Drainase

424,64

Meter

27,97%

1

Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan

9,32%

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

25,00

KK

19,08%

0

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

25,00

KK

19,08%

0

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah

0,00%

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

131,00

KK

100,00%

5

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis

131,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan

100,00%

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

127,00

Unit

73,84%

3

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

172,00

Unit

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran

86,92%

TOTAL NILAI

21

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

32,32%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%

DS001-00000

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kawasan

Kelurahan

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumlah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

22,67 Ha

22,67 Ha

172 Unit

606 jiwa

131 KK

Cat Preh

30 KK

ASPEK

KRITERIA

KONDISI AWAL (BASELINE)

NUMERIK

SAT.

PROSEN (%)

NILAI

1. Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

12,00

Unit

40,00%

1

b. Kepadatan Bangunan

-

Ha

0,00%

0

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Bangunan

4,00

Unit

13,33%

0

Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung

13,33%

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

-

Meter

0,00%

0

b. Kualitas Perumahan Jalan lingkungan

821,97

Meter

31,26%

1

Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan

15,68%

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

2,00

KK

6,67%

0

b. Tidak terpengaruhnya Kebutuhan Air Minum

-

KK

0,00%

0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum

3,33%

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air

-

Ha

0,00%

0

b. Ketidaktersedian Drainase

-

Meter

0,00%

0

c. Kualitas Konstruksi Drainase

81,81

Meter

34,07%

0

Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan

9,00%

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

11,00

KK

36,67%

1

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

11,00

KK

36,67%

1

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah

36,67%

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

30,00

KK

100,00%

5

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis

30,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan

100,00%

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

-

Unit

0,00%

0

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

30,00

Unit

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran

50,00%

TOTAL NILAI

19

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

30,88%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%

DS002-00000

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kawasan

Kelurahan

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumlah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

0,46 Ha

0,46 Ha

61 Unit

202 jiwa

17 KK

Pante Jaya

17 KK

ASPEK

KRITERIA

KONDISI AWAL (BASELINE)

NUMERIK

SAT.

PROSEN (%)

NILAI

1. Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

46,00

Unit

73,77%

3

b. Kepadatan Bangunan

-

Ha

0,00%

0

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Bangunan

15,00

Unit

28,59%

0

Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung

34,88%

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

-

Meter

0,00%

0

b. Kualitas Perumahan Jalan lingkungan

215,41

Meter

2,74%

0

Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan

0,88%

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

-

KK

0,00%

0

b. Tidak terpengaruhnya Kebutuhan Air Minum

17,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum

90,00%

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air

-

Ha

0,00%

0

b. Ketidaktersedian Drainase

-

Meter

0,00%

0

c. Kualitas Konstruksi Drainase

234,05

Meter

76,34%

5

Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan

25,48%

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

11,00

KK

17,65%

0

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

11,00

KK

17,65%

0

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah

0,00%

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

17,00

KK

100,00%

5

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis

17,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan

100,00%

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

61,00

Unit

100,00%

5

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

61,00

Unit

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran

100,00%

TOTAL NILAI

23

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

42,86%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%

DS003-00000

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kawasan

Kelurahan

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumlah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

15,09 Ha

15,09 Ha

86 Unit

230 jiwa

66 KK

Tgk Chik Alue Kale

66 KK

ASPEK

KRITERIA

KONDISI AWAL (BASELINE)

NUMERIK

SAT.

PROSEN (%)

NILAI

1. Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

25,00

Unit

37,88%

1

b. Kepadatan Bangunan

-

Ha

0,00%

0

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Bangunan

12,00

Unit

18,18%

0

Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung

12,88%

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

-

Meter

0,00%

0

b. Kualitas Perumahan Jalan lingkungan

-

Meter

0,00%

0

Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan

0,00%

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

-

KK

0,00%

0

b. Tidak terpengaruhnya Kebutuhan Air Minum

-

KK

0,00%

0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum

0,00%

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air

-

Ha

0,00%

0

b. Ketidaktersedian Drainase

-

Meter

0,00%

0

c. Kualitas Konstruksi Drainase

118,78

Meter

30,88%

1

Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan

30,88%

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

11,00

KK

16,67%

0

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

11,00

KK

16,67%

0

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah

0,00%

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

66,00

KK

100,00%

5

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis

66,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan

100,00%

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

66,00

Unit

100,00%

5

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

66,00

Unit

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran

100,00%

TOTAL NILAI

22

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

31,82%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%

DS004-00000

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kawasan

Kelurahan

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumlah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

1,23 Ha

1,23 Ha

15 Unit

58 jiwa

18 KK

Tgk Di Teureumon

18 KK

ASPEK

KRITERIA

KONDISI AWAL (BASELINE)

NUMERIK

SAT.

PROSEN (%)

NILAI

1. Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

4,00

Unit

26,67%

1

b. Kepadatan Bangunan

-

Ha

0,00%

0

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Bangunan

6,00

Unit

40,00%

1

Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung

21,43%

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

-

Meter

0,00%

0

b. Kualitas Perumahan Jalan lingkungan

767,55

Meter

34,85%

1

Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan

17,43%

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

-

KK

0,00%

0

b. Tidak terpengaruhnya Kebutuhan Air Minum

18,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum

50,00%

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air

-

Ha

0,00%

0

b. Ketidaktersedian Drainase

-

Meter

0,00%

0

c. Kualitas Konstruksi Drainase

-

Meter

0,00%

0

Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan

0,00%

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

-

KK

0,00%

0

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

-

KK

0,00%

0

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah

0,00%

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

18,00

KK

100,00%

5

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis

18,00

KK

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan

100,00%

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

-

Unit

0,00%

0

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

15,00

Unit

100,00%

5

Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran

30,70%

TOTAL NILAI

23

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

34,24%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

30-59 KUMUH SEDANG

15-37 KUMUH RINGAN

<15 DIPERHATIKAN TIDAK KUMUH

TOTAL NILAI

21

TINGKAT KEKUMUHAN

KUMUH RINGAN

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL

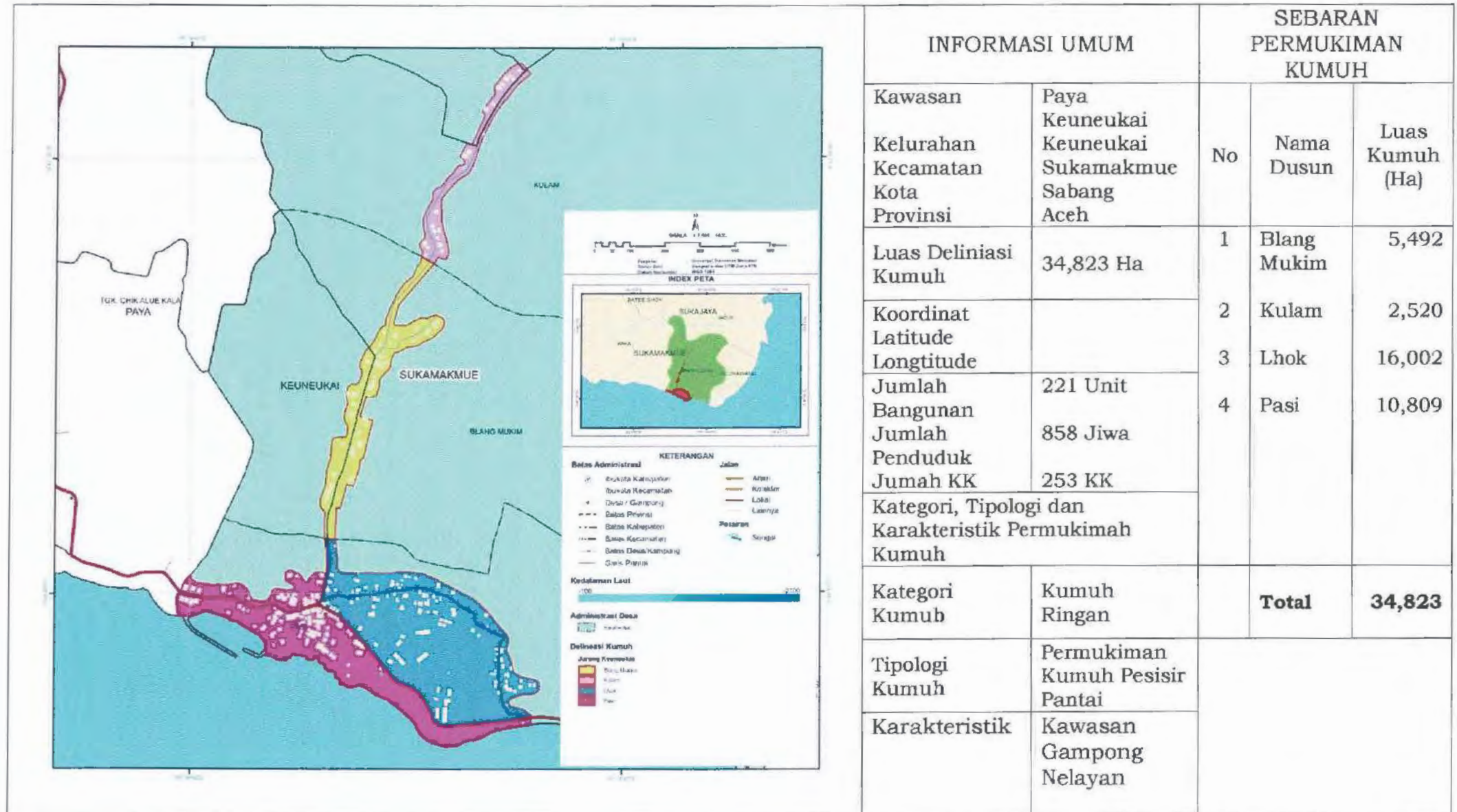
32,32%

KONTRIBUSI PENANGANAN

0,00%


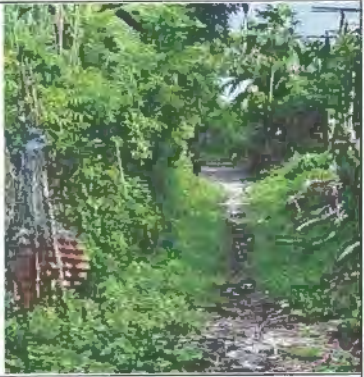


Tabel 3.7 Profil Kumuh Gampong Keuneukai





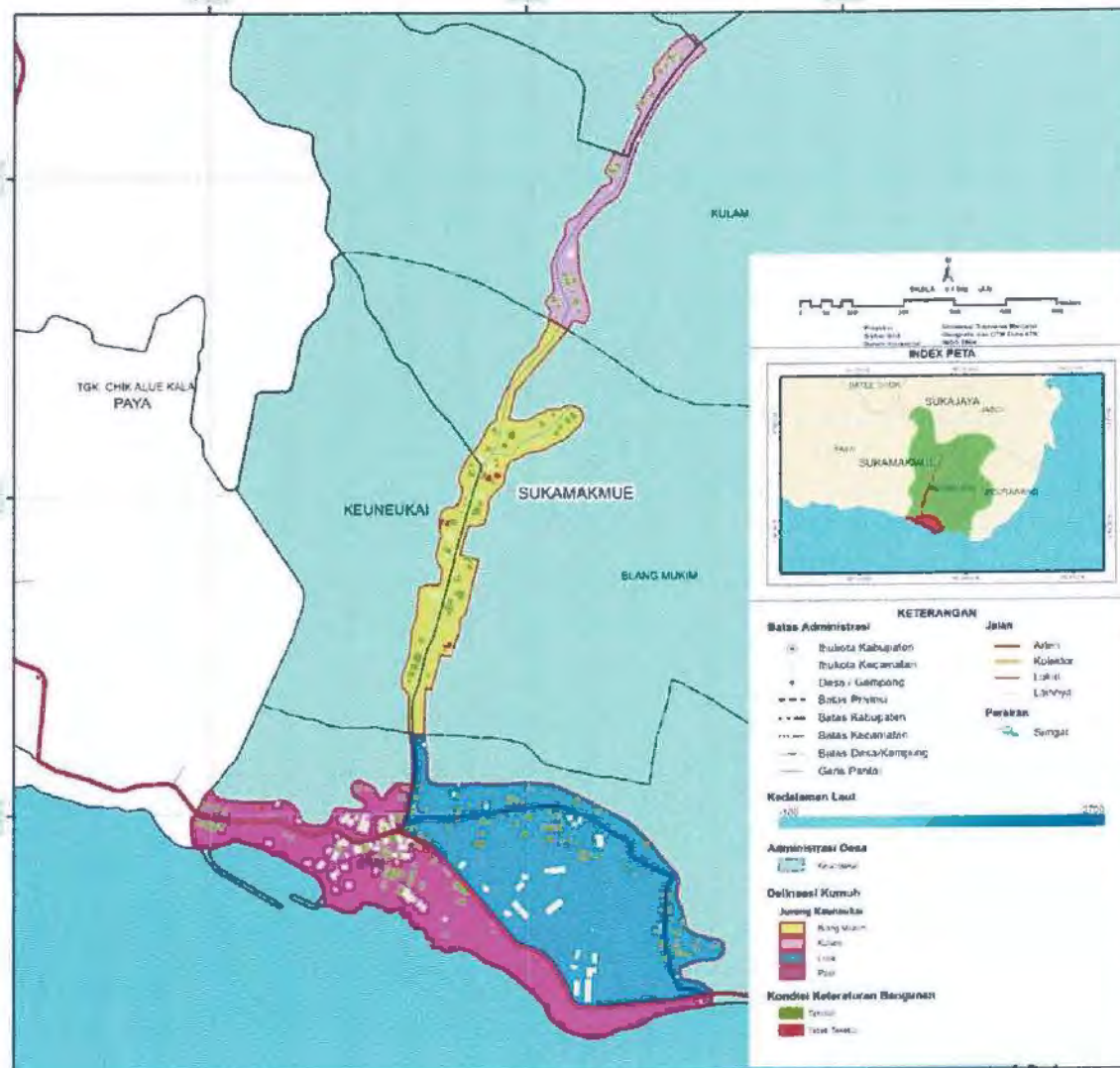
|                   |                           |          |                                  |                          | Permasalahan Utama   |                |                            |                  |  |
|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|--|
|                   |                           |          |                                  |                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan sesuai teknis</li><li>• Sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedia</li><li>• Kondisi drainase lingkungan yang buruk</li><li>• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum</li><li>• Ketidakteraturan bangunan</li></ul> |                |                            |                  |  |
| PERTIMBANGAN LAIN |                           | BANGUNAN |                                  | LEGALITAS & STATUS TANAH |  | SOSIAL EKONOMI |                            | JALAN LINGKUNGAN |  |
|                   | Jumlah Bangunan           | 221 Unit | Bangunan Ber IMB                 | 0                        | Jumlah Penduduk  | 858 Jiwa       | Total jaringan jalan       | 10.786,89 Meter  |  |
|                   | Jumlah RTLH               | 31 Unit  | Bangunan tidak Ber IMB           | 221 Unit                 | Jumlah KK  | 253 KK         | Jalan rusak                | 1.524,09 Meter   |  |
|                   | Ketidakteraturan Bangunan | 26 Unit  | Rumah Tangga tidak memiliki SHM  | 210 Unit                 | Jumlah MBR   | 128 KK         | Jalan belum memadai (<2 m) | 0                |  |
|                   | Kepadatan Bangunan        | 0        | Bangunan tidak sesuai peruntukan | 0                        |  |                | Kebutuhan jalan baru       | 0                |  |

|  |        |  |                |  |        |   |        |  |          |
|--|--------|--|----------------|--|--------|---|--------|---|----------|
|  |        |  |                |  |        |   |        |   |          |
| AIR MINUM                              |        | DRAINASE   |                | PENGOLAHAN LIMBAH  |        | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |        | KONDISI KEBAKARAN   |          |
| Jumlah KK                              | 253 KK | Panjang drainase eksisting   | 2.649,25 Meter | Jumlah KK  | 253 KK | Jumlah KK   | 253 KK | Jumlah Bangunan   | 221 Unit |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 0      | Panjang drainase ideal   | 2.649,25 Meter | Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                   | 0      | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 253 KK | Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                       | 80 Unit  |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 98 KK  | Luas genangan  | 0              | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 0      | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 203 KK | Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran  | 221 Unit |



|   |  |   |               |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|---------------|---|--|---|--|---|--|
|   |  | Drainase rusak  | 1.049,6 Meter |   |  |   |  |   |  |
|  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |

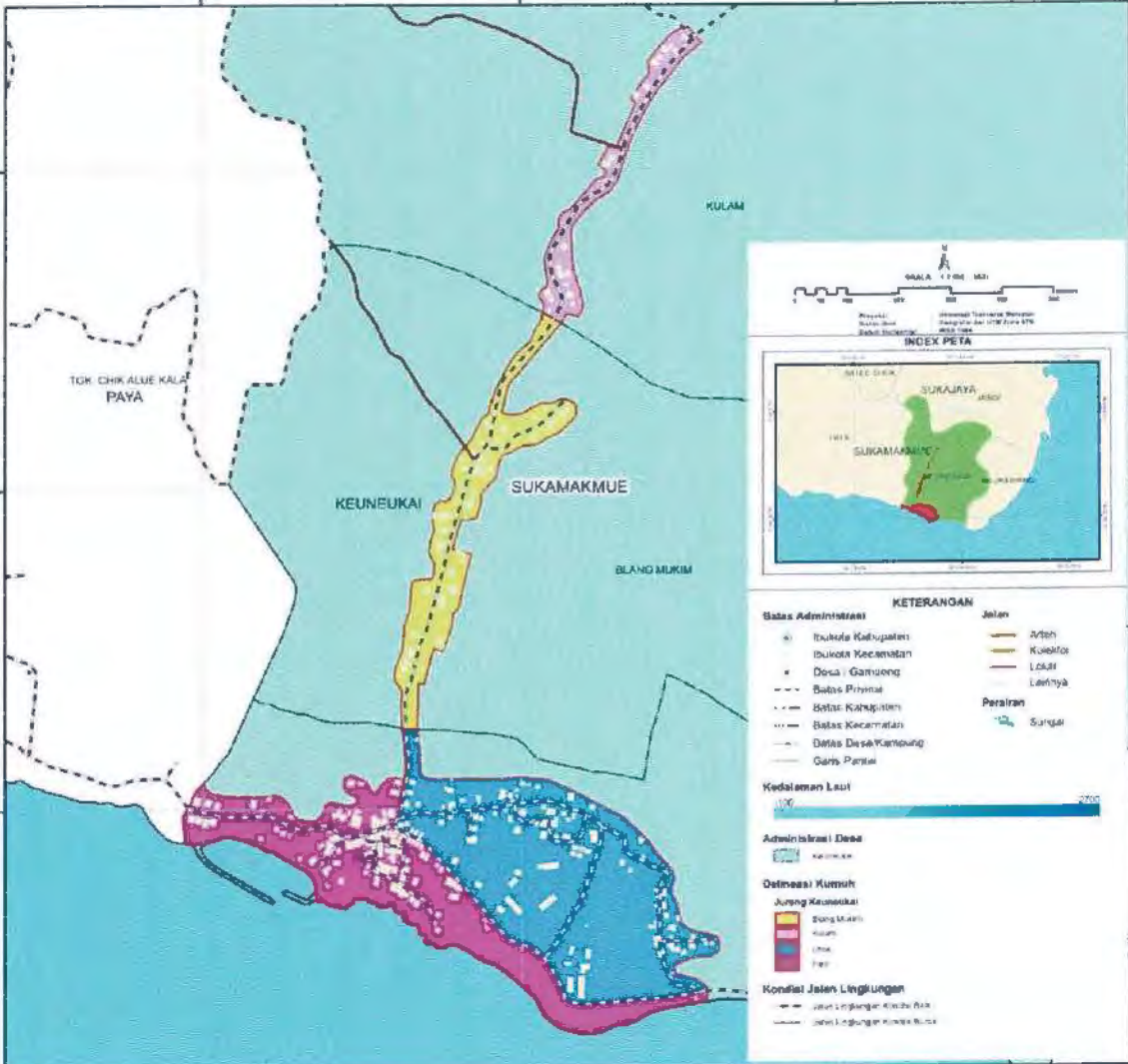
## KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG KEUNEUKAI



|  |          |
|--|----------|
| Jumlah Bangunan                          | 221 Unit |
| Jumlah RTLH                              | 31 Unit  |
| Ketidakteraturab Bangunan                | 26 Unit  |
| Kepadatan Bangunan                       | -        |
| Ketidaksesuain dengan Persyaratan Teknis | 31 Unit  |
|  |          |

Kondisi ...





### KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG KEUNEUKAI

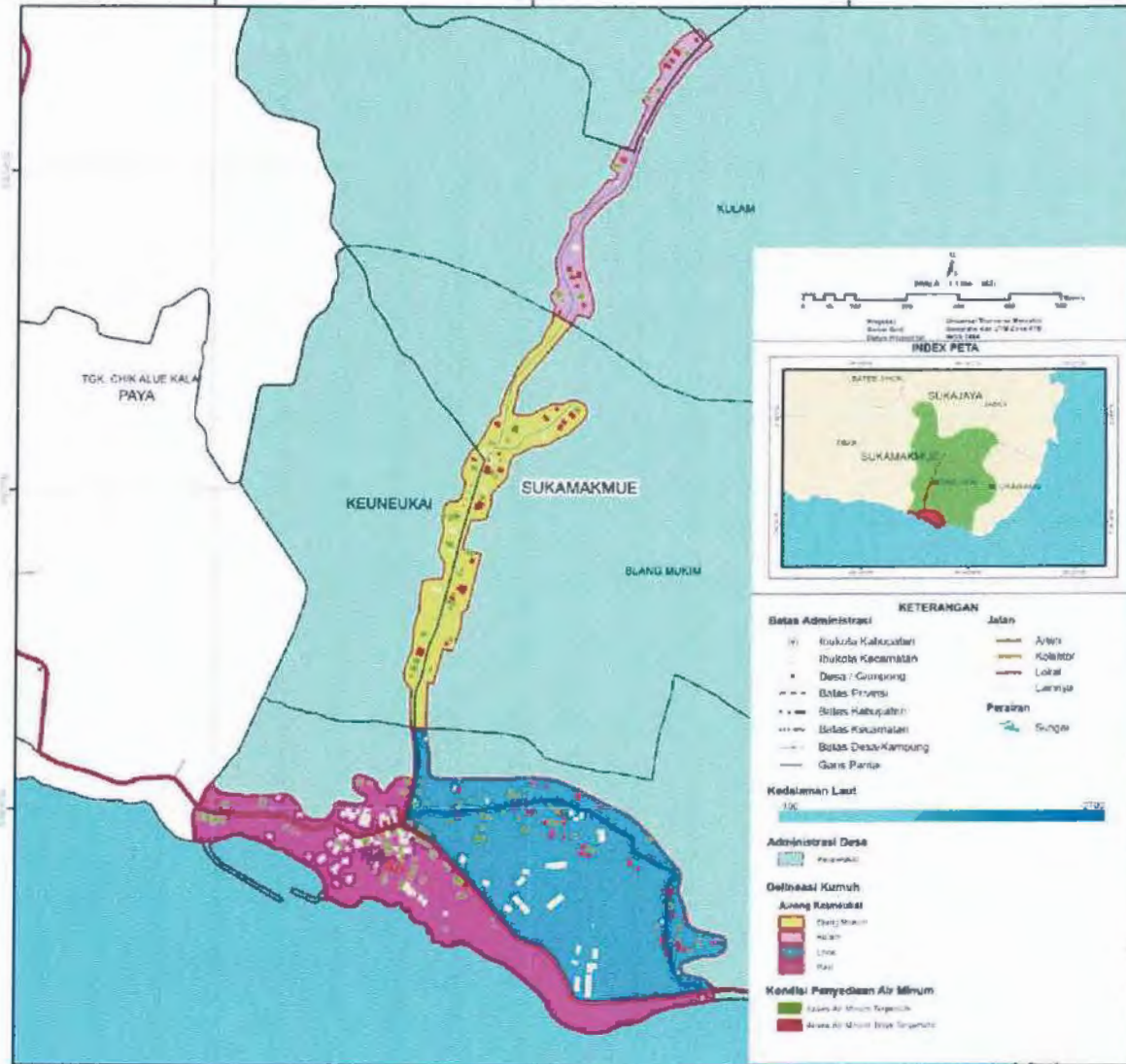


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Total Jaringan Jalan | 10.786,89 Meter |
| Jalan Rusak          | 1.524,09 Meter  |
| Kebutuhan Jalan Baru | 0 Meter         |

Kondisi ...



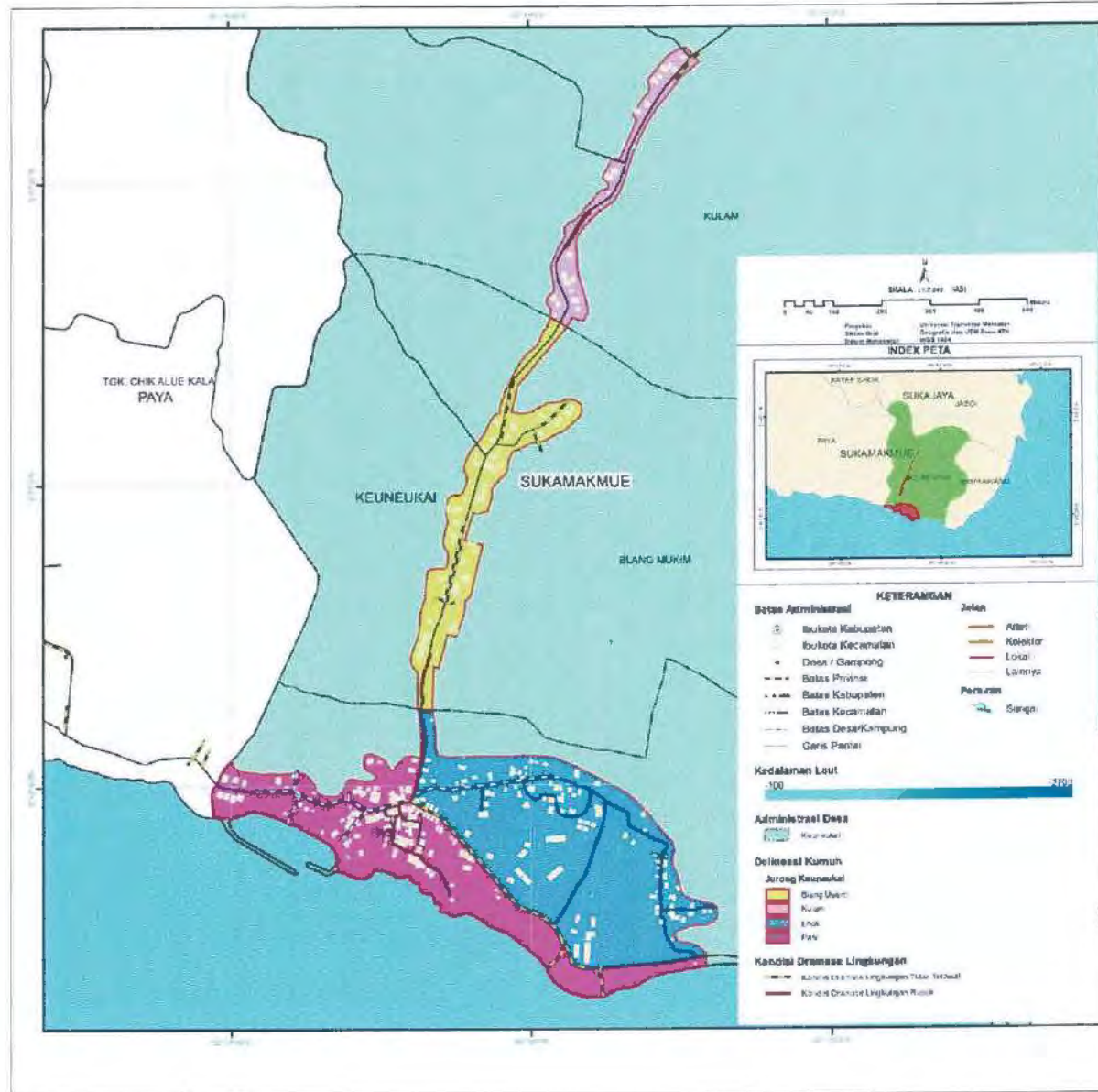
## KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG KEUNEUKAI



|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KK                              | 253 KK |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 0      |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 98 KK  |

Kondisi ...





## KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG KEUNEUKAI



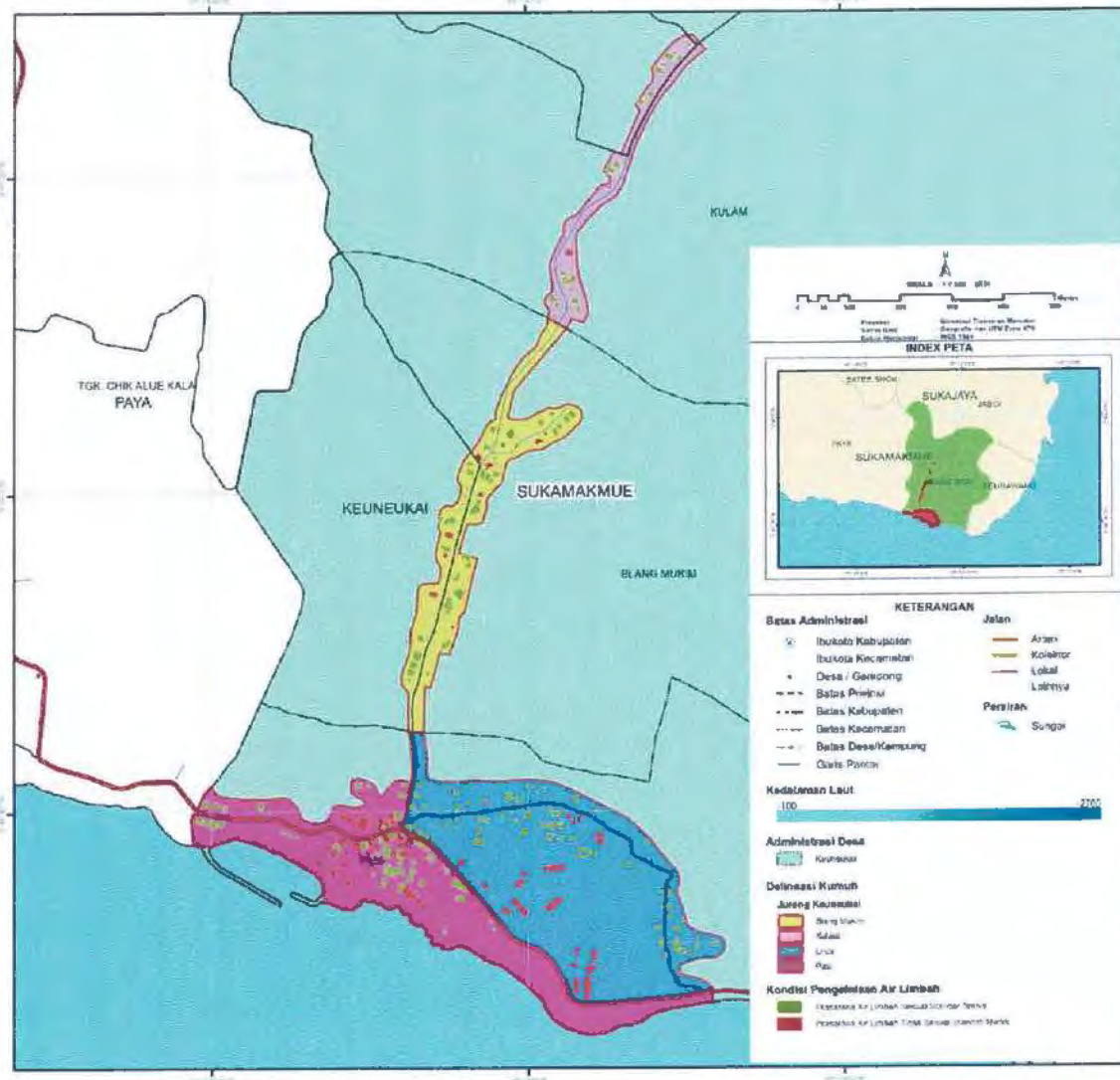
|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Panjang Drainase Eksisting | 2.649,25<br>Meter |
| Panjang Drainase Ideal     | 2.649,25 Meter    |
| Luas Genangan              | 0 Ha              |
| Drainase Rusak             | 1.049,6 Meter     |

Kondisi ...

11



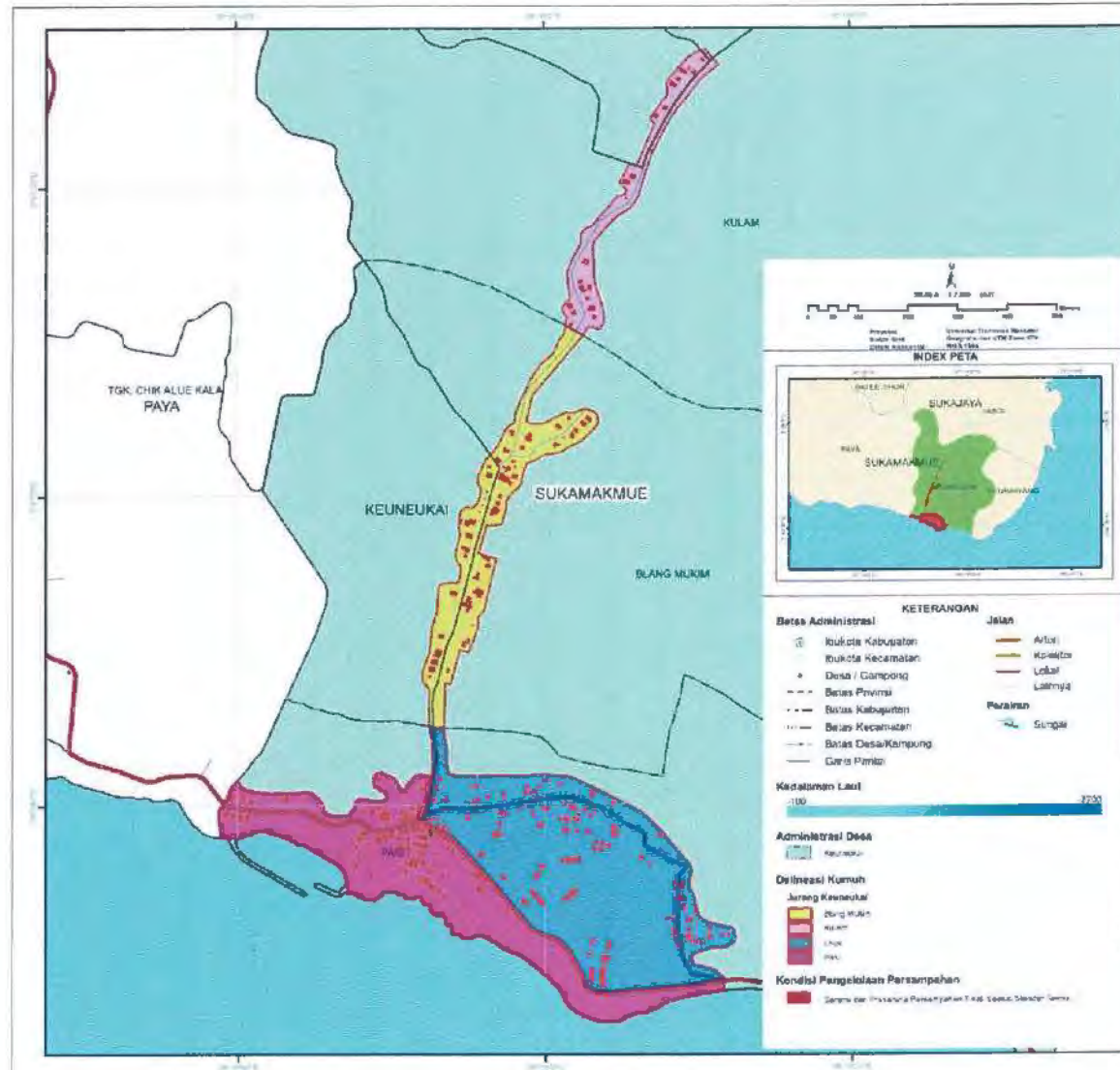
## KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG KEUNEUKAI



|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KK  | 253 KK |
| Sistem Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Teknis                                   | 0      |
| Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis | 0      |

Kondisi ...





## KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG KEUNEUKAI



|   |        |
|---|--------|
| Jumlah KK   | 253 KK |
| Prasarana Dan Sarana<br>Persampahan Tidak Sesuai Dengan<br>Persyaratan Teknis | 253 KK |
| Sistem Pengelolaan Persampahan<br>Yang Tidak Sesuai Standar Teknis            | 203 KK |

Kondisi ...



## KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG KEUNEUKAI



Jumlah Bangunan

221 Unit

Ketidaktersediaan Prasarana  
Proteksi Kebakaran

80 Unit

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi  
Kebakaran

221 Unit

DATA ...



# DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG KEUNEUKAI

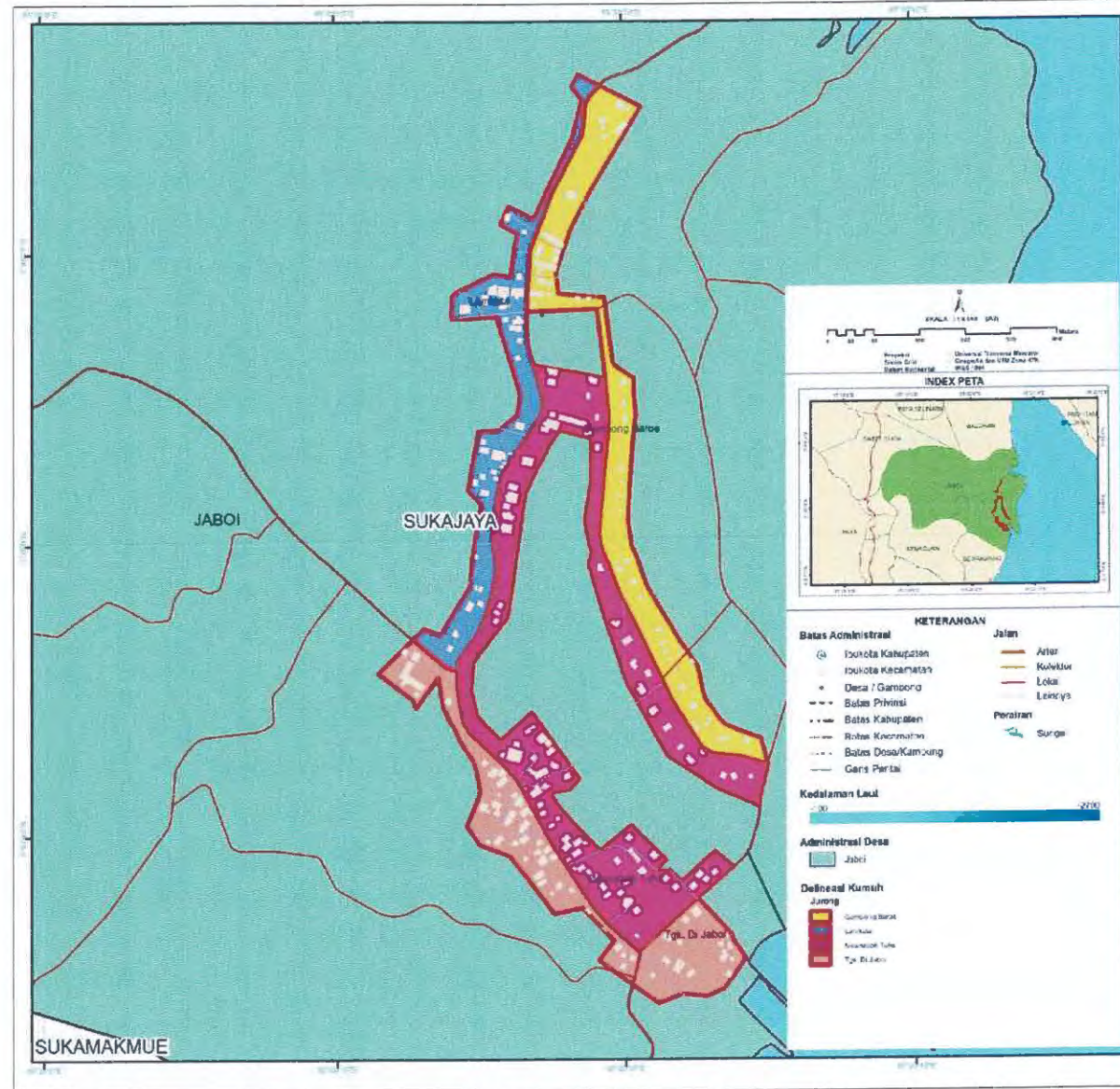
Hasil pendataan baseline numeric Kumuh Gampong Keuneukai berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.8. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Keuneukai adalah 18, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.8 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Keuneukai

| PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS |   |                         |        |            | DS001-00000  |                                      |       |            |         | DS002-00000             |              |                                      |         |                         | DS003-00000 |            |              |                                      |       | DS004-00000 |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|--------|------------|--------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|--|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Provinsi   | : ACEH  | Luas SK                 | 34,823 | Ha         | 5,492        | Ha                                   | 2,520 | Ha         | 16,002  | Ha                      | 10,809       | Ha                                   |         |                         |             |            |              |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Kab/Kota   | : KOTA SABANG   | Luas Verifikasi         | 34,823 | Ha         | 5,492        | Ha                                   | 2,520 | Ha         | 16,002  | Ha                      | 10,809       | Ha                                   |         |                         |             |            |              |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Kecamatan  | : SUKAMAKMUE  | Jumlah Bangunan         | 221    | Unit       | 46           | Unit                                 | 28    | Unit       | 67      | Unit                    | 80           | Unit                                 |         |                         |             |            |              |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Kawasan  | : PAYA KEUNEUKAI  | Jumlah Penduduk         | 858    | Jiwa       | 192          | Jiwa                                 | 120   | Jiwa       | 254     | Jiwa                    | 292          | Jiwa                                 |         |                         |             |            |              |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Kelurahan  | : KEUNEUKAI   | Jumlah KK               | 253    | KK         | 55           | KK                                   | 23    | KK         | 82      | KK                      | 93           | KK                                   |         |                         |             |            |              |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| ASPEK  | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE) |        |            |              | KONDISI AWAL (BASELINE)              |       |            |         | KONDISI AWAL (BASELINE) |              |                                      |         | KONDISI AWAL (BASELINE) |             |            |              | KONDISI AWAL (BASELINE)              |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  |   | NUMERIK                 | SATUAN | PROSEN (%) | NILAI        | NUMERIK                              | SAT.  | PROSEN (%) | NILAI   | NUMERIK                 | SAT.         | PROSEN (%)                           | NILAI   | NUMERIK                 | SAT.        | PROSEN (%) | NILAI        | NUMERIK                              | SAT.  | PROSEN (%)  | NILAI |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG   | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 26,00                   | Unit   | 11,76%     | 0            | 6,00                                 | Unit  | 13,04%     | 0       | 2,00                    | Unit         | 7,14%                                | 0       | 1,00                    | Unit        | 1,49%      | 0            | 17,00                                | Unit  | 21,25%      | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Kepadatan Bangunan   | -                       | Ha     | 0,00%      | 0            | -                                    | Ha    | 0,00%      | 0       | -                       | Ha           | 0,00%                                | 0       | -                       | Ha          | 0,00%      | 0            | -                                    | Ha    | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan                                       | 31,00                   | Unit   | 14,03%     | 0            | 1,00                                 | Unit  | 2,17%      | 0       | 5,00                    | Unit         | 17,86%                               | 0       | 6,00                    | Unit        | 8,96%      | 0            | 19,00                                | Unit  | 23,75%      | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung  |   |                         |        |            | 0,00%        |                                      |       |            | 0,00%   |                         |              |                                      | 0,00%   |                         |             |            | 0,00%        |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan  | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | -                       | Meter  | 0,00%      | 0            | -                                    | Meter | 0,00%      | 0       | -                       | Meter        | 0,00%                                | 0       | -                       | Meter       | 0,00%      | 0            | -                                    | Meter | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 1.524,09                | Meter  | 14,13%     | 0            | 504,59                               | Meter | 24,14%     | 0       | 1.019,50                | Meter        | 22,01%                               | 0       | -                       | Meter       | 0,00%      | 0            | -                                    | Meter | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan   |   |                         |        |            | 0,00%        |                                      |       |            | 0,00%   |                         |              |                                      | 0,00%   |                         |             |            | 0,00%        |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum  | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | -                       | KK     | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%      | 0       | -                       | KK           | 0,00%                                | 0       | -                       | KK          | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 98,00                   | KK     | 38,74%     | 1            | 23,00                                | KK    | 41,82%     | 1       | 11,00                   | KK           | 47,83%                               | 1       | 42,00                   | KK          | 51,22%     | 3            | 22,00                                | KK    | 23,66%      | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum                                       |   |                         |        |            | 19,37%       |                                      |       |            | 20,91%  |                         |              |                                      | 23,91%  |                         |             |            | 25,61%       |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan   | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                       | Ha     | 0,00%      | 0            | -                                    | Ha    | 0,00%      | 0       | -                       | Ha           | 0,00%                                | 0       | -                       | Ha          | 0,00%      | 0            | -                                    | Ha    | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Ketidakte rsediaan Drainase  | -                       | Meter  | 0,00%      | 0            | -                                    | Meter | 0,00%      | 0       | -                       | Meter        | 0,00%                                | 0       | -                       | Meter       | 0,00%      | 0            | -                                    | Meter | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 1.049,64                | Meter  | 39,62%     | 1            | 111,00                               | Meter | 14,80%     | 0       | 89,58                   | Meter        | 50,07%                               | 1       | 849,06                  | Meter       | 84,86%     | 5            | -                                    | Meter | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan  |   |                         |        |            | 13,21%       |                                      |       |            | 0,00%   |                         |              |                                      | 16,69%  |                         |             |            | 28,29%       |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah  | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | -                       | KK     | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%      | 0       | -                       | KK           | 0,00%                                | 0       | -                       | KK          | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | -                       | KK     | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%      | 0       | -                       | KK           | 0,00%                                | 0       | -                       | KK          | 0,00%      | 0            | -                                    | KK    | 0,00%       | 0     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah                                     |   |                         |        |            | 0,00%        |                                      |       |            | 0,00%   |                         |              |                                      | 0,00%   |                         |             |            | 0,00%        |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan   | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 253,00                  | KK     | 100,00%    | 5            | 55,00                                | KK    | 100,00%    | 5       | 23,00                   | KK           | 100,00%                              | 5       | 82,00                   | KK          | 100,00%    | 5            | 93,00                                | KK    | 100,00%     | 5     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 203,00                  | KK     | 80,24%     | 5            | 55,00                                | KK    | 100,00%    | 5       | 23,00                   | KK           | 100,00%                              | 5       | 82,00                   | KK          | 100,00%    | 5            | 43,00                                | KK    | 46,24%      | 1     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan                                    |   |                         |        |            | 90,12%       |                                      |       |            | 100,00% |                         |              |                                      | 100,00% |                         |             |            | 73,12%       |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran  | a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                      | 80,00                   | Unit   | 36,20%     | 1            | -                                    | Unit  | 0,00%      | 0       | -                       | Unit         | 0,00%                                | 0       | -                       | Unit        | 0,00%      | 0            | 80,00                                | Unit  | 100,00%     | 5     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
|  | b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran   | 221,00                  | Unit   | 100,00%    | 5            | 46,00                                | Unit  | 100,00%    | 5       | 28,00                   | Unit         | 100,00%                              | 5       | 67,00                   | Unit        | 100,00%    | 5            | 80,00                                | Unit  | 100,00%     | 5     |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran   |   |                         |        |            | 68,10%       |                                      |       |            | 30,00%  |                         |              |                                      | 30,00%  |                         |             |            | 50,00%       |                                      |       |             |       |  |              |                                      |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| TOTAL NILAI  |   |                         |        |            | 18           | TOTAL NILAI                          |       |            |         |                         | 16           | TOTAL NILAI                          |         |                         |             |            | 17           | TOTAL NILAI                          |       |             |       |  | 23           | TOTAL NILAI                          |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| TINGKAT KECUMUHAN  |   |                         |        |            | KUMUH RINGAN | TINGKAT KECUMUHAN                    |       |            |         |                         | KUMUH RINGAN | TINGKAT KECUMUHAN                    |         |                         |             |            | KUMUH RINGAN | TINGKAT KECUMUHAN                    |       |             |       |  | KUMUH RINGAN | TINGKAT KECUMUHAN                    |  |  |  |  |        |                                      |  |  |  |  |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL   |   |                         |        |            | 27,26%       | RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL             |       |            |         |                         | 24,42%       | RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL             |         |                         |             |            | 27,23%       | RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL             |       |             |       |  | 29,13%       | RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL             |  |  |  |  | 24,77% | RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL             |  |  |  |  |
| KONTRIBUSI PENANGANAN  |   |                         |        |            | 0,00%        | KONTRIBUSI PENANGANAN                |       |            |         |                         | 0,00%        | KONTRIBUSI PENANGANAN                |         |                         |             |            | 0,00%        | KONTRIBUSI PENANGANAN                |       |             |       |  | 0,00%        | KONTRIBUSI PENANGANAN                |  |  |  |  | 0,00%  | KONTRIBUSI PENANGANAN                |  |  |  |  |
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN   |   |                         |        |            |              | BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |       |            |         |                         |              | BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |         |                         |             |            |              | BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |       |             |       |  |              | BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |  |  |  |  |        | BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |  |  |  |  |
| 36-59 KUMUH SEDANG   |   |                         |        |            |              | 36-59 KUMUH SEDANG                   |       |            |         |                         |              | 36-59 KUMUH SEDANG                   |         |                         |             |            |              | 36-59 KUMUH SEDANG                   |       |             |       |  |              | 36-59 KUMUH SEDANG                   |  |  |  |  |        | 36-59 KUMUH SEDANG                   |  |  |  |  |
| 16-37 KUMUH RINGAN   |   |                         |        |            |              | 16-37 KUMUH RINGAN                   |       |            |         |                         |              | 16-37 KUMUH RINGAN                   |         |                         |             |            |              | 16-37 KUMUH RINGAN                   |       |             |       |  |              | 16-37 KUMUH RINGAN                   |  |  |  |  |        | 16-37 KUMUH RINGAN                   |  |  |  |  |
| <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH   |   |                         |        |            |              | <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |       |            |         |                         |              | <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |         |                         |             |            |              | <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |       |             |       |  |              | <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |  |  |  |  |        | <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |  |  |  |  |





Tabel 3.9 Profil Kumuh Gampong Jaboi






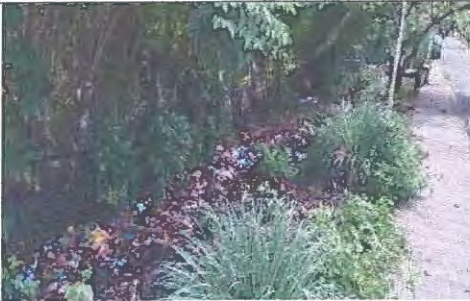


| INFORMASI UMUM  |  | SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH |               |                 |
|---|--|--------------------------|---------------|-----------------|
| Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi             | Jaboi<br>Jaboi<br>Sukajaya<br>Sabang<br>Aceh | No                       | Nama Dusun    | Luas Kumuh (Ha) |
| Luas Deliniasi Kumuh                                  | 23,928                                       | 1                        | Gampong Baroe | 5,583           |
| Koordinat Latitude Longitude                          |  | 2                        | Lamkuta       | 3,89            |
| Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumlah KK             | 165 Unit<br>717 Jiwa<br>178 KK               | 3                        | Meunasah Tuha | 9,322           |
| Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh |  | 4                        | Tgk Di Jaboi  | 5,133           |
| Kategori Kumuh  | Kumuh Ringan                                 |                          | <b>Total</b>  | <b>23,928</b>   |
| Tipologi Kumuh  | Permukiman Kumuh Pesisir Pantai              |                          |               |                 |
| Karakteristik   | Kawasan Gampong Nelayan                      |                          |               |                 |



|                   |                           |          |                                  |          | Permasalahan Utama  |          |                            |                 |
|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|----------|----------------------------|-----------------|
|                   |                           |          |                                  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis</li> <li>• Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran</li> <li>• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum</li> <li>• Ketersediaan akses aman air minum</li> <li>• Kualitas permukaan jalan lingkungan</li> <li>• Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis</li> <li>• Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis</li> </ul> |          |                            |                 |
| PERTIMBANGAN LAIN | BANGUNAN                  |          | LEGALITAS & STATUS TANAH         |          | SOSIAL EKONOMI  |          | JALAN LINGKUNGAN           |                 |
|                   | Jumlah Bangunan           | 165 Unit | Bangunan Ber IMB                 | 8 Unit   | Jumlah penduduk   | 717 Jiwa | Total jaringan jalan       | 15.279,93 Meter |
|                   | Jumlah RTLH               | 16 Unit  | Bangunan tidak Ber IMB           | 157 Unit | Jumlah KK   | 178 KK   | Jalan rusak                | 5.103,65 Meter  |
|                   | Ketidakteraturan Bangunan | 24 Unit  | Rumah Tangga tidak memiliki SHM  | 22 Unit  | Jumlah MBR  | 144 KK   | Jalan belum memadai (<2 m) | 0 Meter         |
|                   | Kepadatan Bangunan        | 0        | Bangunan tidak sesuai peruntukan | 0        |   |          | Kebutuhan jalan baru       | 0 Meter         |

|  |        |  |                |  |        |   |        |  |          |
|--|--------|---|----------------|--|--------|---|--------|---|----------|
| AIR MINUM                              |        | DRAINASE  |                | PENGOLAHAN LIMBAH                                |        | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |        | KONDISI KEBAKARAN   |          |
| Jumlah KRT                             | 178 KK | Panjang drainase eksisting  | 7.416,92 Meter | Jumlah KRT                                       | 178 KK | Jumlah KRT  | 178 KK | Jumlah KRT  | 178 KK   |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 97 KK  | Panjang drainase idela  | 9.235,36 Meter | Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis | 50 KK  | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 178 KK | Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                     | 31 Unit  |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 163 KK | Luas genangan   | 0 Ha           | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah      | 50 KK  | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak                               | 178 KK | Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran  | 165 Unit |



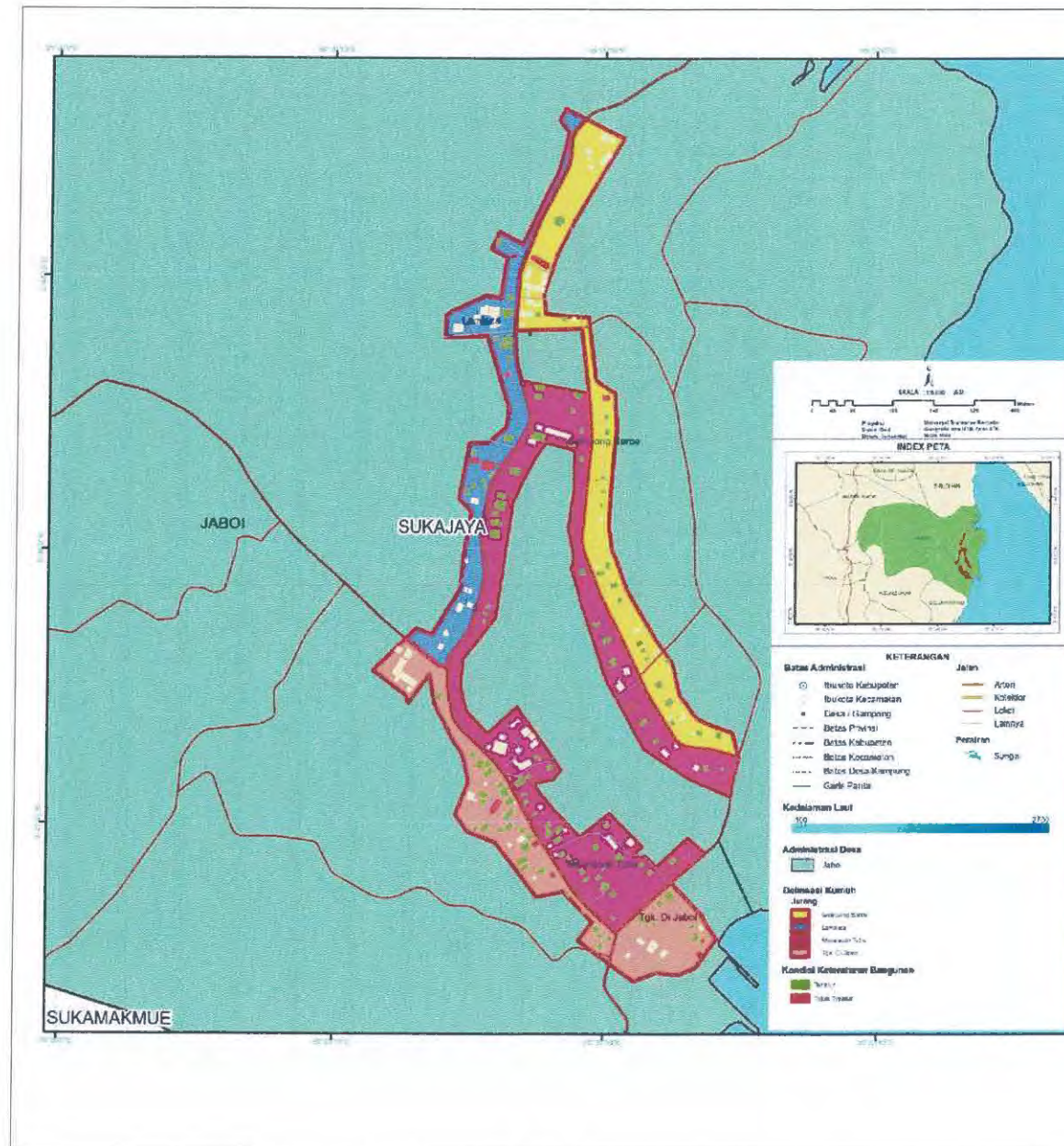
|   |   |   |   |   |  |                       |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
|   |   |   |   | Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis  |  | sesuai Standar Teknis |  |  |  |
|   |   | Drainase rusak  | 999,6 Meter   |   |  |                       |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |



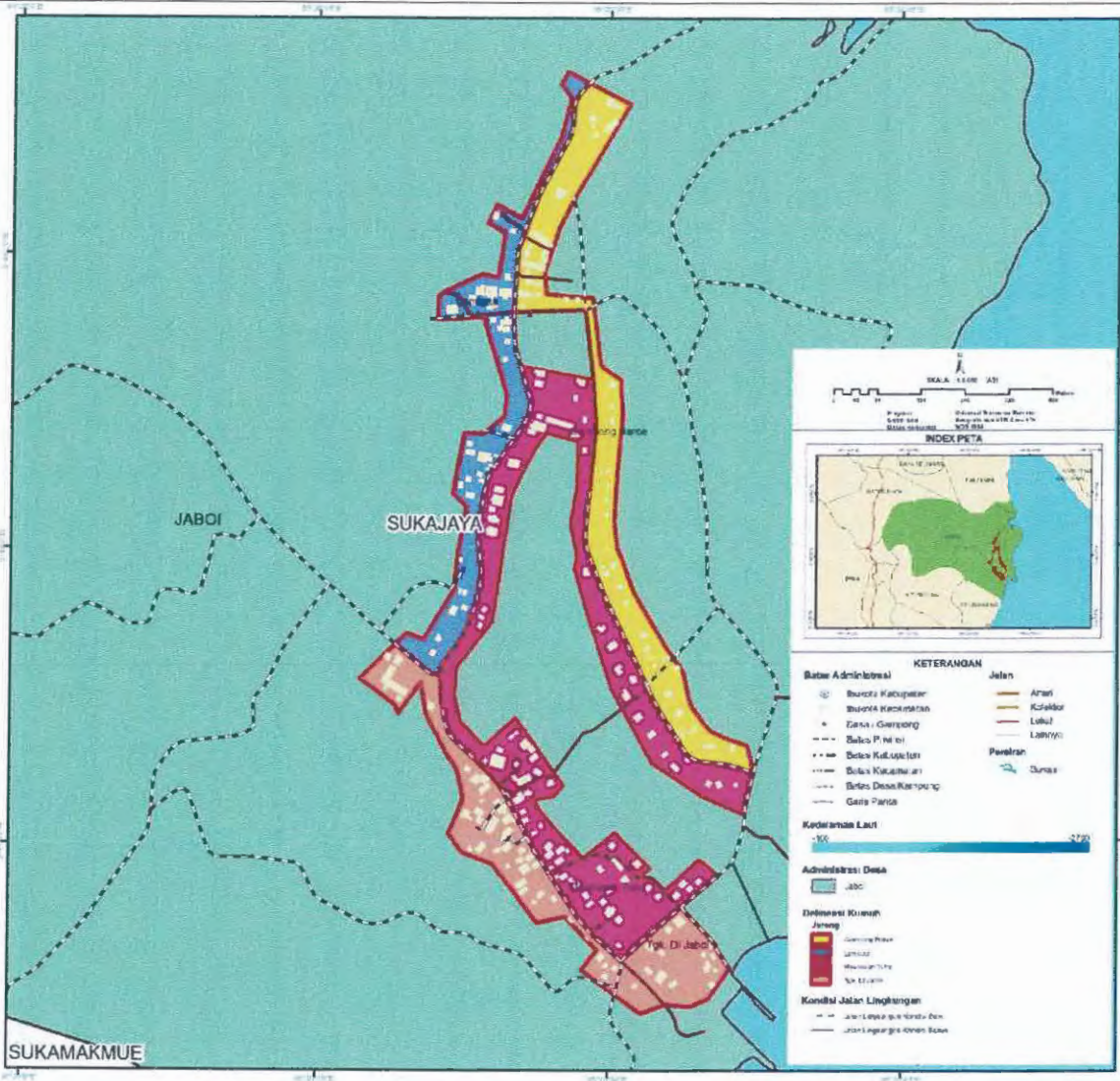
## KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG JABOI



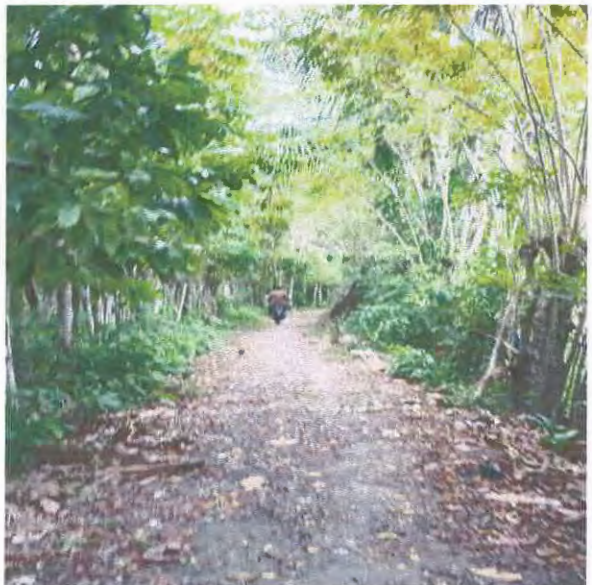
|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Jumlah Bangunan                       | 165 Unit |
| Jumlah RTLH                           | 16 Unit  |
| Ketidakteraturab Bangunan             | 24 Unit  |
| Kepadatan Bangunan                    | -        |
| Ketidaksesuain dgn Persyaratan Teknis | 16 Unit  |







## KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG JABOI

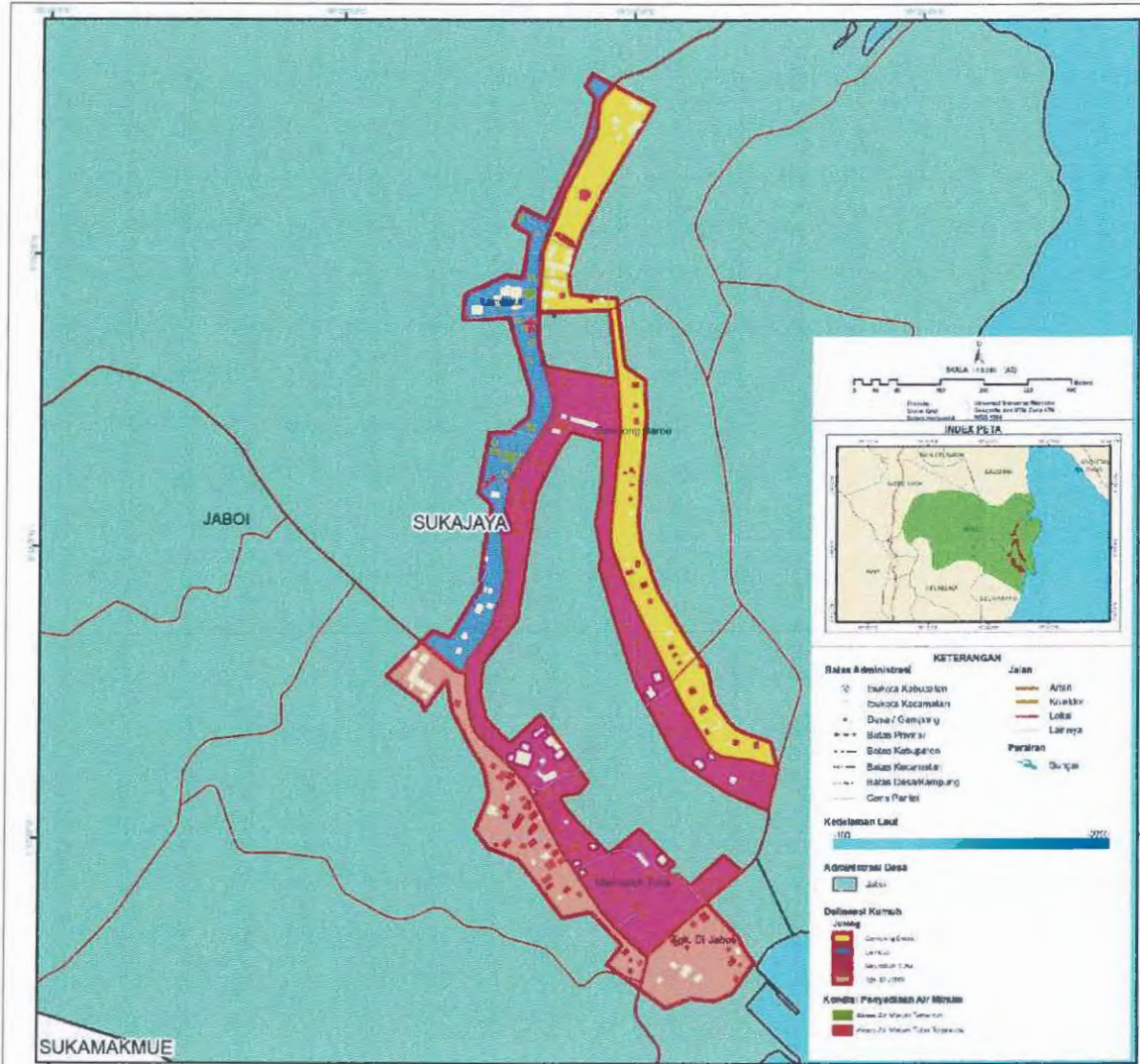


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total Jaringan Jalan | 15.279,93<br>Meter |
| Jalan Rusak          | 5.103,65 Meter     |
| Kebutuhan Jalan Baru | 0 Meter            |

Kondisi ...

11





## KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG JABOI

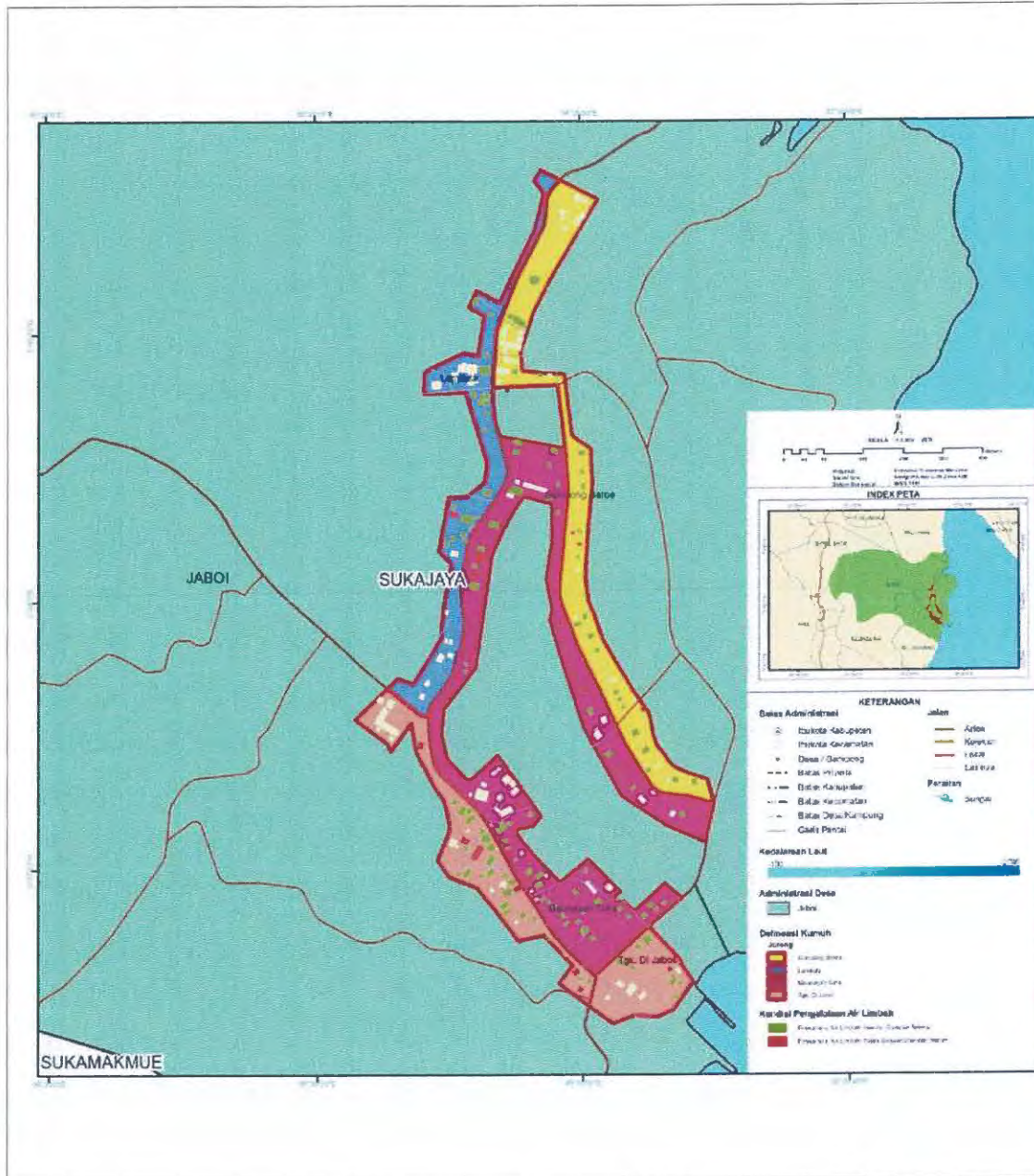


|  |        |
|--|--------|
| Jumlah KK                              | 178 KK |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum      | 97 KK  |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 163 KK |









### KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG JABOI



Jumlah KK

178 KK

Sistem Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Teknis

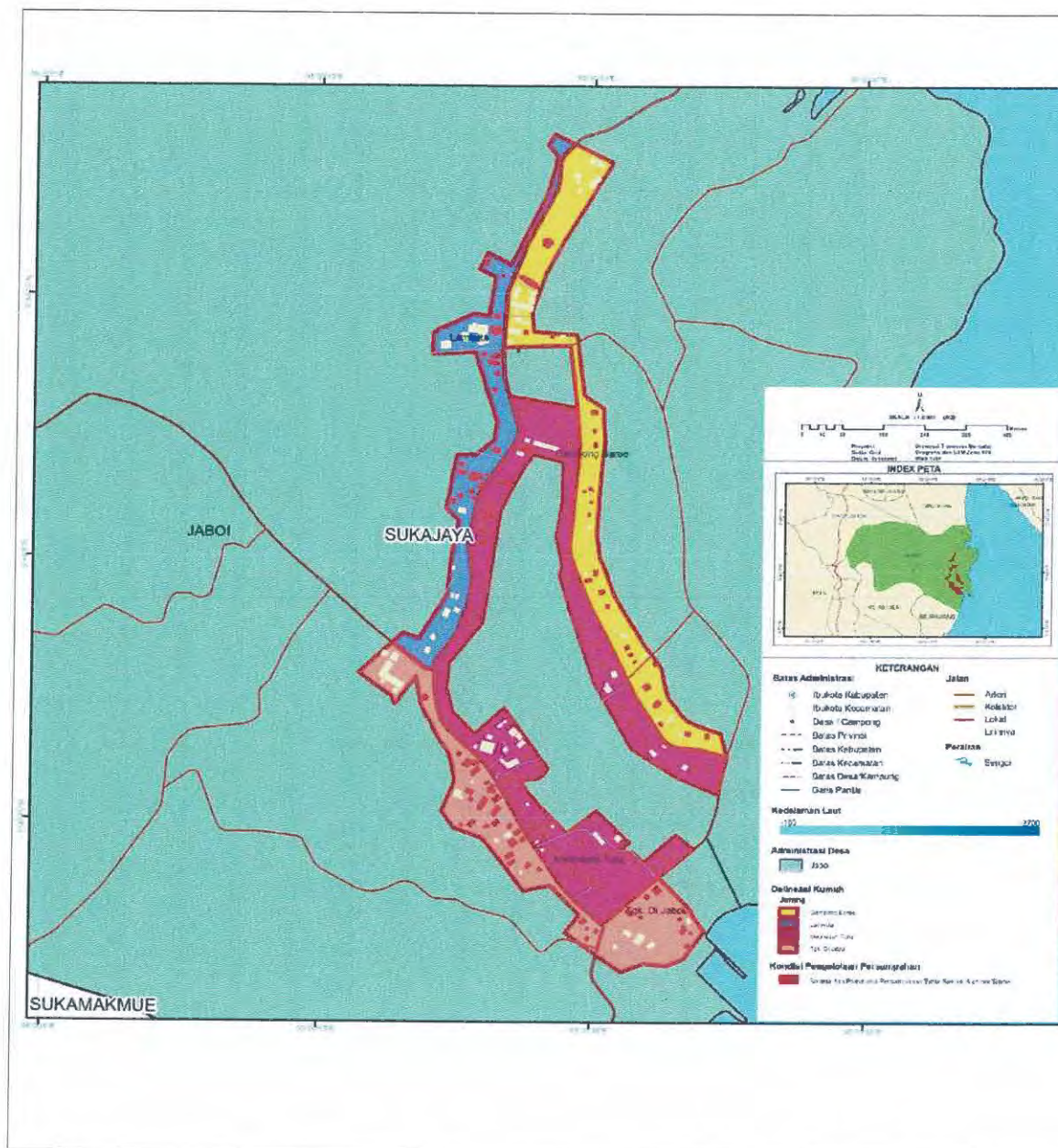
50 KK

Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis

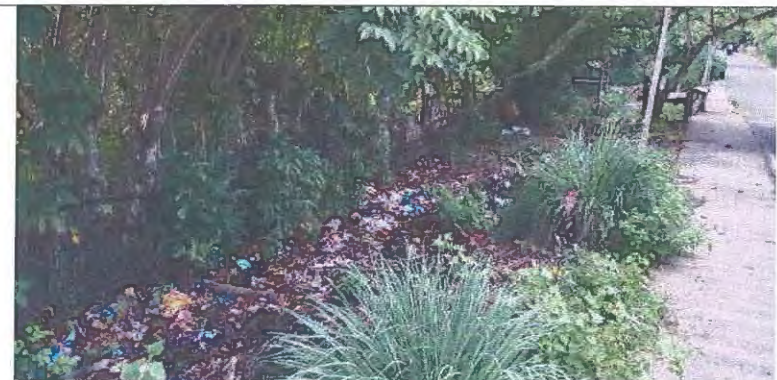
50 KK

Kondisi ...



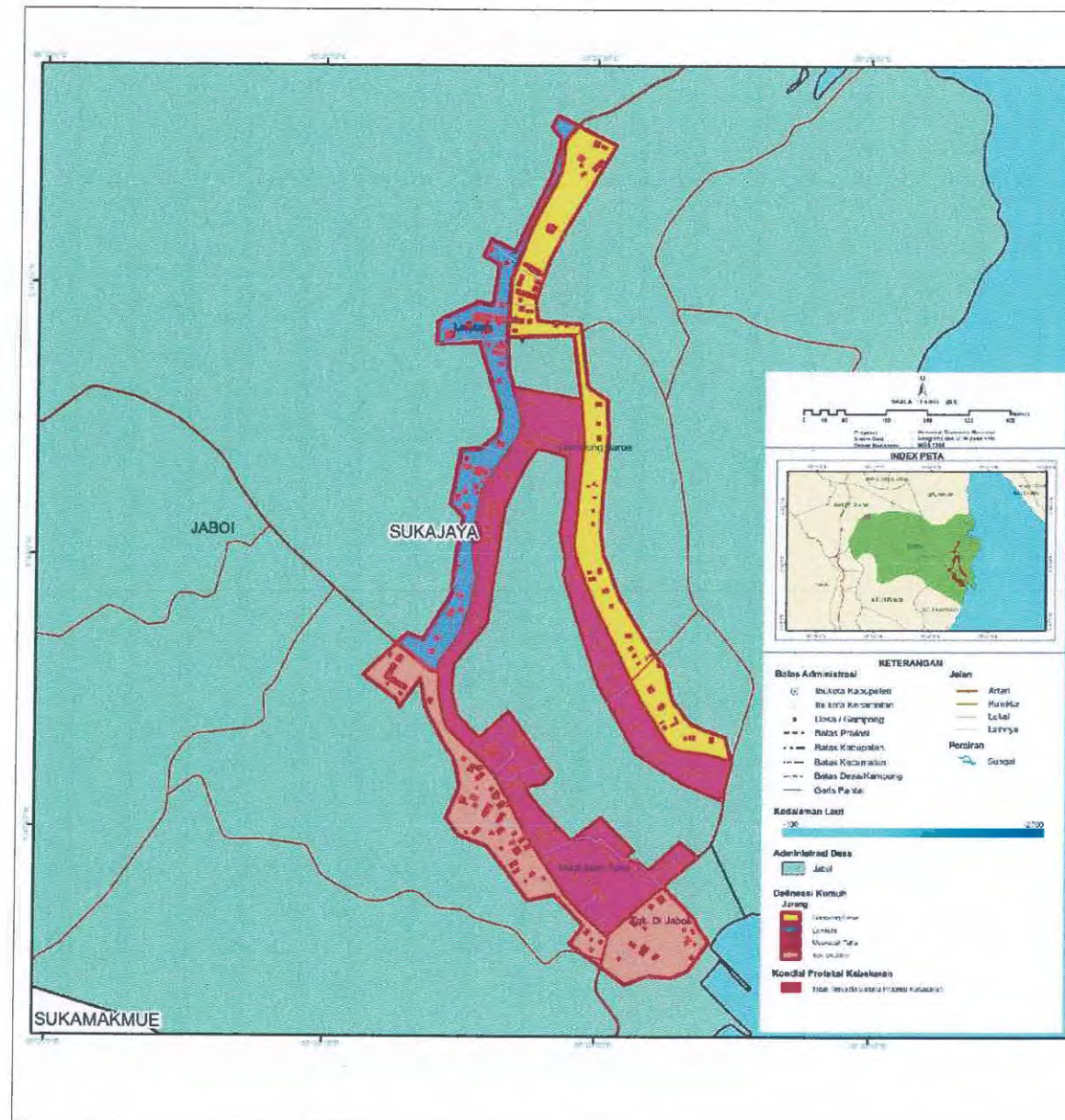


### KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG JABOI



|   |        |
|---|--------|
| Jumlah KK   | 178 KK |
| Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 178 KK |
| Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 178 KK |
|   |        |





## KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG JABOI



|  |          |
|--|----------|
| Jumlah KK                                      | 178 KK   |
| Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 31 Unit  |
| Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran    | 165 Unit |



# DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG JABOI

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Jaboi berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.10. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Jaboi adalah 26, yang tergolong kategori kumuh ringan. Tabel 3.10 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jaboi

| PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS |               |                 |           |  |
|--|---------------|-----------------|-----------|--|
| Provinsi   | : ACEH        | Luas SK         | 23,928 Ha |  |
| Kab/Kota   | : KOTA SABANG | Luas Verifikasi | 23,928 Ha |  |
| Kecamatan  | : SUKAJAYA    | Jumlah Bangunan | 165 Unit  |  |
| Kawasan  | : JABOI       | Jumlah Penduduk | 717 Jiwa  |  |
| Kelurahan  | : JABOI       | Jumlah KK       | 178 KK    |  |

| ASPEK                                     | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE) |        |            |       |
|---|---|-------------------------|--------|------------|-------|
|   |   | NUMERIK                 | SATUAN | PROSEN (%) | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG                | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 24,00                   | Unit   | 14,55%     | 0     |
|   | b. Kepadatan Bangunan   | -                       | Ha     | 0,00%      | 0     |
|   | c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan                                       | 16,00                   | Unit   | 9,70%      | 0     |
| Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung         |   |                         |        | 0,00%      |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan               | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | -                       | Meter  | 0,00%      | 0     |
|   | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 5.105,65                | Meter  | 33,40%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan        |   |                         |        | 16,70%     |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum           | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | 97,00                   | KK     | 54,49%     | 3     |
|   | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 163,00                  | KK     | 91,57%     | 5     |
| Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum    |   |                         |        | 73,03%     |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan            | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                       | Ha     | 0,00%      | 0     |
|   | b. Ketidaktersediaan Drainase   | 1.818,44                | Meter  | 19,66%     | 0     |
|   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 999,64                  | Meter  | 10,82%     | 0     |
| Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan     |   |                         |        | 0,00%      |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah         | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | 50,00                   | KK     | 28,09%     | 1     |
|   | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 50,00                   | KK     | 28,09%     | 1     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah  |   |                         |        | 28,09%     |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan        | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 178,00                  | KK     | 100,00%    | 5     |
|   | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 178,00                  | KK     | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan |   |                         |        | 100,00%    |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran             | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                     | 31,00                   | Unit   | 18,79%     | 0     |
|   | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran  | 165,00                  | Unit   | 100,00%    | 5     |
| Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran      |   |                         |        | 50,00%     |       |
| TOTAL NILAI                               |   |                         |        |            | 26    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN |  |
| 38-59 KUMUH SEDANG                   |  |
| 16-37 KUMUH RINGAN                   |  |
| <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| TINGKAT KECUMUHAN        | KUMUH RINGAN |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL | 38,26%       |
| KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTAL NILAI              | 27     |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL | 39,27% |
| KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTAL NILAI              | 23     |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL | 36,01% |
| KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTAL NILAI              | 22     |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL | 34,76% |
| KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTAL NILAI              | 28     |
| RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL | 40,21% |
| KONTRIBUSI PENANGANAN    | 0,00%  |

Tabel 3.11 ...




Tabel 3.11 Profil Kumuh Gampong Beurawang

| INFORMASI UMUM  |  | SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH |             |                 |
|---|--|--------------------------|-------------|-----------------|
| Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi             | Beurawang Beurawang Sukamakmue Sabang Aceh | No                       | Nama Dusun  | Luas Kumuh (Ha) |
| Luas Deliniasi Kumuh                                  | 15,279                                     | 1                        | Teupin Bada | 8,348           |
| Koordinat Latitude Longitude                          |  | 2                        | Meurelo     | 6,931           |
| Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumlah KK             | 87 Unit<br>357 Jiwa<br>76 KK               |                          | Total       | 15,279          |
| Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh |  |                          |             |                 |
| Kategori Kumuh  | Kumuh Ringan                               |                          |             |                 |
| Tipologi Kumuh  | Permukiman Kumuh Pesisir Pantai            |                          |             |                 |



|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  | Karakteristik   | Kawasan<br>Gampong<br>Nelayan |
|  | Permasalahan Utama  |                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis</li><li>• Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran</li><li>• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum</li><li>• System pengolahan air limbah tidak sesuai standart teknis</li><li>• Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis</li><li>• Kualitas konstruksi drainase</li><li>• Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan</li></ul> |                               |

| PERTIMBANGAN LAIN | BANGUNAN   |         | LEGALITAS & STATUS TANAH         |         | SOSIAL EKONOMI  |          | JALAN LINGKUNGAN           |                |
|-------------------|--|---------|----------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|
|                   | Jumlah Bangunan  | 87 Unit | Bangunan Ber IMB                 | 0       | Jumlah penduduk | 357 Jiwa | Total jaringan jalan       | 6.508,18 Meter |
|                   | Jumlah RTLH  | 24 Unit | Bangunan tidak Ber IMB           | 76 Unit | Jumlah KK       | 76 KK    | Jalan rusak                | 482,25 Meter   |
|                   | Ketidakteraturan Bangunan  | 19 Unit | Rumah Tangga tidak memiliki SHM  | 2 Unit  | Jumlah MBR      | 67 KK    | Jalan belum memadai (<2 m) |                |
|                   | Kepadatan Bangunan   | 0       | Bangunan tidak sesuai peruntukan | 0       |                 |          | Kebutuhan jalan baru       | 0              |
|                   |  |         |                                  |         |                 |          |                            |                |



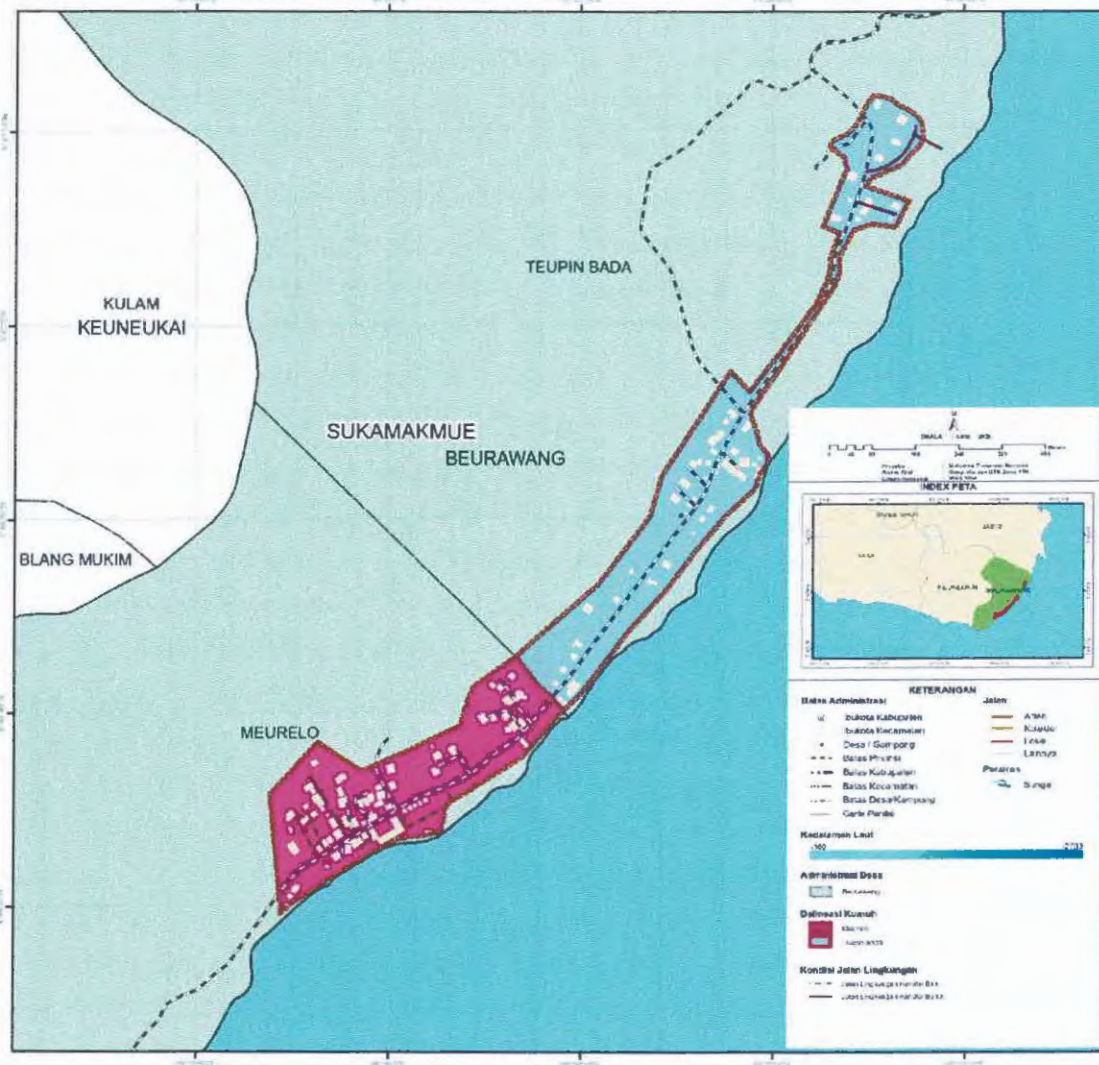
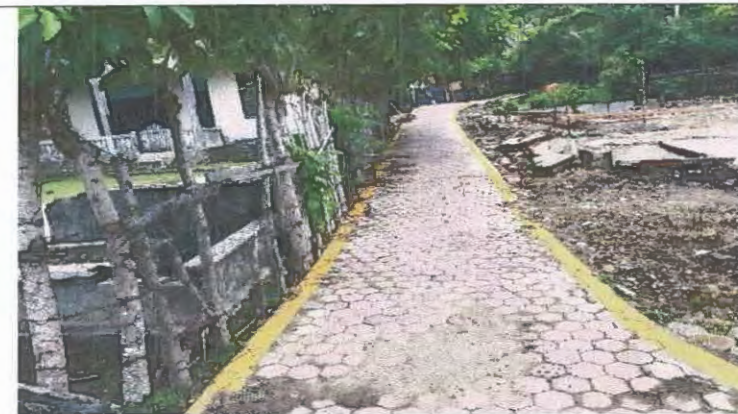
| AIR MINUM   |       | DRAINASE  |           | PENGOLAHAN LIMBAH  |       | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |       | KONDISI KEBAKARAN   |         |
|---|-------|---|-----------|--|-------|---|-------|---|---------|
| Jumlah KRT  | 76 KK | Panjang drainase eksisting  | 743 Meter | Jumlah KK  | 76 KK | Jumlah KK   | 76 KK | Jumlah KK   | 87 Unit |
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum   | 1 KK  | Panjang drainase idela  | 743 Meter | Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                     | 25 KK | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis               | 76 KK | Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                       | 0       |
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum  | 51 KK | Luas genangan   | 0 Ha      | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis   | 25 KK | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                       | 76 KK | Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran  | 87 Unit |
|   |       | Drainase rusak  | 334 Meter |  |       |   |       |   |         |
|  |       |  |           |  |       |  |       |  |         |







## KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG BEURAWANG

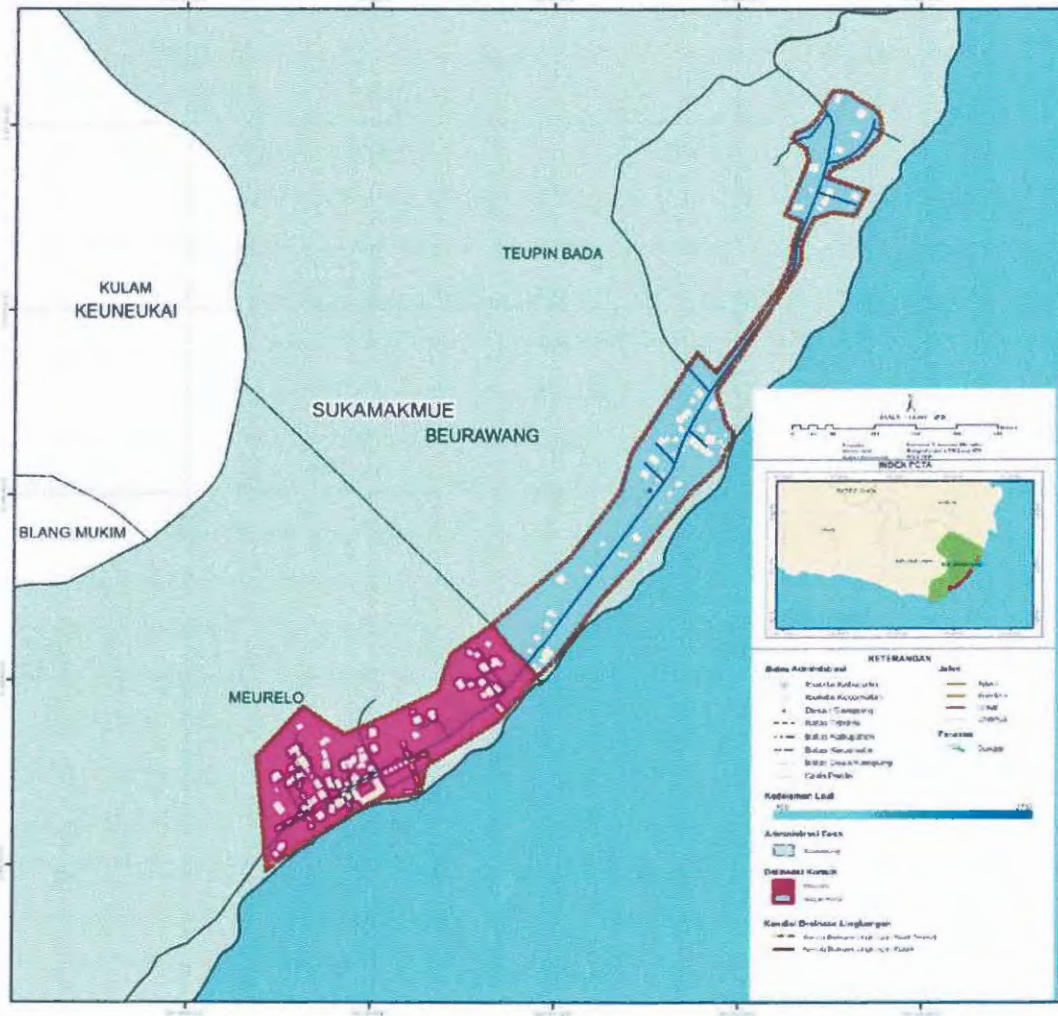


|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Total jaringan jalan | 6.508,00 Meter |
| Jalan rusak          | 482,25 Meter   |
| Kebutuhan jalan baru | 0              |







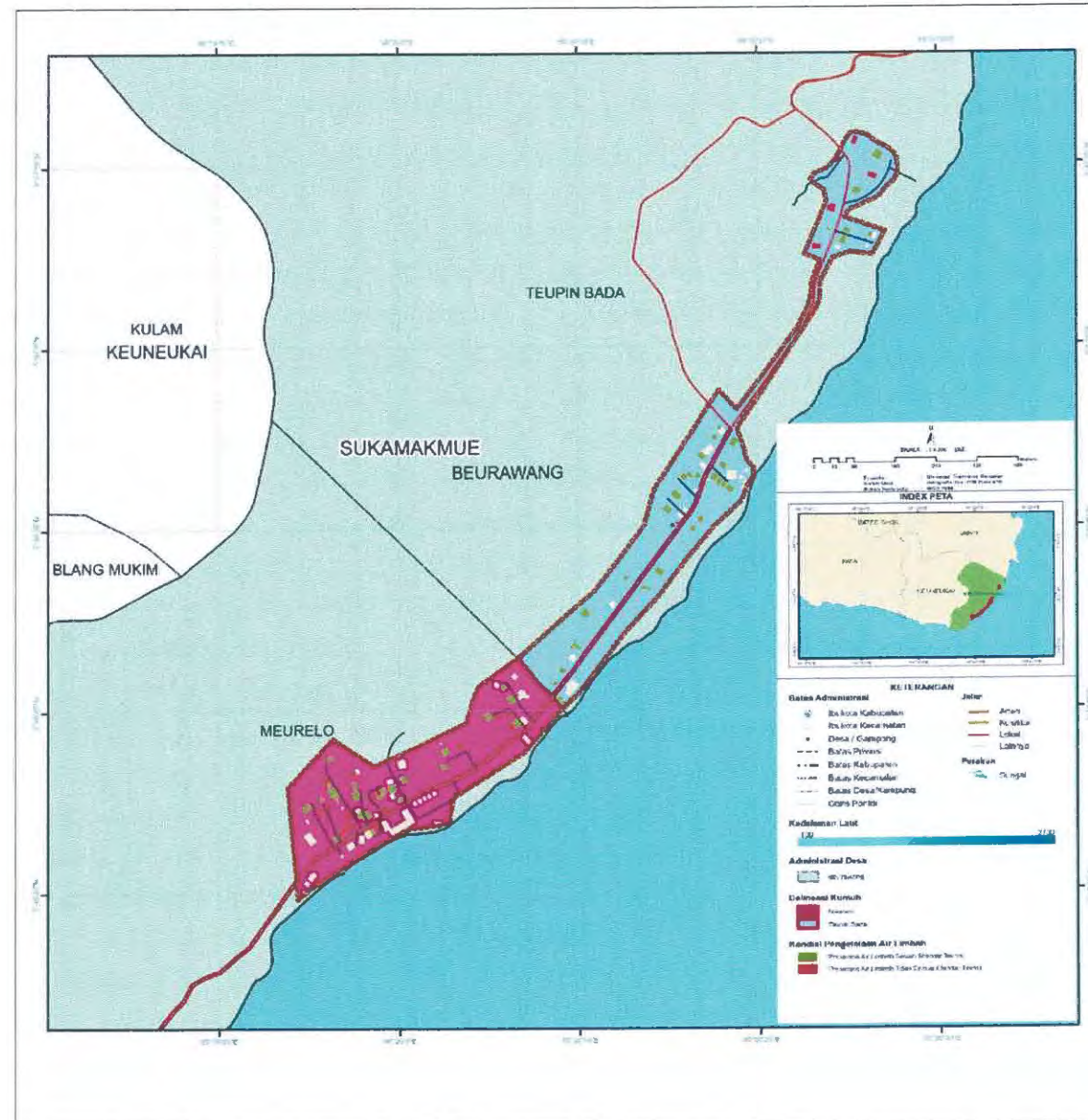


## KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG BEURAWANG



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Panjang Drainase Eksisting | 743 Meter |
| Panjang Drainase Ideal     | 743 Meter |
| Luas Genangan              | 0 Ha      |
| Drainase Rusak             | 334 Meter |



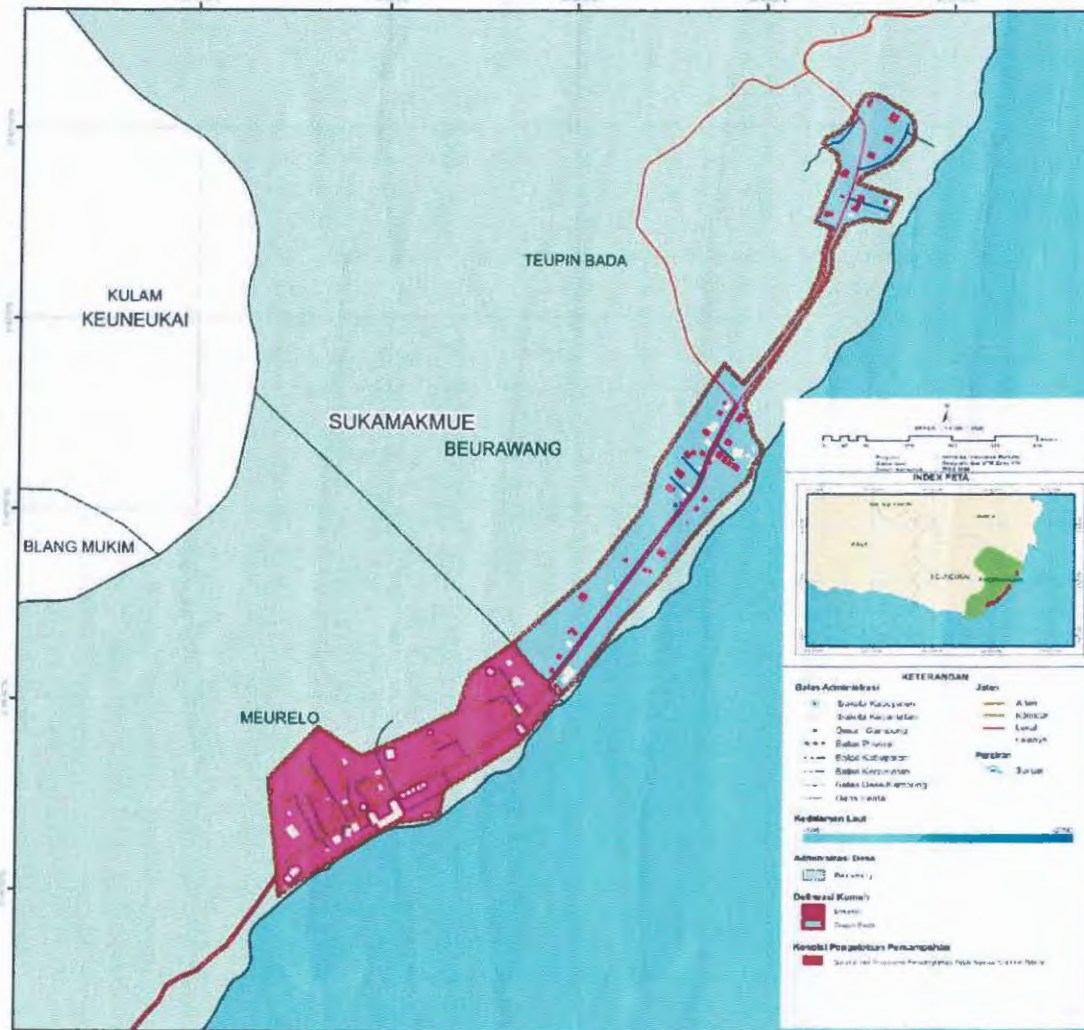


### KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG BEURAWANG



|  |       |
|--|-------|
| Jumlah KRT   | 76 KK |
| Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis                                   | 25 KK |
| Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 25 KK |
|  |       |





## KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG BEURAWANG



|   |       |
|---|-------|
| Jumlah KK   | 76 KK |
| Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 76 KK |
| Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis         | 76 KK |

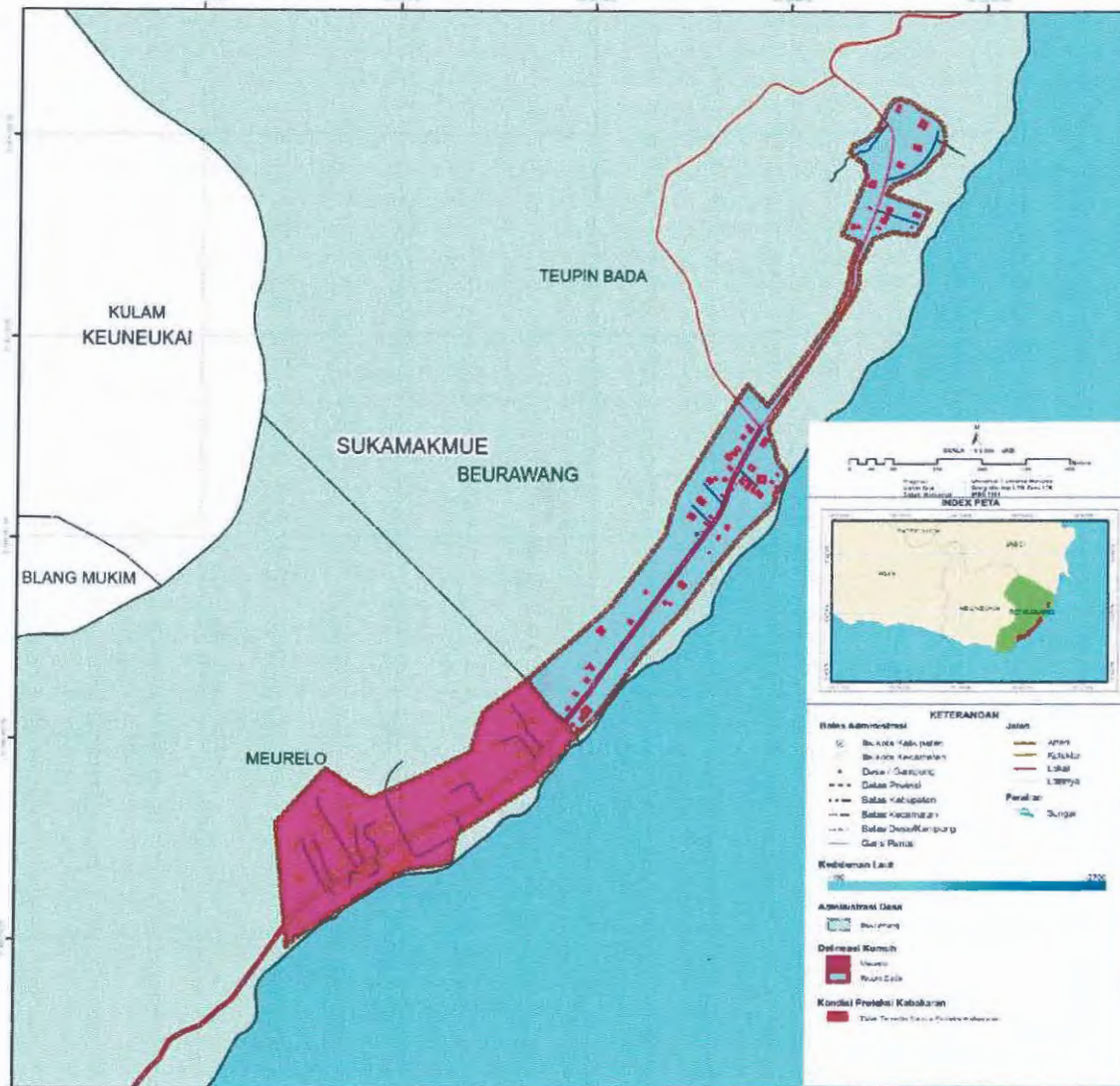


# KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG BEURAWANG



|  |         |
|--|---------|
| Jumlah Bangunan                                | 87 Unit |
| Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 0       |
| Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran    | 87 Unit |

DATA ...





## DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG BEURAWANG

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Beurawang berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.12. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Beurawang adalah 21, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

### 3.12 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Beurawang

| PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH |               |                 |        |      |  |
|---|---------------|-----------------|--------|------|--|
| Provinsi  | : ACEH        | Luas SK         | 15,279 | Ha   |  |
| Kab/Kota  | : KOTA SABANG | Luas Verifikasi | 15,279 | Ha   |  |
| Kecamatan   | : SUKAMAKMUE  | Jumlah Bangunan | 87     | Unit |  |
| Kawasan   | : BEURAWANG   | Jumlah Penduduk | 357    | Jiwa |  |
| Kelurahan   | : BEURAWANG   | Jumlah KK       | 76     | KK   |  |

| ASPEK                              | KRITERIA  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |        |              |       |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------|--------------|-------|
|                                    |   | NUMERIK                  | SATUAN | PROSEN (%)   | NILAI |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG         | a. Ketidakteraturan Bangunan  | 19,00                    | Unit   | 21,84%       | 0     |
|                                    | b. Kepadatan Bangunan   | -                        | Ha     | 0,00%        | 0     |
|                                    | c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan                                       | 24,00                    | Unit   | 27,59%       | 1     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung   |                          |        | 9,20%        |       |
| 2. Kondisi Jalan Lingkungan        | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan   | -                        | Meter  | 0,00%        | 0     |
|                                    | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan  | 482,25                   | Meter  | 7,41%        | 0     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan  |                          |        | 0,00%        |       |
| 3. Kondisi Penyediaan Air Minum    | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  | 1,00                     | KK     | 1,32%        | 0     |
|                                    | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   | 51,00                    | KK     | 67,11%       | 3     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum  |                          |        | 33,55%       |       |
| 4. Kondisi Drainase Lingkungan     | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air  | -                        | Ha     | 0,00%        | 0     |
|                                    | b. Ketidaktersediaan Drainase   | -                        | Meter  | 0,00%        | 0     |
|                                    | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | 334,00                   | Meter  | 44,95%       | 1     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan   |                          |        | 14,98%       |       |
| 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah  | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis                          | 25,00                    | KK     | 32,89%       | 1     |
|                                    | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 25,00                    | KK     | 32,89%       | 1     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah   |                          |        | 32,89%       |       |
| 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis            | 76,00                    | KK     | 100,00%      | 5     |
|                                    | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis                    | 76,00                    | KK     | 100,00%      | 5     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Pengelolaan   |                          |        | 100,00%      |       |
| 7. Kondisi Proteksi Kebakaran      | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran                                     | -                        | Unit   | 0,00%        | 0     |
|                                    | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran  | 87,00                    | Unit   | 100,00%      | 5     |
|                                    | Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran  |                          |        | 50,00%       |       |
|                                    |   | TOTAL NILAI              |        | 22           |       |
|                                    |   | TINGKAT KEKUMUHAN        |        | KUMUH RINGAN |       |
|                                    |   | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL |        | 34,38%       |       |
|                                    |   | KONTRIBUSI PENANGANAN    |        | 0,00%        |       |

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN |  |  |  |  |  |
| 0000 KUMUH RINGAN                    |  |  |  |  |  |
| 38-59 KUMUH SEDANG                   |  |  |  |  |  |
| 16-37 KUMUH RINGAN                   |  |  |  |  |  |
| <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH           |  |  |  |  |  |

|             |  |       |      |  |  |
|-------------|--|-------|------|--|--|
| DS001-00000 |  |       |      |  |  |
| Meurelo     |  |       |      |  |  |
|             |  | 6,931 | Ha   |  |  |
|             |  | 6,931 | Ha   |  |  |
|             |  | 43    | Unit |  |  |
|             |  | 177   | Jiwa |  |  |
|             |  | 50    | KK   |  |  |

| NUMERIK | SAT.  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |  | NILAI        |
|---------|-------|--------------------------|--|--------------|
|         |       | PROSEN (%)               |  |              |
| 14,00   | Unit  | 32,56%                   |  | 1            |
| -       | Ha    | 0,00%                    |  | 0            |
| 12,00   | Unit  | 27,91%                   |  | 1            |
|         |       | 20,16%                   |  |              |
| -       | Meter | 0,00%                    |  | 0            |
| 482,25  | Meter | 16,10%                   |  | 0            |
|         |       | 0,00%                    |  |              |
| -       | KK    | 0,00%                    |  | 0            |
| 50,00   | KK    | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 50,00%                   |  |              |
| -       | Ha    | 0,00%                    |  | 0            |
| -       | Meter | 0,00%                    |  | 0            |
| 102,00  | Meter | 19,96%                   |  | 0            |
|         |       | 0,00%                    |  |              |
| 22,00   | KK    | 44,00%                   |  | 1            |
| 22,00   | KK    | 44,00%                   |  | 1            |
|         |       | 44,00%                   |  |              |
| 50,00   | KK    | 100,00%                  |  | 5            |
| 50,00   | KK    | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 100,00%                  |  |              |
| -       | Unit  | 0,00%                    |  | 0            |
| 43,00   | Unit  | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 50,00%                   |  |              |
|         |       | TOTAL NILAI              |  | 24           |
|         |       | TINGKAT KEKUMUHAN        |  | KUMUH RINGAN |
|         |       | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL |  | 37,74%       |
|         |       | KONTRIBUSI PENANGANAN    |  | 0,00%        |

|             |  |       |      |  |  |
|-------------|--|-------|------|--|--|
| DS002-00000 |  |       |      |  |  |
| Teupin Bada |  |       |      |  |  |
|             |  | 8,348 | Ha   |  |  |
|             |  | 8,348 | Ha   |  |  |
|             |  | 44    | Unit |  |  |
|             |  | 180   | Jiwa |  |  |
|             |  | 26    | KK   |  |  |

| NUMERIK | SAT.  | KONDISI AWAL (BASELINE)  |  | NILAI        |
|---------|-------|--------------------------|--|--------------|
|         |       | PROSEN (%)               |  |              |
| 5,00    | Unit  | 11,36%                   |  | 0            |
| -       | Ha    | 0,00%                    |  | 0            |
| 12,00   | Unit  | 27,27%                   |  | 1            |
|         |       | 9,00%                    |  |              |
| -       | Meter | 0,00%                    |  | 0            |
| -       | Meter | 0,00%                    |  | 0            |
|         |       | 0,00%                    |  |              |
| 1,00    | KK    | 3,85%                    |  | 0            |
| 1,00    | KK    | 3,85%                    |  | 0            |
|         |       | 0,00%                    |  |              |
| -       | Ha    | 0,00%                    |  | 0            |
| -       | Meter | 0,00%                    |  | 0            |
| 232,00  | Meter | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 33,33%                   |  |              |
| 3,00    | KK    | 11,54%                   |  | 0            |
| 3,00    | KK    | 11,54%                   |  | 0            |
|         |       | 0,00%                    |  |              |
| 25,00   | KK    | 100,00%                  |  | 5            |
| 25,00   | KK    | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 100,00%                  |  |              |
| -       | Unit  | 0,00%                    |  | 0            |
| 44,00   | Unit  | 100,00%                  |  | 5            |
|         |       | 50,00%                   |  |              |
|         |       | TOTAL NILAI              |  | 21           |
|         |       | TINGKAT KEKUMUHAN        |  | KUMUH RINGAN |
|         |       | RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL |  | 27,49%       |
|         |       | KONTRIBUSI PENANGANAN    |  | 0,00%        |

## BAB IV

### PERMASALAHAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH

#### 4.1 ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi

pembangunan yang memadai, tepat, berskala kabupaten/kota, dan berbasis kawasan;

- b. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum, namun juga memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh;
- c. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya;
- d. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota sehingga penanganan kumuh bersifat parsial;
- e. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan;



- f. Peran Pokja PKP yang belum optimal sebagai penggerak kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penanganan kumuh;
- g. Proses kemitraan/keterpaduan yang masih sulit dilakukan karena pembagian kewenangan yang masih sebatas sektoral;
- h. Terdapat permasalahan sosial/ adat istiadat/ pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah;
- i. Terdapat permasalahan legalitas tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kepemilikan yang sah atas tanah;
- j. Terdapat permukiman kumuh perkotaan yang ada pada lahan ilegal (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel KA, tanah Pelindo, tanah militer/TNI); dan
- k. Terdapat Desain Kawasan dan DED yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh, khususnya di kota-kota besar diantaranya adalah wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman. Di sisi lain bahwa kehidupan

penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh di bawah garis kemiskinan. Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah:

- a. Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standar untuk bangunan layak huni
- b. Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran;
- c. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai;
- d. Tidak tersedianya jaringan drainase;
- e. Kurangnya suplai air bersih; dan
- f. Jaringan listrik yang tidak teratur serta fasilitas MCK yang tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kabupaten/kota;
- b. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan

kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;

- c. Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Bahwa dalam pengembangan kabupaten/kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Merujuk pada Keputusan Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang

| NO | KECAMATAN | KAWASAN                      | GAMPONG        | JURONG                     | LUAS<br>DELINIASI<br>KUMUH<br>(HA) | TOTAL<br>DELINIASI<br>KAWASAN<br>(HA) |
|----|-----------|------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sukajaya  | Kawasan<br>Paya<br>Keuneukai | Keuneukai      | Lhok                       | 16,002                             | 57,495                                |
|    |           |                              |                | Pasi                       | 10,809                             |                                       |
|    |           |                              |                | Kulam                      | 2,520                              |                                       |
|    |           |                              |                | Blang<br>Mukim             | 5,492                              |                                       |
|    |           |                              | Paya           | Pante Jaya                 | 4,457                              |                                       |
|    |           |                              |                | Tgk. Chok<br>Alue Kala     | 15,088                             |                                       |
|    |           |                              |                | Cot Preh                   | 1,894                              |                                       |
|    |           |                              |                | Ditremon                   | 1,233                              |                                       |
| 2  | Sukajaya  | Kawasan<br>Beurawang         | Beurawang      | Teupin<br>Bada             | 8,348                              | 15,279                                |
|    |           |                              |                | Meurelo                    | 6,931                              |                                       |
| 3  | Sukajaya  | Kawasan<br>Jaboi             | Jaboi          | Meunasah<br>Tuha           | 9,322                              | 23,928                                |
|    |           |                              |                | Tgk. Di<br>Jaboi           | 5,133                              |                                       |
|    |           |                              |                | Lamkuta                    | 3,890                              |                                       |
|    |           |                              |                | Gampong<br>Baroe           | 5,583                              |                                       |
| 4  | Sukakarya | Kawasan<br>Krueng<br>Raya    | Krueng<br>Raya | Batu Singa<br>Berfakta     | 9,240                              | 27,011                                |
|    |           |                              |                | Lhok<br>Drien              | 3,039                              |                                       |
|    |           |                              |                | Mustia<br>Kolam<br>Bermata | 7,161                              |                                       |
|    |           |                              |                | Teupin<br>Cirik            | 7,571                              |                                       |
|    |           |                              |                |                            |                                    | 123,713 Ha                            |



Selanjutnya, beberapa kondisi aktual Kota Sabang terkait dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabag, dapat dijelaskan melalui tujuh sektor yakni permukiman, jalan/aksesibilitas, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran. Secara lebih rinci, masing-masing isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang.

Sumber : Kajian dan Analisis Dokumen. RP2KPKP 2022-2025

| No | Aspek              | Isu dan Permasalahan  |
|----|--------------------|---|
| 1  | Permukiman         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 1.449 unit</li> <li>2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik</li> <li>3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat</li> </ol>           |
| 2  | Jalan dan Jembatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal</li> <li>2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar</li> <li>3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal</li> <li>4. Kondisi mantap Jalan Kota sebesar 89,72%</li> </ol> |

| No | Aspek     | Isu dan Permasalahan  |
|----|-----------|---|
| 3  | Air Minum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.</li> <li>3. Water Treatment Plan yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (24 jam).</li> <li>4. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.</li> <li>5. Capaian air minum layak dan aman sebesar 89, 87%</li> </ol> |
| 4  | Drainase  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya,</li> <li>2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.</li> <li>3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung.</li> <li>4. Kawasan permukiman yang tergenang.</li> <li>5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.</li> <li>6. Luasan Genangan sebesar 0 Ha.</li> </ol>   |

| No | Aspek       | Isu dan Permasalahan  |
|----|-------------|---|
| 5  | Air Limbah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah.</li> <li>2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.</li> <li>3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.</li> <li>4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;</li> <li>5. Capaian akses Sanitasi layak sebesar 99,20 %</li> </ol> |
| 6  | Persampahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.</li> <li>2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.</li> <li>3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian</li> <li>5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,</li> </ol>                             |
| 7  | Kebakaran   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.</li> </ol>   |

#### 4.2 Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan

Kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah menetapkan bahwa dalam mengidentifikasi kondisi kekumuhan ada 3 (tiga) aspek utama yang harus menjadi tinjauan, yakni:

##### A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan;

1. Kondisi Bangunan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran

##### B. Identifikasi Legalitas Lahan; dan

##### C. Identifikasi Pertimbangan Lain

Secara lebih rinci, masing-masing aspek tinjauan dalam penentuan urutan kawasan prioritas ini akan dijabarkan dengan masing-masing kriteria, indikator, parameter, nilai serta sumber data seperti yang terlampir pada tabel berikut ini:



Tabel 4.3 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

| ASPEK                             | KRITERIA  | INDIKATOR   | PARAMETER   | NILAI | SUMBER DATA  |
|-----------------------------------|---|---|---|-------|--|
| A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan |   |   |   |       |  |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG        | a. Ketidakteraturan Bangunan                          | 1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;<br>2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan        | 5     | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observas                |
|                                   |   |   | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan         | 3     |  |
|                                   |   |   | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan         | 1     |  |
|                                   | b. Tingkat kepadatan bangunan                         | 1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;<br>2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;<br>3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:<br>4. Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha;<br>5. Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.   | 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan     | 5     | Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokas |
|                                   |   |   | 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan      | 3     |  |
|                                   |   |   | 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan      | 1     |  |
|                                   | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:<br>1. Pengendalian dampak lingkungan<br>2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum   | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5     | Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi            |
|                                   |   |   | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis  | 3     |  |
|                                   |   |   | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis  | 1     |  |

| ASPEK                           | KRITERIA   | INDIKATOR   | PARAMETER  | NILAI | SUMBER DATA                                     |
|---------------------------------|--|---|--|-------|---|
|                                 |  | 3. Keselamatan bangunan gedung<br>4. Kesehatan bangunan gedung<br>5. Kenyamanan bangunan gedung<br>6. Kemudahan bangunan gedung                       |  |       |   |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN     | a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis                                 | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan     | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
|                                 |  |   | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan      | 3     |   |
|                                 |  |   | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan      | 1     |   |
|                                 | b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan                         | Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman  | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk       | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
|                                 |  |   | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk        | 3     |   |
|                                 |  |   | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk        | 1     |   |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Akses aman air minum tidak tersedia                         | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman      | 5     | Wawancara, Format Isian, Observasi              |
|                                 |  |   | 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman       | 3     |   |
|                                 |  |   | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman       | 1     |   |
|                                 | b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi | Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari                              | 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5     | Wawancara, Format Isian, Observasi              |
|                                 |  |   | 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  | 3     |   |
|                                 |  |   | 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  | 1     |   |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN  |  | Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan  | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau        | 5     | Wawancara,                                      |



| ASPEK                             | KRITERIA  | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | SUMBER DATA                                  |
|-----------------------------------|---|--|---|-------|--|
|                                   | a. Drainase lingkungan tidak tersedia   | saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan  | tidak terhubung dengan hierarki di atasnya  |       | Format Isian, Peta RIS, Observasi            |
|                                   |   |  | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya | 3     |  |
|                                   |   |  | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya | 1     |  |
|                                   | b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                    | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
|                                   |   |  | 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                     | 3     |  |
|                                   |   |  | 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                     | 1     |  |
|                                   | c. Kualitas Konstruksi Drainase   | Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan   | 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk                                | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
|                                   |   |  | 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk                                 | 3     |  |
|                                   |   |  | 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk                                 | 1     |  |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem pengelolaan air limbah tidak  | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak  | 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis                           | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta                |

memenuhi ...

11

| ASPEK                      | KRITERIA   | INDIKATOR   | PARAMETER   | NILAI | SUMBER DATA                                  |
|----------------------------|--|---|---|-------|--|
|                            | memenuhi persyaratan teknis  | terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat   | 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis                        | 3     | RIS, Observasi                               |
|                            |  |   | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis                        | 1     |  |
|                            | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:<br>1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;<br>2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.   | 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis                     | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
|                            |  |   | 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis                      | 3     |  |
|                            |  |   | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis                      | 1     |  |
| 6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis     | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:<br>1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;<br>2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;<br>3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan<br>4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
|                            |  |   | 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  | 3     |  |
|                            |  |   | 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  | 1     |  |
|                            |  |   |   |       |  |
|                            | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak                                     | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br>1. pewadahan dan pemilahan domestik;   | 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar                                  | 5     | Wawancara, Format Isian, Peta                |
|                            |  |   | 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar                                   | 3     |  |



| ASPEK   | KRITERIA                                       | INDIKATOR   | PARAMETER  | NILAI   | SUMBER DATA                                  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN   | memenuhi persyaratan teknis                    | 2. pengumpulan lingkungan;<br>3. pengangkutan lingkungan;<br>4. pengolahan lingkungan   | 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar  | 1   | RIS, Observasi                               |  |
|   |  |   | 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara   | 1   |  |  |
|   | a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:<br>1. pasokan air;<br>2. jalan lingkungan;<br>3. sarana komunikasi;<br>4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan         | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran  | 5   | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |  |
|   |  |   | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran   | 3   |  |  |
|   |  |   | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran   | 1   |  |  |
|   | b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia    | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:<br>1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);<br>2. mobil pompa;<br>3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan<br>4. peralatan pendukung lainnya | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran   | 5   | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |  |
|   |  |   | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran  | 3   |  |  |
|   |  |   | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran  | 1   |  |  |
|   | B. Identifikasi Legalitas Lahan                |   |  |   |  |  |
|   | Legalitas Lahan                                | a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan  | Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:<br>1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikasi hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau<br>2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah | Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (+)  | Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi |
| Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain |  |   |  | (-)   |  |  |

| ASPEK                             | KRITERIA                  | INDIKATOR  | PARAMETER  | NILAI | SUMBER DATA                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-------|--|
|                                   | b. Kesesuaian RTR         | Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).  | Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR   | (+)   | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
|                                   |                           |  | Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR   | (-)   |  |
| C. Identifikasi Pertimbangan Lain |                           |  |  |       |  |
| Petimbangan Lain                  | a. Nilai Strategis Lokasi | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :<br>1. fungsi strategis kabupaten/kota;<br>2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota  | Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota   | 5     | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
|                                   |                           |  | Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota  | 1     |  |
|                                   | b. Kependudukan           | Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :<br>1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;<br>2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha;<br>3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- 400 jiwa/ha;<br>4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha | 1. Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha<br>2. Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiw a/Ha | 5     | Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi  |
|                                   |                           |  | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha   | 3     |  |
|                                   |                           |  | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiw a/Ha   | 1     |  |
|                                   |                           |  |  |       |  |



| ASPEK | KRITERIA                               | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI  | SUMBER DATA                        |
|-------|--|--|---|--------|------------------------------------|
|       | c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa :<br>1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;<br>2. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;<br>3. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat | Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara<br>Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara | 5<br>1 | Wawancara, Format Isian, Observasi |

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai formula penilaian tersebut di atas, maka selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
  - a. Kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
  - b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
  - c. Kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
  - a. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15
  - b. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
  - c. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
  - a. Status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
  - b. Status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;



10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;

Tabel 4.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

| NO                                | ASPEK                   | KRITERIA                   | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|                                   |                         |                            |  |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
| A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan |                         |                            |  |   |       |                         |      |           |       |             |
| 1                                 | KONDISI BANGUNAN GEDUNG | Ketidakteraturan Bangunan  | 1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;  | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan    | 5     |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            |  | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan     | 3     |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            | 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan     | 1     |                         | 1    | 1         |       |             |
|                                   |                         | Tingkat kepadatan bangunan | 1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;   | 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 5     |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            | 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;   | 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan  | 3     |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            | 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:  |   |       |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            | 4. Untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;   | 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan  | 1     |                         |      |           |       |             |
|                                   |                         |                            | 5. Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.  |   |       |                         |      |           |       |             |



| NO | ASPEK                    | KRITERIA  | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|--------------------------|---|--|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |                          |   |  |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |                          | Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan          | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:<br>1. Pengendalian dampak lingkungan<br>2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum<br>3. Keselamatan bangunan gedung<br>4. kesehatan bangunan gedung<br>5. Kenyamanan bangunan gedung<br>6. Kemudahan bangunan gedung | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                          |   |  | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis  | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                          |   |  | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis  | 1     |                         |      |           |       |             |
| 2  | KONDISI JALAN LINGKUNGAN | Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis  | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan    | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                          |   |  | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan     | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                          |   |  | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan     | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |                          | Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan                         | Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman   | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk      | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                          |   |  | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk       | 3     |                         |      |           |       |             |



| NO | ASPEK                        | KRITERIA  | INDIKATOR  | PARAMETER  | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|------------------------------|---|--|--|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |                              |   |  |  |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |                              |   |  | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  | 1     |                         |      |           | 1     | 1           |
| 3  | KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | Akses aman air minum tidak tersedia                         | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa        | 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman  | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                              |   |  | 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman   | 3     |                         |      |           | 3     |             |
|    |                              |   |  | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman   | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |                              | Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi | Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari                                     | 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya                                     | 5     |                         |      |           | 5     |             |
|    |                              |   |  | 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya                                      | 3     |                         |      | 3         |       |             |
|    |                              |   |  | 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya                                      | 1     | 1                       | 1    |           |       | 1           |
|    |                              |   |  |  |       |                         |      |           |       |             |
| 4  | KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN  | Drainase lingkungan tidak tersedia                          | Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya | 5     |                         |      |           |       |             |



| NO | ASPEK | KRITERIA   | INDIKATOR  | PARAMETER  | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|-------|--|--|--|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |       |  |  |  |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |       |  | mengalir dan menimbulkan genangan  | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya  | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |       |  |  | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/ atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |       | Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                     | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |       |  |  | 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                      | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |       |  |  | 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun                                      | 1     |                         |      |           |       | 1           |
|    |       | Kualitas Konstruksi Drainase   | Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan   | 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk                                 | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |       |  |  | 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk                                  | 3     |                         |      |           |       |             |



| NO | ASPEK                          | KRITERIA  | INDIKATOR   | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|--------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |                                |   |   |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |                                |   |   | 25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk          | 1     | 1                       | 1    | 1         |       | 1           |
| 5  | KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis               | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat             | 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis   | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                                |   |   | 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis    | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                                |   |   | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis    | 1     |                         |      | 1         | 1     |             |
|    |                                | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:<br>1. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;<br>2. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. | 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |                                |   |   | 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                                |   |   | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  | 1     |                         |      | 1         | 1     | 1           |
|    |                                |   |   |   |       |                         |      |           |       |             |



| NO | ASPEK                   | KRITERIA  | INDIKATOR   | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|-------------------------|---|---|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |                         |   |   |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
| 6  | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:<br>1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;<br>2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;<br>3. Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan<br>4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 5     | 5                       | 5    | 5         | 5     | 5           |
|    |                         |   |   | 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                         |   |   | 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |                         | Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis     | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br>1. pewadahan dan pemilahan domestik;<br>2. pengumpulan lingkungan;<br>3. pengangkutan lingkungan;<br>4. pengolahan lingkungan  | 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar                                  | 5     | 5                       | 5    | 5         |       | 5           |
|    |                         |   |   | 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar                                   | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |                         |   |   | 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar                                   | 1     |                         |      |           |       |             |

11



| NO | ASPEK                        | KRITERIA                                    | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |           |           |           |             |
|----|------------------------------|---|--|---|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|    |                              |   |  |   |       | Keunekai                | Paya      | Beurawang | Jaboi     | Krueng Raya |
| 7  | KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN   | Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :<br>1. Pasokan air;<br>2. Jalan lingkungan;<br>3. Sarana komunikasi;<br>4. Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan         | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran   | 5     |                         |           |           |           |             |
|    |                              |   |  | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran  | 3     |                         | 3         |           |           |             |
|    |                              |   |  | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran  | 1     | 1                       |           |           |           | 1           |
|    |                              | Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia    | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :<br>1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);<br>2. Mobil pompa;<br>3. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan<br>4. Peralatan pendukung lainnya | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran  | 5     | 5                       | 5         | 5         | 5         | 5           |
|    |                              |   |  | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran   | 3     |                         |           |           |           |             |
|    |                              |   |  | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran   | 1     |                         |           |           |           |             |
|    |                              |   |  | <b>SUBTOTAL</b>   |       | <b>18</b>               | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>26</b> | <b>21</b>   |
| 1  | IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN |   |  |   |       |                         |           |           |           |             |
|    | Legalitas Lahan              | Kejelasan Status Penguasaan Lahan           | Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:<br>1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk   | Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (+)   | +1                      | +1        | +1        | +1        | +1          |



| NO                                    | ASPEK             | KRITERIA               | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |           |           |           |             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--|---|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                       |                   |                        |  |   |       | Keunekai                | Paya      | Beurawang | Jaboi     | Krueng Raya |
|                                       |                   |                        | dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau<br>2. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah | Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (-)   |                         |           |           |           |             |
|                                       |                   | Kesesuaian RTR         | Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat  | Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR  | (+)   | +1                      | +1        | +1        | +1        | +1          |
|                                       |                   |                        | Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).  | Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR                          | (-)   |                         |           |           |           |             |
|                                       |                   |                        |  | <b>SUBTOTAL</b>   |       | <b>+2</b>               | <b>+2</b> | <b>+2</b> | <b>+2</b> | <b>+2</b>   |
| <b>IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN</b> |                   |                        |  |   |       |                         |           |           |           |             |
|                                       | Pertimbangan Lain | Nilai Strategis Lokasi | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :   | Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota  | 5     | 5                       | 5         | 5         | 5         | 5           |

| NO | ASPEK | KRITERIA                            | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|-------|-------------------------------------|--|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |       |                                     |  |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |       |                                     | 1. Fungsi strategis kabupaten/kota;<br>2. Bukan fungsi strategis kabupaten/kota  | Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota                           | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |       |                                     | Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :<br>1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;<br>2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha;<br>3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- 400 jiwa/ha;<br>4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha | Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha   | 5     |                         |      |           |       |             |
|    |       |                                     |  | Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha    |       |                         |      |           |       |             |
|    |       |                                     |  | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha                              | 3     |                         |      |           |       |             |
|    |       |                                     |  | Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha                                   | 1     | 1                       | 1    | 1         | 1     | 1           |
|    |       | Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa   | Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara | 5     | 5                       | 5    | 5         | 5     | 5           |



| NO | ASPEK | KRITERIA                                       | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|-------|--|--|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |       |  |  |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |       |  | 1. Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;<br>2. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;<br>3. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat | Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara            | 1     |                         |      |           |       |             |
|    |       | Keterjangkauan Lokasi dengan Pusat Kota Sabang | Pertimbangan jarak tempuh dan akses lokasi perumahan dan permukiman dengan pusat kota sabang.  | Lokasi perumahan atau permukiman memiliki kemudahan akses dan jangkauan dengan pusat Kota Sabang              | 5     | 5                       | 5    |           |       | 5           |
|    |       |  |  | Lokasi perumahan atau permukiman belum memiliki kemudahan akses yang memadai dari jangkauan pusat Kota Sabang | 1     |                         |      | 1         | 1     |             |
|    |       | Potensi pengembangan perubahan wajah           | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa<br>1. Potensi pengembangan perubahan wajah kawasan  | Lokasi perumahan atau permukiman memiliki potensi pengembangan perubahan wajah kawasan kumuh.                 | 5     | 5                       |      |           |       | 5           |

| NO | ASPEK | KRITERIA                                       | INDIKATOR  | PARAMETER   | NILAI | Lokasi Permukiman Kumuh |      |           |       |             |
|----|-------|--|--|---|-------|-------------------------|------|-----------|-------|-------------|
|    |       |  |  |   |       | Keunekai                | Paya | Beurawang | Jaboi | Krueng Raya |
|    |       | kawasan kumuh                                  | perumahan dan permukiman kumuh<br>2. Potensi lokasi yang memiliki karakteristik atau tema tertentu   | Lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki potensi pengembangan perubahan wajah kawasan kumuh.   | 1     |                         | 1    | 1         | 1     |             |
|    |       | Kolaborasi penanganan kumuh dan penganggara n. | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa<br>1. Memiliki perencanaan yang berdampingan dan terintegrasi dengan kawasan perumahan dan permukiman kumuh<br>2. Keterlibatan pihak stake holder dalam perencanaan | Lokasi perumahan atau permukiman kumuh memiliki potensi kolaborasi penanganan kumuh dan penganggaraan | 5     |                         |      |           |       | 5           |
|    |       |  |  | Lokasi perumahan atau permukiman kumuh memiliki potensi kolaborasi penanganan kumuh dan penganggaraan | 1     | 1                       | 1    | 1         | 1     |             |
|    |       |  |  | SUBTOTAL  |       | 22                      | 18   | 14        | 14    | 26          |
|    |       |  |  | GRAND TOTAL   |       | 42                      | 41   | 38        | 42    | 44          |

Selanjutnya ...

11



Selanjutnya, rekapitulasi hasil penilaian, penentuan klasifikasi, dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

| NO | GAMPONG        | Jumlah<br>Nilai<br>Penilaian<br>Kriteria<br>dan<br>Indikator<br>Kekumu-<br>han | TINGKAT KEKUMUHAN |                 |                 | JUMLAH<br>NILAI ASPEK<br>PERTIMBAN-<br>GAN LAIN | PERTIMBANGAN LAIN |         |        | LEGALITAS LAHAN |                | KLASI-<br>FIKASI | SKALA<br>PRIORITAS |
|----|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|---------|--------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|
|    |                |  | KUMUH<br>BERAT    | KUMUH<br>SEDANG | KUMUH<br>RINGAN |   | TINGGI            | SEDANG  | REDAH  | LEGAL           | TIDAK<br>LEGAL |                  |                    |
|    |                |  | (60-80)           | (38-59)         | (16-37)         |   | (21-30)           | (11-20) | (1-10) | NILAI (+)       | NILAI (-)      |                  |                    |
| 1  | Keunekai       | 18   |                   |                 | √               | 22  | √                 |         |        | √               |                | C1               | 2                  |
| 2  | Paya           | 21   |                   |                 | √               | 18  |                   | √       |        | √               |                | C3               | 3                  |
| 3  | Beurawang      | 22   |                   |                 | √               | 14  |                   | √       |        | √               |                | C3               | 3                  |
| 4  | Jaboi          | 26   |                   |                 | √               | 14  |                   | √       |        | √               |                | C3               | 2                  |
| 5  | Krueng<br>Raya | 21   |                   |                 | √               | 26  | √                 |         |        | √               |                | C1               | 1                  |

#### 4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Target 0% permukiman kumuh di tahun 2024 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang sangat serius dan program-program inovatif yang dapat menggerakkan seluruh pihak secara intensif dalam menangani permukiman kumuh, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh untuk mengimplementasikan program kolaborasi sebagai platform dalam penanganan kumuh antar sektor pembangunan. Dalam program tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah (Pemda) akan jadi pelaku utama dalam penanganan, dimana seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana investasi akan disusun oleh Pemda. Program-program yang ada di pemerintah pusat kemudian hanya akan menjadi pendamping daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program, dan program yang ada di pusat akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah. Berikut ini adalah tabel

kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman skala kota dan kawasan.



Tabel 4.6 Rumusan Kebutuhan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

| NO | KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG   | LOKASI   | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW  | KEBUTUHAN PENANGANAN   |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   |  |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  |
| 1  | <input type="checkbox"/> Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).<br><input type="checkbox"/> Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik<br><input type="checkbox"/> Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni.<br><input type="checkbox"/> Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru<br><input type="checkbox"/> Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman<br><input type="checkbox"/> Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan<br><input type="checkbox"/> Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas | Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni  |
| 2  | <input type="checkbox"/> Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal<br><input type="checkbox"/> Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar<br><input type="checkbox"/> Konektivitas jaringan jalan belum optimal                          | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang |   | <input type="checkbox"/> Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman   | <input type="checkbox"/> Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. |

| NO | KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG   | LOKASI   | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN   |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   |  |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   |
| 3. | <input type="checkbox"/> Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi<br><input type="checkbox"/> Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.<br><input type="checkbox"/> Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.                     | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.  | <input type="checkbox"/> Pemeliharaan sumber air bersih.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih<br><input type="checkbox"/> Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum | <input type="checkbox"/> Pengamanan sumber dan sistem air minum<br><input type="checkbox"/> Pembangunan reservoir skala komunitas                               |
| 4  | <input type="checkbox"/> Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya,<br><input type="checkbox"/> Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.<br><input type="checkbox"/> Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung.<br><input type="checkbox"/> Kawasan permukiman yang tergenang.<br><input type="checkbox"/> Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman. | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase.<br><input type="checkbox"/> Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan saluran air hujan secara terbuka didaerah kerapatan bangunan rendah.<br><input type="checkbox"/> Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup. | <input type="checkbox"/> Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.   | <input type="checkbox"/> Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase.<br><input type="checkbox"/> Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan. |



| NO | KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG   | LOKASI   | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN   |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   |  |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  |
| 5  | <input type="checkbox"/> Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah.<br><input type="checkbox"/> Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.   | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> . Meningkatkan pelayanan sanitasi yang berkelanjutan<br><input type="checkbox"/> Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga<br><input type="checkbox"/> Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)   | <input type="checkbox"/> . Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. | <input type="checkbox"/> Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.   |
|    | <input type="checkbox"/> Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.<br><input type="checkbox"/> Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;   |  |  | <input type="checkbox"/> .Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).  | <input type="checkbox"/> Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan   |
| 6  | <input type="checkbox"/> Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.<br><input type="checkbox"/> Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.<br><input type="checkbox"/> Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.<br><input type="checkbox"/> Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Meningkatkan sarana dan prasarana layanan persampahan<br><input type="checkbox"/> Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan<br><input type="checkbox"/> Meningkatkan pelayanan persampahan<br><input type="checkbox"/> Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan<br><input type="checkbox"/> penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang).<br><input type="checkbox"/> Pengadaan pengelolaan alat angkut. | <input type="checkbox"/> Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.<br><input type="checkbox"/> Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.          | <input type="checkbox"/> Peningkatan dan pengembangan TPA<br><input type="checkbox"/> Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan<br><input type="checkbox"/> Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan. |

| NO | KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG  | LOKASI   | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN  |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  |  |  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN   |
|    | <input type="checkbox"/> Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.                            |  |  |   |   |
| 7  | <input type="checkbox"/> Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana<br><input type="checkbox"/> Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat.<br><input type="checkbox"/> Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman;<br><input type="checkbox"/> Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran;<br><input type="checkbox"/> Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran                    | <input type="checkbox"/> Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran<br><input type="checkbox"/> Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran | <input type="checkbox"/> Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran. |
| 8  | <input type="checkbox"/> Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,                             | Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang | <input type="checkbox"/> Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan.<br><input type="checkbox"/> Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;<br><input type="checkbox"/> Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;<br><input type="checkbox"/> Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional. |   |   |



## BAB V

### KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### 5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor

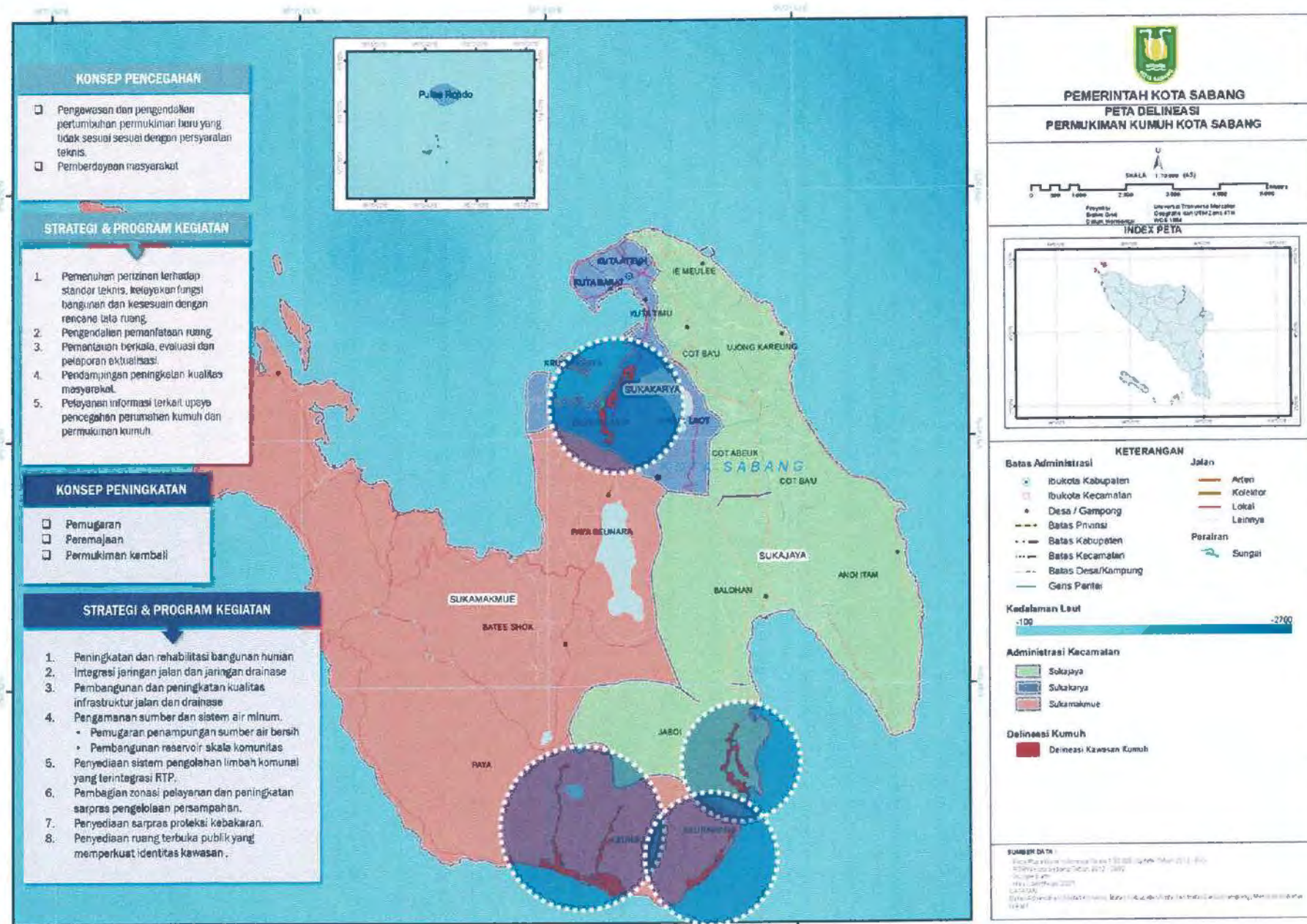
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Konsep dan strategi ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang dimana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota ini diangkat dari kondisi aktual yang ada di Kota Sabang disertai isu-isu strategis apa saja yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Sabang yang dengan demikian akan diketahui kebutuhan penanganan. Seperti yang telah terjabar pada bab sebelumnya, kebutuhan penanganan kekumuhan untuk skala perkotaan mencakup delapan sektor, seperti pada tabel berikut:

Gambar 5.1...

11



Gambar 5.1 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota - Kota Sabang. Sumber : Hasil Pemetaan, 2021

Tabel 5.1...



Tabel 5.1

Tabel Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota

| NO | SEKTOR     | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA  | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW  | KEBUTUHAN PENANGANAN   |  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN |  |
|----|------------|--|---|--|--|--|---|---------------------|--|
|    |            |  |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN          | PENINGKATAN  |
| 1  | PERMUKIMAN | <p>1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p> <p>2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik</p> <p>3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni.</li> <li>• Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru</li> <li>• Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman</li> <li>• Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan</li> <li>• Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas</li> </ul> | Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan Pengendalian</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemugaran</li> <li>• Penataan Kawasan Permukiman / Peremajaan</li> <li>• Permukiman kembali</li> </ul> |                     | Rehabilitasi bangunan secara bertahap sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sehat layak huni |

| NO | SEKTOR                 | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA  | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN   |   | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |  |
|----|------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|
|    |                        |  |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  |
| 2  | JALAN & AKSESI-BILITAS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal</li> <li>2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar</li> <li>3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal</li> </ol> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan permukiman</li> <li>• Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman.</li> <li>• Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peremajaan</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan lingkungan</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.</li> <li>• Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi yang belum terlayani prasarana jalan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan eksisting.</li> <li>• Peningkatan kualitas jalan lingkungan.</li> </ul> |
| 3. | AIR MINUM              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air</li> </ol>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan sumber air bersih.</li> <li>• Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan sumber dan sistem air minum</li> <li>• Pembangunan reservoir skala komunitas</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan Pengendalian</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan sumber dan sistem air minum.</li> <li>• Pengelompokan zonasi kebutuhan air minum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan dan penertiban pemasangan pipa distribusi ilegal.</li> <li>• Pemugaran jaringan pipa distribusi.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan rumah pompa dan reservoir skala komunitas.</li> <li>• Pemugaran berkala</li> </ul>  |



| NO | SEKTOR | KONDISI<br>AKTUAL DAN<br>ISU STRATEGIS<br>KOTA   | KEBIJAKAN<br>PENANGANAN<br>PERMUKIMAN<br>KUMUH HASIL<br>OVERVIEW | KEBUTUHAN PENANGANAN  |             | KONSEP PENANGANAN |  | STRATEGI PENANGANAN |  |
|----|--------|--|--|---|-------------|-------------------|--|---------------------|--|
|    |        |  |  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN | PENCEGAHAN        | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN          | PENINGKATAN  |
|    |        | <p>minum terlindungi</p> <p>2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.</p> <p>3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.</p> | bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.              | <p>penampungan air bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum</li> </ul> |             |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan reservoir skala komunitas</li> <li>• Peningkatan jangkauan pelayanan unit penyediaan air minum</li> </ul> |                     | <p>sumber dan sarana penampungan air bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jangkauan jaringan distribusi air bersih.</li> </ul> |

| NO | SEKTOR   | KONDISI<br>AKTUAL DAN<br>ISU STRATEGIS<br>KOTA   | KEBIJAKAN<br>PENANGANAN<br>PERMUKIMAN<br>KUMUH HASIL<br>OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN   |  | KONSEP PENANGANAN   |  | STRATEGI PENANGANAN  |   |
|----|----------|--|--|--|--|---|--|--|---|
|    |          |  |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   |
| 4  | DRAINASE | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya,</li> <li>2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.</li> <li>3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung.</li> <li>4. Kawasan permukiman yang tergenang.</li> <li>5. Belum optimalnya fungsi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase</li> <li>• Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase.</li> <li>• Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.</li> <li>• Pembangunan saluran air hujan secara terbuka didaerah kerapatan bangunan rendah.</li> <li>• Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase.</li> <li>• Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.</li> <li>• Sosialisasi dan pendampingan masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.</li> <li>• Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan .</li> <li>• Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan drainase.</li> <li>• Peningkatan kualitas drainase</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.</li> <li>• Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas jaringan Drainase kawasan permukiman</li> </ul> |



| NO | SEKTOR     | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA  | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW  | KEBUTUHAN PENANGANAN  |  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |   |
|----|------------|--|---|---|--|--|---|--|---|
|    |            |  |   | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN   |
|    |            | drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.   | menggunakan saluran tertutup.   |   |  |  |   |  |   |
| 5  | AIR LIMBAH | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah.</li> <li>2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.</li> <li>3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan</li> <li>• Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga</li> <li>• Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.</li> <li>• Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.</li> <li>• Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.</li> <li>• Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan berkala</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelompokan layanan sistem pengolahan limbah komunal.</li> <li>• Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air limbah komunal</li> <li>• Pemugaran sarana dan prasarana pengolahan air limbah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik</li> <li>• Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal pada permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi.</li> <li>• Pembangunan sistem pengolahan limbah rumah tangga setempat pada kawasan perumahan dengan tingkat</li> </ul> |

| NO | SEKTOR | KONDISI<br>AKTUAL DAN<br>ISU STRATEGIS<br>KOTA  | KEBIJAKAN<br>PENANGANAN<br>PERMUKIMAN<br>KUMUH HASIL<br>OVERVIEW | KEBUTUHAN PENANGANAN |             | KONSEP PENANGANAN |             | STRATEGI PENANGANAN |                          |
|----|--------|---|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
|    |        |   |  | PENCEGAHAN           | PENINGKATAN | PENCEGAHAN        | PENINGKATAN | PENCEGAHAN          | PENINGKATAN              |
|    |        | sanitasi yang layak baik.<br>4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan; |  |                      |             |                   |             |                     | kepadatan sedang-rendah. |



| NO | SEKTOR      | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA   | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN  |   | KONSEP PENANGANAN   |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
|    |             |   |  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN   | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN   |
| 6  | PERSAMPAHAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.</li> <li>2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.</li> <li>3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana layanan persampahan</li> <li>• Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>• Meningkatkan pelayanan persampahan</li> <li>• Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan</li> <li>• penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.</li> <li>• Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pengembangan TPA</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>• Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.</li> <li>• Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan dikawasan permukiman.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pengembangan TPA Lhoek Batee.</li> <li>• Pengelompokan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layanan tingkat dusun.</li> <li>• Peningkatan kuantitas dan kuantitas sarpras persampahan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan</li> <li>• Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan.</li> <li>• Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasta mampu mengelola persampahan dengan baik.</li> <li>• Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pengembangan TPA.</li> <li>• Peningkatan jumlah TPS pada kawasan permukiman.</li> <li>• Peningkatan jangkauan dan kuantitas layanan pengangkutan persampahan.</li> <li>• Pengadaan alat pengangkutan persampahan.</li> </ul> |

| NO | SEKTOR             | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA  | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN  |  | KONSEP PENANGANAN  |  | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|--------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
|    |                    |  |  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN   |
|    |                    | 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan pengelolaan alat angkut.</li> </ul>   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | PROTEKSI KEBAKARAN | 1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana</li> <li>• Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat.</li> <li>• Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran</li> <li>• Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran.</li> <li>• Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran.</li> <li>• Penyediaan APAR.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi masyarakat mengenai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana di semua Dusun.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran.</li> <li>• Rencana pembangunan sistem hidran di kawasan permukiman.</li> <li>• Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran.</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul> |



| NO | SEKTOR              | KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA                                     | KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW   | KEBUTUHAN PENANGANAN |             | KONSEP PENANGANAN |             | STRATEGI PENANGANAN  |  |
|----|---------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--|--|
|    |                     |   |  | PENCEGAHAN           | PENINGKATAN | PENCEGAHAN        | PENINGKATAN | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN  |
|    |                     |   | dan jasa serta kawasan permukiman;<br>• Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran;<br>• Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran  |                      |             |                   |             |  |  |
| 8  | RUANG TERBUKA HIJAU | 1. Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman , | • Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota /lingkungan.<br>• Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama |                      |             |                   |             | • Pemugaraan RTP eksisting.<br>• Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman. | • Optimalisasi fungsi RTP pada kawasan permukiman.<br>• Penyediaan RTP yang sesuai dengan karakter dan identitas kawasan permukiman. |

kawasan...

11

| NO | SEKTOR | KONDISI<br>AKTUAL DAN<br>ISU STRATEGIS<br>KOTA | KEBIJAKAN<br>PENANGANAN<br>PERMUKIMAN<br>KUMUH HASIL<br>OVERVIEW  | KEBUTUHAN PENANGANAN |             | KONSEP PENANGANAN |             | STRATEGI PENANGANAN |             |
|----|--------|--|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|    |        |  |   | PENCEGAHAN           | PENINGKATAN | PENCEGAHAN        | PENINGKATAN | PENCEGAHAN          | PENINGKATAN |
|    |        |  | kawasan permukiman<br>• Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;<br>• Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional. |                      |             |                   |             |                     |             |

## 5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang berada pada empat kawasan yang memiliki karakteristik dan tipologi kumuh yang serupa. Namun tiap-tiap kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga memerlukan konsep dan strategi penanganan yang berbeda. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan Kota Sabang adalah sebagai berikut :



Tabel 5.2 Tabel Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan

| NO                  | SEKTOR     | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN   |  | STRATEGI PENANGANAN  |   |
|---------------------|------------|---|---|--|--|---|
|                     |            |   | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  |
| KAWASAN KRUENG RAYA |            |   |   |  |  |   |
| A                   | PERMUKIMAN | <div><input type="checkbox"/> 8,46% bangunan permukiman belum teratur.<br/>Beberapa unit bangunan berada pada sempadan alur.</div> <div><input type="checkbox"/> 15,02% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis dan berada pada area yang terdampak bencana tsunami pada tahun 2004.</div> | <div><input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian</div> <div><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat</div> | <div><input type="checkbox"/> Pemugaran</div> <div><input type="checkbox"/> Permukiman kembali</div> | <div><input type="checkbox"/> Melakukan sosialisasi tentang lingkungan sehat dan layak huni.</div> <div><input type="checkbox"/> Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.</div>  | <div><input type="checkbox"/> Penataan kawasan permukiman.</div> <div><input type="checkbox"/> Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.</div>   |
| B                   | JALAN      | <div><input type="checkbox"/> 12,74% kawasan permukiman belum terlayani oleh jaringan jalan lingkungan.</div> <div><input type="checkbox"/> 9,90% jalan lingkungan dalam kondisi rusak.</div>   | <div><input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian</div> <div><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat</div> | <div><input type="checkbox"/> Pemugaran</div> <div><input type="checkbox"/> Peremajaan</div>         | <div><input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman.</div> <div><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.</div> <div><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang</div> | <div><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas jalan lingkungan</div> <div><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting.</div> <div><input type="checkbox"/> Rehab jembatan.</div> |

sesuai ...

| NO | SEKTOR    | PERMASALAHAN   | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |   |
|----|-----------|--|--|---|--|---|
|    |           |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  |
|    |           |  |  |   | sesuai arahan rencana tata ruang.  |   |
| C  | AIR MINUM | <input type="checkbox"/> 16,35% penduduk belum terpenuhi kebutuhan air minum.  | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Pemeliharaan sumber air bersih<br><input type="checkbox"/> Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.   | <input type="checkbox"/> Pembangunan reservoir komunal skala komunitas.<br><input type="checkbox"/> Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.  |
| D  | DRAINASE  | <input type="checkbox"/> 7,41% kawasan permukiman tidak mampu mengalirkan limpasan air.<br><input type="checkbox"/> 15,22% kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase. Sebagian sistem jaringan drainase lingkungan tidak saling terkoneksi.<br><input type="checkbox"/> 42,24% jaringan drainase lingkungan memiliki kualitas yang tidak sesuai standar teknis. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan .<br><input type="checkbox"/> Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan. | <input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman. |



| NO | SEKTOR      | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |  |
|----|-------------|---|--|---|---|--|
|    |             |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS   |
| E  | SANITASI    | <input type="checkbox"/> 3,19% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 18,73% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis.  | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola limbah<br><input type="checkbox"/> Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan  | <input type="checkbox"/> Pembangunan MCK komunal<br><input type="checkbox"/> Pembangunan IPAL komunal  |
| F  | PERSAMPAHAN | <input type="checkbox"/> 89,84% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. Sampah domestik dibuang ke badan air.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.<br><input type="checkbox"/> Pelatihan pengelolaan sampah 3R.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan.<br><input type="checkbox"/> Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan. | <input type="checkbox"/> Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layananan tingkat dusun.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan TPS.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan alat pengangkutan persampahan. |

| NO                     | SEKTOR               | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |  |
|------------------------|----------------------|---|--|---|--|--|
|                        |                      |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS   |
| G                      | PROTEKSI KEBAKARAN   | <input type="checkbox"/> 12,05% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran<br><input type="checkbox"/> Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.   | <input type="checkbox"/> Pembangunan posko tanggap bencana.<br><input type="checkbox"/> Penyediaan hydran umum.  |
| H                      | RUANG TERBUKA PUBLIK | <input type="checkbox"/> Belum optimalnya fungsi RTP eksisting.<br><input type="checkbox"/> Belum adanya RTP yang memadai.  |  |   | <input type="checkbox"/> Pemugaraan RTP eksisting.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.  | <input type="checkbox"/> Pembangunan RTP skala komunitas<br><input type="checkbox"/> Integrasi desain RTP yang sesuai dengan karakter kawasan krueng raya. |
| KAWASAN PAYA-KEUNEUKAI |                      |   |  |   |  |  |
| A                      | PERMUKIMAN           | <input type="checkbox"/> 28,50% bangunan permukiman belum teratur. Sebagian permukiman berada di pesisir pantai.<br><input type="checkbox"/> 17,30% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis.   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Melakukan sosialisasi tentang rumah dan lingkungan sehat dan layak huni.<br><input type="checkbox"/> Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Penataan kawasan permukiman.<br>Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.  |



| NO | SEKTOR    | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN   |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|-----------|---|---|---|---|---|
|    |           |   | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  |
| B  | JALAN     | <input type="checkbox"/> 12,68% jalan lingkungan dalam kondisi rusak.         | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat  | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas jalan lingkungan<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting.<br>Rehab jembatan.   |
| C  | AIR MINUM | <input type="checkbox"/> 42,69% penduduk belum terpenuhi kebutuhan air minum. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat. | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Pemeliharaan sumber air bersih.<br><input type="checkbox"/> Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.   | <input type="checkbox"/> Pemugaran fasilitas penampungan air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih. |

| NO | SEKTOR   | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|----------|---|--|---|---|---|
|    |          |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  |
| D  | DRAINASE | <input type="checkbox"/> 35,37% jaringan drainase lingkungan memiliki kualitas yang tidak sesuai standar teknis.  | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan .<br><input type="checkbox"/> Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman. |
| E  | SANITASI | <input type="checkbox"/> 7,76% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 7,76% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola limbah<br><input type="checkbox"/> Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop  | <input type="checkbox"/> Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan IPAL komunal   |



| NO | SEKTOR               | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |  |
|----|----------------------|---|--|---|---|--|
|    |                      |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS   |
|    |                      |   |  |   | Buang Air Besar Sembarangan   |  |
| F  | PERSAMPAHAN          | <input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. Sampah domestik dibuang ke badan air.<br><input type="checkbox"/> 88,58% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.<br><input type="checkbox"/> Pelatihan pengelolaan sampah 3R.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan.<br><input type="checkbox"/> Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan. | <input type="checkbox"/> Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layanan tingkat dusun.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan TPS.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan alat pengangkutan persampahan. |
| G  | PROTEKSI KEBAKARAN   | <input type="checkbox"/> 52,67% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran.   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran<br><input type="checkbox"/> Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.  | <input type="checkbox"/> Pembangunan posko tanggap bencana.<br><input type="checkbox"/> Penyediaan hydran umum.  |
| H  | RUANG TERBUKA PUBLIK | <input type="checkbox"/> Belum optimalnya fungsi RTP eksisting.<br><input type="checkbox"/> Belum adanya RTP yang memadai.  |  |   | <input type="checkbox"/> Pemugaran RTP eksisting.   | <input type="checkbox"/> Pembangunan RTP skala komunitas   |

| NO            | SEKTOR     | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |  |
|---------------|------------|---|--|---|--|--|
|               |            |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS   |
|               |            |   |  |   | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.  | <input type="checkbox"/> Optimalisasi RTP eksisting  |
| KAWASAN JABOI |            |   |  |   |  |  |
| A             | PERMUKIMAN | <input type="checkbox"/> 14,55% bangunan permukiman belum teratur<br><input type="checkbox"/> 9,70% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Melakukan sosialisasi tentang rumah dan lingkungan sehat dan layak huni.<br><input type="checkbox"/> Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Penataan kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.   |
| B             | JALAN      | <input type="checkbox"/> 33,40% jalan lingkungan dalam kondisi rusak  | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.                         | <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas jalan lingkungan<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting.<br><input type="checkbox"/> |



| NO | SEKTOR    | PERMASALAHAN   | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |  |
|----|-----------|--|--|---|---|--|
|    |           |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS   |
|    |           |  |  |   | <input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.   |  |
| C  | AIR MINUM | <input type="checkbox"/> 54,49% masyarakat belum memiliki akses aman air minum<br><input type="checkbox"/> 91,57% masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air minum   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Pemeliharaan sumber air bersih.<br><input type="checkbox"/> Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.   | <input type="checkbox"/> Pemanfaatan sumber mata air sebagai sumber air baku.<br><input type="checkbox"/> Pemugaran fasilitas penampungan air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih. |
| D  | DRAINASE  | <input type="checkbox"/> 19,69% kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase.<br><input type="checkbox"/> 10,82% jaringan drainase lingkungan memiliki kualitas yang tidak sesuai standar teknis | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk | <input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman.  |

| NO | SEKTOR      | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|-------------|---|--|---|---|---|
|    |             |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  |
|    |             |   |  |   | durabilitas drainase lingkungan .<br><input type="checkbox"/> Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. | Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman.   |
| E  | SANITASI    | <input type="checkbox"/> 28,09% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 28,09% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis.                 | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola limbah<br><input type="checkbox"/> Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan  | <input type="checkbox"/> Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan IPAL komunal |
| F  | PERSAMPAHAN | <input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.   | <input type="checkbox"/> Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan   |



| NO                | SEKTOR               | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |  |
|-------------------|----------------------|---|--|---|--|--|
|                   |                      |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS   |
|                   |                      | pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman.  |  |   | <input type="checkbox"/> Pelatihan pengelolaan sampah 3R.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan.<br><input type="checkbox"/> Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan. | layanan tingkat dusun.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan TPS.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan alat pengangkutan persampahan. |
| G                 | PROTEKSI KEBAKARAN   | <input type="checkbox"/> 18,79% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran<br>Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.  | <input type="checkbox"/> Pembangunan posko tanggap bencana.<br>Penyediaan hydran umum.   |
| H                 | RUANG TERBUKA PUBLIK |   |  |   | <input type="checkbox"/> Pemugaraan RTP eksisting.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.  | <input type="checkbox"/> Pembangunan RTP skala komunitas<br>Optimalisasi RTP eksisting   |
| KAWASAN BEURAWANG |                      |   |  |   |  |  |
| A                 | PERMUKIMAN           | <input type="checkbox"/> 21,84% bangunan permukiman belum teratur.<br><input type="checkbox"/> 27,59% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis.   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Melakukan sosialisasi tentang rumah dan   | <input type="checkbox"/> Penataan kawasan permukiman.  |

| NO | SEKTOR    | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |  |
|----|-----------|---|--|---|---|--|
|    |           |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS   |
|    |           |   |  |   | lingkungan sehat dan layak huni.<br><input type="checkbox"/> Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.   | <input type="checkbox"/> Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.  |
| B  | JALAN     | <input type="checkbox"/> 7,41% jalan lingkungan dalam kondisi rusak   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemherdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas jalan lingkungan<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting. |
| C  | AIR MINUM | <input type="checkbox"/> 1,32% masyarakat belum memiliki akses aman air minum<br><input type="checkbox"/> 67,11% masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air minum | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Pemeliharaan sumber air bersih.<br><input type="checkbox"/> Pengawasan dan pengendalian  | <input type="checkbox"/> Pemugaran fasilitas penampungan air bersih.   |



| NO | SEKTOR   | PERMASALAHAN   | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|----------|--|--|---|---|---|
|    |          |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  |
|    |          |  |  |   | kuantitas distribusi air bersih.  | <input type="checkbox"/> Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.   |
| D  | DRAINASE | <input type="checkbox"/> 44,95% kualitas kontruksi jaringan drainase lingkungan mengalami kerusakan. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan .<br><input type="checkbox"/> Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. | <input type="checkbox"/> Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir.<br><input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman.<br><input type="checkbox"/> Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman. |

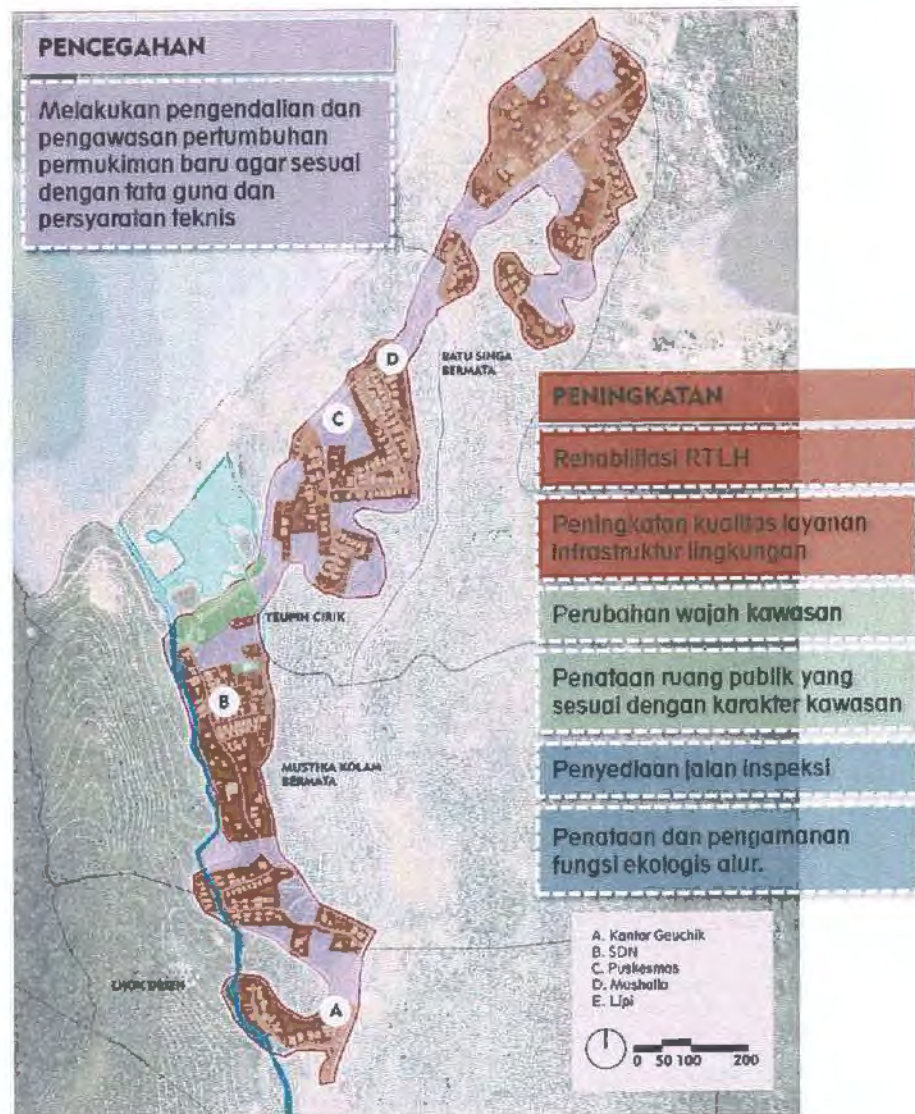
| NO | SEKTOR      | PERMASALAHAN   | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN   |   |
|----|-------------|--|--|---|---|---|
|    |             |  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN  | PENINGKATAN KUALITAS  |
| E  | SANITASI    | <input type="checkbox"/> 32,89% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 32,89% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis   | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola limbah<br><input type="checkbox"/> Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan  | <input type="checkbox"/> Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan.<br><input type="checkbox"/> Pembangunan IPAL komunal   |
| F  | PERSAMPAHAN | <input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman. | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.<br><input type="checkbox"/> Pelatihan pengelolaan sampah 3R.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan.<br><input type="checkbox"/> Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan. | <input type="checkbox"/> Pengelompokan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layanan tingkat dusun.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan TPS.<br><input type="checkbox"/> Pengadaan alat pengangkutan persampahan. |



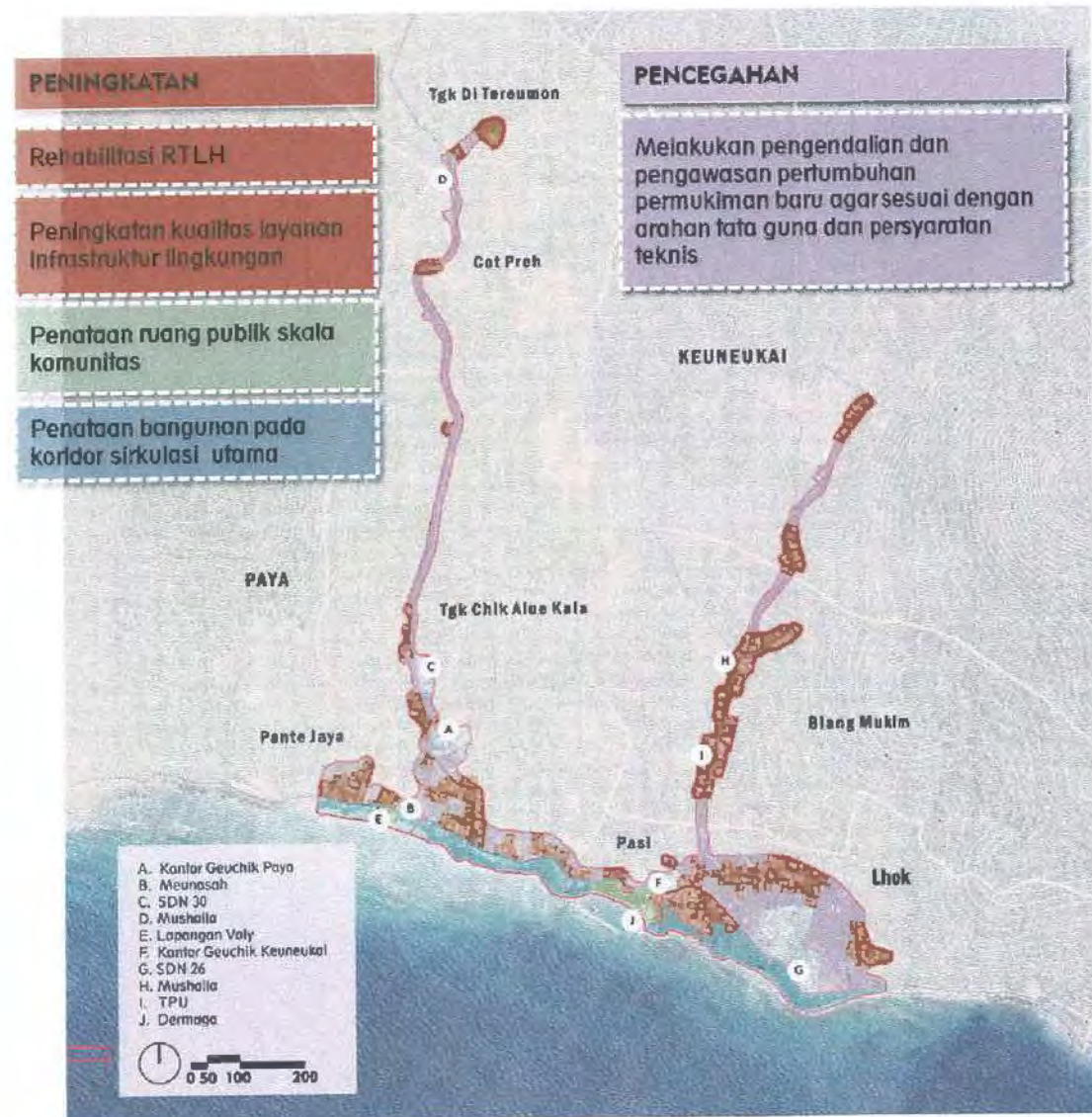
| NO | SEKTOR             | PERMASALAHAN  | KONSEP PENANGANAN  |   | STRATEGI PENANGANAN  |   |
|----|--------------------|---|--|---|--|---|
|    |                    |   | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  | PENCEGAHAN   | PENINGKATAN KUALITAS  |
| G  | PROTEKSI KEBAKARAN | <input type="checkbox"/> 0,00% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran.<br><input type="checkbox"/> 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran | <input type="checkbox"/> Pengawasan dan Pengendalian<br><input type="checkbox"/> Pemberdayaan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Pemugaran<br><input type="checkbox"/> Peremajaan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran<br><input type="checkbox"/> Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana. | <input type="checkbox"/> Pembangunan posko tanggap bencana.<br><input type="checkbox"/> Penyediaan hydran umum. |
|    |                    |   |  |   | <input type="checkbox"/> Pemugaraan RTP eksisting.<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.                                    | <input type="checkbox"/> Pembangunan RTP skala komunitas<br><input type="checkbox"/> Optimaliasi RTP eksisting  |



Gambar 5.2 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Krueng Raya

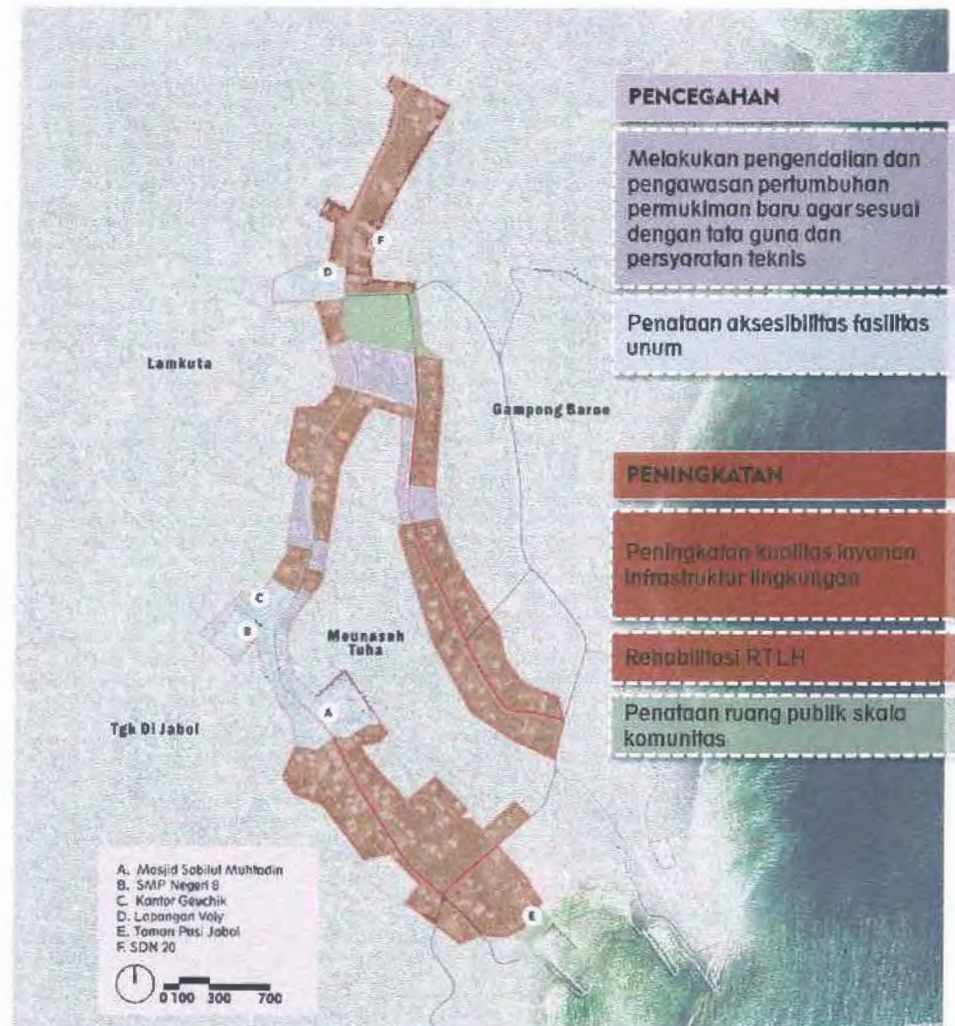


Gambar 5.3 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Paya-Keuneukai

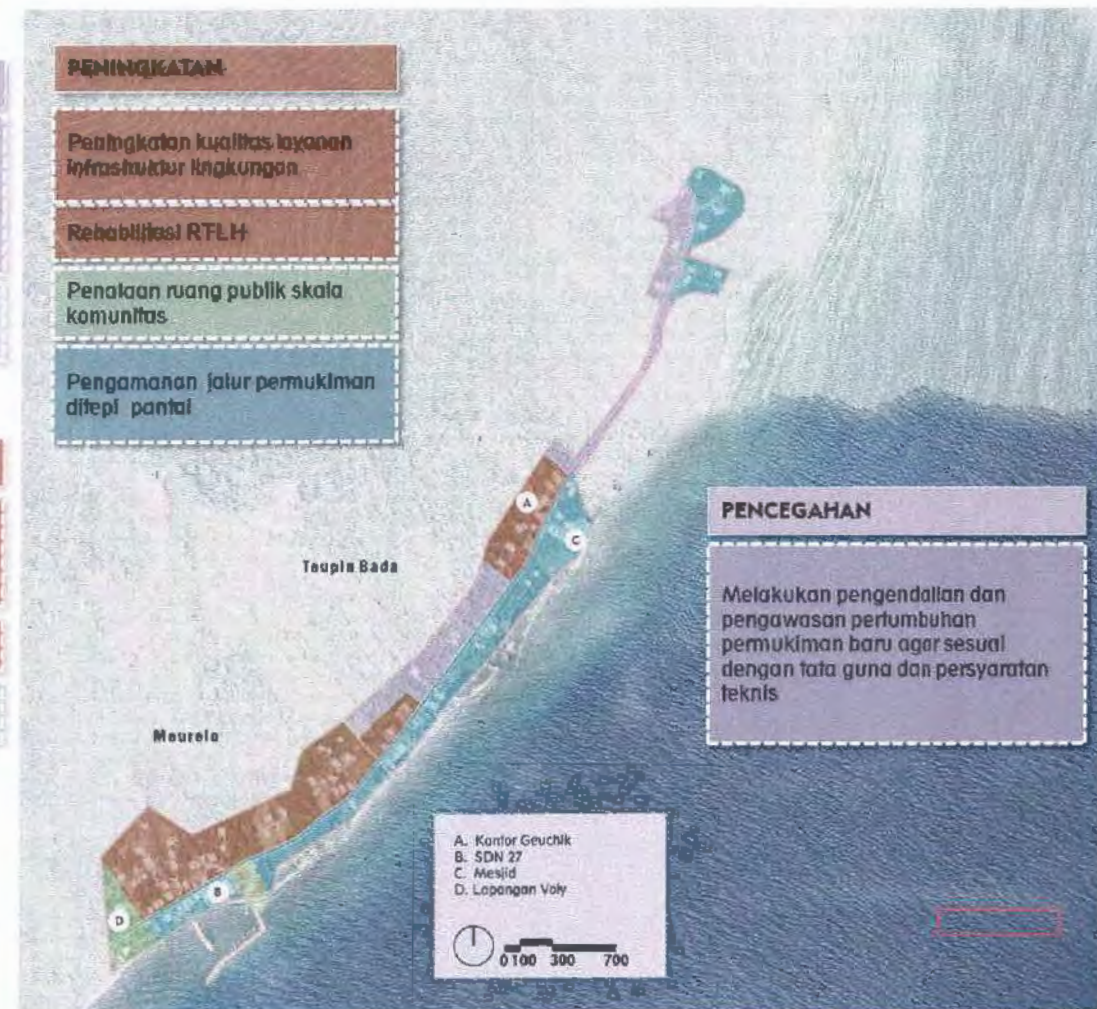




Gambar 5.4 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Jaboi



Gambar 5.5 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Beurawang



## BAB VI

### RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### 6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sabang diharapkan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan yang dilakukan meliputi pengawasan dan pengendalian oleh para *stakeholder* serta juga dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap perizinan yang telah ditetapkan (seperti: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tindakan

pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

#### 1. Pengawasan dan Pengendalian

Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman. Kegiatan tersebut mencakup perizinan terhadap: izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lainnya. Pengawasan dan pengendalian dalam tahap pembangunan dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan dengan mengacu pada 8 indikator kumuh yang meliputi:

- Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan
- Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan
- Kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya;

Kondisi...



- Kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU tidak mengurangi keberfungsian.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan meliputi ;

### 1) Pendampingan

- a) Penyuluhan; Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- b) Pembinaan; Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- c) Bantuan Teknis; Bantuan teknis yang bersifat fisik, diarahkan pada upaya pemeliharaan/ perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater

kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software pengaturan dan perencanaan, meliputi : fasilitasi penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur, dan kriteria; penguatan kapasitas kelembagaan; kerjasama pemerintah dengan swasta.

### 2) Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat. terkait dengan: (1) rencana tata ruang; (2) penataan bangunan dan lingkungan; (3) perizinan; dan (4) standar perumahan dan permukiman. Beberapa program dan kegiatan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru yang dilakukan dengan mekanisme sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat sadar dan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan maupun pasca penanganan kumuh tersebut, adalah sebagai berikut:

#### a) Program pengendalian pemanfaatan ruang

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud berupa

sosialisasi ...

sosialisasi aturan tata ruang dan teknis pemanfaatan sempadan sungai kepada masyarakat, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan tata ruang yang berlaku, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan tata ruang. Kegiatan lanjutan dari sosialisasi ini adalah terbentuknya aturan bersama terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Program lingkungan sehat perumahan

Lingkup kegiatan dalam program ini berupa penyuluhan mengenai lingkungan sehat perumahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat menyadari pentingnya lingkungan sehat sebagai upaya dalam pencegahan munculnya permukiman kumuh.

c) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan dalam program ini adalah penyuluhan masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat. Hal

ini penting karena lingkungan yang sehat tercipta dari diri yang sehat.

d) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya alam lainnya

Lingkup kegiatan dari program ini adalah perencanaan kawasan sempadan sungai dan sumber daya alam lainnya agar dapat berfungsi efektif sebagai buffer. Bentuk penataan kawasan sempadan sungai dapat berupa jalur inspeksi, pedestrian dan vegetasi sabuk hijau.

Kota Sabang juga menerapkan program dan kegiatan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.



Tabel 6.1 Program Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru

| PERMASALAHAN  | PROGRAM PENANGANAN                  | NO | KEGIATAN  | LOKASI                                       |
|---|-------------------------------------|----|---|--|
| Pertumbuhan kebutuhan perumahan dan permukiman baru dengan kelengkapan sarana prasarana permukiman yang kurang memadai. | Program pencegahan permukiman kumuh | 1  | Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya untuk rumah layak huni dan sehat serta Indikator kumuh | Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang |
|   |                                     | 2  | Pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman baru  | Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sahang |
|   |                                     | 3  | Pemberdayaan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan huniannya agar tetap sehat dan nyaman (layak huni)           | Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang |

Secara lebih rinci, program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru

| NO                                     | KEGIATAN   | PELAKU  | OUTPUT  |
|--|--|---|---|
| A Penyusunan Dokumen Perencanaan       |  |   |   |
| 1                                      | Penyusunan database 100-0-100  | Aparat kel/ desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim fasilitator | Daftar potensi dan masalah terkait dengan 100-0-100   |
| 2                                      | Penyusunan RPLP  | TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/ desa               | Dokumen RPLP/RTPLP  |
| 3                                      | Pemilihan kegiatan prioritas dan penyusunan DED  | TIPP, BKM-UP  | DED kegiatan prioritas  |
| B Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) |  |   |   |
| 1                                      | Penyusunan terkait persyaratan IMB   | Pemda, Aparat kel/desa, fasilitator, BKM-UP             | Masyarakat mengerti dan paham tentang persyaratan IMB   |
| 2                                      | Penyuluhan tentang RTRW/RDTR kab/kota  | Pemda dan aparat kel/desa                               | Masyarakat paham tentang zonasi peruntukan wilayah  |
| 3                                      | Penyuluhan/ pelatihan/coach tentang standar teknis pembangunan infrastruktur yang terkait dengan 8 indikator kumuh | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa         | Masyarakat mengerti dan paham tentang bangunan infrastruktur yang memenuhi standar teknis (SPM) |
| 4                                      | Penyuluhan/ pelatihan/coach  | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat,                         | Masyarakat mengerti dan paham cara  |

| NO | KEGIATAN   | PELAKU   | OUTPUT  |
|----|--|--|---|
|    | tentang identifikasi kelayakan fungsi bangunan infrastruktur permukiman (termasuk PSU dan 8 indikator kumuh) | aparatur kel/desa dan Tim OP                               | melakukan pemeliharaan bangunan   |
| 5  | Penguatan Tim OP dan pembentukan Pokja pengawasan permukiman tingkat kel/desa                                | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa dan Tim OP | Tim OP dan Pokja Waskim menjalankan fungsi dengan optimal   |
| C  | Pemberdayaan Masyarakat  |  |   |
| 1  | Penyuluhan dan pembimbingan tentang penyusunan dan pelaksanaan norma (aturan) bersama                        | Aparatur kel/desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim Fasilitator   | Tersedianya aturan bersama tentang penceahan permukiman kumuh & adanya indikasi awal perubahan pola perilaku masyarakat |
| 2  | Monitoring dan pengendalian penerapan aturan bersama   | Aparatur kel/desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim Fasilitator   | Aturan bersama dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat  |
| 3  | Informasi tentang (1) rencana tata ruang, (2) penataan bangunan dan lingkungan, (3) perizinan, dan (4)       | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa            | Informasi tentang perumahan dan permukiman baik melalui media elektronik maupun cetak                                   |

| NO | KEGIATAN   | PELAKU  | OUTPUT   |
|----|--|---|--|
|    | standar perumahan dan permukiman   |   |  |
| D  | Pembangunan Infrastruktur  |   |  |
| 1  | Pelatihan/ coach terkait pembangunan infrastruktur skala lingkungan (8 indikator)    | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Dipahaminya pembangunan infrastruktur yang memenuhi kelayakan teknis dan kelayakan fungsi      |
| 2  | Transparansi dan akuntabilitas keuangan  | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Terbangunnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana                              |
| 3  | Monitoring & evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik dan penggunaan keuangan          | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Bangunan fisik memiliki kelayakan teknis dan kelayakan fungsi serta efisiensi pemanfaatan dana |
| E  | Membangun Jejaring Kerja   |   |  |
| 1  | Pelatihan/ coach identifikasi stakeholder dalam kegiatan pencegahan permukiman kumuh | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Daftar stakeholder   |



| NO | KEGIATAN  | PELAKU  | OUTPUT  |
|----|---|---|---|
| 2  | Pelatihan/coach menyusun proposal kerjasama dengan pihak lain   | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Dipahaminya cara menyusun proposal kerjasama          |
| 3  | Pelatihan/coach cara komunikasi dengan mitra terkait pemanfaatan dana kemitraan                         | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Adanya laporan hasil dan penggunaan dana kepada mitra |
| F  | Penguatan Livelihood (P2B)  |   |   |
| 1  | Penguatan kelompok melalui implementasi panca sutra   | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Kelompok menerapkan panca sutra                       |
| 2  | Prioritas sasaran adalah warga MBR, utamanya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh (delineasi kumuh) | Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa | Warga MBR di kawasan kumuh mendapatkan layanan P2B    |

## 6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, Dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/Cap)

Rencana aksi program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program baik skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan. Perumusan rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan yang ditinjau berdasarkan masing-masing segmen ini dilakukan dengan dua mekanisme, yakni dengan membuat peta rencana aksi program penanganan permukiman kumuh serta matriks rencana aksi program penanganan dan memorandum program skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya bahwa rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
  - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. Pemberdayaan masyarakat, serta
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui:
  - a. Pemugaran;
  - b. Peremajaan; dan
  - c. Permukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran). Secara lebih rinci, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang

dijabarkan berdasarkan segmen masing-masing kawasan pada Tabel 6.3.

### 6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang termuat dalam Rencana Aksi Program perkotaan Sabang yang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan penanganan. Dalam memorandum ini teruraikan kebutuhan program dibidang keciptakaryaan yang meliputi (jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan) beserta dengan rencana investasi (yang didalamnya terdapat sumber pendanaan, pelaksana, dan perkiraan biaya).



Tabel 6.3

Rencana Aksi Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang

| NO | LOKASI KEGIATAN                              | LUAS | INDIKATOR KEKUMUHAN | ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN  | VOL | SATUAN | TAHUN PENANGANAN |      |      |      |
|----|--|------|---------------------|---|-----|--------|------------------|------|------|------|
|    |  |      |                     |   |     |        | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SABANG |      | BANGUNAN            | Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru                                       | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman   | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pendampingan peningkatan kualitas masyarakat.   | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pelayanan informasi terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.                  | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     |   |     |        |                  |      |      |      |
|    |  |      | JALAN               | Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman. | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pemugaran kondisi sistem jaringan jalan secara berkala.   | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.                |     | Meter  |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi yang belum terlayani prasarana jalan.                      |     | Meter  |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     |   |     |        |                  |      |      |      |
|    |  |      | AIR MINUM           | Pemeliharaan sumber air bersih.   |     | Unit   |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih                           | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pengawasan keamanan sistem distribusi air minum penertiban pemasangan pipa disribusi ilegal.        | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |  |      |                     | Pemugaran jaringan pipa distribusi.   |     | Meter  |                  |      |      |      |

| NO | LOKASI KEGIATAN | LUAS | INDIKATOR KEKUMUHAN | ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN   | VOL | SATUAN | TAHUN PENANGANAN |      |      |      |
|----|-----------------|------|---------------------|--|-----|--------|------------------|------|------|------|
|    |                 |      |                     |  |     |        | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 |
|    |                 |      | DRAINASE            | Pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman                         | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.     |     | Meter  |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     |  |     |        |                  |      |      |      |
|    |                 |      | SANITASI            | Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik                        | 1   | Paket  |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.                               | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.   | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pendampingan perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru.        | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     |  |     |        |                  |      |      |      |
|    |                 |      | PERSAMPAHAN         | Penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan   | 1   | Paket  |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan.                           | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasta mampu mengelola persampahan dengan baik.       | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.                              | 1   | Paket  |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R                                       | 1   | Ls     |                  |      |      |      |



| NO | LOKASI KEGIATAN | LUAS | INDIKATOR KECUMUHAN | ASPEK KECUMUHAN / JENIS KEGIATAN                   | VOL | SATUAN | TAHUN PENANGANAN |      |      |      |
|----|-----------------|------|---------------------|--|-----|--------|------------------|------|------|------|
|    |                 |      |                     |  |     |        | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 |
|    |                 |      |                     |  |     |        |                  |      |      |      |
|    |                 |      | PROTEKSI KEBAKARAN  | Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran     | 1   | Paket  |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran | 15  | Ls     |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana  | 18  | Unit   |                  |      |      |      |
|    |                 |      |                     | Pembangunan pos pemadam kebakaran                  | 18  | Unit   |                  |      |      |      |

## BAB VII

### RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### 7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan terjadi. Dimana program yang diusulkan meliputi program pengembangan perumahan, program perbaikan/peningkatan RTLH, program peningkatan kualitas dan kapasitas air minum, program Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, program penanganan air limbah, program peningkatan pelayanan persampahan serta program proteksi bencana kebakaran

Tabel 7.1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

| PERMASALAHAN   | PROGRAM PENANGANAN                                     | NO | SUB PROGRAM                     | KEGIATAN   | LOKASI   |
|--|--|----|---------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</li> <li>✓ Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik</li> <li>✓ Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat</li> </ul> | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Program pengembangan perumahan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan legalisasi Qanun RP2KPKPK</li> <li>2. Sosialisasi dan monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang.</li> <li>3. Pendataan dan mapping status kepemilikan lahan.</li> <li>4. Sosialisasi pentingnya Surat Hak Milik (SHM) atas tanah</li> <li>5. Percepatan pengurusan SHM.</li> </ol> | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
|  |  | 2  | Peningkatan/Perbaikan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi rumah sehat dan layak huni</li> <li>2. Penyusunan database RTLH</li> <li>3. Rehabilitasi bangunan secara bertahap sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sehat dan layak huni.</li> </ol>   | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |



| PERMASALAHAN  | PROGRAM PENANGANAN                                     | NO | SUB PROGRAM   | KEGIATAN  | LOKASI   |
|---|--|----|---|---|--|
|   |  |    |   | 4. Stimulasi pembangunan perumahan bagi MBR.<br>5. Monitoring dan evaluasi  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal</li> <li>✓ Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar</li> <li>✓ Konektifitas jaringan jalan belum optimal</li> </ul>                               | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | 1. Pendataan dan mapping jaringan jalan<br>2. Integrasi jaringan jalan dan jembatan<br>3. Pembangunan jaringan jalan sesuai dengan perencanaan tata ruang.<br>4. Monitoring dan evaluasi      | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
|   |  | 2  | Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan                   | 1. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan<br>2. Pemeliharaan dan monitoring kondisi dan kualitas jaringan jalan  | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi</li> <li>✓ Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air.</li> <li>✓ Kebocoran pipa distribusi</li> <li>✓ Pemasangan sambungan pipa illegal</li> </ul> | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Pengamanan sumber air dan sistem distribusi air bersih    | 1. Pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih.<br>2. Peremajaan jaringan pipa distribusi air bersih<br>3. Monitoring dan evaluasi sumber air dan sistem distribusi air bersih | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
|   |  | 2  | Pengelompokan zonasi kebutuhan air minum                  | 1. Pembangunan sarana penampungan air bersih berdasarkan zonasi pelayanan   | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |

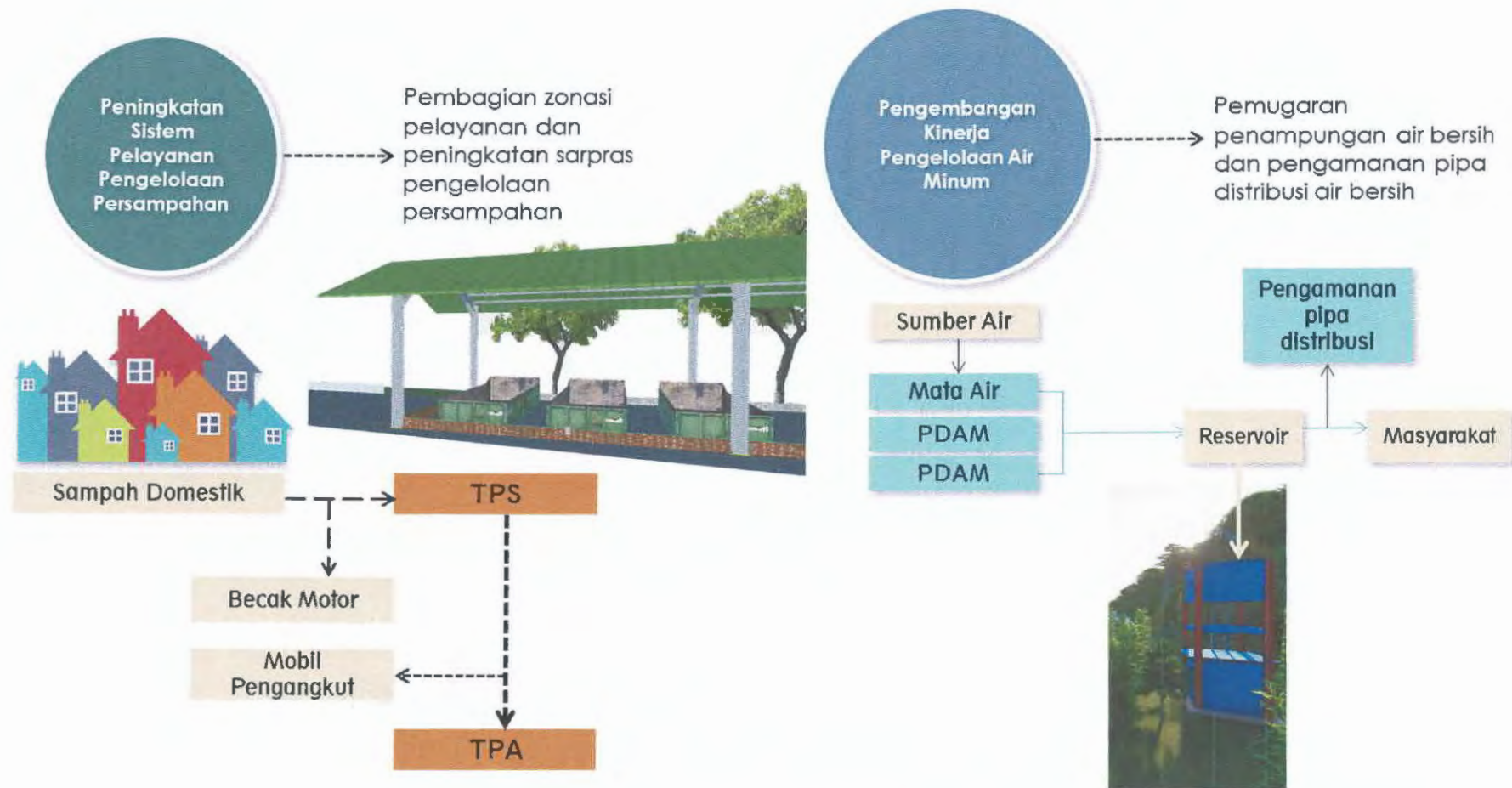
| PERMASALAHAN  | PROGRAM PENANGANAN                                     | NO | SUB PROGRAM   | KEGIATAN   | LOKASI   |
|---|--|----|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jaringan drainase belum terintegrasi</li> <li>✓ Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.</li> <li>✓ Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung.</li> <li>✓ Kawasan permukiman yang tergenang.</li> <li>✓ Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.</li> </ul> | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Pembangunan Sistem Informasi/Data base jaringan drainase  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan mapping jaringan drainase</li> <li>2. Integrasi jaringan drainase</li> <li>3. Pembangunan jaringan jaringan sesuai dengan perencanaan tata ruang.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>   | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
|   |  | 2  | Peningkatan Kualitas jaringan Drainase kawasan permukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas jaringan drainase</li> <li>2. Peningkatan kapasitas drainase untuk penanggulangan banjir</li> <li>3. Memaksimalkan fungsi waduk sebagai area retensi untuk penanggulangan banjir</li> <li>4. Pemeliharaan rutin kualitas jaringan drainase</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan drainase</li> </ol>   | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.</li> <li>✓ Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.</li> <li>✓ Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;</li> </ul>                           | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Peningkatan Layanan dan Sistem Pengolahan Limbah          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestic</li> <li>2. Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.</li> <li>3. Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru •</li> <li>4. Pengelompokkan layanan sistem pengolahan limbah komunal</li> <li>5. Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.</li> </ol> | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |



| PERMASALAHAN   | PROGRAM PENANGANAN                                     | NO | SUB PROGRAM  | KEGIATAN   | LOKASI   |
|--|--|----|--|--|--|
|  |  |    |  | 6. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air limbah komunal<br>7. Pemugaran sarana dan prasarana pengolahan air limbah   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.</li> <li>✓ Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.</li> <li>✓ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>✓ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian</li> <li>✓ Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,</li> </ul> | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Peningkatan Sistem Pelayanan Pengelolaan Persampahan | 1. Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan<br>2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan.<br>3. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.<br>4. Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasta mampu mengelola persampahan dengan baik.<br>5. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan<br>6. Peningkatan dan pengembangan TPA.<br>7. Peningkatan jumlah TPS pada kawaasn permukiman.<br>8. Peningkatan jangkauan dan kuantitas layanan pengangkutan persampahan.<br>9. Pengadaan alat pengangkutan persampahan<br>10. Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan dikawasan permukiman. | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |

| PERMASALAHAN  | PROGRAM PENANGANAN                                     | NO | SUB PROGRAM                                     | KEGIATAN  | LOKASI   |
|---|--|----|---|---|--|
| ✓ Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian | Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan | 1  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran</li> <li>2. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran</li> <li>3. Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran.</li> <li>4. Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran.</li> <li>5. Rencana pembangunan sistem hidran dikawasan permukiman.</li> </ol> | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
| ✓ Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,                             | Penyediaan Ruang Terbuka Publik                        | 1  | Penataan ruang publik skala komunitas           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemugaraan RTP eksisting.</li> <li>2. Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman.</li> <li>3. Optimalisasi fungsi RTP pada kawasan permukiman.</li> </ol>   | Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang |
|   |  | 2  | Penataan ruang publik yang berkarakter          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan RTP yang sesuai dengan karakter dan identitas kawasan permukiman.</li> </ol>   |  |





Gambar 7.1 Ilustrasi Diagram Program Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sabang

## 7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng Raya

Kawasan Krueng Raya merupakan kawasan prioritas pertama berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh kota sabang. Kawasan Krueng Raya merupakan kawasan permukiman kumuh yang berada dipesisir pantai dengan tingkat kekumuhan sedang. Luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh Krueng Raya adalah 27,011 Ha. Informasi umum Kawasan Krueng Raya dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2  
Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya

|   |              |
|---|--------------|
| Kawasan   | Krueng Raya  |
| Gampong   | Krueng Raya  |
| Kecamatan   | Sukakarya    |
| Kota  | Sabang       |
| Provinsi  | Aceh         |
| Luas Deliniasi Kumuh                                  | 27,011       |
| Jumlah Bangunan                                       | 474          |
| Jumlah Penduduk                                       | 1.581 Jiwa   |
| Jumah KK  | 387          |
| Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh |              |
| Kategori Kumuh  | Kumuh Ringan |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipologi Kumuh  | Permukiman Kumuh Pesisir Pantai |
| Karakteristik   | Kawasan Gampong Nelayan         |
| Permasalahan Utama  |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis</li> <li>• Kondisi jalan lingkungan belum memadai (&lt;2 M)</li> <li>• Kondisi drainase lingkungan yang buruk</li> <li>• Sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai teknis</li> </ul> |                                 |
| SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH  |                                 |
| 1. Batu Singa Berfakta  | 9,240 Ha                        |
| 2. Lhok Drien   | 3,039 Ha                        |
| 3. Mustika Kolam Bermata  | 7,161 Ha                        |
| 4. Teupin Cirik   | 7,571 Ha                        |

Penyusunan program peningkatan kualitas kawasan prioritas Krueng Raya merincikan program-program yang telah disusun untuk penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang. Program peningkatan kualitas Kawasan Krueng Raya dilakukan dengan pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif. Program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Krueng Raya dapat dilihat pada tabel 7.3.



Table 7.3

Tabel 7.3 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prioritas – Kawasan Krueng Raya

| NO | SEKTOR     | PERMASALAHAN   | KEBUTUHAN PENANGANAN                                    |          |  | RENCANA TAHUN PELAKSANAAN |      |      |      |
|----|------------|--|---|----------|--|---------------------------|------|------|------|
|    |            |  | PENANGANAN  | KEGIATAN |  | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 |
| A  | PERMUKIMAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan pembangunan perumahan tidak terencana.</li> <li>✓ Rumah tidak layak huni</li> <li>✓ Konflik kepemilikan lahan</li> </ul>   | Program pengembangan perumahan                          | 1        | Sosialisasi dan monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 2        | Stimulan rehabilitasi RTLH   |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 3        | Pendataan dan mapping status kepemilikan lahan.  |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 4        | Percepatan pengurusan SHM  |                           |      |      |      |
| B  | JALAN      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kondisi jaringan jalan lingkungan yang belum memadai</li> <li>✓ Kawasan permukiman belum seluruhnya terlayani jaringan jalan</li> </ul> | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan                      | 1        | Pembangunan jalan lingkungan   |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 2        | Pembangunan jalan inspeksi + pedestrian  |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 3        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan  |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 4        | Rehab jembatan   |                           |      |      |      |
| C  | AIR MINUM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sumber air bersih belum terlindungi</li> <li>✓ Kawasan permukiman belum sepenuhnya memiliki akses aman air bersih</li> </ul>            | Pengamanan sumber air dan sistem distribusi air bersih. | 1        | Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih   |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 2        | Pembagian zonasi pelayanan air bersih  |                           |      |      |      |
|    |            |  |   | 3        | Pembangunan rumah pompa dan reservoir air bersih   |                           |      |      |      |

| NO | SEKTOR      | PERMASALAHAN  | KEBUTUHAN PENANGANAN                                   |          |  | RENCANA TAHUN PELAKSANAAN |      |      |      |
|----|-------------|---|--|----------|--|---------------------------|------|------|------|
|    |             |   | PENANGANAN   | KEGIATAN |  | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|    |             | ✓ Kawasan permukiman belum terlayannya jaringan air bersih  |  |          |  |                           |      |      |      |
| D  | DRAINASE    | ✓ Kawasan permukiman belum terakses jaringan drainase<br>✓ Jaringan drainsae tidak berfungsi secara optimal<br>✓ Kawasan permukiman tergenangan | Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase | 1        | Pembangunan jaringan drainase  |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 2        | Peningkatan kualitas drainase  |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 3        | Pemeliharaan rutin jaringan drainase                                   |                           |      |      |      |
| E  | SANITASI    | ✓ Kawasan permukiman belum memiliki sistem pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis   | Pengembangan kinerja sistem pengelolaan air limbah     | 1        | Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis  |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 2        | Pembagian zonasi pelayanan pengolahan limbah                           |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 3        | Pembangunan IPAL komunal   |                           |      |      |      |
| F  | PERSAMPAHAN | ✓ Belum tersedianya sarana dan prasarana persampahan<br>✓ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan                                   | Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan           | 1        | Sosialisasi kawasan permukiman yang layak huni.                        |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 2        | Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.        |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 3        | Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan |                           |      |      |      |
|    |             |   |  | 4        | Pelatihan pengelolaan sampah 3R  |                           |      |      |      |

sampah ...

11



| NO | SEKTOR                         | PERMASALAHAN  | KEBUTUHAN PENANGANAN                                  |          |   | RENCANA TAHUN PELAKSANAAN |      |      |      |
|----|--------------------------------|---|---|----------|---|---------------------------|------|------|------|
|    |                                |   | PENANGANAN  | KEGIATAN |   | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|    |                                | sampah dan pemeliharaan kesehatan lingkungan                        |   | 5        | Pembangunan Tempat Penampungan Sementara tingkat Dusun        |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 6        | Pengadaan sarana pengangkutan sampah domestik                 |                           |      |      |      |
| G  | PROTEKSI KEBAKARAN             | ✓ Tidak tersedianya sistem proteksi kebakaran di kawasan permukiman | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1        | Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran                   |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 2        | Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran.       |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 3        | Rencana pembangunan sistem hidran dikawasan permukiman.       |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 4        | Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan      |                           |      |      |      |
| H  | RUANG TERBUKA HIJAU DAN PUBLIK | ✓ Belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka publik                 | Penataan ruang publik skala komunitas                 | 1        | Pembangunan balai nelayan                                     |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 2        | Pembangunan RTP Kampung nelayan                               |                           |      |      |      |
|    |                                |   |   | 3        | Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman. |                           |      |      |      |

### 7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Sabang

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang tertuang dalam matriks rencana aksi program yang memuat aspek kekumuhan , jenis kegiatan, volume pekerjaan, rencana anggaran, dan sumber pembiayaan. Adapun periode pengentasan kawasan kumuh dilaksanakan selama lima tahun untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh di Kota Sabang.

Penyusunan rencana aksi program dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan permukiman kumuh. Rencana aksi program disusun berdasarkan ketujuh indikator kekumuhan dan berdasarkan strategi penanganan permukiman kumuh dan juga kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi eksisting. Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada Tabel 7.4

Table 7.4  
Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN                    | JENIS KEGIATAN  | LOKASI          | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |        |        |        | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
|    |                                       |   |                 |     |        |                | 2022                     | 2023   | 2024   | 2025   |                     |
| I  | GAMPONG<br>PAYA                       |   |                 |     |        |                |                          |        |        |        |                     |
| A  | Tahap<br>persiapan dan<br>perencanaan | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh  | Gampong<br>Paya | 4   | Unit   | 80.000         |                          | 40.000 | 40.000 |        | APBK                |
|    |                                       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan perilaku  | Gampong<br>Paya | 4   | Unit   | 80.000         |                          |        | 40.000 | 40.000 | APBK                |
|    |                                       | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Paya-<br>Keuneukai | Gampong<br>Paya | 1   | Unit   | 100.000        | 100.000                  |        |        |        | APBK                |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN   | JENIS KEGIATAN                        | LOKASI              | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                      |                                       |                     |     |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                      | Penyusunan Dokumen RTP Gampong Paya   | Gampong Paya        | 1   | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
| B  | Bangunan gedung      | Peremajaan rumah                      | Cot Preh            | 4   | Unit   | 120.000        |                          | 120.000 |         |         | APBN-APBK           |
|    |                      | Peremajaan rumah                      | Pante Jaya          | 15  | Unit   | 450.000        |                          | 150.000 | 150.000 | 150.000 | APBN-APBK           |
|    |                      | Peremajaan rumah                      | Tgk Chick Alue Kala | 12  | Unit   | 360.000        |                          | 60.000  | 300.000 |         | APBN-APBK           |
|    |                      | Peremajaan rumah                      | Tgk Di Teuremon     | 6   | Unit   | 180.000        |                          | 30.000  | 60.000  | 90.000  | APBN-APBK           |
| C  | Jalan lingkungan     | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | Cot Preh            | 900 | Meter  | 900.000        |                          | 300.000 | 300.000 | 300.000 | APBN                |
|    |                      | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | Pante Jaya          | 300 | Meter  | 300.000        |                          | 300.000 |         |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | Tgk Di Teuremon     | 800 | Meter  | 800.000        |                          | 300.000 | 500.000 |         | APBN                |
| D  | Penyediaan air minum | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gampong Paya        | 2   | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
|    |                      | Pembangunan rumah pompa & reservoir   | Pante Jaya          | 1   | Unit   | 500.000        |                          |         | 500.000 |         | APBN                |
|    |                      | Pembangunan rumah pompa & reservoir   | Tgk Di Teuremon     | 1   | Unit   | 500.000        |                          |         |         | 500.000 | APBN                |
| E  | Drainase lingkungan  | Peningkatan kualitas drainase         | Cot Preh            | 100 | Meter  | 70.000         |                          | 700.00  |         |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas drainase         | Pante Jaya          | 250 | Meter  | 175.000        |                          |         | 175.000 |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas drainase         | Tgk Chick Alue Kala | 150 | Meter  | 105.000        |                          |         |         | 105.000 | APBK                |
| F  | Pengolahan limbah    | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gampong Paya        | 3   | Unit   | 150.000        | 100.000                  | 50.000  |         |         | APBK                |
|    |                      | IPAL + MCK komunal                    | Cot Preh            | 1   | Unit   | 500.000        |                          | 500.000 |         |         | APBN                |

| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN         | JENIS KEGIATAN                            | LOKASI                 | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|----------------------------|---|------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                            |   |                        |     |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                            | IPAL + MCK komunal                        | Pante<br>Jaya          | 1   | Unit   | 500.000        |                          |         | 500.000 |         | APBN                |
|    |                            | Bio - Septitanc                           | Tgk Chick<br>Alue Kala | 1   | Unit   | 30.000         |                          |         | 30.000  |         | APBK                |
| F  | Pengelolaan<br>persampahan | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Paya        | 4   | Unit   | 200.000        | 100.000                  | 100.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Cot Preh               | 1   | Unit   | 150.000        |                          | 150.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Pante<br>Jaya          | 1   | Unit   | 150.000        |                          | 150.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Tgk Chick<br>Alue Kala | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Tgk Di<br>Teuremon     | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
|    |                            | Becak Motor                               | Gampong<br>Paya        | 4   | Unit   | 400.000        |                          |         | 200.000 | 200.000 | APBG                |
| G  | Proteksi<br>kebakaran      | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Paya        | 4   | Unit   | 200.000        | 100.000                  | 100.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Cot Preh               | 1   | Unit   | 150.000        |                          | 150.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Pante<br>Jaya          | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Tgk Chick<br>Alue Kala | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Tgk Di<br>Teuremon     | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         |         | 150.000 | APBK                |
| H  | Ruang terbuka<br>hijau     | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Paya        | 2   | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Penyediaan penerangan<br>jalan umum (PJU) | Gampong<br>Paya        | 40  | Unit   | 1.200.000      |                          |         | 600.000 | 600.000 | APBA                |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN              | JENIS KEGIATAN   | LOKASI            | VOL       | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|---------------------------------|--|-------------------|-----------|--------|----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
|    |                                 |  |                   |           |        |                | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |
|    |                                 | Pembangunan RTP  | Gampong Paya      | 1         | Unit   | 4.000.000      |                          |         | 2.000.000 | 2.000.000 | APBN-APBK           |
|    |                                 | Revitalisasi lapangan voly   | Gampong Paya      | 1         | Unit   | 1.000.000      |                          |         | 1.000.000 |           | APBN-APBK           |
| I  | Pengendalian dan pengawasan     | Operasional dan pemeliharaan   | Gampong Paya      | 2         | Unit   | 100.000        |                          |         | 50.000    | 50.000    | APBK                |
|    |                                 | Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan                                  | Gampong Paya      | 3         | Unit   | 120.000        | 40.000                   | 40.000  | 40.000    |           | CSR                 |
|    |                                 | Bantuan modal usaha  | Gampong Paya      | 3         | Unit   | 300.000        |                          | 100.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 |
|    |                                 | Peningkatan kualitas UMK   | Gampong Paya      | 3         | Unit   | 300.000        | 100.000                  | 100.000 | 100.000   |           | CSR                 |
|    |                                 | Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan               | Gampong Paya      | 3         | Unit   | 150.000        | 50.000                   | 50.000  | 50.000    |           | APBK                |
|    |                                 | Pelatihan pemuda tanggap bencana                                       | Gampong Paya      | 3         | Unit   | 150.000        |                          | 50.000  | 50.000    | 50.000    | APBK                |
|    |                                 |  |                   | SUB TOTAL |        | 15.520.000     |                          |         |           |           |                     |
| II | GAMPONG KEUNEUKAI               |  |                   |           |        |                |                          |         |           |           |                     |
| A  | Tahap persiapan dan perencanaan | Sosialisasi 7 indikator kumuh  | Gampong Keuneukai | 4         | Unit   | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                |
|    |                                 | Sosialisai perubahan sikap dan prilaku                                 | Gampong Keuneukai | 4         | Unit   | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                |
|    |                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Paya-Keuneukai | Gampong Keuneukai | 1         | Unit   | 100.000        | 100.000                  |         |           |           | APBK                |

| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN   | JENIS KEGIATAN                           | LOKASI            | VOL   | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|----------------------|--|-------------------|-------|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                      |  |                   |       |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                      | Penyusunan Dokumen RTP Gampong Keuneukai | Gampong Keuneukai | 1     | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
| B  | Bangunan Gedung      | Bantuan stimulan bahan bangunan          | Blang Mukim       | 1     | Unit   | 15.000         |                          | 15.000  |         |         | APBA                |
|    |                      | Bantuan stimulan bahan bangunan          | Kulam             | 5     | Unit   | 75.000         |                          | 75.000  |         |         | APBA                |
|    |                      | Peremajaan RTLH                          | Lhok              | 6     | Unit   | 180.000        |                          |         | 180.000 |         | APBN-APBK           |
|    |                      | Peremajaan RTLH                          | Pasi              | 19    | Unit   | 570.000        |                          | 60.000  | 120.000 | 390.000 | APBN-APBK           |
| C  | Jalan lingkungan     | Peningkatan kualitas jalan lingkungan    | Blang Mukim       | 600   | Meter  | 600.000        |                          | 600.000 |         |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas jalan lingkungan    | Kulam             | 1.200 | Meter  | 1.200.000      |                          | 600.000 | 600.000 |         | APBA                |
| D  | Penyediaan air minum | Penyediaan dan pengadaan lahan           | Gampong Keuneukai | 4     | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                |
|    |                      | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | Blang Mukim       | 1     | Unit   | 500.000        |                          |         | 500.000 |         | APBN                |
|    |                      | Hydran umum                              | Kulam             | 1     | Unit   | 50.000         |                          |         | 50.000  |         | APBK                |
|    |                      | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | Lhok              | 1     | Unit   | 500.000        |                          | 500.000 |         |         | APBN                |
|    |                      | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | Pasi              | 1     | Unit   | 500.000        |                          |         | 500.000 |         | APBN                |
|    |                      | Penyediaan mobil tank                    | Gampong Keuneukai | 1     | Unit   | 600.000        |                          |         |         | 600.000 |                     |
| E  | Drainase             | Peningkatan kualitas drainase            | Blang Mukim       | 150   | Meter  | 105.000        |                          | 105.000 |         |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas drainase            | Kulam             | 100   | Meter  | 70.000         |                          | 70.000  |         |         | APBK                |
|    |                      | Peningkatan kualitas drainase            | Lhok              | 900   | Meter  | 630.000        |                          |         | 400.000 | 230.000 | APBK                |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN         | JENIS KEGIATAN                            | LOKASI               | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|----------------------------|---|----------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
|    |                            |   |                      |     |        |                | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |
| F  | Pengelolaan<br>persampahan | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Keuneukai | 4   | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Blang<br>Mukim       | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000   |           | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Kulam                | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000   |           | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Lhok                 | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         |           | 150.000   | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Pasi                 | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         |           | 150.000   | APBK                |
|    |                            | Becak Motor                               | Gampong<br>Keuneukai | 4   | Unit   | 400.000        |                          |         | 200.000   | 200.000   | APBG                |
| G  | Proteksi<br>kebakaran      | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Keuneukai | 4   | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Blang<br>Mukim       | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000   |           | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Kulam                | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000   |           | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Lhok                 | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         |           | 150.000   | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Pasi                 | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         |           | 150.000   | APBK                |
| H  | Ruang terbuka<br>hijau     | Penyediaan penerangan<br>jalan umum (PJU) | Gampong<br>Keuneukai | 50  | Unit   | 1.500.000      |                          | 500.000 | 500.000   | 500.000   | APBA                |
|    |                            | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Keuneukai | 2   | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |           |           | APBK                |
|    |                            | Pembangunan RTP                           | Gampong<br>Keuneukai | 2   | Unit   | 3.000.000      |                          |         | 2.000.000 | 1.500.000 | APBN-CSR            |
|    |                            | Revitalisasi dermaga                      | Gampong<br>Keuneukai | 1   | Unit   | 5.000.000      |                          |         | 2.500.000 | 2.500.000 | APBA-CSR            |
| I  |                            | Operasional dan<br>pemeliharaan           | Gampong<br>Keuneukai | 2   | Unit   | 100.000        |                          |         | 100.000   |           | APBK                |

| NO                 | ASPEK<br>KEKUMUHAN              | JENIS KEGIATAN  | LOKASI            | VOL       | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|--------------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|                    |                                 |   |                   |           |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|                    | Pengendalian dan pengawasan     | Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan                         | Gampong Keuneukai | 3         | Unit   | 120.000        |                          | 40.000  | 40.000  | 40.000  | CSR                 |
|                    |                                 | Bantuan modal usaha   | Gampong Keuneukai | 3         | Unit   | 300.000        |                          | 100.000 | 100.000 | 100.000 | CSR                 |
|                    |                                 | Peningkatan kualitas UMK                                      | Gampong Keuneukai | 3         | Unit   | 300.000        | 100.000                  | 100.000 | 100.000 |         | CSR                 |
|                    |                                 | Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan      | Gampong Keuneukai | 2         | Unit   | 100.000        |                          | 50.000  | 50.000  |         | APBK                |
|                    |                                 | Pelatihan pemuda tanggap bencana                              | Gampong Keuneukai | 4         | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                |
|                    |                                 |   |                   | SUB TOTAL |        | 18.875.000     |                          |         |         |         |                     |
| III. GAMPONG JABOI |                                 |   |                   |           |        |                |                          |         |         |         |                     |
| A                  | Tahap persiapan dan perencanaan | Sosialisasi 7 iIndikator kumuh                                | Gampong Jaboi     | 4         | Unit   | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | APBK                |
|                    |                                 | Sosialisai perubahan sikap dan prilaku                        | Gampong Jaboi     | 4         | Unit   | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | APBK                |
|                    |                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Jaboi | Gampong Jaboi     | 1         | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
|                    |                                 | Penyusunan Dokumen RTP Gampong Jaboi                          | Gampong Jaboi     | 1         | Unit   | 100.000        |                          | 100.000 |         |         | APBK                |
| B                  | Bangunan gedung                 | Peremajaan RTLH   | Dsn Gampong Baro  | 9         | Unit   | 270.000        |                          | 180.000 | 90.000  |         | APBN-APBA           |
|                    |                                 | Peremajaan RTLH   | Dsn Lamkuta       | 8         | Unit   | 240.000        |                          | 240.000 |         |         | APBN-APBA           |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN      | JENIS KEGIATAN                           | LOKASI                  | VOL       | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|-------------------------|--|-------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
|    |                         |  |                         |           |        |                | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |
|    |                         | Peremajaan RTLH                          | Dsn<br>Meunasah<br>Tuha | 11        | Unit   | 330.000        |                          |         | 150.000   | 180.000   | APBN-APBA           |
|    |                         | Peremajaan RTLH                          | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 12        | Unit   | 360.000        |                          |         | 120.000   | 240.000   | APBN-APBA           |
| C  | Jalan<br>lingkungan     | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | Dsn<br>Gampong<br>Baro  | 1.30<br>0 | Meter  | 1.300.000      |                          |         | 1.300.000 |           | APBN                |
|    |                         | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | Dsn<br>Lamkuta          | 300       | Meter  | 300.000        |                          | 300.000 |           |           | APBK                |
|    |                         | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 2.65<br>0 | Meter  | 2.650.000      |                          |         | 1.650.000 | 1.000.000 | APBN                |
| D  | Penyediaan air<br>minum | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan        | Gampong<br>Jaboi        | 4         | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                |
|    |                         | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir   | Dsn<br>Gampong<br>Baro  | 1         | Unit   | 500.000        |                          |         | 500.000   |           | ABPN                |
|    |                         | Hydran umum                              | Dsn<br>Lamkuta          | 1         | Unit   | 50.000         |                          |         | 50.000    |           | APBK                |
|    |                         | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir   | Dsn<br>Meunasah<br>Tuha | 1         | Unit   | 500.000        |                          |         |           | 500.000   | APBN                |
|    |                         | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir   | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 1         | Unit   | 500.000        |                          |         |           | 500.000   | APBN                |
|    |                         | Penyediaan mobil tank                    | Gampong<br>Jaboi        | 2         | Unit   | 1.200.000      |                          | 600.000 | 600.000   |           | APBK                |
| E  | Drainase<br>lingkungan  | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan        | Gampong<br>Jaboi        | 4         | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                |

| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN | JENIS KEGIATAN                           | LOKASI            | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|--------------------|--|-------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                    |  |                   |     |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                    | Pembangunan drainase baru                | Dsn Gampong Baro  | 850 | Meter  | 850.000        |                          | 850.000 |         |         | APBA                |
|    |                    | Pembangunan drainase baru                | Dsn Lamkuta       | 405 | Meter  | 405.000        |                          | 405.000 |         |         | APBA                |
|    |                    | Pembangunan drainase baru                | Dsn Meunasah Tuha | 490 | Meter  | 490.000        |                          |         | 490.000 |         | APBK                |
|    |                    | Pembangunan drainase baru                | Dsn Tgk Di Jaboi  | 100 | Meter  | 100.000        |                          |         | 100.000 |         | APBK                |
|    |                    | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | Dsn Gampong Baro  | 350 | Meter  | 245.000        |                          |         | 245.000 |         | APBK                |
|    |                    | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | Dsn Lamkuta       | 100 | Meter  | 70.000         | 70.000                   |         |         |         | APBK                |
|    |                    | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | Dsn Meunasah Tuha | 345 | Meter  | 241.500        |                          | 241.000 |         |         | APBK                |
|    |                    | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | Dsn Tgk Di Jaboi  | 250 | Meter  | 175.000        |                          |         | 175.000 |         | APBK                |
| F  | Pengolahan limbah  | Penyediaan dan pengadaan lahan           | Gampong Jaboi     | 4   | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                |
|    |                    | Bio - Septitanc                          | Dsn Gampong Baro  | 1   | Unit   | 30.000         |                          |         | 30.000  |         | APBK                |
|    |                    | Bio - Septitanc                          | Dsn Lamkuta       | 1   | Unit   | 30.000         |                          |         | 30.000  |         | APBK                |
|    |                    | IPAL + MCK komunal                       | Dsn Meunasah Tuha | 1   | Unit   | 500.000        |                          |         |         | 500.000 | APBN                |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN         | JENIS KEGIATAN                            | LOKASI                  | VOL | SATUAN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|----------------------------|---|-------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                            |   |                         |     |        |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                            | IPAL + MCK komunal                        | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 1   | Unit   | 500.000        |                          |         |         | 500.000 | APBN                |
| G  | Pengelolaan<br>persampahan | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Jaboi        | 4   | Unit   | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Dsn<br>Gampong<br>Baro  | 1   | Unit   | 200.000        |                          | 200.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Dsn<br>Lamkuta          | 1   | Unit   | 200.000        |                          | 200.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Dsn<br>Meunasah<br>Tuha | 1   | Unit   | 200.000        |                          |         | 200.000 |         | APBK                |
|    |                            | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)     | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 1   | Unit   | 200.000        |                          |         | 200.000 |         | APBK                |
|    |                            | Becak Motor                               | Gampong<br>Jaboi        | 4   | Unit   | 400.000        |                          | 200.000 | 100.000 | 100.000 | CSR                 |
| H  | Proteksi<br>kebakaran      | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan         | Gampong<br>Jaboi        | 4   | Unit   | 200.000        | 100.000                  | 100.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Dsn<br>Gampong<br>Baro  | 1   | Unit   | 150.000        |                          | 150.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Dsn<br>Lamkuta          | 1   | Unit   | 150.000        |                          | 150.000 |         |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Dsn<br>Meunasah<br>Tuha | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
|    |                            | Posko Tanggap Bencana                     | Dsn Tgk<br>Di Jaboi     | 1   | Unit   | 150.000        |                          |         | 150.000 |         | APBK                |
| I  | Ruang terbuka<br>hijau     | Penyediaan penerangan<br>jalan umum (PJU) | Gampong<br>Jaboi        | 50  | Unit   | 1.500.000      |                          | 500.000 | 500.000 | 500.000 | APBA-APBK           |

| NO                    | ASPEK<br>KEKUMUHAN          | JENIS KEGIATAN   | LOKASI         | VOL       | SATU<br>AN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
|                       |                             |  |                |           |            |                | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |
|                       |                             | Penyediaan dan pengadaan lahan                           | Gampong Jaboi  | 2         | Unit       | 200.000        | 100.000                  | 100.000 |           |           | APBK                |
|                       |                             | Pembangunan RTP  | Gampong Jaboi  | 2         | Unit       | 2.000.000      |                          |         | 1.000.000 | 1.000.000 | APBA-APBK           |
|                       |                             | Revitalisasi lapangan voly                               | Gampong Jaboi  | 1         | Unit       | 1.000.000      |                          |         | 500.000   | 500.000   | CSR                 |
| J                     | Pengendalian dan pengawasan | Operasional dan pemeliharaan                             | Gampong Jaboi  | 1         | Unit       | 50.000         |                          |         |           | 50.000    | APBK                |
|                       |                             | Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan                    | Gampong Jaboi  | 3         | Unit       | 120.000        | 40.000                   | 40.000  | 40.000    |           | CSR                 |
|                       |                             | Bantuan modal usaha                                      | Gampong Jaboi  | 3         | Unit       | 300.000        | 100.000                  | 100.000 | 100.000   |           | CSR                 |
|                       |                             | Peningkatan kualitas UMK                                 | Gampong Jaboi  | 3         | Unit       | 300.000        |                          | 100.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 |
|                       |                             | Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan | Gampong Jaboi  | 2         | Unit       | 100.000        |                          | 50.000  | 50.000    |           | APBK                |
|                       |                             | Pelatihan pemuda tanggap bencana                         | Gampong Jaboi  | 4         | Unit       | 200.000        | 50.000                   | 50.000  | 50.000    | 50.000    | APBK                |
|                       |                             |  |                | SUB TOTAL |            | 20.766.500     |                          |         |           |           |                     |
| IV. GAMPONG BEURAWANG |                             |  |                |           |            |                |                          |         |           |           |                     |
| A                     | Persiapan dan perencanaan   | Sosialisasi 7 indikator kumuh                            | Gp. Beu-rawang | 4         | Unit       | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                |
|                       |                             | Sosialisai perubahan sikap dan prilaku                   | Gp. Beu-rawang | 4         | Unit       | 80.000         | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN      | JENIS KEGIATAN   | LOKASI                | VOL | SATU<br>AN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|-------------------------|--|-----------------------|-----|------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                         |  |                       |     |            |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |
|    |                         | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Beurawang | Gp. Beu-<br>rawang    | 1   | Unit       | 100.000        |                          |         | 100.000 |         | APBK                |
|    |                         | Penyusunan Dokumen<br>RTP Gampong<br>Beurawang                             | Gp. Beu-<br>rawang    | 1   | Unit       | 100.000        |                          |         | 100.000 |         | APBK                |
| B  | Bangunan<br>gedung      | Peremajaan RTLH  | Dsn<br>Meurelo        | 12  | Unit       | 360.000        |                          | 60.000  | 120.000 | 180.000 | APBN-APBK           |
|    |                         | Peremajaan RTLH  | Dsn<br>Teupin<br>Bada | 12  | Unit       | 360.000        |                          | 60.000  | 120.000 | 180.000 | APBN-APBK           |
|    |                         | Stimulan bahan<br>bangunan   | Dsn<br>Meurelo        | 14  | Unit       | 210.000        |                          | 70.000  | 70.000  | 70.000  | APBN-APBK           |
|    |                         | Stimulan bahan<br>bangunan   | Dsn<br>Teupin<br>Bada | 9   | Unit       | 135.000        |                          | 60.000  | 75.000  |         | APBN-APBK           |
| C  | Jalan<br>lingkungan     | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan                                   | Dsn<br>Meurelo        | 550 | Meter      | 550.000        |                          | 550.000 |         |         | APBA                |
| D  | Penyediaan air<br>minum | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan  | Dsn<br>Meurelo        | 1   | Unit       | 50.000         |                          | 50.000  |         |         | APBK                |
|    |                         | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir                                     | Dsn<br>Meurelo        | 1   | Unit       | 500.000        |                          |         | 500.000 |         | APBN                |
| E  | Drainase<br>lingkungan  | Peningkatan kualitas<br>drainase   | Dsn<br>Meurelo        | 110 | Meter      | 77.000         |                          | 77.000  |         |         | APBK                |
|    |                         | Peningkatan kualitas<br>drainase   | Dsn<br>Teupin<br>Bada | 240 | Meter      | 168.000        |                          | 168.000 |         |         | APBK                |

| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN      | JENIS KEGIATAN                         | LOKASI          | VOL | SATU<br>AN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |        | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|-------------------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|--------------------------|---------|---------|--------|---------------------|
|    |                         |  |                 |     |            |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025   |                     |
| F  | Pengolahan limbah       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | Gp. Beu-rawang  | 2   | Unit       | 100.000        |                          | 100.000 |         |        | APBK                |
|    |                         | IPAL + MCK komunal                     | Dsn Meurelo     | 1   | Unit       | 500.000        |                          |         | 500.000 |        | APBN                |
|    |                         | Bio - Septitanc                        | Dsn Teupin Bada | 1   | Unit       | 30.000         |                          |         | 30.000  |        | APBK                |
| G  | Pengelolaan persampahan | Penyediaan dan pengadaan lahan         | Gp. Beu-rawang  | 2   | Unit       | 100.000        | 50.000                   | 50.000  |         |        | APBK                |
|    |                         | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | Dsn Meurelo     | 1   | Unit       | 200.000        |                          | 200.000 |         |        | APBK                |
|    |                         | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | Dsn Teupin Bada | 1   | Unit       | 200.000        |                          |         | 200.000 |        | APBK                |
|    |                         | Becak Motor                            | Gp. Beu-rawang  | 2   | Unit       | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |        | APBG                |
| H  | Proteksi kebakaram      | Penyediaan dan pengadaan lahan         | Gp. Beu-rawang  | 2   | Unit       | 100.000        |                          | 50.000  | 50.000  |        | APBK                |
|    |                         | Posko Tanggap Bencana                  | Dsn Meurelo     | 1   | Unit       | 150.000        |                          |         | 150.000 |        | APBK                |
|    |                         | Posko Tanggap Bencana                  | Dsn Teupin Bada | 1   | Unit       | 150.000        |                          |         | 150.000 |        | APBK                |
| I  | Ruang terbuka           | Penyediaan penerangan jalan umum (PJU) | Gp. Beu-rawang  | 30  | Unit       | 900.000        |                          | 30.000  | 30.000  | 30.000 | APBN-APBA           |



| NO | ASPEK<br>KEKUMUHAN                | JENIS KEGIATAN  | LOKASI             | VOL       | SATU<br>AN | TOTAL<br>BIAYA | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |           | SUMBER<br>PENDANAAN |
|----|-----------------------------------|---|--------------------|-----------|------------|----------------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------------------|
|    |                                   |   |                    |           |            |                | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025      |                     |
|    |                                   | Pembangunan RTP   | Gp. Beu-<br>rawang | 1         | Unit       | 1.000.000      |                          |         |         | 1.000.000 | APBN-APBA           |
|    |                                   | Revitalisasi lapangan<br>voly                                     | Gp. Beu-<br>rawang | 1         | Unit       | 1.000.000      |                          |         |         | 1.000.000 | APBK-CSR            |
| J  | Pengendalian<br>dan<br>Pengawasan | Operasional dan<br>pemeliharaan                                   | Gp. Beu-<br>rawang | 1         | Unit       | 50.000         |                          |         |         | 50.000    | APBK                |
|    |                                   | Pelatihan kemitraan dan<br>kewirausahaan                          | Gp. Beu-<br>rawang | 4         | Unit       | 160.000        | 40.000                   | 40.000  | 40.000  | 40.000    | CSR                 |
|    |                                   | Bantuan modal usaha   | Gp. Beu-<br>rawang | 2         | Unit       | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |           | CSR                 |
|    |                                   | Peningkatan kualitas<br>UMK                                       | Gp. Beu-<br>rawang | 2         | Unit       | 200.000        |                          | 100.000 | 100.000 |           | CSR                 |
|    |                                   | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan | Gp. Beu-<br>rawang | 2         | Unit       | 100.000        |                          | 50.000  | 50.000  |           | APBK                |
|    |                                   | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana                               | Gp. Beu-<br>rawang | 2         | Unit       | 100.000        |                          | 50.000  | 50.000  |           | APBK                |
|    |                                   |   |                    | SUB TOTAL |            | 8.210.000      |                          |         |         |           |                     |

#### 7.4 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PRIORITAS - KRUENG RAYA

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan prioritas di Kota Sabang berada di Kawasan Krueng Raya. Rencana aksi program peningkatan kawasan permukiman kumuh kawasan prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, hal ini mengingat

penanganan kawasan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan pendekatan non fisik. Adapun rencana aksi program fisik yang diusulkan meliputi rehabilitasi rumah layak huni, pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, persampahan, air limbah, serta lainnya. Sedangkan dalam aspek non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

Table 7.5

Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas – Krueng Raya

| NO | LOKASI                            | ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN   | LOKASI      | VOLUME | SATUAN | TOTAL BIAYA | TAHUN PENANGAN |      |      |      | SUMBER PENDANAAN |
|----|-----------------------------------|--|-------------|--------|--------|-------------|----------------|------|------|------|------------------|
|    |                                   |  |             |        |        |             | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
| A  | Tahapan persiapan dan perencanaan | Sosialisasi Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya        | Gp. Kr Raya | 4      | Unit   | 80.000.000  |                |      |      |      | APBK             |
|    |                                   | Sosialisasi 7 indikator kumuh  | Gp. Kr Raya | 4      | Unit   | 80.000.000  |                |      |      |      | APBK             |
|    |                                   | Sosialisai perubahan sikap dan prilaku   | Gp. Kr Raya | 4      | Unit   | 200.000.000 |                |      |      |      | APBK             |
|    |                                   | Tinjauan lapangan  | Gp. Kr Raya | 4      | Unit   | 200.000.000 |                |      |      |      | APBK             |
|    |                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya | Gp. Kr Raya | 1      | Unit   | 100.000.000 |                |      |      |      | APBK             |



| NO | LOKASI                        | ASPEK KECUMUHAN / JENIS KEGIATAN  | LOKASI              | VOLUME | SATUAN | TOTAL BIAYA   | TAHUN PENANGAN |      |      |      | SUMBER PENDANAAN |
|----|-------------------------------|---|---------------------|--------|--------|---------------|----------------|------|------|------|------------------|
|    |                               |   |                     |        |        |               | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
|    |                               | Penyusunan Dokumen Teknis RTP Gampong Nelayan                                     | Gp. Kr Raya         | 1      | Unit   | 50.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                               | Penyusunan Dokumen Teknis Jalan inspeksi + pedestrian                             | Gp. Kr Raya         | 1      | Unit   | 200.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                               | Penyusunan Dokumen Teknis Dermaga, jalur kuliner dan souvenir serta balee nelayan | Gp. Kr Raya         | 1      | Unit   | 100.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
| B  | Pembebasan lahan dan bangunan | Pembebasan lahan jalan inspeksi + pedestrian                                      | Gp. Kr Raya         | 20     | Unit   | 2.500.000.000 |                |      |      |      | APBK             |
|    |                               | Pembebasan lahan RTP  | Gp. Kr Raya         | 10     | Unit   | 1.500.000.000 |                |      |      |      | APBK             |
| C  | Bangunan gedung               | Peremajaan rumah  | Batu Singa Berfakta | 3      | Unit   | 90.000.000    |                |      |      |      | APBN-APBK        |
|    |                               | Peremajaan rumah  | Lhok Drien          | 17     | Unit   | 510.000.000   |                |      |      |      | APBN-APBK        |
|    |                               | Peremajaan rumah  | MKB                 | 44     | Unit   | 1.320.000.000 |                |      |      |      | APBN-APBK        |
|    |                               | Peremajaan rumah  | Teupin Cirik        | 3      | Unit   | 90.000.000    |                |      |      |      | APBN-APBK        |
| D  | Jalan lingkungan              | Peningkatan jalan aspal   | Gp Krueng Raya      | 1.600  | Meter  | 3.200.000.000 |                |      |      |      | APBA             |
|    |                               | Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan lingkungan                               | Batu Singa Berfakta | 700    | Meter  | 700.000.000   |                |      |      |      | ABPN             |
|    |                               | Penyediaan dan pengadaan lahan  | Gp. Krueng Raya     | 1      | Ls     | 500.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                               | Pembangunan inspeksi + pedestrian   | Gp Krueng Raya      | 1.400  | Meter  | 5.000.000.000 |                |      |      |      | APBN             |
|    |                               | Peningkatan kualitas jalan lingkungan   | Batu Singa Berfakta | 1.420  | Meter  | 1.420.000.000 |                |      |      |      | APBN             |
|    |                               | Peningkatan kualitas jalan lingkungan   | Lhok Drien          | 247    | Meter  | 247.000.000   |                |      |      |      | APBK             |

| NO | LOKASI                  | ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN      | LOKASI              | VOLUME | SATUAN | TOTAL BIAYA   | TAHUN PENANGAN |      |      |      | SUMBER PENDANAAN |
|----|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------|----------------|------|------|------|------------------|
|    |                         |                                       |                     |        |        |               | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
| E  | Penyediaan air minum    | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | MKB                 | 598    | Meter  | 598.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | Teupin Cirik        | 627    | Meter  | 627.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Rehab Jembatan                        | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 500.000.000   |                |      |      |      | APBN             |
|    |                         | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gp. Krueng Raya     | 3      | Unit   | 150.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Pembangunan reservoir                 | Batu Singa Berfakta | 1      | Unit   | 500.000.000   |                |      |      |      | APBN             |
|    |                         | Pembangunan reservoir                 | Lhok Drien          | 1      | Unit   | 500.000.000   |                |      |      |      | APBN             |
|    |                         | Pembangunan reservoir                 | MKB                 | 1      | Unit   | 500.000.000   |                |      |      |      | APBN             |
| F  | Drainase lingkungan     | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gp Krueng Raya      | 1      | Unit   | 50.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Pembangunan drainase sekunder         | Gp Kr Raya          | 1.345  | Meter  | 1.345.000.000 |                |      |      |      | APBN             |
|    |                         | Peningkatan kualitas drainase         | Batu Singa Berfakta | 500    | Meter  | 350.000.000   |                |      |      |      | APBN             |
|    |                         | Peningkatan kualitas drainase         | Lhok Drien          | 400    | Meter  | 280.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Pembangunan drainase lingkungan       | MKB                 | 600    | Meter  | 600.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Peningkatan kualitas drainase         | MKB                 | 600    | Meter  | 420.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | Peningkatan kualitas drainase         | Teupin Cirik        | 520    | Meter  | 364.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
| G  | Pengolahan limbah       | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gp Kr Raya          | 3      | Unit   | 150.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | IPAL komunal                          | Batu Singa Berfakta | 1      | Unit   | 500.000.000   |                |      |      |      | APBK             |
|    |                         | IPAL komunal                          | MKB                 | 2      | Unit   | 1.000.000.000 |                |      |      |      | APBK             |
| H  | Pengelolaan persampahan | Penyediaan dan pengadaan lahan        | Gp Krueng Raya      | 4      | Unit   | 200.000.000   |                |      |      |      | APBK             |



| NO | LOKASI              | ASPEK KECUMUHAN / JENIS KEGIATAN        | LOKASI              | VOLUME | SATUAN | TOTAL BIAYA    | TAHUN PENANGAN |      |      |      | SUMBER PENDANAAN |
|----|---------------------|---|---------------------|--------|--------|----------------|----------------|------|------|------|------------------|
|    |                     |   |                     |        |        |                | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
|    |                     | Tempat Penampungan Sementara (TPS)      | Batu Singa Berfakta | 1      | Unit   | 150.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Tempat Penampungan Sementara (TPS)      | Lhok Drien          | 1      | Unit   | 150.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Tempat Penampungan Sementara (TPS)      | MKB                 | 1      | Unit   | 150.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Tempat Penampungan Sementara (TPS)      | Teupin Cirik        | 1      | Unit   | 150.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Becak Motor                             | Gp Kr Raya          | 2      | Unit   | 200.000.000    |                |      |      |      | APBG             |
| I  | Proteksi kebakaran  | Penyediaan dan pengadaan lahan          | Gp Kr Raya          | 4      | Unit   | 200.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Posko Tanggap Bencana                   | Batu Singa Berfakta | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Posko Tanggap Bencana                   | Lhok Drien          | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Posko Tanggap Bencana                   | MKB                 | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Posko Tanggap Bencana                   | Teupin Cirik        | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
| J  | Ruang terbuka hijau | Penyediaan dan pengadaan lahan          | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 1.000.000.000  |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)  | Gp Kr Raya          | 80     | Unit   | 2.400.000.000  |                |      |      |      | APBN-APBK        |
|    |                     | Pembangunan RTP gampong nelayan         | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 8.000.000.000  |                |      |      |      | APBN             |
|    |                     | Pembangunan dermaga                     | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 7.000.000.000  |                |      |      |      | APBN             |
|    |                     | Pembangunan bay walk                    | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 3.000.000.000  |                |      |      |      | APBN             |
|    |                     | Penyediaan food stall                   | Gp Kr Raya          | 16     | Unit   | 160.000.000    |                |      |      |      | CSR              |
|    |                     | Pembangunan balee nelayan + MCK         | Gp Krueng Raya      | 3      | Unit   | 510.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                     | Pembangunan pintu masuk Gampong Nelayan | Gp Kr Raya          | 2      | Unit   | 300.000.000    |                |      |      |      | CSR              |
|    |                     | Pembangunan Mesjid                      | Gp Kr Raya          | 1      | Unit   | 10.000.000.000 |                |      |      |      | APBK             |

| NO | LOKASI                      | ASPEK KECUMUHAN / JENIS KEGIATAN                         | LOKASI     | VOLUME | SATUAN | TOTAL BIAYA    | TAHUN PENANGAN |      |      |      | SUMBER PENDANAAN |
|----|-----------------------------|--|------------|--------|--------|----------------|----------------|------|------|------|------------------|
|    |                             |  |            |        |        |                | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
| K  | Pengendalian dan pengawasan | Operasional dan pemeliharaan                             | Gp Kr Raya | 2      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBG             |
|    |                             | Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan                    | Gp Kr Raya | 4      | Unit   | 160.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                             | Bantuan modal usaha                                      | Gp Kr Raya | 2      | Unit   | 200.000.000    |                |      |      |      | APBK-CSR         |
|    |                             | Peningkatan kualitas UMK                                 | Gp Kr Raya | 1      | Unit   | 200.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                             | Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan | Gp Kr Raya | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                             | Pelatihan pemuda tanggap bencana                         | Gp Kr Raya | 1      | Unit   | 100.000.000    |                |      |      |      | APBK             |
|    |                             |  | SUB TOTAL  |        |        | 61.351.000.000 |                |      |      |      |                  |

7.5 RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PRIORITAS

Penataan Kawasan permukiman Kawasan Krueng Raya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur permukiman yang juga dapat bernilai lebih terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Konsep yang diterapkan pada perencanaan ini adalah Wisata Desa. Wisata Desa adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cinderamata, homestay dan sebagainya.

Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kawasan Krueng Raya berfokus pada tujuh perencanaan utama yaitu :

1. Pelestarian lingkungan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur
3. Sistem pengolahan limbah dan pengelolaan persampahan
4. Penyediaan Air Bersih
5. Pertumbuhan UKM dan ekonomi kreatif
6. Perubahan wajah kawasan
7. Proteksi dan evakuasi bencana

Pengembangan kegiatan dari tujuh perencanaan utama tersebut dapat dilihat dalam grafik 7.2. Lokasi pengembangan untuk



setiap kegiatan tertuang Dalam Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya pada gambar 7.3



Gambar 7.2 Kegiatan pengembangan penanganan kumuh Kawasan Krueng Raya



Gambar 7.3 Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya



## ❑ Pelestarian Lingkungan

Kegiatan untuk mendukung konsep Pelestarian Lingkungan adalah naturalisasi sungai/alur, *natural trail*, *camping ground*, *mangrove trail*, dan konservasi hutan lindung. Naturalisasi sungai/alur berfungsi untuk memperbaiki fungsi inisial sungai, konservasi alam (berhenti mengeksploitasi) dan melindungi ekosistem sekitar. Kegiatan normalisasi alur akan dilakukan disepanjang aliran alur yang melintasi kawasan perencanaan.

### 1 PELESTARIAN LINGKUNGAN NATURALISASI SUNGAI/ALUR



Gambar 7.4 Kegiatan Naturalisasi Krueng Raya.

Kegiatan *mangrove trail/park* akan bersinergi dengan perencanaan area LIPI berupa laboratorium budidaya ikan. Kegiatan mangrove trail/park dapat menjadi wisata edukasi di Kawasan Krueng Raya. Kawasan mangrove trai;/park berfungsi untuk mereduksi dampak abrasi pantai, sebagai pemecah ombak dan pelindung ekosistem biota laut.

### 1 PELESTARIAN LINGKUNGAN MANGROVE PARK

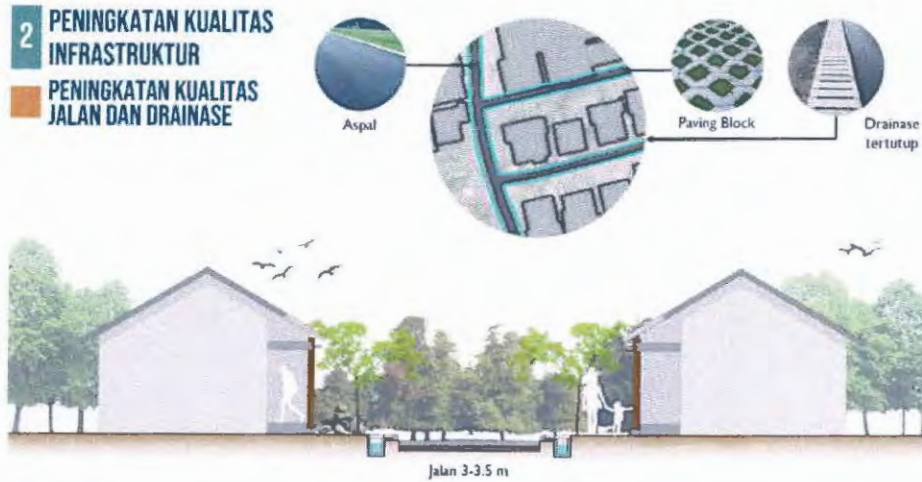
1. Berfungsi mereduksi dampak abrasi pantai
2. Befungsi sebagai barrier/pemecah ombak
3. Pelindung ekosistem biota laut



Gambar 7.5 Kegiatan *Mangrove Trail/Park*. Krueng Raya.



## □ Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 7.6 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan



Gambar 7.7 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan

Kegiatan rehab jembatan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik jembatan, namun juga penambahan kantilever di sisi kiri dan kanan jembatan yang berfungsi sebagai area pejalan kaki yang terkoneksi dengan jalur pejalan kaki yang ada pada kawasan perencanaan.



Gambar 7.8 Ilustrasi Kegiatan Rehab Jembatan.

## □ Pengolahan Limbah dan Pengelolaan Persampahan

Kegiatan untuk Pengolahan Limbah dan Pengelolaan Persampahan adalah penyediaan IPAL komunal terintegrasi RTP dan penyediaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) 3R serta becak motor untuk pengangkutan sampah domestik.



### 3 PENGOLAHAN LIMBAH & PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

#### IPAL KOMUNAL TERINTEGRASI RTP

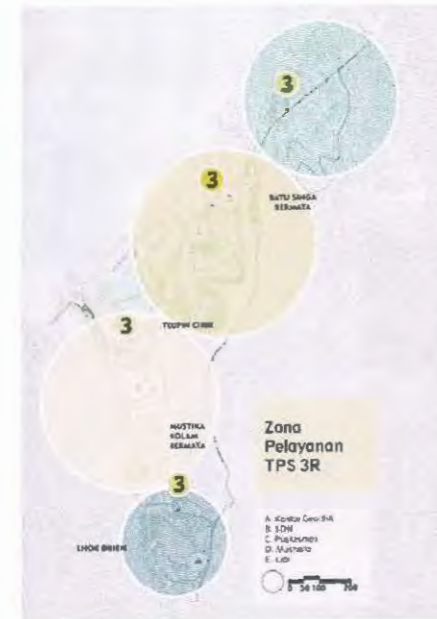


Gambar 7.9 Konsep Kegiatan IPAL Komunal Terintegrasi RTP

Penyediaan IPAL komunal terintegrasi RTP dibagi menjadi empat zona pelayanan berdasarkan batas administrasi dusun, agar memudahkan administrasi dan biaya operasional. Pemilihan lokasi IPAL komunal harus berada di elevasi yang lebih rendah dari permukiman, sehingga dapat memanfaatkan gaya gravitasi untuk aliran limbah domestik. Satu unit IPAL komunal direncanakan melayani 25-50 KK.

Kegiatan TPS 3R juga dibagi menjadi empat zona pelayanan berdasarkan batas administrasi dusun. Sampah domestik yang

berasal dari masing-masing hunian rumah tangga diangkut secara rutin menggunakan becak motor yang dikelola oleh desa. Becak motor akan mengangkut sampah domestik menuju TPS 3R yang ada disetiap zona pelayanan. Untuk selanjutnya diangkut oleh mobil pengangkut sampah menuju TPA.



Gambar 7.10 Kegiatan TPS 3R dan Sistem Pengelolaan Persampahan.

#### ❑ Penyediaan Air Bersih

Kegiatan untuk penyediaan air bersih adalah penyediaan rumah rumah dan reservoir skala lingkungan. Potensi sumber air bersih



yang ada adalah alur Waduk Paya Senara dan sumber mata air dari lereng perbukitan di sekitar permukiman penduduk.



Gambar 7.11 Potensi sumber air bersih. Alur Waduk Paya Senara (kiri) dan Mata air (kanan)

Kedua sumber air ini akan melalui penyaringan sederhana untuk selanjutnya akan ditampung dalam reservoir dan rumah pompa. Bentuk reservoir berupa kolam retensi dan menara air.



Gambar 7.12 Skema Konsep Penyediaan Air Bersih

#### □ Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan UMK dan ekonomi kreatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi masyarakat setempat dengan penyediaan galeri-galeri dan food stall di area publik yang dapat diakses oleh wisatawan.

Selain penyediaan sarana, perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan oleh pihak-pihak terkait. Sosialisasi untuk perubahan perilaku masyarakat serta kesiapan masyarakat juga perlu terus dilakukan. Pembangunan fisik perlu diiringi dengan perubahan kualitas dan pola pikir masyarakat, agar masyarakat siap dan dapat menggunakan, menjaga dan memelihara pembangunan fisik tersebut secara tepat sasaran.

#### 5 PERTUMBUHAN UMK & EKONOMI KREATIF

1. Memperkuat branding kuliner khas Krugeng Raya
2. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis wisata masyarakat



Gambar 7.13 Ilustrasi Penyediaan Galeri dan Food Stall Untuk Mendukung Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif.:



### ❑ Perubahan Wajah Kawasan

Penanganan kumuh Kawasan Krueng Raya tidak hanya berfokus pada peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman, tetapi juga melakukan perubahan wajah kawasan kumuh Krueng Raya. Hal dilakukan dengan kegiatan penyediaan *entrance gate*, ruang terbuka komunitas, dermaga, serta *food stall* dan *bay walk*.

Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas bertujuan untuk memberikan ruang berinteraksi masyarakat sekitar. Ruang Terbuka Komunitas memiliki fasilitas area parkir; tiga lapangan voli pantai; *bench*; plaza dan galeri yang berfungsi untuk memajang produk-produk lokal masyarakat setempat. Plaza yang berada di tengah RTP dapat digunakan untuk area pertunjukan seni dan pertunjukan-pertunjukan lainnya.



Gambar 7.14 Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas



Gambar 7.15 Ilustrasi 3D Ruang Terbuka Komunitas



## BAB VIII

### RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Rencana Penyediaan Tanah memuat rumusan penyediaan tanah terhadap penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- b. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Sabang akan dilaksanakan dengan pola Pemugaran dan Peremajaan, dimana tingkat kekumuhan di empat kawasan permukiman kumuh adalah kumuh ringan.

#### 8.1 POLA PENYEDIAAN TANAH

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara (PP 40/1996);
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah (UU 1 dan 20/2011);
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah (PP 24/1997);
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah (UU 1/2014);
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (PP 11/2010); dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (UU 2/2012).

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) akan dilaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan.

Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara

- ☐ Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
- ☐ Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
- ☐ Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
- ☐ Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Warga



Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

## 2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

- ☐ Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah Negara yang digarap oleh masyarakat;
- ☐ Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan: antar pemegang hak atas tanah; antar pemegang tanah negara; atau antara penggarap tanah Negara dan pemegang hak atas tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen)

dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;

- ☐ Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;
- ☐ Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

Manfaat konsolidasi tanah antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib dan sehat;
- b. Keuntungan estetika/keindahan view yang lebih baik kepada pemilik tanah;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa menggurus);
- d. Menghindari akses – akses yang mungkin timbul dalam proses penataan dan penyediaan tanah;
- e. Mempercepat pertumbuhan wilayah;
- f. Menertibkan administrasi pertanahan;
- g. Menghemat biaya pemerintah;

h. Meningkatkan ...

- h. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah;
  - i. Meningkatkan harga properti peserta;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
- ☐ Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
  - ☐ Peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;
  - ☐ Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenang;
  - ☐ Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah
- ☐ Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman

diperuntukkan pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;

- ☐ Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar

- ☐ Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
- ☐ Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Pengadaan tanah

- ☐ Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;





- Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

## 8.2 PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI

### 8.2.1 Ketentuan Pelaksanaan

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
- b. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
- c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
  - 1) Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
  - 2) Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;

- 3) Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian asset yang terkena proyek secara langsung;
  - 4) Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
  - 5) Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
  - 6) Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
  - 7) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
- d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan

e. Jika ...



- e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 8.2.1 Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

- a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan
- b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel 8.1 Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

| URAIAN   | KEBUTUHAN DOKUMEN           |
|--|-----------------------------|
| 1. Pengadaan tanah dan relokasi  |                             |
| <input type="checkbox"/> Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) atau menghilangkan >10% dari aset produktif | LARAP Komprehensif/ Lengkap |
| <input type="checkbox"/> Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif | LARAP Sederhana             |
| 2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi  | RPL                         |

#### 8.2.2 Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

- a. Pemerintah ...



a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)

- 1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
- 3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
- 4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota

- 1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
- 2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;

- 3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan

- 4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota

- 1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- 2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen

- 1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
- 2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui

tahapan (1) Persiapan; (2) Sosialisasi awal; (3) Pendataan; (4) Rembug dan konsultasi; (5) Penyusunan dokumen LARAP; (6) Review dokumen LARAP; (7) Persetujuan LARAP; (8) Pelaksanaan LARAP; dan (9) Pemantauan pelaksanaan LARAP.

Pihak/instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:

- a. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan pelaksanaan;
- c. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari pemerintah kabupaten/kota;
- d. Inventarisasi dan identifikasi;
- e. Penetapan penilai;
- f. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- g. Pemberian ganti kerugian;
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap);
- j. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah; dan
- k. Penyusunan laporan.



## BAB IX

### RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

#### 9.1 SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sabang direncanakan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Sabang serta Non Pemerintahan atau pembiayaan lainnya. Adapun sumber biaya, bentuk, skema pembiayaan dan karakteristik pembiayaan yang akan diimplementasikan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel 9.1.

Tabel 9.1 Sumber Biaya, Bentuk dan Skema Pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Sabang

| SUMBER PEMBIAYAAN | BENTUK PEMBIAYAAN     | SKEMA PEMBIAYAAN   |
|-------------------|-----------------------|--|
| Pemerintah        | Pendanaan Reguler     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN/APBD Provinsi/APBD Kota</li> <li>• APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan</li> <li>• APBN Transfer Ke Daerah (DAU/DAK/DBH)</li> </ul> |
|                   | Pendanaan Non Reguler | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah APBN (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP, Bantuan Uang Muka</li> </ul>  |

| SUMBER PEMBIAYAAN | BENTUK PEMBIAYAAN                    | SKEMA PEMBIAYAAN  |
|-------------------|--------------------------------------|---|
|                   |                                      | (BUM) Dan Subsidi Selisih Bunga (SSB),<br>Pembangunan Apartemen Bersubsidi, Dll) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah APBD</li> <li>• Pinjaman APBN/APBD (Pendampingan Pembangunan Infrastruktur, Dll)</li> </ul> |
| Non Pemerintah    | Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan BUMN</li> <li>• Private Finance Initiative (PFI)</li> <li>• Performance - Based Annuity Scheme (PBAS)</li> <li>• Availability Payment</li> </ul>                         |

Tabel 9.2 Karakteristik Pembiayaan  
Sumber : Penyusunan Skema Pembiayaan Penataan Permukiman

| SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN | KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT                               | KEGIATAN YANG SESUAI   |
|-----------------------------|---|--|
| APBN                        | Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional | Semua kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang |

dibagi ...

| SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN               | KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT  | KEGIATAN YANG SESUAI  |
|---|--|---|
|   |  | dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (misal: fasilitas program penanganan permukiman kumu bagi lokasi strategis nasional, fasilitas dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh) |
| APBN – Dekonsentrasi dan tugas perbantuan | Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telah didelegasikan   | Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat/nasional yang telah didelegasikan  |
|   | Memenuhi readiness kriteria yang telah ditetapkan:<br>(1). Memiliki SK Kumuh<br>(2). Telah melakukan verifikasi data kumuh<br>(3). Telah menyusun RP2KPKPK |   |
| APBN – Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH)    | Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional: Melalui Program KOTAKU  | Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung pencapaian 100 - 0 - 100   |

| SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN | KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT   | KEGIATAN YANG SESUAI  |
|-----------------------------|---|---|
|                             | Memenuhi Persyaratan:<br>(1). Mendukung kegiatan strategis dan prioritas = 0% kawasan kumuh,<br>(2). Sesuai dengan kewenangan pusat |   |
| APBN – Pinjaman dan Hibah   | Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional   | Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung pencapaian 100 - 0 - 100                       |
|                             | Memenuhi persyaratan akses program yang disediakan, missal apartemen bersubsidi, dst.   |   |
| APBD Provinsi               | Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan provinsi   | semua kegiatan memungkinkan selama menjadi kewenangan provinsi  |
| APBD Kota                   | Sesuai dengan pengalokasian anggaran  | Semua kegiatan memungkinkan   |
| Infrastruktur Swasta        | Pembangunan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan kepemilikan aset pada swasta                                      | Kegiatan infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menjadi kewenangan negara |



| SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN                  | KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT  | KEGIATAN YANG SESUAI  |
|--|--|---|
| <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | <p>Berdasarkan proposal yang telah diajukan dan disepakati kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan :</p> <p>(1). Rencana CSR<br/>(2). RPI2JM<br/>(3). Kesiapan Lahan Dan Penerimaan<br/>(4). Kesiapan DED Keberlanjutan Penanganan<br/>(5). Kesiapan Perijinan<br/>(6). Ketersediaan Dana</p> <p>Sumber: Penyusunan Skema</p> | <p>(1). Program dan kegiatan yang membutuhkan penanganan dalam waktu singkat.</p> <p>(2). Program dan kegiatan yang tidak membutuhkan keberlanjutan penanganan.</p> |

## 9.2 RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG.

Rencana Investasi dan pembiayaan mengidentifikasin kebutuhan anggaran penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Sabang yang dijabarkan selama lima tahun kedepan. Rencana Investasi merupakan bagian dari Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Memorandum Program pada

dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan penanganan yang diuraikan pada masing-masing kawasan. Dalam memorandum ini teruraikan kebutuhan program di bidang keciptakaryaan yang meliputi jalan, drainase, air minum, sanitasi dan persampahan beserta dengan rencana investasi yang didalamnya terdapat sumber pendanaan, pelaksana, dan perkiraan biaya. Matriks memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel 9.3 berikut

Tabel 9.3 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025

| NO | LOKASI                | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN   | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |        | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-----------------------|--------------|---|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|
|    |                       |              |   |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025   |                     |                     |
| I  | GAMPONG KRUENG RAYA   |              |   |     |        |                            |                           |                          |         |         |        |                     |                     |
| A  |                       |              | Tahap Persiapan dan Perencanaan   |     |        |                            |                           |                          |         |         |        |                     |                     |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Sosialisasi<br>Perencanaan<br>Infrastruktur<br>Lingkungan<br>Permukiman Skala<br>Kawasan - Kawasan<br>Kumuh Krueng Raya           | 4   | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   |         | 20.000  | 20.000 | APBK                | PUPR                |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh  | 4   | Unit   | 20.000                     | 80.000                    |                          | 40.000  | 40.000  |        | APBK                | PUPR                |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan perilaku  | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |        | APBK                | DLHK                |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Tinjauan lapangan   | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |        | APBK                | PUPR                |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Infrastruktur<br>Lingkungan<br>Permukiman Skala<br>Kawasan - Kawasan<br>Kumuh Krueng Raya | 1   | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |         |         |        | APBK                | BAPPEDA             |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Penyusunan<br>Dokumen Teknis RTP<br>Gampong Nelayan   | 1   | Unit   | 50.000                     | 50.000                    | 50.000                   |         |         |        | APBK                | PUPR                |
|    | Gp.<br>Krueng<br>Raya | 27,011       | Penyusunan<br>Dokumen Teknis<br>Jalan inspeksi +<br>pedestrian  | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   | 200.000                  |         |         |        | APBK                | PUPR                |



| NO       | LOKASI                | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN   | VOL   | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |           |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------|-----------------------|--------------|---|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|          |                       |              |   |       |        |                            |                           | 2022                     | 2023      | 2024      | 2025      |                     |                     |
|          | Gp. Krueng Raya       | 27,011       | Penyusunan Dokumen Teknis Dermaga, jalur kuliner dan souvenir serta balee nelayan | 1     | Unit   | 100.000                    | 100.000                   | 100.000                  |           |           |           | APBK                | PUPR                |
| <b>B</b> |                       |              | Pembebasan Lahan dan Bangunan   |       |        |                            |                           |                          |           |           |           |                     |                     |
|          | Gp. Krueng Raya       | 27,011       | Pembebasan lahan jalan inspeksi + pedestrian                                      | 20    | Unit   | 125.000                    | 2.500.000                 |                          | 1.250.000 | 1.250.000 |           | APBK                | PUPR                |
|          | Gp. Krueng Raya       | 27,011       | Pembebasan lahan RTP  | 10    | Unit   | 150.000                    | 1.500.000                 | 750.000                  | 750.000   |           |           | APBK                | PUPR                |
| <b>C</b> |                       |              | Bangunan Gedung   |       |        |                            |                           |                          |           |           |           |                     |                     |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Peremajaan rumah  | 3     | Unit   | 30.000                     | 90.000                    |                          | 30.000    | 30.000    | 30.000    | APBN-APBK           | PUPR                |
|          | Lhok Drien            | 3,039        | Peremajaan rumah  | 17    | Unit   | 30.000                     | 510.000                   |                          | 170.000   | 170.000   | 170.000   | APBN-APBK           | PUPR                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Peremajaan rumah  | 44    | Unit   | 30.000                     | 1.320.000                 |                          | 440.000   | 440.000   | 440.000   | APBN-APBK           | PUPR                |
|          | Teupin Cirik          | 7,571        | Peremajaan rumah  | 3     | Unit   | 30.000                     | 90.000                    |                          | 30.000    | 30.000    | 30.000    | APBN-APBK           | PUPR                |
| <b>D</b> |                       |              | Jalan Lingkungan  |       |        |                            |                           |                          |           |           |           |                     |                     |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,01        | Peningkatan jalan aspal   | 1.600 | Meter  | 2.000.000                  | 3.200.000                 |                          | 1.600.000 | 1.600.000 |           | APBA                | PUPR                |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan lingkungan                               | 700   | Meter  | 1.000                      | 700.000                   | 700.000                  |           |           |           | ABPN                | BPPW                |
|          | Gp. Krueng Raya       | 27,01        | Penyediaan dan pengadaan lahan  | 1     | Ls     | 500.000                    | 500.000                   |                          | 250.000   | 250.000   |           | APBK                | PUPR                |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,01        | Pembangunan inspeksi + pedestrian   | 1.400 | Meter  |                            | 5.000.000                 |                          |           | 2.500.000 | 2.500.000 | APBN                | BPPW                |

| NO       | LOKASI                | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN   | VOL   | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |           |         |      | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|------|---------------------|---------------------|
|          |                       |              |                                       |       |        |                            |                           | 2022                     | 2023      | 2024    | 2025 |                     |                     |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 1.420 | Meter  | 1.000                      | 1.420.000                 |                          | 1.000.000 | 420.000 |      | APBN                | PUPR                |
|          | Lhok Drien            | 3,039        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 247   | Meter  | 1.000                      | 247.000                   |                          |           | 247.000 |      | APBK                | PUPR                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 598   | Meter  | 1.000                      | 598.000                   |                          |           | 598.000 |      | APBK                | PUPR                |
|          | Teupin Cirik          | 7,571        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 627   | Meter  | 1.000                      | 627.000                   |                          |           | 627.000 |      | APBK                | PUPR                |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Rehab Jembatan                        | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   | 500.000                  |           |         |      | APBN                | PUPR                |
| <b>E</b> |                       |              | Penyediaan Air Minum                  |       |        |                            |                           |                          |           |         |      |                     |                     |
|          | Gp. Krueng Raya       | 27,011       | Penyediaan dan pengadaan lahan        | 3     | Unit   | 50.000                     | 150.000                   | 50.000                   | 50.000    | 50.000  |      | APBK                | PUPR                |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Pembangunan reservoir                 | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          | 500.000   |         |      | APBN                | PDAM                |
|          | Lhok Drien            | 3,039        | Pembangunan reservoir                 | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |           | 500.000 |      | APBN                | PDAM                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Pembangunan reservoir                 | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   | 500.000                  |           |         |      | APBN                | PDAM                |
| <b>F</b> |                       |              | Drainase Lingkungan                   |       |        |                            |                           |                          |           |         |      |                     |                     |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Penyediaan dan pengadaan lahan        | 1     | Unit   | 50.000                     | 50.000                    | 50.000                   |           |         |      | APBK                | PUPR                |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Pembangunan drainase sekunder         | 1.345 | Meter  | 1.000                      | 1.345.000                 | 1.345.000                |           |         |      | APBN                | BPPW                |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Peningkatan kualitas drainase         | 500   | Meter  | 700                        | 350.000                   | 350.000                  |           |         |      | APBN                | BPPW                |
|          | Lhok Drien            | 3,039        | Peningkatan kualitas drainase         | 400   | Meter  | 700                        | 280.000                   | 280.000                  |           |         |      | APBK                | PUPR                |



| NO       | LOKASI                | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |      | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|------|---------------------|---------------------|
|          |                       |              |                                     |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025 |                     |                     |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Pembangunan drainase lingkungan     | 600 | Meter  | 700                        | 600.000                   |                          | 600.000 |         |      | APBK                | PUPR                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Peningkatan kualitas drainase       | 600 | Meter  | 700                        | 420.000                   |                          |         | 420.000 |      | APBK                | PUPR                |
|          | Teupin Cirik          | 7,571        | Peningkatan kualitas drainase       | 520 | Meter  | 700                        | 364.000                   |                          |         | 364.000 |      | APBK                | PUPR                |
| <b>G</b> |                       |              | Pengolahan Limbah                   |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 3   | Unit   | 50.000                     | 150.000                   | 100.000                  | 50.000  |         |      | APBK                | PUPR                |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | IPAL komunal                        | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          | 500.000 |         |      | APBK                | PUPR                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | IPAL komunal                        | 2   | Unit   | 500.000                    | 1.000.000                 |                          | 500.000 | 500.000 |      | APBK                | PUPR                |
| <b>H</b> |                       |              | Pengelolaan Persampahan             |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |         |      | APBK                | PUPR                |
|          | Batu Singa Berfakta   | 9,24         | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |         |      | APBK                | DLHK                |
|          | Lhok Drien            | 3,039        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |         |      | APBK                | DLHK                |
|          | Mustika Kolam Bermata | 7,161        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |      | APBK                | DLHK                |
|          | Teupin Cirik          | 7,571        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |      | APBK                | DLHK                |
|          | Gp Krueng Raya        | 27,011       | Becak Motor                         | 2   | Unit   | 100.000                    | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |      | APBG                | DLHK                |

| NO       | LOKASI                      | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN           | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |           |           |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------|-----------------------------|--------------|---|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------------|
|          |                             |              |   |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023      | 2024      | 2025    |                     |                     |
| <b>I</b> |                             |              | Proteksi Kebakaran                            |     |        |                            |                           |                          |           |           |         |                     |                     |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan             | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000   | 100.000   |         | APBK                | DPKK                |
|          | Batu<br>Singa<br>Berfakta   | 9,24         | Posko Tanggap<br>Bencana                      | 1   | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |           | 100.000   |         | APBK                | DPKK                |
|          | Lhok<br>Drien               | 3,039        | Posko Tanggap<br>Bencana                      | 1   | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |           | 100.000   |         | APBK                | DPKK                |
|          | Mustika<br>Kolam<br>Bermata | 7,161        | Posko Tanggap<br>Bencana                      | 1   | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |           |           | 100.000 | APBK                | DPKK                |
|          | Teupin<br>Cirik             | 7,571        | Posko Tanggap<br>Bencana                      | 1   | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |           |           | 100.000 | APBK                | DPKK                |
| <b>J</b> |                             |              | Ruang Terbuka Hijau                           |     |        |                            |                           |                          |           |           |         |                     |                     |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan             | 1   | Unit   | 1.000.000                  | 1.000.000                 |                          | 500.000   | 500.000   |         | APBK                | PUPR                |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Penyediaan<br>penerangan jalan<br>umum (PJU)  | 80  | Unit   | 30.000                     | 2.400.000                 |                          | 800.000   | 800.000   | 800.000 | APBN-<br>APBK       | PUPR                |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan RTP<br>gampong nelayan            | 1   | Unit   | 8.000.000                  | 8.000.000                 | 8.000.000                |           |           |         | APBN                | BPPW                |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan<br>dermaga                        | 1   | Unit   | 7.000.000                  | 7.000.000                 | 7.000.000                |           |           |         | APBN                | BPPW                |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan bay<br>walk                       | 1   | Unit   | 3.000.000                  | 3.000.000                 |                          | 3.000.000 |           |         | APBN                | BPPW                |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Penyediaan food stall                         | 16  | Unit   | 10.000                     | 160.000                   |                          | 160.000   |           |         | CSR                 | DISPARK             |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan balee<br>nelayan + MCK            | 3   | Unit   | 170.00                     | 510.000                   |                          | 340.000   | 170.000   |         | APBK                | DISPARK             |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan pintu<br>masuk Gampong<br>Nelayan | 2   | Unit   | 150.000                    | 300.000                   |                          | 300.000   |           |         | CSR                 | DISPAK              |
|          | Gp Krueng<br>Raya           | 27,011       | Pembangunan Mesjid                            | 1   | Unit   | 10.000.000                 | 10.000.000                |                          | 5.000.000 | 5.000.000 |         | APBK                | PUPR                |



| NO | LOKASI            | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN  | VOL       | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |        | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------|--|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|
|    |                   |              |  |           |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025   |                     |                     |
| K  |                   |              | Pengendalian dan Pengawasan  |           |        |                            |                           |                          |         |         |        |                     |                     |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Operasional dan<br>pemeliharaan  | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          |         | 50.000  | 50.000 | APBG                | PUPR                |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Pelatihan kemitraan<br>dan kewirausahaan   | 4         | Unit   | 40.000                     | 160.000                   | 40.000                   | 40.000  | 40.000  | 40.000 | APBK                | DISPERINDAG         |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Bantuan modal usaha  | 2         | Unit   | 100.000                    | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |        | APBK-CSR            | DISPERINDAG         |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Peningkatan kualitas<br>UMK  | 1         | Unit   | 100.000                    | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |         |        | APBK                | DISPERINDAG         |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan                      | 1         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |        | APBK                | DPKK                |
|    | Gp Krueng<br>Raya | 27,011       | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana  | 1         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |        | APBK                | DPKK                |
|    |                   |              |  | SUB TOTAL |        |                            | 61.351.000                |                          |         |         |        |                     |                     |
| II | GAMPONG PAYA      |              |  |           |        |                            |                           |                          |         |         |        |                     |                     |
| A  |                   |              | Tahap Persiapan dan Perencanaan  |           |        |                            |                           |                          |         |         |        |                     |                     |
|    | Gampung<br>Paya   | 22,672       | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh   | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    |                          | 40.000  | 40.000  |        | APBK                | PUPR                |
|    | Gampung<br>Paya   | 22,672       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan prilaku  | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    |                          |         | 40.000  | 40.000 | APBK                | DLHK                |
|    | Gampung<br>Paya   | 22,672       | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Paya-<br>Keuneukai | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   | 100.000                  |         |         |        | APBK                | BAPPEDA             |
|    | Gampung<br>Paya   | 22,672       | Penyusunan<br>Dokumen RTP<br>Gampung Paya  | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          | 100.000 |         |        | APBK                | PUPR                |



| NO | LOKASI                 | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN      | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|------------------------|--------------|--|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|    |                        |              |  |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |                     |
| B  |                        |              | Bangunan Gedung                          |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Cot Preh               | 1,894        | Peremajaan rumah                         | 4   | Unit   | 30.000                     | 120.000                   |                          | 120.000 |         |         | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Peremajaan rumah                         | 15  | Unit   | 30.000                     | 450.000                   |                          | 150.000 | 150.000 | 150.000 | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Tgk Chick<br>Alue Kala | 15,088       | Peremajaan rumah                         | 12  | Unit   | 30.000                     | 360.000                   |                          | 60.000  | 300.000 |         | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Tgk Di<br>Teuremon     | 1,233        | Peremajaan rumah                         | 6   | Unit   | 30.000                     | 180.000                   |                          | 30.000  | 60.000  | 90.000  | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
| C  |                        |              | Jalan Lingkungan                         |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Cot Preh               | 1,894        | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | 900 | Meter  | 1.000                      | 900.000                   |                          | 300.000 | 300.000 | 300.000 | APBN                | BPPW                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | 300 | Meter  | 1.000                      | 300.000                   |                          | 300.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Tgk Di<br>Teuremon     | 1,233        | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan | 800 | Meter  | 1.000                      | 800.000                   |                          | 300.000 | 500.000 |         | APBN                | BPPW                |
| D  |                        |              | Penyediaan Air Minum                     |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan        | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 100.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir   | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |         | APBN                | BPPW                |
|    | Tgk Di<br>Teuremon     | 1,233        | Pembangunan rumah<br>pompa & reservoir   | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         |         | 500.000 | APBN                | BPPW                |
| E  |                        |              | Drainase Lingkungan                      |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Cot Preh               | 1,894        | Peningkatan kualitas<br>drainase         | 100 | Meter  | 700                        | 70.000                    |                          | 700.00  |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Peningkatan kualitas<br>drainase         | 250 | Meter  | 700                        | 175.000                   |                          |         | 175.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Tgk Chick<br>Alue Kala | 15,088       | Peningkatan kualitas<br>drainase         | 150 | Meter  | 700                        | 105.000                   |                          |         |         | 105.000 | APBK                | PUPR                |
| F  |                        |              | Pengolahan Limbah                        |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan        | 3   | Unit   | 50.000                     | 150.000                   | 100.000                  | 50.000  |         |         | APBK                | PUPR                |



| NO | LOKASI                 | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN          | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|------------------------|--------------|--|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|    |                        |              |  |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |                     |
|    | Cot Preh               | 1,894        | IPAL + MCK komunal                           | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          | 500.000 |         |         | APBN                | BPPW                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | IPAL + MCK komunal                           | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |         | APBN                | BPPW                |
|    | Tgk Chick<br>Alue Kala | 15,088       | Bio - Septitanc                              | 1   | Unit   | 30.000                     | 30.000                    |                          |         | 30.000  |         | APBK                | PUPR                |
| G  |                        |              | Pengelolaan Persampahan                      |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan            | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |         |         | APBK                | DLHK                |
|    | Cot Preh               | 1,894        | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)        | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |         |         | APBK                | DLHK                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)        | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |         |         | APBK                | DLHK                |
|    | Tgk Chick<br>Alue Kala | 15,088       | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)        | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |         | APBK                | DLHK                |
|    | Tgk Di<br>Teuremon     | 1,233        | Tempat Penampungan<br>Sementara (TPS)        | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |         | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Becak Motor                                  | 4   | Unit   | 100.000                    | 400.000                   |                          |         | 200.000 | 200.000 | APBG                | DLHK                |
| H  |                        |              | Proteksi Kebakaran                           |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan            | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |         |         | APBK                | DPKK                |
|    | Cot Preh               | 1,894        | Posko Tanggap<br>Bencana                     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |         |         | APBK                | DPKK                |
|    | Pante Jaya             | 4,457        | Posko Tanggap<br>Bencana                     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |         | APBK                | DPKK                |
|    | Tgk Chick<br>Alue Kala | 15,088       | Posko Tanggap<br>Bencana                     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |         | APBK                | DPKK                |
|    | Tgk Di<br>Teuremon     | 1,233        | Posko Tanggap<br>Bencana                     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         |         | 150.000 | APBK                | DPKK                |
| I  |                        |              | Ruang Terbuka Hijau                          |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan dan<br>pengadaan lahan            | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 100.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong<br>Paya        | 22,672       | Penyediaan<br>penerangan jalan<br>umum (PJU) | 40  | Unit   | 30.000                     | 1.200.000                 |                          |         | 600.000 | 600.000 | APBA                | PUPR                |



| NO                    | LOKASI            | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN   | VOL       | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------|-------------------|--------------|---|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|                       |                   |              |   |           |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |                     |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Pembangunan RTP   | 1         | Unit   | 4.000.000                  | 4.000.000                 |                          |         | 2.000.000 | 2.000.000 | APBN-<br>APBK       | PUPR                |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Revitalisasi lapangan<br>voly   | 1         | Unit   | 1.000.000                  | 1.000.000                 |                          |         | 1.000.000 |           | APBN-<br>APBK       | PUPR                |
| J                     |                   |              | Pengendalian dan Pengawasan   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Operasional dan<br>pemeliharaan   | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          |         | 50.000    | 50.000    | APBK                | PUPR                |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Pelatihan kemitraan<br>dan kewirausahaan  | 3         | Unit   | 40.000                     | 120.000                   | 40.000                   | 40.000  | 40.000    |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Bantuan modal usaha   | 3         | Unit   | 100.000                    | 300.000                   |                          | 100.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 | DISPERINDAG         |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Peningkatan kualitas<br>UMK   | 3         | Unit   | 100.000                    | 300.000                   | 100.000                  | 100.000 | 100.000   |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan                     | 3         | Unit   | 50.000                     | 150.000                   | 50.000                   | 50.000  | 50.000    |           | APBK                | DPKK                |
|                       | Gampong Paya      | 22,672       | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana   | 3         | Unit   | 50.000                     | 150.000                   |                          | 50.000  | 50.000    | 50.000    | APBK                | DPKK                |
|                       |                   |              |   | SUB TOTAL |        |                            | 15.520.000                |                          |         |           |           |                     |                     |
| III GAMPONG KEUNEUKAI |                   |              |   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
| A                     |                   |              | Tahap Persiapan dan Perencanaan   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|                       | Gampong Keuneukai | 34,823       | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh  | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                | PUPR                |
|                       | Gampong Keuneukai | 34,823       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan prilaku   | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                | DLHK                |
|                       | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyusunan Doku-<br>men Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Paya-<br>Keuneukai | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   | 100.000                  |         |           |           | APBK                | BAPPEDA             |



| NO | LOKASI            | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN      | VOL   | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------|--|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|    |                   |              |  |       |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |                     |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyusunan Dokumen RTP Gampong Keuneukai | 1     | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          | 100.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
| B  |                   |              | Bangunan Gedung                          |       |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Bantuan stimulan bahan bangunan          | 1     | Unit   | 15.000                     | 15.000                    |                          | 15.000  |         |         | APBA                | PUPR                |
|    | Kulam             | 2,52         | Bantuan stimulan bahan bangunan          | 5     | Unit   | 15.000                     | 75.000                    |                          | 75.000  |         |         | APBA                | PUPR                |
|    | Lhok              | 16,002       | Peremajaan RTLH                          | 6     | Unit   | 30.000                     | 180.000                   |                          |         | 180.000 |         | APBN-APBK           | BPPPS-PUPR          |
|    | Pasi              | 10,809       | Peremajaan RTLH                          | 19    | Unit   | 30.000                     | 570.000                   |                          | 60.000  | 120.000 | 390.000 | APBN-APBK           | BPPPS-PUPR          |
| C  |                   |              | Jalan Lingkungan                         |       |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan    | 600   | Meter  | 1.000                      | 600.000                   |                          | 600.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Kulam             | 2,52         | Peningkatan kualitas jalan lingkungan    | 1.200 | Meter  | 1.000                      | 1.200.000                 |                          | 600.000 | 600.000 |         | APBA                | PUPR                |
| D  |                   |              | Penyediaan Air Minum                     |       |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyediaan dan pengadaan lahan           | 4     | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |         | APBN                | BPPW                |
|    | Kulam             | 2,52         | Hydran umum                              | 1     | Unit   | 50.000                     | 50.000                    |                          |         | 50.000  |         | APBK                | PUPR                |
|    | Lhok              | 16,002       | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          | 500.000 |         |         | APBN                | BPPW                |
|    | Pasi              | 10,809       | Pembangunan rumah pompa & reservoir      | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |         | APBN                | BPPW                |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyediaan mobil tank                    | 1     | Unit   | 600.000                    | 600.000                   |                          |         |         | 600.000 |                     |                     |
| E  |                   |              | Drainase Lingkungan                      |       |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Peningkatan kualitas drainase            | 150   | Meter  | 700                        | 105.000                   |                          | 105.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Kulam             | 2,52         | Peningkatan kualitas drainase            | 100   | Meter  | 700                        | 70.000                    |                          | 70.000  |         |         | APBK                | PUPR                |



| NO | LOKASI            | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN    | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------|--|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|    |                   |              |  |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |                     |
|    | Lhok              | 16,002       | Peningkatan kualitas drainase          | 900 | Meter  | 700                        | 630.000                   |                          |         | 400.000   | 230.000   | APBK                | PUPR                |
| F  |                   |              | Pengelolaan Persampahan                |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Keuncukai | 34,823       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                | DLHK                |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DLHK                |
|    | Kulam             | 2,52         | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DLHK                |
|    | Lhok              | 16,002       | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         |           | 150.000   | APBK                | DLHK                |
|    | Pasi              | 10,809       | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         |           | 150.000   | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Becak Motor                            | 4   | Unit   | 100.000                    | 400.000                   |                          |         | 200.000   | 200.000   | APBG                | DLHK                |
| G  |                   |              | Proteksi Kebakaran                     |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                | DPKK                |
|    | Blang Mukim       | 5,492        | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DPKK                |
|    | Kulam             | 2,52         | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DPKK                |
|    | Lhok              | 16,002       | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         |           | 150.000   | APBK                | DPKK                |
|    | Pasi              | 10,809       | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         |           | 150.000   | APBK                | DPKK                |
| H  |                   |              | Ruang Terbuka Hijau                    |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyediaan penerangan jalan umum (PJU) | 50  | Unit   | 30.000                     | 1.500.000                 |                          | 500.000 | 500.000   | 500.000   | APBA                | PUPR                |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 100.000 |           |           | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Keuneukai | 34,823       | Pembangunan RTP                        | 2   | Unit   | 1.500.000                  | 3.000.000                 |                          |         | 2.000.000 | 1.500.000 | APBN-CSR            | BPPW-PUPR           |



| NO | LOKASI               | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN                                       | VOL       | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|----------------------|--------------|---|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|    |                      |              |   |           |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |                     |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Revitalisasi dermaga  | 1         | Unit   | 5.000.000                  | 5.000.000                 |                          |         | 2.500.000 | 2.500.000 | APBA-CSR            | PUPR                |
| I  |                      |              | Pengendalian dan Pengawasan   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Operasional dan<br>pemeliharaan   | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          |         | 100.000   |           | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Pelatihan kemitraan<br>dan kewirausahaan                                  | 3         | Unit   | 40.000                     | 120.000                   |                          | 40.000  | 40.000    | 40.000    | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Bantuan modal usaha   | 3         | Unit   | 100.000                    | 300.000                   |                          | 100.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Peningkatan kualitas<br>UMK   | 3         | Unit   | 100.000                    | 300.000                   | 100.000                  | 100.000 | 100.000   |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan         | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000    |           | APBK                | DPKK                |
|    | Gampong<br>Keuneukai | 34,823       | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana                                       | 4         | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                | DPKK                |
|    |                      |              |   | SUB TOTAL |        |                            | 18.875.000                |                          |         |           |           |                     |                     |
| IV | GAMPONG JABOI        |              |   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
| A  |                      |              | Tahap Persiapan dan Perencanaan   |           |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh  | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan prilaku                                 | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000    | 20.000    | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Jaboi | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          | 100.000 |           |           | APBK                | BAPPEDA             |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Penyusunan<br>Dokumen RTP<br>Gampong Jaboi                                | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          | 100.000 |           |           | APBK                | PUPR                |



| NO | LOKASI        | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUKHAN<br>/ JENIS KEGIATAN  | VOL   | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|    |               |              |                                       |       |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |                     |
| B  |               |              | Bangunan Gedung                       |       |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Peremajaan RTLH                       | 9     | Unit   | 30.000                     | 270.000                   |                          | 180.000 | 90.000    |           | APBN-<br>APBA       | BPPPS-<br>PERKIM    |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Peremajaan RTLH                       | 8     | Unit   | 30.000                     | 240.000                   |                          | 240.000 |           |           | APBN-<br>APBA       | BPPPS-<br>PERKIM    |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Peremajaan RTLH                       | 11    | Unit   | 30.000                     | 330.000                   |                          |         | 150.000   | 180.000   | APBN-<br>APBA       | BPPPS-<br>PERKIM    |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Peremajaan RTLH                       | 12    | Unit   | 30.000                     | 360.000                   |                          |         | 120.000   | 240.000   | APBN-<br>APBA       | BPPPS-<br>PERKIM    |
| C  |               |              | Jalan Lingkungan                      |       |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 1.300 | Meter  | 1.000                      | 1.300.000                 |                          |         | 1.300.000 |           | APBN                | BPPW                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 300   | Meter  | 1.000                      | 300.000                   |                          | 300.000 |           |           | APBK                | PUPR                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Peningkatan kualitas jalan lingkungan | 2.650 | Meter  | 1.000                      | 2.650.000                 |                          |         | 1.650.000 | 1.000.000 | APBN                | BPPW                |
| D  |               |              | Penyediaan Air Minum                  |       |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan        | 4     | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Pembangunan rumah pompa & reservoir   | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000   |           | ABPN                | BPPW                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Hyndran umum                          | 1     | Unit   | 50.000                     | 50.000                    |                          |         | 50.000    |           | APBK                | PUPR                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Pembangunan rumah pompa & reservoir   | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         |           | 500.000   | APBN                | BPPW                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Pembangunan rumah pompa & reservoir   | 1     | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         |           | 500.000   | APBN                | BPPW                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan mobil tank                 | 2     | Unit   | 600.000                    | 1.200.000                 |                          | 600.000 | 600.000   |           | APBK                | PUPR                |
| E  |               |              | Drainase Lingkungan                   |       |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan        | 4     | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000   |           | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Pembangunan drainase baru             | 850   | Meter  | 1.000                      | 850.000                   |                          | 850.000 |           |           | APBA                | PUPR                |



| NO | LOKASI        | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN      | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------------|--------------|--|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|    |               |              |  |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |                     |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Pembangunan drainase baru                | 405 | Meter  | 1.000                      | 405.000                   |                          | 405.000 |         |         | APBA                | PUPR                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Pembangunan drainase baru                | 490 | Meter  | 1.000                      | 490.000                   |                          |         | 490.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Pembangunan drainase baru                | 100 | Meter  | 1.000                      | 100.000                   |                          |         | 100.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | 350 | Meter  | 700                        | 245.000                   |                          |         | 245.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | 100 | Meter  | 700                        | 70.000                    | 70.000                   |         |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | 345 | Meter  | 700                        | 241.500                   |                          | 241.000 |         |         | APBK                | PUPR                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Peningkatan kualitas drainase lingkungan | 250 | Meter  | 700                        | 175.000                   |                          |         | 175.000 |         | APBK                | PUPR                |
| F  |               |              | Pengolahan Limbah                        |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan           | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Bio - Septitanc                          | 1   | Unit   | 30.000                     | 30.000                    |                          |         | 30.000  |         | APBK                | PUPR                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Bio - Septitanc                          | 1   | Unit   | 30.000                     | 30.000                    |                          |         | 30.000  |         | APBK                | PUPR                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | IPAL + MCK komunal                       | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         |         | 500.000 | APBN                | BPPW                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | IPAL + MCK komunal                       | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         |         | 500.000 | APBN                | BPPW                |
| G  |               |              | Pengelolaan Persampahan                  |     |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan           | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |         | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)       | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          | 200.000 |         |         | APBK                | DLHK                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Tempat Penampungan Sementara (TPS)       | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          | 200.000 |         |         | APBK                | DLHK                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)       | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          |         | 200.000 |         | APBK                | DLHK                |



| NO | LOKASI        | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KECUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN    | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |           |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------------|--------------|--|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|    |               |              |  |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024      | 2025      |                     |                     |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)     | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          |         | 200.000   |           | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Becak Motor                            | 4   | Unit   | 100.000                    | 400.000                   |                          | 200.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 | DLHK                |
| H  |               |              | Proteksi Kebakaran                     |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | 4   | Unit   | 50.000                     | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |           |           | APBK                | DPKK                |
|    | Gampong Baro  | 5,583        | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |           |           | APBK                | DPKK                |
|    | Lamkuta       | 3,89         | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          | 150.000 |           |           | APBK                | DPKK                |
|    | Meunasah Tuha | 9,322        | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DPKK                |
|    | Tgk Di Jaboi  | 5,133        | Posko Tanggap Bencana                  | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000   |           | APBK                | DPKK                |
| I  |               |              | Ruang Terbuka Hijau                    |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan penerangan jalan umum (PJU) | 50  | Unit   | 30.000                     | 1.500.000                 |                          | 500.000 | 500.000   | 500.000   | APBA-APBK           | PUPR                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Penyediaan dan pengadaan lahan         | 2   | Unit   | 100.000                    | 200.000                   | 100.000                  | 100.000 |           |           | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Pembangunan RTP                        | 2   | Unit   | 1.000.000                  | 2.000.000                 |                          |         | 1.000.000 | 1.000.000 | APBA-APBK           | PUPR                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Revitalisasi lapangan voly             | 1   | Unit   | 1.000.000                  | 1.000.000                 |                          |         | 500.000   | 500.000   | CSR                 | PUPR                |
| J  |               |              | Pengendalian dan Pengawasan            |     |        |                            |                           |                          |         |           |           |                     |                     |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Operasional dan pemeliharaan           | 1   | Unit   | 50.000                     | 50.000                    |                          |         |           | 50.000    | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan  | 3   | Unit   | 40.000                     | 120.000                   | 40.000                   | 40.000  | 40.000    |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Bantuan modal usaha                    | 3   | Unit   | 100.000                    | 300.000                   | 100.000                  | 100.000 | 100.000   |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong Jaboi | 23,928       | Peningkatan kualitas UMK               | 3   | Unit   | 100.000                    | 300.000                   |                          | 100.000 | 100.000   | 100.000   | CSR                 | DISPERINDAG         |



| NO | LOKASI               | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN   | VOL       | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |         | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|----------------------|--------------|---|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|    |                      |              |   |           |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025    |                     |                     |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan             | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |         | APBK                | DPKK                |
|    | Gampong<br>Jaboi     | 23,928       | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana   | 4         | Unit   | 50.000                     | 200.000                   | 50.000                   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | APBK                | DPKK                |
|    |                      |              |   | SUB TOTAL |        |                            | 20.766.500                |                          |         |         |         |                     |                     |
| V  | GAMPONG BEURAWANG    |              |   |           |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
| A  |                      |              | Tahap Persiapan dan Perencanaan   |           |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Sosialisasi 7 indikator<br>kumuh  | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Sosialisai perubahan<br>sikap dan prilaku                                     | 4         | Unit   | 20.000                     | 80.000                    | 20.000                   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Penanganan Kumuh<br>Kawasan Beurawang | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |         | 100.000 |         | APBK                | BAPPEDA             |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Penyusunan<br>Dokumen RTP<br>Gampong Beurawang                                | 1         | Unit   | 100.000                    | 100.000                   |                          |         | 100.000 |         | APBK                | PUPR                |
| B  |                      |              | Bangunan Gedung   |           |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Meurelo              | 6,931        | Peremajaan RTLH   | 12        | Unit   | 30.000                     | 360.000                   |                          | 60.000  | 120.000 | 180.000 | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Teupin<br>Bada       | 8,348        | Peremajaan RTLH   | 12        | Unit   | 30.000                     | 360.000                   |                          | 60.000  | 120.000 | 180.000 | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Meurelo              | 6,931        | Stimulan bahan<br>bangunan  | 14        | Unit   | 15.000                     | 210.000                   |                          | 70.000  | 70.000  | 70.000  | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
|    | Teupin<br>Bada       | 8,348        | Stimulan bahan<br>bangunan  | 9         | Unit   | 15.000                     | 135.000                   |                          | 60.000  | 75.000  |         | APBN-<br>APBK       | BPPPS-PUPR          |
| C  |                      |              | Jalan Lingkungan  |           |        |                            |                           |                          |         |         |         |                     |                     |
|    | Meurelo              | 6,931        | Peningkatan kualitas<br>jalan lingkungan                                      | 550       | Meter  | 1.000                      | 550.000                   |                          | 550.000 |         |         | APBA                | PUPR                |



| NO | LOKASI            | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN | VOL | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |      | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|------|---------------------|---------------------|
|    |                   |              |                                     |     |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025 |                     |                     |
| D  |                   |              | Penyediaan Air Minum                |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|    | Meurelo           | 6,931        | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 1   | Unit   | 50.000                     | 50.000                    |                          | 50.000  |         |      | APBK                | PUPR                |
|    | Meurelo           | 6,931        | Pembangunan rumah pompa & reservoir | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |      | APBN                | BPPW                |
| E  |                   |              | Drainase Lingkungan                 |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|    | Meurelo           | 6,931        | Peningkatan kualitas drainase       | 110 | Meter  | 700                        | 77.000                    |                          | 77.000  |         |      | APBK                | PUPR                |
|    | Teupin Bada       | 8,348        | Peningkatan kualitas drainase       | 240 | Meter  | 700                        | 168.000                   |                          | 168.000 |         |      | APBK                | PUPR                |
| F  |                   |              | Pengolahan Limbah                   |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|    | Gampong Beurawang | 15,279       | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 100.000 |         |      | APBK                | PUPR                |
|    | Meurelo           | 6,931        | IPAL + MCK komunal                  | 1   | Unit   | 500.000                    | 500.000                   |                          |         | 500.000 |      | APBN                | BPPW                |
|    | Teupin Bada       | 8,348        | Bio - Septitanc                     | 1   | Unit   | 30.000                     | 30.000                    |                          |         | 30.000  |      | APBK                | PUPR                |
| G  |                   |              | Pengelolaan Persampahan             |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|    | Gampong Beurawang | 15,279       | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   | 50.000                   | 50.000  |         |      | APBK                | DLHK                |
|    | Meurelo           | 6,931        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          | 200.000 |         |      | APBK                | DLHK                |
|    | Teupin Bada       | 8,348        | Tempat Penampungan Sementara (TPS)  | 1   | Unit   | 200.000                    | 200.000                   |                          |         | 200.000 |      | APBK                | DLHK                |
|    | Gampong Beurawang | 15,279       | Becak Motor                         | 2   | Unit   | 100.000                    | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |      | APBG                | DLHK                |
|    |                   |              |                                     |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
| H  |                   |              | Proteksi Kebakaran                  |     |        |                            |                           |                          |         |         |      |                     |                     |
|    | Gampong Beurawang | 15,279       | Penyediaan dan pengadaan lahan      | 2   | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |      | APBK                | DPKK                |
|    | Meurelo           | 6,931        | Posko Tanggap Bencana               | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |      | APBK                | DPKK                |
|    | Teupin Bada       | 8,348        | Posko Tanggap Bencana               | 1   | Unit   | 150.000                    | 150.000                   |                          |         | 150.000 |      | APBK                | DPKK                |



| NO | LOKASI               | LUAS<br>(Ha) | ASPEK KEKUMUHAN<br>/ JENIS KEGIATAN                               | VOL       | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(x1000) | TOTAL<br>BIAYA<br>(x1000) | TAHUN PENANGANAN (x1000) |         |         |           | SUMBER<br>PENDANAAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|----------------------|--------------|---|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------------------|---------------------|
|    |                      |              |   |           |        |                            |                           | 2022                     | 2023    | 2024    | 2025      |                     |                     |
| I  |                      |              | Ruang Terbuka Hijau   |           |        |                            |                           |                          |         |         |           |                     |                     |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Penyediaan<br>pencerangan jalan<br>umum (PJU)                     | 30        | Unit   | 30.000                     | 900.000                   |                          | 30.000  | 30.000  | 30.000    | APBN-<br>APBA       | PUPR                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Pembangunan RTP   | 1         | Unit   | 1.000.000                  | 1.000.000                 |                          |         |         | 1.000.000 | APBN-<br>APBA       | PUPR                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Revitalisasi lapangan<br>voly                                     | 1         | Unit   | 1.000.000                  | 1.000.000                 |                          |         |         | 1.000.000 | APBK-CSR            | PUPR                |
| J  |                      |              | Pengendalian dan Pengawasan                                       |           |        |                            |                           |                          |         |         |           |                     |                     |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Operasional dan<br>pemeliharaan                                   | 1         | Unit   | 50.000                     | 50.000                    |                          |         |         | 50.000    | APBK                | PUPR                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Pelatihan kemitraan<br>dan kewirausahaan                          | 4         | Unit   | 40.000                     | 160.000                   | 40.000                   | 40.000  | 40.000  | 40.000    | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Bantuan modal usaha   | 2         | Unit   | 100.000                    | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Peningkatan kualitas<br>UMK                                       | 2         | Unit   | 100.000                    | 200.000                   |                          | 100.000 | 100.000 |           | CSR                 | DISPERINDAG         |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Sosialisasi<br>penanggulangan dan<br>evakuasi dini<br>kebencanaan | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |           | APBK                | DPKK                |
|    | Gampong<br>Beurawang | 15,279       | Pelatihan pemuda<br>tanggap bencana                               | 2         | Unit   | 50.000                     | 100.000                   |                          | 50.000  | 50.000  |           | APBK                | DPKK                |
|    |                      |              |   | SUB TOTAL |        |                            | 8.210.000                 |                          |         |         |           |                     |                     |





hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang-undangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi, dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik mejabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan setiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia., dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 10.1 Peran Para Pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

| PELAKU KEPENTINGAN |                  | PERAN   |
|--------------------|------------------|---|
| Pemerintah         | Pemerintah Pusat | ✓ Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDG's. |

| PELAKU KEPENTINGAN |                           | PERAN   |
|--------------------|---------------------------|---|
|                    |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengkoordinasikan pemerintah daerah</li> <li>✓ Untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah.</li> <li>✓ Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.</li> </ul>                                  |
|                    | Pemerintah Provinsi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota.</li> <li>✓ Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.</li> </ul>   |
|                    | Pemerintah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>✓ Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD.</li> <li>✓ Mendorong kerja sama dengan badan usaha.</li> </ul> |

| PELAKU KEPENTINGAN |                                 | PERAN   |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Non Pemerintah     | Swasta                          | ✓ Menggiatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Corporate Shared Value</i> (CSV).                                   |
|                    |                                 | ✓ Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.  |
|                    | Akademisi                       | ✓ Menyediakan <i>evidence-based research</i> sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.                         |
|                    | Komunitas/Organisasi Masyarakat | ✓ Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota.<br>✓ Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.             |
|                    | Media                           | ✓ Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat. |

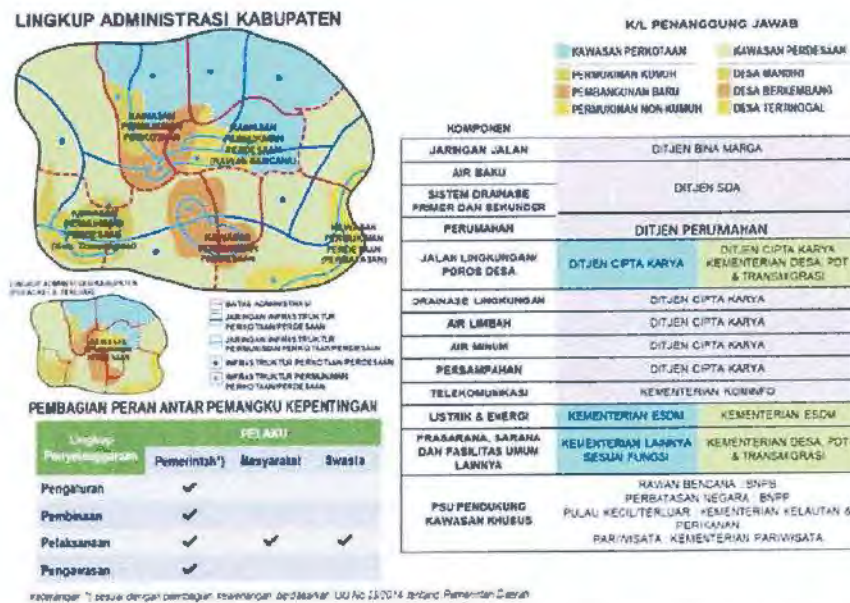
Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan kolaborasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan dalam

mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraanya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah Pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.



Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut.



Gambar 10. 2 Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Secara rinci pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sub kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

| NO | SUB URUSAN                             | PEMERINTAH PUSAT   | PEMERINTAH PROVINSI  | PEMERINTAH KAB/KOTA   |
|----|--|--|--|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan sistem kawasan permukiman.</li> <li>✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai dengan dibawah 15 hektar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</li> <li>✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar</li> </ul> |
|    | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |  |  | Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.  |
|    | Permukiman                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan sistem</li> </ul>   | Penyelenggaraan  | Penyelenggaraan   |

| NO | SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT   | PEMERINTAH PROVINSI   | PEMERINTAH KAB/KOTA                              |
|----|------------|--|---|--|
|    |            | pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.<br>✓ Penyelenggaraan infrastruktur pada permukaan dikawasan | infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi. | infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota. |

## 10.2 PERAN DAN BENTUK KETERLIBATAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKPK

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran dan bentuk keterlibatan pemerintah Kota Sabang dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 10.3 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Sabang dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

| PEMANGKU KEPENTINGAN                        | PERAN                                 | BENTUK KETERLIBATAN   | TUGAS DAN WEWENANG  |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Tim Teknis Penyusun RP2KPKPK yang merupakan | Kabupaten/ Kota<br>Perumusan RP2KPKPK | ✓ Merumuskan RP2KPKPK<br>✓ Mengambil keputusan dalam proses | TUGAS<br>✓ Menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; |

| PEMANGKU KEPENTINGAN  | PERAN | BENTUK KETERLIBATAN  | TUGAS DAN WEWENANG   |
|---|-------|--|--|
| Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota |       | penyusunan dokumen RP2KPKPK<br>✓ Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan;</li> <li>✓ Menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan;</li> <li>✓ Publikasi dokumen RP2KPKPK kepada masyarakat;</li> <li>✓ Menindaklanjuti output RP2KPKPK; dan</li> <li>✓ Menyusun dan legalisasi peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal)</li> </ul> <p>WEWENANG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum;</li> <li>✓ Melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK</li> </ul> |



| PEMANGKU KEPENTINGAN  | PERAN   | BENTUK KETERLIBATAN                                | TUGAS DAN WEWENANG  |
|---|---|--|---|
| Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Pokja PKP, Perbankan, Perguruan Tinggi/Akademisi, BUMN/BUMD, Asosiasi Pengembang Perumahan, Asosiasi Profesi, Forum Masyarakat dan Pelaku Program Air Minum dan Kumuh. | Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK | Berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi     | Memberikan masukan teknis terkait dengan dokumen RP2KPKPK   |
| Kelembagaan masyarakat  | Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK | Berpartisipasi dalam kegiatan survey dan wawancara | <p>TUGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh;</li> <li>✓ Memberikan input dalam pola penanganan permukiman kumuh;</li> <li>✓ Melakukan perencanaan partisipatif.</li> </ul> |

| PEMANGKU KEPENTINGAN | PERAN | BENTUK KETERLIBATAN | TUGAS DAN WEWENANG  |
|----------------------|-------|---------------------|---|
|                      |       |                     | <p>WEWENANG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan</li> </ul> |

(Pj. WALI KOTA SABANG,



REZA FAHLEVI

f f





# BAPPEDA KOTA SABANG

